



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Optimisme Wujudkan New DJPb in Town yang **HANDAL**

*Optimism Creates a Reliable
New DJPb in Town*



Laporan Tahunan
Annual Report
2021

Cover Story

SAKTI merupakan sistem informasi yang memodernisasi pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara yang mengintegrasikan berbagai sistem aplikasi pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya SAKTI, sistem pengelolaan transaksi akuntansi dan pelaporan dapat dikerjakan secara lebih transparan dan profesional karena dilakukan secara elektronik serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja.

SAKTI is an information system that modernizes the implementation of the state financial management function that integrates various state financial management application systems. With SAKTI, the accounting and reporting transaction management system can be carried out more transparently and professionally because it is done electronically and can be accessed from anywhere and anytime.

Fotografer: Muhammad Fachri Indrawan

Lokasi: Kampung Tradisional Todo, NTT

Laporan Tahunan
Annual Report
2021

Optimisme Wujudkan New DJPb in Town yang HAnDAL

Optimism Creates a Reliable New DJPb in Town

DJPb telah *on the track* bertransformasi menjadi *modern treasurer* yang memiliki peran lebih strategis. Dinamika dan tantangan yang dihadapi DJPb akan semakin *challenging* dan *demanding*. Pandangan bahwa DJPb sekedar mencatat, membayar, dan melaporkan keuangan negara telah perlahan berhasil berubah. Kini statement strategis DJPb di bidang pengelolaan likuiditas, kas negara, analisis laporan keuangan, dan strategi belanja mampu menjadi rujukan dalam berbagai kebijakan melalui peran *Regional Chief Economist* (RCE). Dengan mengusung nilai DJPb HAnDAL (**H**armonis, **A**kuntabel, **D**igital, **A**manah, **L**oyal), jajaran Insan Perbendaharaan optimis wujudkan New DJPb in Town.

DJPb has on the track transformed into a modern treasurer with a more strategic role. The dynamics and challenges faced by DJPb will be increasingly challenging and demanding. The view that DJPb only records, pays, and reports state finances has slowly changed. Now DJPb's strategic statements in the areas of liquidity management, state treasury, financial statement analysis, and spending strategies can become a reference in various policies through the role of the Regional Chief Economist (RCE). By carrying out the value of DJPb HAnDAL (Harmonious, Accountable, Digital, Trustworthy, Loyal), the Treasurer is optimistic about realizing New DJPb in Town.

HAnDAL
Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal

*New DJPb
in Town*



Direktur Jenderal Perbendaharaan
Director General of Treasury

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Para pemangku kepentingan yang kami hormati, kiranya kita perlu memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sepanjang tahun 2021, atas rahmat dan karunia-Nya, DJPb mampu menjalankan tugas dan fungsi dalam mengawal pelaksanaan APBN. Oleh karenanya, Laporan Tahunan DJPb Tahun 2021 ini kami sajikan dengan maksud sebagai catatan sekaligus dokumentasi atas segala capaian, prestasi, maupun inovasi DJPb pada tahun 2021, juga merupakan bentuk akuntabilitas atas peran DJPb dalam mengemban amanah kepada para pemangku kepentingan.

Tahun 2021 adalah sebuah tahun luar biasa penuh tantangan. Kita mengawali tahun tersebut dengan sebuah optimisme bahwa bangsa akan pulih dari pandemi, tetapi justru kemudian kita diuji dengan munculnya berbagai varian Covid-19. Namun dengan penuh fokus dan kesungguhan, jajaran DJPb berhasil melewati periode tersebut untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada para pemangku kepentingan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2021 DJPb mengimplementasikan fungsi sebagai *Regional Chief Economist (RCE)*. Fungsi baru ini semakin memperluas peran DJPb untuk mampu menjelaskan kebijakan fiskal terhadap perekonomian dan melihat dampak APBN terhadap pembangunan daerah dengan terus menjalin sinergi yang baik bersama para pemangku kepentingan di daerah dalam semangat "New DJPb in Town".

DJPb terus bertransformasi menjadi modern treasurer yang memiliki peran lebih berpengaruh dengan mengubah *clerical works* menjadi *analytical works*. Statement strategis DJPb di bidang pengelolaan likuiditas, kas negara, analisis laporan keuangan, dan strategi belanja mampu menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan keuangan baik di pusat maupun daerah.

Semangat New DJPb in Town terus bergema dalam kinerja sehari-hari di setiap unit kerja DJPb. Kerja keras tersebut membuahkan berbagai capaian yang tentunya membuat jajaran DJPb semakin optimis dalam melaksanakan perannya sebagai pengelola perbendaharaan, salah satunya dengan kembali diperolehnya opini WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021 sebagai muara dari pertanggungjawaban pengelolaan APBN.

Capaian ini tentunya merupakan hasil kerja keras bersama, bukan hanya DJPb tetapi juga seluruh stakeholders serta mitra kerja terkait. Apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan atas segenap daya upaya dan dukungan untuk bersama-sama mewujudkan fungsi APBN dalam membangun negeri. Kami harapkan sinergi yang telah terjalin ini dapat terus berjalan dan semakin erat dalam menciptakan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu mengaruniakan berkat dan rahmat serta lindungan-Nya untuk kinerja DJPb ke depannya yang semakin baik lagi.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hadiyanto

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

We respect stakeholders, we need to express our gratitude to the presence of Allah SWT, God Almighty. Throughout 2021, by His grace and grace, DJPb is able to carry out its duties and functions in overseeing the implementation of the State Budget. Therefore, we present this 2021 DGT Annual Report with the intention of being a record as well as documentation of all DGT's achievements, achievements, and innovations in 2021, as well as a form of accountability for DGT's role in carrying out the mandate to stakeholders.

2021 is an extraordinary year full of challenges. We started the year with an optimism that the nation would recover from the pandemic, but then we were tested with the emergence of various variants of Covid-19. However, with full focus and sincerity, the DGT staff managed to get through this period to continue to provide the best service to stakeholders.

As an effort to achieve this, in 2021 DGT will implement the function as Regional Chief Economist (RCE). This new function further expands the role of DJPb to be able to explain fiscal policy to the economy and see the impact of the APBN on regional development by continuing to establish good synergies with local stakeholders in the spirit of "New DJPb in Town".

DJPb continues to transform into a modern treasurer who has a more influential role by turning clerical works into analytical works. DGT's strategic statements in the areas of liquidity management, state treasury, financial statement analysis, and spending strategies can be used as a reference in making financial policies both at the central and regional levels.

The spirit of New DJPb in Town continues to resonate in the daily performance of every DJPb work unit. This hard work has resulted in various achievements which of course have made the ranks of DJPb more optimistic in carrying out their role as treasury managers, one of which is the return of the WTP opinion in the 2021 Central Government Financial Report (LKPP) as the estuary of accountability for the management of the State Budget.

This achievement is certainly the result of joint hard work, not only DGT but also all relevant stakeholders and partners. We express our appreciation and gratitude for all the efforts and support to jointly realize the function of the State Budget in developing the country. We hope that the synergies that have been established can continue and become closer in creating prosperity for all levels of society.

May Allah SWT, God Almighty always bestow His blessings and mercy and protection for the better performance of DJPb in the future.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Menteri Keuangan
Minister of Finance
Sri Mulyani Indrawati

“

DJPb adalah fungsi Kementerian Keuangan yang hadir di seluruh pelosok tanah air. Peranan Kantor Wilayah menjadi sangat penting sebagai wajah dari Kementerian Keuangan di daerah. Selain melaksanakan tugas dan fungsi sesuai unit, DJPb juga berperan strategis sebagai *Regional Chief Economist* (RCE) yang diharapkan mampu menganalisis dan mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah bertugas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan
30/04/2021

DG Treasury is a function of the Ministry of Finance that is present in all corners of the country. Treasury regional offices have a very important role as the face of the Ministry of Finance in the regions. Besides carrying out its duties and functions, DG Treasury also plays a strategic role as *Regional Chief Economist* (RCE), and is expected to be able to analyze and identify various economic activities of the community in the assigned areas.

Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati during the Inauguration of Pratama level Senior Leaders within the Ministry of Finance
04/30/2021

“

DJPb memegang “pena terakhir” untuk mengeluarkan anggaran. Dengan kondisi seperti ini, kita harus menaruh perspektif baru mengenai bagaimana meningkatkan kapasitas, bagaimana supaya kita lebih bermanfaat, dan lebih *connect* pada situasi. Kita harus mengetahui dan memahami perekonomian Indonesia agar apa yang ada dalam APBN itu benar-benar merespons perekonomian Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam Kunjungan Kerja Kanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta

08/10/2021

DG Treasury holds the “final pen” in terms of budget expenditures. In such a condition, we need to have a new perspective on how to increase capacity, how to be more useful, and more connected to the situation. We must know and understand the Indonesian economy so that what is contained in the State Budget is really responsive to the Indonesian economy.

Vice Minister of Finance Suhasil Nazara during a Working Visit to the DG Treasury Regional Office of Yogyakarta Special Province

10/08/2021



Wakil Menteri Keuangan
Vice Minister of Finance
Suhasil Nazara



Daftar Isi Contents

5	Optimisme Wujudkan New DJPb in Town yang Andal <i>Optimism Creates a Reliable New DJPb in Town</i>
6	Sambutan Direktur Jenderal Perbendaharaan <i>Remark of The Director General of Treasury</i>
8	Kutipan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan <i>Quotes of Minister and Deputy Minister of Finance</i>
12	Ringkasan Eksekutif <i>Executive Summary</i>
14	Penghargaan dan Pencapaian <i>Awards and Achievements</i>
18	Catatan Penting DJPb 2021 <i>Highlighted Events of DG Treasury 2021</i>
20	Kesinambungan Tema Antartahun <i>Continuity of the Interyear Theme</i>
22	Overview APBN

01

Kilas Balik Kinerja

Performance Overview

48	Peristiwa Penting <i>Key Events</i>
59	Peta Strategis, Capaian IKU, Inisiatif Strategis, dan NKO <i>Strategic Map, KPI Achievements, Strategic Initiatives and NKO</i>
62	Highlight Laporan Keuangan <i>Financial Report Highlights</i>

04

Pencapaian Kinerja

Performance Achievement

154	Fungsi Pelaksanaan Anggaran <i>The Budget Execution Function</i>	228	Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan <i>The Accounting and Financial Reporting Function</i>
178	Fungsi Pengelolaan Kas Negara <i>The State Treasury Management Function</i>	246	Fungsi Sistem Perbendaharaan <i>The Treasury System Function</i>
200	Fungsi Sistem Manajemen Investasi <i>The Investment Management System Function</i>	262	Fungsi Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan <i>The Treasury Information Systems and Technology Function</i>
214	Fungsi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU <i>The Financial Management of Public Service Agencies Function</i>	272	Fungsi Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan <i>The Senior Treasury Analyst Function</i>

02

Profil Organisasi

Organizational Profile

72	Sejarah Organisasi <i>History of the Treasury</i>
76	Visi, Misi, dan Tata Nilai <i>Vision, Mission and Values</i>
82	Profil Kantor Pusat <i>Profile of Head Office</i>
98	Profil Kantor Wilayah <i>Profile of State Treasury Regional Office</i>
118	Profil Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara <i>Profile of State Treasury Office</i>

03

Sumber Daya Manusia

Human Resources Management

126	Profil Sumber Daya Manusia <i>Human Resources Profile</i>
129	Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training</i>
139	Program Strategis Pengelolaan SDM <i>Strategic Programs on HR Management</i>

05

Tata Kelola Organisasi

Organizational Governance

282	Strategi Treasury Sebagai Regional Chief Economist <i>The Treasury Strategy on the Regional Chief Economist</i>
288	Layanan KPPN Filial dan KPPN Mobile <i>KPPN Filial Service and KPPN Mobile</i>
291	Sistem Pengendalian Internal <i>Internal Control System</i>
299	Keterbukaan Informasi Publik/ Kehumasan <i>Public Information Openness/ Public Relations</i>
307	Optimalisasi Barang Milik Negara <i>Optimization Of State-Owned Assets</i>

Lampiran

Appendix

312	Daftar Alamat Unit Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan <i>List of Work Unit Addresses of the DG of Treasury</i>
319	Daftar Singkatan <i>List of Abbreviations</i>
322	Daftar Pagu dan Realisasi DIPA Tahun 2021 <i>Budget and Realization DIPA Year 2021</i>
328	Tim Penyusun <i>Editorial Team</i>



Ringkasan Eksekutif Executive Summary

Sebagai salah satu unit eselon I Kemenkeu yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, DJPb berkomitmen untuk terus melakukan inovasi guna mencapai visi menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia. Melalui sejumlah kantor vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, DJPb mampu memastikan bahwa APBN akan dapat disalurkan hingga seluruh penjuru Indonesia.

Sejumlah inovasi berupa kebijakan maupun digitalisasi pada berbagai bidang perbendaharaan telah digagas sebagai upaya peningkatan peran treasury di tahun 2021, khususnya dalam mendukung program percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Meskipun tertahan oleh penyebaran pandemi Covid-19, kinerja perekonomian global mengalami penguatan di 2021. Dalam kondisi yang penuh tantangan, APBN 2021 mencatatkan raihan gemilang, khususnya dari sisi pelaksanaan belanja APBN sebagaimana tugas dan fungsi DJPb yang tetap bisa dilakukan, bahkan belanja ekstra dengan perluasannya untuk menangani dampak pandemi.

DJPb terus mendorong perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran di Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melalui penerapan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Capaian IKPA pada lima tahun terakhir terus mengalami

peningkatan yang mencerminkan komitmen dan *awareness* K/L untuk terus memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran. Komitmen DJPb di tengah kondisi pandemi tahun 2021 untuk tetap memberi kontribusi terbaik bagi negeri pun membuahkan sejumlah penghargaan yang diraih dari berbagai pihak. Penguatan Kanwil DJPb sebagai *Regional Chief Economist* semakin memperluas peran DJPb untuk mampu menerjemahkan fungsi APBN terhadap pembangunan daerah. DJPb yang diwakili oleh aplikasi HAI-DJPb meraih penghargaan SNI Award kategori perak untuk organisasi kecil jasa. Sejumlah kantor vertikal DJPb yaitu Kanwil DJPb dan KPPN juga memperoleh predikat WBK WBBM oleh KemenpanRB yang menjadikan DJPb memiliki jumlah unit kerja berpredikat WBK WBBM terbanyak di Kemenkeu. Begitu pula raihan lainnya yang menjadikan bukti komitmen bahwa DJPb terus berupaya hadir untuk membangun negeri.

Penyusunan Laporan Tahunan DJPb tahun 2021 ini diharapkan mampu menjadi salah satu media penyampaian informasi sekaligus dokumentasi sebagai perwujudan dari asas transparansi dan keterbukaan bagi pemangku kepentingan DJPb.

As one of the Ministry of Finance's echelon I units that is tasked with formulating and implementing policies on budget execution, cash and investment management, and government accounting and financial reporting, DG Treasury is committed to continuously innovate to achieve the vision of becoming a superior state treasury manager at the world stage. With its network of vertical offices that are spread throughout Indonesia, DG Treasury can ensure that State Budget execution is performed appropriately across the country.

Various innovations have been initiated on treasury issues, for instance the digitalization of business processes and the issuance of new policies, which are geared towards enhancing the treasury role 2021, especially on accelerating the National Economic Recovery program. Despite being restrained by the continuing spread of Covid-19, global economic performance saw a resurgence during the year. Given the challenging conditions, the execution of State Budget 2021 recorded excellent achievements, especially as DG Treasury could oversee expenditures as per its responsibilities, and even conduct extra spending to deal with the effects of the pandemic.

DG Treasury continued to encourage improvements in the quality of budget execution at line ministries/agencies (K/L) through the implementation of Budget Execution Performance Indicators (IKPA). The IKPA achievements have continued to improve over the last five years, which indicates the commitment and awareness of ministries/agencies towards continuous

improvement on budget execution governance. Furthermore, amid pandemic conditions in 2021 DG Treasury's commitment to deliver its best contribution to the country has also resulted in the winning of several awards from various parties. The strengthening of Treasury regional offices as Regional Chief Economist further expands DG Treasury's role in rendering the State Budget function towards regional development. Represented by the HAI-DJPb application, DG Treasury won the SNI Award in the silver category for small service organizations. Moreover, several DG Treasury vertical offices such as Treasury regional offices and KPPN also received the WBK & WBBM predicate from the Ministry for Administrative and Bureaucratic Reforms (KemenPAN RB), making it the organization within the Ministry of Finance with the highest number of work units with WBK & WBBM predicate. Likewise, other achievements are proof of DG Treasury's commitment to be present in building the country.

The DG Treasury Annual Report 2021 is expected to be one of the mediums for presenting information and documentation as an embodiment of the principle of transparency and openness towards all stakeholders.



Penghargaan dan Pencapaian Awards and Achievements



LKPP Tahun 2021 kembali WTP

Laporan Keuangan pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Artinya, pemerintah dapat mempertahankan capaian opini audit terbaik atas laporan keuangan tersebut selama enam tahun berturut-turut.

LKPP 2021 returns to WTP

The Central Government Financial Report (LKPP) for 2021 has again received an Unqualified Opinion (WTP) from the Supreme Audit Agency (BPK). This means that the government can maintain the best audit opinion on the financial statements for six years the BMN Award within the Ministry of Finance.

Juara Umum BMN Award

DJPb menginisiasi berbagai inovasi dan kreatifitas agar pengelolaan BMN dapat lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 456/KM.1/2021 DJPb meraih juara umum BMN Award di lingkungan Kemenkeu.

Grand Champion of BMN Award

DG Treasury initiates various innovations and creativity so that the management of BMN can be more effective and efficient. In accordance with the Decree of the Minister of Finance No. 456/KM.1/2021 DJPb won the overall winner of the BMN Award within the Ministry of Finance.



Top Ranking Performance Awards

DJPb meraih 2 medali emas pada ajang Top Ranking Performance Awards (TRPA) tahun 2021 tingkat Asia Pasifik pada kategori Best Home/Remote Agent Program dan Kategori Best Contact Center Operational Manager

The Best Contact Center Indonesia

DJPb meraih 3 medali platinum, 3 medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu pada ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association. Atas raihan tersebut, HAI-DJPb menjadi 8th Runner Up untuk top 10 organisasi/korporasi yang mengikuti ajang tersebut.

Top Ranking Performance Awards

DG Treasury won 2 gold medals at the Top Ranking Performance Awards (TRPA) 2021 Asia Pacific level in the Best Home/Remote Agent Program category and the Best Contact Center Operational Manager category.

The Best Contact Center Indonesia

DG Treasury won 3 platinum medals, 3 gold medals, 3 silver medals, and 1 bronze medal at The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) in 2021 organized by the Indonesia Contact Center Association. For this achievement, HAI-DJPb became the 8th Runner Up for the top 10 organizations/corporations that participated in the event.



Peringkat Tertinggi Skor MOFIN

Ministry of Finance Organization Fitness Index (MOFIN) DJPb memperoleh skor 93 yang merupakan tertinggi di Kemenkeu. DJPb meraih skor tertinggi MOFIN di lingkungan Kemenkeu selama 5 kali berturut-turut (2014, 2015, 2017, 2019, dan 2021)

Highest Ranking MOFIN Score

Ministry of Finance Organization Fitness Index (MOFIN) DJPb obtained a score of 93 which is the highest in the Ministry of Finance. DG Treasury achieved the highest MOFIN score within the Ministry of Finance for 5 consecutive times (2014, 2015, 2017, 2019, and 2021)



SNI Award/The National Quality Award of Indonesia ke 16

DJPb yang diwakili oleh HAI-DJPb meraih penghargaan kategori perak untuk organisasi kecil jasa. SNI Award merupakan penghargaan tertinggi dari Pemerintah Republik Indonesia bagi industri/perusahaan/organisasi yang menerapkan SNI berkinerja baik dan berkelanjutan.

16th SNI Award/The National Quality Award of Indonesia

DJPb, represented by HAI-DJPb, won the silver category award for small service organizations. The SNI Award is the highest award from the Government of the Republic of Indonesia for industries/companies/organizations that apply SNI with good and sustainable performance.



Unit Kerja Berpredikat WBK WBBM

DJPb Memiliki Jumlah Unit Kerja Berpredikat WBK WBBM Terbanyak di Kemenkeu. Jumlah unit yang meraih predikat WBK/WBBM adalah sebanyak 220 unit kerja yang terdiri dari 191 unit berpredikat WBK dan 29 unit berpredikat WBBM.

Work Units with the WBK WBBM

DG Treasury Has the Most Number of Work Units with the WBK WBBM predicate in the Ministry of Finance. The number of units that won the WBK/WBBM predicate is as many as 220 work units consisting of 191 units with the WBK predicate and 29 units with the WBBM predicate.



Best Practice Pengelolaan Kebijakan Publik

DJPb menjadi Perumus Kebijakan PMK Nomor 6/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dan terpilih sebagai *Best Practice* Pengelolaan Kebijakan Publik untuk kategori "Komunikatif" melalui penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Publik Tahun 2021.

Best Practice of Public Policy Management

DG Treasury becomes the Formulator of PMK Policy Number 6/PMK.05/2019 concerning Procedures for Payment of Activities Funded Through the Issuance of State Sharia Securities and was selected as the Best Practice of Public Policy Management for the "Communicative" category through the assessment of the Public Policy Quality Index (IKK) of the Year 2021.



PPID DJPb Raih Penghargaan sebagai Empat PPID Tingkat I Kemenkeu dengan Kategori Informatif

DJPb mengembangkan inovasi aplikasi e-PPID DJPb yang bertujuan mempercepat waktu penyelesaian permohonan informasi.

PPID DJPb Wins Award as Four PPID Level I Ministry of Finance with Informative Category

DG Treasury has developed an innovative DG Treasury e-PPID application that aims to speed up the completion time of information requests.

Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kemenkeu

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-429/KMK.01/2021 tentang Kantor Wilayah Terbaik di Lingkungan Kemenkeu tahun 2021 ditetapkan Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Kantor Wilayah Terbaik Keempat.

Sedangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-430/KMK.01/2021 tentang Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kemenkeu Tahun 2021 menetapkan urutan pemenang yaitu KPPN Tarakan sebagai Peringkat Pertama, KPPN Benteng sebagai Peringkat Kedua, dan KPPN Sidikalang sebagai Peringkat Ketiga.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan di lingkup unit Eselon I Kemenkeu

DJPb memperoleh nilai 4,59 pada penilaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan. Nilai tersebut melebihi nilai agregat Kemenkeu secara keseluruhan sebesar 4,40

Capaian Terbaik Survei Penilaian Integritas

DJPb merupakan unit eselon I dengan indeks persepsi integritas tertinggi di Kemenkeu dengan indeks 95,82. Capaian tersebut menunjukkan bahwa DJPb telah menunjukkan integritas yang sangat baik dalam hal kinerja layanan, baik layanan internal maupun layanan eksternal.

Best Regional Offices and Best Service Offices at the Ministry of Finance Level

In accordance with the Decree of the Minister of Finance Number KMK-429/KMK.01/2021 concerning the Best Regional Office within the Ministry of Finance in 2021, the Regional Office of DG Treasury of East Nusa Tenggara Province has been designated as the Fourth Best Regional Office.

Meanwhile, the Decree of the Minister of Finance Number KMK-430/KMK.01/2021 concerning the Best Service Office in the Ministry of Finance in 2021 stipulates the order of winners, namely KPPN Tarakan as First Rank, KPPN Benteng as Second Rank, and KPPN Sidikalang as Third Rank.

Service User Satisfaction Index within the Echelon I unit of the Ministry of Finance

DG Treasury obtained a score of 4.59 on the assessment of the Service User Satisfaction Index. This value exceeds the overall aggregate value of the Ministry of Finance of 4.40.

Best Outcomes Integrity Assessment Survey

DG Treasury is an echelon I unit with the highest perceived integrity index in the Ministry of Finance with an index of 95.82. This achievement shows that DG Treasury has demonstrated excellent integrity in terms of service performance, both internal services and external services/partners.



Catatan Penting DJPb 2021

Highlighted Events of DG Treasury 2021

Perluasan dan akselerasi implementasi *Digital Payment-Marketplace* (digipay) ke seluruh K/L

Expansion and acceleration of Digital Payment-Marketplace (digipay) implementation to all Ministries/Institutions



Penguatan Peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE)

Strengthening the Role of the DG Treasury Regional Office as Regional Chief Economist (RCE)

Soft Launching Platform Pembayaran Pemerintah sebagai sistem utama *shared service* penyediaan layanan dokumentasi digital

Soft Launching of the Government Payment Platform as the main shared service system for providing digital documentation services

Penguatan image branding DJPb melalui nilai DJPb HANdAL (Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, dan Loyal)

Strengthening DG Treasury's branding image through the value of HANdAL (Harmony, Trustworthy, Digital, Accountable, and Loyal)

Penerapan SAKTI *full module* ke seluruh K/L (roll out)

Application of full SAKTI module to all Ministries/Institutions (roll out)



Launching Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia Modul Pelaporan (SIKRI MP) sebagai pengembangan dari SIKRI

Launching of the Financial Information System of the Republic of Indonesia Reporting Module (SIKRI MP) as a development of SIKRI

DJPb merupakan pelopor sertifikasi ISO Sistem Manajemen Anti Suap di Kementerian Keuangan melalui KPPN Madiun

DJPb is the pioneer of ISO certification of Anti-bribery Management System at the Ministry of Finance through KPPN Madiun

Dukungan UMKM melalui penyediaan Rumah UMi di 10 Kanwil DJPb

MSME support through the provision of UMi Houses in 10 Regional Offices of DJPb



Kesinambungan Tema Antartahun Continuity of the Interyear Theme



2021 – Optimisme Wujudkan New DJPb in Town yang Handal

DJPb telah *on the track* bertransformasi menjadi modern treasurer yang memiliki peran lebih strategis. Dinamika dan tantangan yang dihadapi DJPb akan semakin *challenging* dan *demanding*. Pandangan bahwa DJPb sekedar mencatat, membayar, dan melaporkan keuangan negara telah perlahan berhasil berubah. Kini statement strategis DJPb di bidang pengelolaan likuiditas, kas negara, analisis laporan keuangan, dan strategi belanja mampu menjadi rujukan dalam berbagai kebijakan melalui peran *Regional Chief Economist* (RCE). Dengan mengusung nilai DJPb HANdAL (Harmonis, Akuntabel, Digital, Amanah, Loyal), jajaran Insan Perbendaharaan optimis wujudkan New DJPb in Town.

2021 – Optimism Creates a Reliable New DJPb in Town

DJPb has *on the track* transformed into a modern treasurer with a more strategic role. The dynamics and challenges faced by DJPb will be increasingly *challenging* and *demanding*. The view that DJPb only records, pays, and reports state finances has slowly changed. Now DJPb's strategic statements in the areas of liquidity management, state treasury, financial statement analysis, and spending strategies can become a reference in various policies through the role of the Regional Chief Economist (RCE). By carrying out the value of DJPb HANdAL (Harmonious, Accountable, Digital, Trustworthy, Loyal), the Treasurer is optimistic about realizing New DJPb in Town.



2020 – Pulihkan Asa Kuatkan Bangsa

Tahun 2020 merupakan periode yang penuh tantangan sebab dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19. Sebagai respon untuk mengantisipasi dampak pandemi tersebut, pemerintah mengambil langkah-langkah *extraordinary* melalui berbagai kebijakan terkait dengan APBN, termasuk DJPb yang juga benar-benar diuji tingkat ketangguhan dan ketangkasannya dalam menghadapi kondisi menantang ini. Komitmen DJPb untuk menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia menjadikannya harus cepat beradaptasi dan berinovasi di masa pandemi ini agar APBN tetap dapat disalurkan secara tepat dan optimal untuk memulihkan kembali harapan bagi kekuatan bangsa.

2020 – Restoring Hope Strengthen the Nation

The year 2020 is a period full of challenges because it is faced with the conditions of the Covid-19 pandemic. In response to anticipating the impact of the pandemic, the government took *extraordinary* steps through various policies related to the APBN, including the DG Treasury which was also really tested for its level of resilience and agility in dealing with these challenging conditions. DG Treasury's commitment to become a superior state treasury manager at the world level requires that he must quickly adapt and innovate during this pandemic so that the APBN can still be channeled appropriately and optimally to restore hope for the strength of the nation.



2019 – Berpada Berdaya Guna Bagi Bangsa

Sinergi yang baik dari segenap jajaran DJPb bersama seluruh mitra perbendaharaan dan *stakeholders* menjadi bekal utama dalam meraih berbagai pencapaian di sepanjang tahun 2019.

Sejumlah inovasi teknologi perbendaharaan telah digagas melalui program DJPb Bersinergi yang dicanangkan pada tahun 2019. Komitmen DJPb untuk bersinergi dalam membangun Digital Treasury juga membuahkan sejumlah penghargaan yang mampu menambah daya guna bagi kemakmuran bangsa.

2019 – Cohesion in Service to Nation

Good synergy from all levels of DG Treasury together with all treasury partners and stakeholders is the main provision in achieving various achievements throughout 2019.

A number of innovations in treasury technology have been initiated through the DG Treasury Synergy program launched in 2019. DG Treasury's commitment to synergize in building a Digital Treasury is also resulted in a number of awards that are able to increase efficiency for the prosperity of the nation.



2018 – Menorehkan Karya, Membangun Indonesia

Melalui Program Literasi Perbendaharaan sebagai program utama di tahun 2018, kapasitas pengelola APBN dituntut untuk dapat dituangkan dalam bentuk publikasi sehingga mampu memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat atas pengelolaan APBN oleh pemerintah. Komitmen DJPb untuk terus menorehkan karya dalam membangun Indonesia diupayakan melalui sejumlah program strategis berskala nasional.

2018 – Carving Creation, Building Indonesia

Through the Treasury Literacy Program as the main program in 2018, the capacity of the DG Treasury as the manager of the State Budget is required to be put in the form of publications so that they are able to provide education and understanding to the public on the management of the State Budget by the government. DG Treasury's commitment to continue to make works in developing Indonesia is pursued through a number of strategic programs on a national scale.



2017 - Meraih Pencapaian Menggapai Harapan

DJPb tidak pernah berhenti dalam berinovasi untuk mencapai visi perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia. Program Perbendaharaan Go Green yang diimplementasikan pada tahun 2017 menjadi terobosan bagi DJPb dalam upaya efisiensi belanja pemerintah sekaligus menunjukkan bahwa DJPb tidak hanya berorientasi pada pencapaian target-target kerja yang diemban, tetapi juga menunjukkan perhatian kepada aspek penunjang kualitas kinerja.

2018 – Reaching Achievements Obtaining Hope

DG Treasury never stops innovating to achieve a vision of a treasury that excels at the world level. The Go Green Treasury Program which was implemented in 2017 became a breakthrough for DG Treasury in its efforts to improve efficiency in government spending and at the same time showed that DG Treasury was not only oriented towards achieving its work targets, but also showed attention to supporting aspects of performance quality.

OVERVIEW APBN



Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan APBN, DJPb menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021 dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI

Laporan

Realisasi APBN 2021

115,35%

Pendapatan Negara & Hibah



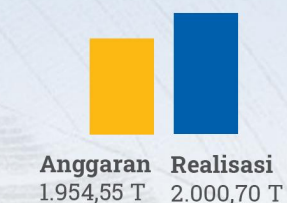
101,32%

Belanja Negara



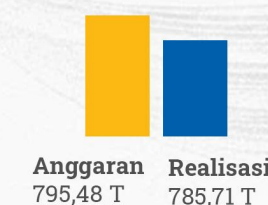
102,36%

Belanja Pemerintah Pusat



98,77%

Transfer Daerah & Dana Desa



77,02%

Defisit Anggaran



86,62%

Pembiayaan Netto



SiLPA

96,66 T

LKPP ini merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menggunakan sistem aplikasi terintegrasi dalam kerangka Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
STATE BUDGET REALIZATION REPORT
FOR THE PERIOD ENDED 31 DECEMBER 2021 AND 31 DECEMBER 2020

(Dalam Rupiah) / (In IDR)

Uraian (Item) (Item)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)			Tahun Anggaran 2020 (Audited)
	Anggaran (Budget)	Realisasi (Realization)	%	Realisasi (Realization)
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH STATE REVENUE AND GRANTS				
I. Penerimaan Perpajakan Tax Revenue	1.444.541.564.794.000	1.547.841.051.644.620	107,15%	1.285.136.317.135.790
1. Pajak Dalam Negeri Domestic Tax	1.409.581.016.340.000	1.474.145.658.872.530	104,58%	1.248.415.111.170.300
2. Pajak Perdagangan Internasional International Trade Tax	34.960.548.454.000	73.695.392.772.093	210,80%	36.721.205.965.494
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak Non-Tax State Revenue	298.204.166.025.000	458.492.978.338.622	153,75%	343.814.209.832.563
1. Penerimaan Sumber Daya Alam Revenue from Natural Resources Extraction	104.108.834.374.000	149.489.367.918.723	143,59%	97.225.067.272.619
2. Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Revenue from Separated State Assets	26.130.490.000.000	30.496.823.293.877	116,71%	66.080.543.541.337
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Other Non-Tax State Revenue	109.174.696.808.000	152.504.035.628.725	139,69%	111.200.271.136.408
4. Pendapatan Badan Layanan Umum Revenue from Public Service Agencies	58.790.144.843.000	126.002.751.497.297	214,33%	69.308.327.882.199
III. Penerimaan Hibah Grant Revenue	902.816.508.000	5.013.042.434.686	555,27%	18.832.815.220.624
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III) Total State Revenue and Grants (A.I + A.II + A.III)	1.743.648.547.327.000	2.011.347.072.417.930	115,35%	1.647.783.342.188.980
B. BELANJA NEGARA STATE EXPENDITURE				
I. Belanja Pemerintah Pusat Central Government Expenditure	1.954.548.542.970.000	2.000.703.773.887.430	102,36%	1.832.950.921.019.890
1. Belanja Pegawai Personnel Expenditure	421.143.676.408.000	387.752.487.126.783	92,07%	380.532.228.590.618
2. Belanja Barang Goods Expenditure	362.476.188.766.000	530.059.299.058.191	146,23%	422.338.225.598.487
3. Belanja Modal Capital Expenditure	246.781.524.752.000	239.632.253.549.976	97,10%	190.919.832.381.884
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang Interest Payment Expenditure	373.262.815.000.000	343.495.383.443.849	92,03%	314.088.112.296.556
5. Belanja Subsidi Subsidies Expenditure	175.350.382.161.000	242.086.818.340.688	138,06%	196.231.455.278.876

Uraian (Item)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)			Tahun Anggaran 2020 (Audited)
	Anggaran (Budget)	Realisasi (Realization)	%	Realisasi (Realization)
6. Belanja Hibah Grants Expenditure	6.781.663.187.000	4.319.001.438.779	63,69%	6.275.907.926.228
7. Belanja Bantuan Sosial Social Assistance Expenditure	161.435.481.650.000	173.654.105.302.037	107,57%	202.529.969.428.206
8. Belanja Lain-lain Other Expenditure	207.316.811.046.000	79.704.425.627.134	38,45%	120.035.189.519.041
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Transfers to Regions and Village Fund	795.479.475.461.000	785.707.585.675.378	98,77%	762.530.176.156.179
Transfer ke Daerah Transfers to Regions	723.479.475.461.000	713.853.875.664.349	98,67%	691.429.657.572.323
1. Dana Perimbangan Balancing Fund	688.676.556.279.000	679.586.677.685.349	98,68%	652.097.644.670.323
Dana Transfer Umum General Transfer Fund	492.253.011.279.000	494.948.379.700.065	100,55%	475.518.812.742.551
a. Dana Bagi Hasil Revenue Sharing Fund	101.961.620.991.000	117.156.989.412.065	114,90%	93.906.361.247.000
b. Dana Alokasi Umum General Allocation Fund	390.291.390.288.000	377.791.390.288.000	96,80%	381.612.451.495.551
Dana Transfer Khusus Special Transfer Fund	196.423.545.000.000	184.638.297.985.284	94,00%	176.578.831.927.772
a. Dana Alokasi Khusus Fisik Physical Special Allocation Fund	65.248.200.000.000	57.069.673.906.021	87,47%	50.175.976.373.103
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Non-physical Special Allocation	131.175.345.000.000	127.568.624.079.263	97,25%	126.402.855.554.669
2. Dana Insentif Daerah Regional Incentive Fund	13.500.000.000.000	13.464.278.795.000	99,74%	18.455.285.206.000
3. Dana Keistimewaan DIY DIY Special Fund	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	100,00%	1.320.000.000.000
4. Dana Otonomi Khusus Special Autonomy Fund	19.982.919.182.000	19.482.919.184.000	97,50%	19.556.727.696.000
Dana Desa Village Fund	72.000.000.000.000	71.853.710.011.029	99,80%	71.100.518.583.856
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II) Total State Expenditure (B.I + B.II)	2.750.028.018.431.000	2.786.411.359.562.810	101,32%	2.595.481.097.176.070
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) BUDGET SURPLUS (DEFICIT) (A - B)	(1.006.379.471.104.000)	(775.064.287.144.883)	77,02%	-947.697.754.987.089

Uraian (Item)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)			Tahun Anggaran 2020 (Audited)
	Anggaran (Budget)	Realisasi (Realization)	%	Realisasi (Realization)
D. PEMBIAYAAN FINANCING				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) Domestic Financing (Net)	1.040.732.292.121.000	881.632.527.734.210	84,71%	1.146.812.705.085.320
1. Rekening Pemerintah Government Account	15.755.785.000.000	143.966.330.873.078	913,74%	70.640.000.000.000
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Instalments from Repayment of Subsidiary Loans	3.906.287.570.000	3.934.601.833.324	100,72%	4.646.479.738.112
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Privatization and Sale of Assets of Restructuring Program		459.418.995.546		299.524.709.410
4. Surat Berharga Negara (Neto) Government Securities (Net)	1.207.267.144.000.000	877.506.537.447.298	72,69%	1.177.152.327.902.790
Penerimaan Surat Berharga Negara Receipts from Government Securities		1.352.768.254.205.300	112,05%	1.541.252.304.258.670
Pengeluaran Surat Berharga Negara Issuance of Government Securities		475.261.716.758.002		364.099.976.355.881
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) Domestic Loans (Net)	978.326.772.000	944.178.723.182	96,51%	2.363.120.617.772
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Receipts from Domestic Loans	2.729.126.772.000	2.482.142.954.931	90,95%	3.767.381.621.350
Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Domestic Loan Principal Payments	1.750.800.000.000	1.537.964.231.749	87,84%	1.404.261.003.578
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah State Equity Participation/ Government Investment Fund	-155.459.515.221.000	-113.462.804.138.218	72,99%	-94.698.164.882.767
7. Kewajiban Penjaminan Guarantee Obligations	-2.715.736.000.000	-2.715.736.000.000	100,00%	-3.590.583.000.000
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional National Education Development Fund	-29.000.000.000.000	-29.000.000.000.000	100,00%	-10.000.000.000.000
9. Pembiayaan lain-lain Miscellaneous financing				

Uraian (Item)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)			Tahun Anggaran 2020 (Audited)
	Anggaran (Budget)	Realisasi (Realization)	%	Realisasi (Realization)
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) Foreign Financing (Net)	-34.352.821.017.000	-9.909.364.145.449	28,85%	46.481.126.166.737
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) Withdrawal of Foreign Loans (Gross)	51.377.409.989.000	74.168.116.606.248	144,36%	141.112.305.195.604
a. Penarikan Pinjaman Program/ Tunai	21.900.000.000.000	41.564.200.800.000	189,79%	102.259.679.376.875
b. Penarikan Pinjaman Proyek/ Kegiatan	29.477.409.989.000	32.603.915.806.248	110,61%	38.852.625.818.729
2. Penerusan Pinjaman (Neto) Subsidiary Loan Agreements (Net)	-3.458.231.006.000	-1.994.500.362.196	57,67%	-3.631.888.376.473
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Foreign Loan Principal Payments	-82.272.000.000.000	-82.082.980.389.501	99,77%	-90.999.290.652.394
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II) Total Financing (D.I + D.II)	1.006.379.471.104.000	871.723.163.588.761	86,62%	1.193.293.831.252.050
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SiLPA (SiKPA) SURPLUS/DEFICIT AFTER BUDGET FINANCING-SiLPA (SiKPA)		96.658.876.443.878		245.596.076.264.968
(D - C)				

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
STATEMENT OF CHANGES IN ACCUMULATED BUDGET SURPLUS
AS OF 31 DECEMBER 2021 AND 31 DECEMBER 2020

(Dalam Rupiah) / (In IDR)

Uraian (Item)	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
A. Saldo Anggaran Lebih Awal Initial Accumulated Budget Surplus (SAL)	388.119.081.331.126	212.698.374.791.778
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(143.966.330.873.078)	(70.640.000.000.000)
Use of SAL as Current Year Financing Revenue		
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	96.658.876.443.878	245.596.076.264.968
Surplus/Deficit after Budget Financing (SiLPA/SiKPA)		
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A + B + C)	340.811.626.901.926	387.654.451.056.746
Total SAL Before Adjustments (A + B + C)		
D. Penyesuaian SAL		
SAL Adjustments		
1. Penyesuaian Pembukuan Bookkeeping Adjustments	(3.021.299.958.783) (11.320.124.797)	(25.425.421.216) 490.055.695.596
2. Penyesuaian Lain-lain Other Adjustments	(3.032.620.083.580)	464.630.274.380
Total Penyesuaian SAL		
Total SAL Adjustments		
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A + B + C + D) FINAL ACCUMULATED BUDGET SURPLUS (A + B + C + D)	337.779.006.818.346	388.119.081.331.126

**NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**
BALANCE SHEET
AS OF 31 DECEMBER 2021 AND 31 DECEMBER 2020

(Dalam Rupiah) / (In IDR)

Uraian (Item)	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
ASET ASSETS		
Aset Lancar Current Assets		
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents		
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Cash in Government Accounts at Bank Indonesia and Commercial Banks	253.683.550.805.313	198.514.075.299.703
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya Cash in Other Government Accounts	6.202.854.028.961	2.885.728.029.464
Kas di Rekening Kas di KPPN Cash in KPPN Cash Accounts	721.442.531.795	3.545.188.057.685
Kas dalam Transito Cash in Transit	150.229.274	-
Kas di Bendahara Pengeluaran Cash at Expenditure Treasurer	248.050.262.873	731.061.274.902
Kas di Bendahara Penerimaan Cash at Revenue Treasurer	37.421.908.699	124.232.758.259
Kas Lainnya dan Setara Kas Other Cash and Cash Equivalents	9.091.165.076.095	7.682.561.400.884
Kas pada BLU Cash at Public Service Agencies	61.377.178.597.005	43.440.621.140.757
Jumlah Kas dan Setara Kas Total Cash and Cash Equivalents	331.361.813.440.015	256.923.467.961.654
Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) Advance Money of the State General Treasurer Account	25.427.588.614	11.763.117.361
Investasi Jangka Pendek Short-Term Investments	20.616.337.564.347	80.997.797.371.759
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja Prepaid Expenses and Advance on Expenses	46.996.615.225.607	34.421.569.421.725
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Accrued Revenue	12.666.270.821.458	5.591.639.511.588
Piutang: Receivables:		
Piutang Perpajakan Tax Receivables	115.671.861.019.017	101.481.619.150.090
Piutang Bukan Pajak Non-Tax Receivables	303.240.928.210.220	189.891.302.692.258
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Current Portion of Installment Sales Receivables	6.796.616.797	7.952.121.446
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Current Portion of Treasury / Indemnification Claims TP/TGR	202.192.066.573	194.035.354.942

(Dalam Rupiah) / (In IDR)

Uraian (Item)	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman Current Portion of Loans Receivables	22.932.217.837.753	22.427.918.639.595
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya Current Portion of Other Long-Term Loans Receivables	6.966.963.753.362	6.586.899.675.108
Piutang dari Kegiatan BLU Receivables from BLU Activities	5.195.965.915.132	5.729.150.674.002
Piutang PFK Third-Party Receivables	143.818.277	605.426.556
Jumlah Piutang (Bruto) Total Receivables (Gross)	454.217.069.237.131	326.319.483.733.997
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Allowance for Doubtful Accounts – Short-Term Receivables	(295.877.324.954.444)	(199.619.416.639.983)
Jumlah Piutang (Bersih) Total Receivables (Net)	158.339.744.282.687	126.700.067.094.014
Persediaan Inventory	199.150.378.100.687	160.514.808.289.624
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	769.156.587.023.415	665.161.112.767.725
Investasi Jangka Panjang Long-Term Investment		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Non-Permanent Long-Term Investment		
Dana Bergulir Revolving Fund	16.913.827.101.272	58.150.909.777.379
Dana Bergulir Diragukan Tertagih Revolving Fund Doubtful Accounts	(5.259.103.797.828)	(5.263.474.230.423)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih) Total Revolving Fund (Net)	11.654.723.303.444	52.887.435.546.956
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Other Non-Permanent Long-Term Investment	201.663.256.483.208	89.459.149.834.715
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya diragukan Realisasinya Other Non-Permanent Long-Term Investment whose Realization remain Doubtful	(582.572.724.048)	(298.094.636.894)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih) Total Other Non-Permanent Long-Term Investment (Net)	201.080.683.759.160	89.161.055.197.821
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Total Non-Permanent Long-Term Investment	212.735.407.062.604	142.048.490.744.777
Investasi Jangka Panjang Permanen Permanent Long-Term Investment		
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Permanent Investment and Government Equity Participation	2.647.354.332.364.797	2.403.279.903.397.823
Investasi Permanen BLU Permanant Investment by BLUs	8.958.055.146	8.913.486.508
Investasi Permanen Lainnya Other Permanent Investment	618.247.231.165.090	627.739.496.594.177
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen Total Permanent Long-Term Investment	3.265.610.521.585.033	3.031.028.313.478.508
Jumlah Investasi Jangka Panjang Total Long-Term Investment	3.478.345.928.647.637	3.173.076.804.223.285

(Dalam Rupiah) / (In IDR)

Uraian (Item)	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Aset Tetap Fixed Assets		
Tanah Land	4.541.798.614.039.399	4.539.889.164.724.754
Peralatan dan Mesin Equipment and Machinery	784.676.725.241.744	706.966.249.385.561
Gedung dan Bangunan Buildings and Properties	420.147.571.518.921	395.808.354.433.284
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Roads, Irrigation and Transmission Networks	1.011.741.986.090.569	940.895.010.856.918
Aset Tetap Lainnya Other Fixed Assets	65.009.747.686.862	55.493.664.420.893
Konstruksi Dalam Pengerjaan Construction in Progress	151.713.397.246.386	161.812.756.359.901
Jumlah Aset Tetap (Bruto) Total Fixed Assets (Gross)	6.975.088.041.823.881	6.800.865.200.181.311
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Accumulated Depreciation of Fixed Assets	(1.027.967.575.561.543)	(824.850.679.122.605)
Jumlah Aset Tetap Total Fixed Assets	5.947.120.466.262.338	5.976.014.521.058.706
Piutang Jangka Panjang Long-Term Receivables		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Installment Sales Receivables	94.540.395.903	107.120.739.065
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Treasury / Indemnification Claims Receivables (TP/TGR)	273.637.588.986	297.191.420.066
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman Long-Term Loans Receivables	54.879.424.507.922	59.898.131.927.338
Piutang Jangka Panjang Lainnya Other Long-Term Receivables	2.862.454.836.305	2.856.864.567.564
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto) Total Long-Term Receivables (Gross)	58.110.057.329.116	63.159.308.654.033
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Allowance for Doubtful Accounts – Long-Term Receivables	(3.809.839.855.220)	(3.837.488.574.312)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih) Total Long-Term Receivables (Net)	54.300.217.473.896	59.321.820.079.721
Aset Lainnya Other Assets		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Partnership With Third Parties	456.034.659.110.539	402.415.771.649.117
Aset Tak Berwujud Intangible Assets	50.941.205.843.715	44.029.306.388.378
Dana yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Fund	282.473.836.958.927	365.366.108.391.343

(Dalam Rupiah) / (In IDR)

Uraian (Item)	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Dana Penjaminan Guarantee Fund	11.299.237.825.000	8.586.595.521.620
Dana Kelolaan BLU BLU Managed Fund	24.727.909.355.189	34.019.184.774.266
Aset Lain-lain Other Assets	734.632.471.885.036	690.770.865.397.592
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya Other Assets of Other Government Units	24.344.018.870.873	17.297.142.477.109
Jumlah Aset Lainnya (Bruto) Total Other Assets (Gross)	1.584.453.339.849.279	1.562.484.974.599.425
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Accumulated Depreciation of Other Assets	(353.350.118.711.276)	(318.753.044.535.507)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya Accumulated Amortization of Other Assets	(25.355.604.750.837)	(18.631.703.843.877)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih) Total Other Assets (Net)	1.205.747.616.387.166	1.225.100.226.220.041
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	11.454.670.815.794.452	11.098.674.484.349.478
KEWAJIBAN LIABILITIES		
Kewajiban Jangka Pendek Current Liabilities		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	3.765.331.476.323	4.033.372.635.177
Utang Kepada Pihak Ketiga Debt to Third-Parties	89.472.483.564.678	49.519.940.549.323
Utang Bunga Interest Debt	85.472.157.396.255	78.397.479.060.871
Utang Subsidi Subsidies Debt	3.907.340.658.138	20.411.311.149.154
Utang Transfer Transfer Debt	40.517.736.709.001	43.869.090.853.813
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Current Portion of Long-Term Debt	400.285.862.654.501	416.341.570.576.012
Unamortized Discount	(58.354.649.000)	(222.819.437.000)
Unamortized Premium	127.025.791.000	226.991.689.000
Utang SBN Jangka Pendek Short-Term Government Securities Debt	42.305.000.000.000	55.780.000.000.000
Unamortized Discount	(337.659.241.000)	(497.081.275.000)
Unamortized Premium	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Liability from Excess Tax Payments	20.948.359.057.302	26.431.751.511.477
Pendapatan Diterima di Muka Unearned Revenue	6.680.157.106.664	6.799.741.953.913

(Dalam Rupiah) / (In IDR)

Uraian (Item)	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Pendapatan Yang Ditangguhkan Deferred Income	55.997.717.597	179.632.783.759
Utang Jangka Pendek Lainnya Other Short-Term Debt	240.083.121.169	335.376.236.376
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Total Current Liabilities	693.381.521.362.628	701.606.358.286.875
Kewajiban Jangka Panjang Non-Current Liabilities		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Long-Term Domestic Debt		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri Long-Term Domestic Loans	11.347.703.253.209	10.781.832.927.370
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri Long-Term Domestic Debt from Government Securities	5.732.372.440.844.653	4.832.289.530.565.900
Unamortized Discount	(45.412.322.167.000)	(46.614.743.504.000)
Unamortized Premium	50.766.925.041.000	44.178.329.970.000
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan Deferred Government Securities Financing	-	11.299.218.500.000
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Other Domestic Long-Term Debt	340.311.378.399.101	289.381.766.612.800
Utang Jangka Panjang Subsidi Long-Term Subsidies Debt	27.730.475.223.220	18.422.169.463.379
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Total Long-Term Domestic Debt	6.117.116.600.594.183	5.159.738.104.535.449
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Long-Term Foreign Debt		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri Long-Term Foreign Loans	727.802.460.644.502	764.106.403.002.755
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Other Long-Term Foreign Loans	25.053.812.708	25.119.765.919
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Total Long-Term Foreign Debt	727.827.514.457.210	764.131.522.768.674
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	6.844.944.115.051.393	5.923.869.627.304.123
JUMLAH KEWAJIBAN TOTAL LIABILITIES	7.538.325.636.414.021	6.625.475.985.590.998
EKUITAS EQUITY	3.916.345.179.380.431	4.473.198.498.758.480
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	11.454.670.815.794.452	11.098.674.484.349.478

LAPORAN OPERASIONAL / OPERATING REPORT

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 /
FOR THE PERIOD ENDED 31 DECEMBER 2021 AND 31 DECEMBER 2020

Dalam Rupiah / (In IDR)

URAIAN / ITEM	JUMLAH / TOTAL		KENAIKAN (PENURUNAN) / INCREASE (DECREASE)	
	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)	JUMLAH (TOTAL)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
OPERATING ACTIVITIES				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
OPERATING REVENUE				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
TAX REVENUE				
Pendapatan Pajak Penghasilan Income Tax Revenue	686.752.482.242.702	588.311.959.554.395	98.440.522.688.307	16,73%
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Value Added Tax Revenue	548.396.434.702.449	453.594.425.319.088	94.802.009.383.361	20,90%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Land and Building Tax Revenue	17.935.848.046.973	21.873.478.094.366	(3.937.630.047.393)	(18,00%)
Pendapatan Cukai Excise Revenue	210.648.080.301.725	185.896.669.118.177	24.751.411.183.548	13,31%
Pendapatan Pajak Lainnya Other Tax Revenue	12.830.882.227.398	10.497.063.339.658	2.333.818.887.740	22,23%
Pendapatan Bea Masuk Import Duty Revenue	38.609.324.997.979	32.451.724.568.651	6.157.600.429.328	18,97%
Pendapatan Bea Keluar Export Duty Revenue	34.818.192.339.405	4.052.791.964.188	30.765.400.375.217	759,12%
Pendapatan Pajak Lain-lain Other Tax Revenue	(2.690.770.914)	(19.303.388.856)	16.612.617.942	(86,06%)
Jumlah Pendapatan Perpajakan Total Tax Revenue	1.549.988.554.087.717	1.296.658.808.569.667	253.329.745.518.050	19,54%
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK				
NON-TAX STATE REVENUE				
Pendapatan Sumber Daya Alam Revenue from Natural Resources Extraction	183.108.968.643.626	107.208.373.405.304	75.900.595.238.322	70,80%
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Revenue from Separated State Assets	22.145.205.009	170.294.841.425.980	(170.272.696.220.971)	(99,99%)
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Other Non-Tax State Revenue	357.763.871.668.324	114.412.629.710.689	243.351.241.957.635	212,70%
Pendapatan Badan Layanan Umum Public Service Agencies Revenue	117.081.911.184.562	65.640.298.429.287	51.441.612.755.275	78,37%
Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	657.976.896.701.521	457.556.142.971.260	200.420.753.730.261	43,80%

Dalam Rupiah / (In IDR)

URAIAN / ITEM	JUMLAH / TOTAL		KENAIKAN (PENURUNAN) / INCREASE (DECREASE)	
	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)	JUMLAH (TOTAL)	%
Total Non-Tax State Revenue				
PENDAPATAN HIBAH				
GRANT REVENUE				
Pendapatan Hibah	26.288.292.683.664	28.977.398.210.131	(2.689.105.526.467)	(9,28%)
Grant Revenue				
Jumlah Pendapatan Hibah	26.288.292.683.664	28.977.398.210.131	(2.689.105.526.467)	(9,28%)
Total Grant Revenue				
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	2.234.253.743.472.902	1.783.192.349.751.058	451.061.393.721.844	25,30%
TOTAL OPERATING REVENUE				
BEBAN OPERASIONAL				
OPERATING EXPENSES				
Beban Pegawai Personnel Expenses	398.649.859.178.366	386.481.644.924.399	12.168.214.253.967	3,15%
Beban Persediaan Inventory Expenses	43.677.925.626.847	30.460.702.045.047	13.217.223.581.800	43,39%
Beban Barang dan Jasa Goods and Services Expenses	312.254.687.585.015	220.554.499.337.304	91.700.188.247.711	41,58%
Beban Pemeliharaan Maintenance Expenses	33.885.556.222.122	30.553.180.667.458	3.332.375.554.664	10,91%
Beban Perjalanan Dinas Official Travel Expenses	28.003.927.323.550	24.381.867.318.524	3.622.060.005.026	14,86%

URAIAN / ITEM	Dalam Rupiah / (In IDR)			
	JUMLAH / TOTAL		KENAIKAN (PENURUNAN) / INCREASE (DECREASE)	
	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)	JUMLAH (TOTAL)	%
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	110.247.665.838.993	103.388.684.664.344	6.858.981.174.649	6,63%
<i>Goods Handed Over to Community/Regional Govt Expenses</i>				
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	370.196.352.562.436	317.892.180.673.151	52.304.171.889.285	16,45%
<i>Debt Obligation Payment Expenses</i>				
Beban Subsidi	211.824.283.817.124	183.621.464.262.798	28.202.819.554.326	15,36%
<i>Subsidies Expenses</i>				
Beban Hibah	4.319.001.994.301	5.798.660.821.822	(1.479.658.827.521)	(25,52%)
<i>Grant Expenses</i>				
Beban Bantuan Sosial	165.516.430.769.156	204.774.725.400.005	(39.258.294.630.849)	(19,17%)
<i>Social Assistance Expenses</i>				
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	773.171.878.446.225	752.583.826.022.245	20.588.052.423.980	2,74%
<i>Transfers to Regions and Village Fund Expenses</i>				
Beban Lain-lain	172.972.087.067.972	86.222.605.803.664	86.749.481.264.308	100,61%
<i>Other Expenses</i>				
Beban Penyusutan dan Amortisasi	228.046.048.203.199	225.173.233.636.287	2.872.814.566.912	1,28%
<i>Depreciation and Amortization Expenses</i>				
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	104.650.071.005.533	29.226.770.527.309	75.423.300.478.224	258,06%
<i>Allowance for Doubtful Accounts Expenses</i>				
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	2.957.415.775.640.839	2.601.114.046.104.357	356.301.729.536.482	13,70%
TOTAL OPERATING EXPENSES				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(723.162.032.167.937)	(817.921.696.353.299)	94.759.664.185.362	(11,59%)
SURPLUS/(DEFICIT) FROM ACTIVITIES				
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
NON-OPERATING ACTIVITIES				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
SURPLUS/(DEFICIT) FROM DISPOSAL OF NON-CURRENT ASSETS				

URAIAN / ITEM	Dalam Rupiah / (In IDR)			
	JUMLAH / TOTAL		KENAIKAN (PENURUNAN) / INCREASE (DECREASE)	
	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)	JUMLAH (TOTAL)	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	533.899.164.465	310.006.160.448	223.893.004.017	72,22%
<i>Revenue from Disposal of Non-Current Assets</i>				
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	6.755.376.717.030	15.930.051.895.610	(9.174.675.178.580)	(57,59%)
<i>Expenses from Disposal of Non-Current Assets</i>				
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(6.221.477.552.565)	(15.620.045.735.162)	9.398.568.182.597	(60,17%)
<i>Total Surplus/(Deficit) from Disposal of Non-Current Assets</i>				
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
SURPLUS/(DEFICIT) FROM SETTLEMENT OF LONG-TERM OBLIGATIONS				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
<i>Revenue from Settlement of Long-Term Obligations</i>				
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	1.854.340.752.507	-	1.854.340.752.507	-
<i>Expenses from Settlement of Long-Term Obligations</i>				
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	(1.854.340.752.507)	-	(1.854.340.752.507)	-
<i>Total Surplus/(Deficit) from Settlement of Long-Term Obligations</i>				

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
CASH FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 31 DECEMBER 2020

(Dalam Rupiah) / (In IDR)

Uraian (Item)	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
I. Arus Kas Masuk		
Cash Inflow		
1. Penerimaan Perpajakan Tax Revenue		
a. Pendapatan Pajak Penghasilan Income Tax Revenue	696.676.588.239.336	594.033.333.770.490
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Value-Added Tax Revenue	551.900.480.905.676	450.328.063.257.688
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Land and Building Tax Revenue	18.924.786.654.220	20.953.610.013.766
d. Pendapatan Cukai Excise Revenue	195.517.827.106.916	176.309.313.789.576
e. Pendapatan Pajak Lainnya Other Tax Revenue	11.125.975.966.383	6.790.790.338.785
f. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional International Trade Tax Revenue	73.695.392.772.093	36.721.205.965.494
Total Penerimaan Perpajakan Total Tax Revenue	1.547.841.051.644.624	1.285.136.317.135.799
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Non-Tax State Revenue		
a. Pendapatan Sumber Daya Alam Revenue from Natural Resources Extraction	149.489.367.918.723	97.225.067.272.619
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Revenue from Separated State Assets	30.496.823.293.877	66.080.543.541.337
c. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Other Non-Tax State Revenue	152.011.308.573.915	110.918.107.259.637
d. Pendapatan Badan Layanan Umum Public Service Agencies Revenue	126.002.751.497.297	69.308.327.882.199
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak Total Non-Tax State Revenue	458.000.251.283.812	343.532.045.955.792
3. Penerimaan Hibah Grant Revenue	5.013.042.434.686	18.832.815.220.624
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I) Total Cash Inflow (A.I)	2.010.854.345.363.122	1.647.501.178.312.215

(Dalam Rupiah) / (In IDR)

Uraian (Item)	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
II. Arus Kas Keluar Cash Outflow		
1. Belanja Pegawai Personnel Expenditure	387.752.487.126.783	380.532.228.590.618
2. Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditure	530.059.299.058.191	422.338.225.598.487
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang Interest Payment Expenditure	343.495.383.443.849	314.088.112.296.556
4. Belanja Subsidi Subsidies Expenditure	242.086.818.340.688	196.231.455.278.876
5. Belanja Hibah Grants Expenditure	4.319.001.438.779	6.275.907.926.228
6. Belanja Bantuan Sosial Social Assistance Expenditure	173.654.105.302.037	202.529.969.428.206
7. Belanja Lain-Lain Other Expenditure	79.704.425.627.134	120.035.189.519.041
8. Dana Bagi Hasil Pajak Tax Revenue Sharing Fund	71.777.109.535.555	44.283.738.827.545
9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Natural Resources Revenue Sharing Fund	41.566.421.176.518	46.498.603.739.756
10. Dana Bagi Hasil Cukai Excise Revenue Sharing Fund	3.813.458.699.992	3.124.018.679.699
11. Dana Alokasi Umum General Allocation Fund	377.791.390.288.000	381.612.451.495.551
12. Dana Alokasi Khusus Fisik Physical Special Autonomy Fund	57.069.673.906.021	50.175.976.373.103
13. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah Special Autonomy Fund, DIY Special Fund and Regional Incentive Fund	34.267.197.979.000	39.332.012.902.000
14. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Non-Physical Special Allocation Fund	127.568.624.079.263	126.402.855.554.669
15. Dana Desa Village Fund	71.853.710.011.029	71.100.518.583.856
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II) Total Cash Outflow (A.II)	2.546.779.106.012.839	2.404.561.264.794.191
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II) Net Cash Flow from Operating Activities (A.I - A.II)	(535.924.760.649.717)	(757.060.086.481.976)

(Dalam Rupiah) / (In IDR)

Uraian (Item)	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES		
I. Arus Kas Masuk Cash Inflow		
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN Management and Sale of State-Owned Assets	492.727.054.810	282.163.876.771
2. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Revenue from Sale of Assets of Restructuring Program	459.418.995.546	299.524.709.410
3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir Revolving Fund Financing Revenue	-	2.014.582.699.001
4. Penerimaan Investasi Pemerintah Government Investment Revenue	24.437.821.226.907	19.955.174.825.564
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I) Total Cash Inflow (B.I)	25.389.967.277.263	22.551.446.110.746
II. Arus Kas Keluar Cash Outflow		
1. Belanja Modal Capital Expenditure	239.632.253.549.976	190.919.832.381.884
2. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional National Education Development Expenditure	29.000.000.000.000	10.000.000.000.000
3. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir Revolving Fund Financing Expenditure	18.620.000.000.000	13.306.582.699.000
4. Penyertaan Modal Negara State Equity Participation	93.092.721.792.114	64.288.017.000.000
5. Pengeluaran Investasi Pemerintah Government Investment Expenditure	28.903.639.573.011	42.663.905.708.332
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II) Total Cash Outflow (B.II)	409.248.614.915.101	321.178.337.789.216
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II) Net Cash Flow from Investment Activities (B.I - B.II)	(383.858.647.637.838)	(298.626.891.678.470)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
I. Arus Kas Masuk Cash Inflow		
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Domestic Financing Revenue	1.499.216.728.033.309	1.615.659.685.880.024
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Foreign Financing Revenue	74.168.116.606.248	141.112.305.195.604

(Dalam Rupiah) / (In IDR)

Uraian (Item)	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Loan Installments Repayment Revenue	3.934.601.833.324	4.646.479.738.112
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Other Financing Revenue	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I) Total Cash Inflow (C.I)	1.577.319.446.472.881	1.761.418.470.813.740
II. Arus Kas Keluar Cash Outflow		
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Domestic Financing Expenditure	476.799.680.989.751	365.504.237.359.459
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Foreign Financing Expenditure	82.082.980.389.501	90.999.290.652.394
3. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement Provision of Loans Sourced from Subsidiary Loan Agreements	1.994.500.362.196	3.631.888.376.473
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II) Total Cash Outflow (C.II)	560.877.161.741.448	460.135.416.388.326
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II) Net Cash Flow from Financing Activities (C.I - C.II)	1.016.442.284.731.433	1.301.283.054.425.414
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS CASH FLOW FROM TRANSITORY ACTIVITIES		
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Neto) Third Party Fund (Net)	(267.579.611.995)	(1.675.465.318.005)
2. Transito (Neto) Transitory (Net)	(19.209.339.592.828)	31.636.865.658.712
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto) Third Party Non-Budget Transactions (Net)	58.761.639.376.438	(55.018.574.605.220)
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) Remittances Between Bank Accounts (Net)	(150.229.276)	52.495.332
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Net Cash Flow from Transitory Activities	39.284.569.942.339	(25.057.121.769.181)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN INCREASE (DECREASE) IN CASH POSITION PRIOR TO BOOKKEEPING CORRECTIONS	135.943.446.386.217	220.538.954.495.787
Penggunaan SAL Use of SAL	(143.966.330.873.078)	(70.640.000.000.000)
Koreksi Pembukuan Bookkeeping Corrections	(3.031.126.148.197)	(50.149.808.575)

(Dalam Rupiah) / (In IDR)		
Uraian (Item)	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN INCREASE (DECREASE) IN CASH POSITION AFTER BOOKKEEPING CORRECTIONS	(11.054.010.635.058)	149.848.804.687.212
SALDO AWAL KAS OPENING CASH BALANCE	385.326.463.515.635	235.477.658.828.423
SALDO AKHIR KAS ENDING CASH BALANCE	374.272.452.880.577	385.326.463.515.635
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Cash at Expenditure Treasurer	248.050.262.873	731.061.274.902
Kas di Bendahara Penerimaan		
Cash at Revenue Treasurer	37.421.908.699	124.232.758.259
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan Other Cash and Cash Equivalents Apart from Authorized Grants	7.346.108.176.157	3.819.744.936.794
Kas BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU) Deposited BLU Cash (Short Term BLU Investments)	(20.616.337.564.347)	(14.247.797.371.759)
Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) Restricted Cash/Funds (Other Assets)	(29.926.032.453.218)	(118.830.237.152.177)
Kas Transito (Kiriman Uang) Transitory Cash (Remittances)	150.229.274	-
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS ENDING CASH AND CASH EQUIVALENTS BALANCE	331.361.813.440.015	256.923.467.961.654

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE PERIOD ENDED 31 DECEMBER 2021 AND 31 DECEMBER 2020

(Dalam Rupiah) / (In IDR)

Uraian (Item)	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
EKUITAS AWAL STARTING EQUITY	4.473.198.498.758.480	5.127.312.881.160.402
SURPLUS/(DEFISIT) LO OPERATING REPORT SURPLUS/(DEFICIT)	(657.236.935.101.822)	(872.618.264.239.235)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS CORRECTIONS THAT DIRECTLY INCREASE/DECREASE EQUITY		
Penyesuaian SiLPA SiLPA Adjustments	(1.175.557.546.736)	454.270.651.534
Koreksi Nilai Persediaan Inventory Value Corrections	1.362.204.184.053	2.873.247.690.030
Revaluasi Aset Tetap Fixed Assets Revaluations	183.644.209.172	104.773.275.462.472
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Corrections of Non-Revalued Assets Value	10.261.922.785.650	71.297.154.112.414
Koreksi Atas Reklasifikasi Corrections on Reclassifications	4.393.487.458.451	7.542.957.446.049
Koreksi Lainnya Other Corrections	84.998.088.557.591	31.986.614.856.946
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS TOTAL OF CORRECTIONS THAT DIRECTLY INCREASE/DECREASE EQUITY	100.023.789.648.181	218.927.520.219.445
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS TRANSACTIONS BETWEEN ENTITIES	359.826.075.592	(423.638.382.132)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS INCREASE/DECREASE IN EQUITY	(556.853.319.378.049)	(654.114.382.401.922)
EKUITAS AKHIR ENDED EQUITY	3.916.345.179.380.431	4.473.198.498.758.480



 **Dander, Bojonegoro**
Fotografer: Dwi Ratnasari, KPPN Bojonegoro

Harmonis bermakna memiliki komunikasi yang baik, rasa saling percaya, dan sikap menghargai perbedaan untuk bersama-sama menjalankan tugas demi tercapainya visi dan misi organisasi. Program strategis dilakukan melalui kerjasama dengan Unit Eselon I lain Kemenkeu di Pusat maupun di Daerah serta stakeholders dan menerapkan budaya kerja egaliter, toleransi dan saling menghargai.

Harmonious means having good communication, mutual trust, and an attitude of respect for differences to jointly carry out tasks in order to achieve the vision and mission of the organization. Strategic programs are carried out in collaboration with other Echelon I Units of the Ministry of Finance at the center and in the regions as well as stakeholders and apply an egalitarian work culture, tolerance and mutual respect.

01

Kilas Balik Kinerja

Performance
Overview



Dengan mengemban peran sebagai *Regional Chief Economist*, Ditjen Perbendaharaan melewati tahun 2021 dengan melakukan sejumlah inisiasi agar kualitas ketepatan pelaksanaan APBN tetap terjaga dalam upaya membangun kembali bangsa yang makmur.

By assuming the role of the Regional Chief Economist, the Directorate General of Treasury passed the year 2021 by running various initiatives to ensure that high-quality and accurate execution of the State Budget (APBN) was maintained in the effort to rebuild a prosperous nation.





Peristiwa Penting Key Events



14 JANUARI
January

Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan ke-17

Menteri Keuangan meminta kepada seluruh jajaran Insan Perbendaharaan untuk tetap fokus dan memiliki semangat bersama di dalam menjaga keuangan negara dalam situasi yang extraordinary karena pandemi Covid-19.

Reflections on the 17th Treasury Service Day

The Minister of Finance asked all levels of Treasury personnel to stay focused and have a shared spirit in safeguarding state finances amid the extraordinary situation brought about by the Covid-19 pandemic.



29 JANUARI
January

Launching Modul Pelaporan SIKRI

Meskipun opini WTP sudah diraih oleh sebagian besar entitas pelaporan, pemerintah tidak berpuas diri. Sejumlah upaya tetap dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan maupun pemanfaatan dari laporan keuangan pemerintah. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan berbagai pelaporan manajerial untuk melengkapi laporan-laporan akuntabilitas yang sudah ada.

Launch of SIKRI Reporting Module

While the unqualified (WTP) opinion has been achieved by most reporting entities, the government does not wish to remain complacent. Several efforts are still being made to improve the quality of reporting and the utilization of government financial reports. Among these efforts is the development of various managerial reports to complement the existing accountability reports.



30 JANUARI
January

Pimpinan DJPb Tandatangani Kontrak Kinerja 2021

Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan bersama sebagai Insan Perbendaharaan untuk terus meningkatkan kinerja, integritas, dan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan, jajaran pimpinan DJPb melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two, Piagam Risiko, Pakta Integritas, serta Treasury Charter tahun 2021.

DG Treasury Leaders Sign the Performance Contract 2021

As a form of mutual commitment and earnestness as Treasury personnel to continuously enhance performance, uphold integrity, and bring about innovations in the implementation of duties and functions in the treasury sector, the DG Treasury leadership signed the Ministry of Finance-Two Performance Contract, Risk Charter, Integrity Pact, and Treasury Charter in 2021.



16 FEBRUARI
February

Empat Unit Kantor Pusat DJPb Siap Raih Predikat WBK

Dalam mempertajam reformasi birokrasi, empat unit kerja lingkup Kantor Pusat DJPb bersinergi dalam pencaanangan penguatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2021. Keempat unit tersebut yakni Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Four Units at DG Treasury Head Office Are Ready to Win the WBK Predicate

With the objective of strengthening bureaucratic reform, four work units under the DG Treasury Head Office have fostered synergies in declaring the development of the Integrity Zone (ZI) towards a Corruption Free Area (WBK) in 2021. The four units are the Secretariat of the Directorate General of Treasury, Directorate of State Treasury Management, Directorate of Financial Management of Public Service Agencies, and Directorate of Accounting and Financial Reporting.



24 FEBRUARI
February

Program Pembiayaan UMi Diperluas untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi

Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) sebagai salah satu BLU yang menjadi bagian dari DJPb turut andil dalam mendorong program pemulihan ekonomi nasional lewat bantuan kepada Usaha Ultramikro. Terdapat sejumlah perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro misalnya plafon menungkat dari Rp10 juta menjadi Rp20 juta.

Expansion of UMi Financing Program to Support Economic Recovery

As one of DG Treasury's public service agencies, the Government Investment Center (BLU PIP) has contributed to boosting the national economic recovery program by providing assistance to ultra-micro enterprises. Various amendments have been made to Minister of Finance Regulation (PMK) No. 193/PMK.05/2020 concerning Ultra Micro Financing, including the raising of the financing limit from IDR 10 million to IDR 20 million.



12 MARET
March

Serah Terima Jabatan Dirjen Perbendaharaan

Hadiyanto yang semula menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dilantik sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, menggantikan Andin Hadiyanto yang dilantik sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Handover of the Director General of Treasury Position

From his earlier role as Secretary General of the Ministry of Finance, Hadiyanto was sworn in as the new Director General of Treasury to replace Andin Hadiyanto who was appointed as Head of the Financial Education and Training Agency (BPPK).

15 MARET
March

Ditjen Perbendaharaan Re-sertifikasi ISO 9001:2015

Dalam menjamin dan memastikan kualitas pelayanan publik, DJPb membuktikan dengan penerapan standar internasional atas pelayanan yang diberikan kepada stakeholder pada KPPN melalui ISO 9001:2015. Sertifikat ISO tersebut ada masa berlakunya, untuk itu perlu dilakukan re-sertifikasi untuk menjamin keberlangsungannya.

Directorate General of Treasury Re-certification of ISO 9001:2015

In guaranteeing and ensuring the quality of public services, DG Treasury has demonstrated its commitment of applying international standards for services provided to stakeholders at KPPN through the ISO 9001:2015 certification. The ISO certificate is valid for a certain period and therefore recertification is necessary to ensure sustainability.

19 MARET
March

Rapat Koordinasi BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi

Selama masa pandemi, BLU dituntut mampu memberikan *extra effort* dan inovasi untuk penanganan pandemi Covid-19. BLU juga didorong mampu memberikan pengembangan layanan dengan pembiayaan alternatif, link and match dengan kebutuhan industri, dan optimalisasi aset.

BLU Coordination Meeting on Strategy to Restore the Economy

During the Covid-19 pandemic, public service agencies (BLU) are required to be able to engage in extra efforts and innovations with respect to the pandemic's handling and mitigation. Furthermore, BLUs are also encouraged to develop their services on alternative financing, link and match with industry needs, and conduct asset optimization.

8 APRIL
April

Rapat Koordinasi DJPb Lingkup Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Kanwil DJPb diharapkan memiliki kemampuan dalam men-deliver kebijakan Kementerian Keuangan, meng-capture konstelasi keuangan daerah, sekaligus memberikan insight mengenai peran apa yang bisa ditingkatkan oleh wilayah di lingkup kerja Kanwil DJPb yang dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

DG Treasury Coordination Meeting for West Sumatra Province

The DG Treasury Regional Office is expected to be able to deliver on Ministry of Finance policies, capture regional financial dynamics, and provide insights into what actions need to be enhanced by the regional government within the Regional Office's scope of operations, with the objective of contributing to national economic growth.

12 APRIL
April

DJPb Laksanakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

DJPb dalam hal ini Direktorat Pelaksanaan Anggaran (PA) menjalankan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) secara berkala, khususnya untuk 15 Kementerian/Lembaga Negara (K/L) yang memiliki pagu anggaran terbesar serta K/L yang memiliki alokasi belanja Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Budget Execution Evaluation by DG Treasury

Through the Directorate of Budget Execution (PA), DG Treasury conducts the Budget Execution Evaluation (EPA) activity on a regular basis, especially against 15 ministries/agencies with the biggest budgets and other ministries and institutions that have allocations for Covid-19 Mitigation and the National Economic Recovery (PC-PEN) program.

11 MEI
May**Sosialisasi Survei MOFIN DJPb**

Tingkat kesehatan organisasi di Kementerian Keuangan telah diukur secara berkala sejak tahun 2013 melalui survei *Ministry of Finance Organizational Fitness Index (MOFIN)*. Pada survei tersebut, nilai MOFIN DJPb selalu menjadi yang tertinggi di Kemenkeu dan selalu bernilai sehat (elite) sejak tahun 2014.

Dissemination on the DG Treasury MOFIN Survey

Since 2013, the level of organizational health within the Ministry of Finance has been measured regularly through the Ministry of Finance Organizational Fitness Index (MOFIN) Survey. In this regard, DG Treasury's scores on the MOFIN surveys have always been the highest within the Ministry, and since 2014 has been in the healthy (elite) category.

9 JUNI
June**Rapat Koordinasi Unit Kepatuhan Internal DJPb**

Integritas merupakan nilai pertama Kementerian Keuangan yang tidak dapat ditoleransi. DJPb telah membuktikan bahwa integritas sudah mengakar, tidak diragukan lagi. Salah satunya dibuktikan lewat Survei Persepsi Integritas 2020 yang lalu, DJPb meraih nilai tertinggi di Kementerian Keuangan yaitu 94,76.

DG Treasury Internal Compliance Unit Coordination Meetings

Integrity is the Ministry of Finance's primary value whose violation cannot be tolerated. In this context, DG Treasury has proven that integrity has taken root and should not be in doubt. Among the proofs for this is through the Integrity Perception Survey 2020, where DG Treasury achieved the highest score within the Ministry of Finance, i.e., 94.76.

22 JUNI
June**LKPP Tahun 2020 Kembali Raih Opini WTP**

Untuk yang kelima kalinya berturut turut sejak LKPP Tahun 2016, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini tersebut diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rapat paripurna.

LKPP FY 2020 Achieves the WTP Opinion Yet Again

For the fifth time in a row since 2016, the Central Government Financial Report (LKPP) 2020 has again received the Unqualified Opinion (WTP) from the State Audit Board (BPK). This opinion is based on BPK's Audit Report (LHP) as submitted to the House of Representatives (DPR) through a plenary meeting.

8 JULI
July**LKBUN 2020 Kembali Raih WTP**

Meskipun berada pada tantangan pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga akuntabilitas tata kelola keuangan negara. Terbukti dengan kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan untuk Bagian Anggaran 015.

LKBUN 2020 Again Wins the WTP Opinion

Despite the challenges of the Covid-19 pandemic, the Ministry of Finance is committed to maintaining accountability over the management of state finances. Evidence of this can be seen in the Unqualified Opinion (WTP) received on the State General Treasurer's Financial Report (LKBUN) and the Ministry of Finance Financial Report for Budget Section 015.

21 JULI
July**Rapat Pimpinan DJPb Regional Maluku-Papua**

Kebutuhan pembangunan di daerah yang beragam sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing menjadikan peran DJPb sebagai unit Kemenkeu dengan sejumlah instansi vertikal di daerah perlu untuk terus membangun komunikasi dan sinergi.

DG Treasury Maluku - Papua Regional Leaders Meeting

Given the development needs of sub-national regions as per their local dynamics, DG Treasury as a Ministry of Finance unit and having vertical agencies located in the regions has a major role to play and needs to build communications and foster synergies with stakeholders.

28 JULI
July**Rapat Pimpinan DJPb Regional Sulawesi**

Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, menyampaikan bahwa peran Kanwil DJPb di daerah menjadi sangat penting dan *critical* untuk membantu daerah agar berkembang meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karenanya, kredibilitas unit vertikal DJPb menjadi sangat diperlukan.

DG Treasury Sulawesi Regional Leaders Meeting

The Director General of Treasury, Hadiyanto, said that the role of the DG Treasury regional offices in the regions is very important and critical to help them to develop and enhance economic growth, and bring prosperity to their people. To that end, the credibility of the DG Treasury regional offices as verticals units is very important.


3 AGUSTUS
August

PPID Tingkat I DJPb Raih Penghargaan Unit Paling Informatif

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan penghargaan kepada DJPb yang termasuk dalam empat PPID Tingkat I di Kementerian Keuangan dengan Kategori Informatif. Prestasi ini diberikan karena memiliki tidak hanya kreasi positif tetapi juga inovasi yang terus dikembangkan.

DG Treasury Level I PPID Win the Most Informative Unit Award

Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati expressed her appreciation to DG Treasury that was represented by four Ministry of Finance Level I PPID (Information and Documentation Management Officer) being awarded for the Most Informative Category. This achievement was given not only for positive creations but also for developing continuous innovations.

4 AGUSTUS
August

MoU dengan PT SMI Dorong Pemanfaatan Pembiayaan Infrastruktur Daerah untuk PEN

Untuk membantu memberikan pemahaman tentang pembiayaan infrastruktur kepada Pemda, DJPb menjalin kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman kedua lembaga.

MoU with PT SMI Encourages Utilization of Regional Infrastructure Financing for the PEN Program

To help provide an understanding of infrastructure financing to local governments, DG Treasury has entered into a collaboration with PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) which was marked by the signing of a memorandum of understanding between the two institutions.

12 AGUSTUS
August

Rapat Pimpinan Regional Bali dan Nusa Tenggara

Kanwil DJPb sebagai *Regional Chief Economist* diharapkan bukan hanya mendorong percepatan belanja APBN oleh K/L dan APBD oleh Pemda, tetapi juga memantau dan mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan belanja di daerah dalam menghasilkan output atau outcome agar dapat menjadi instrumen bagi formulasi kebijakan.

Bali and Nusa Tenggara Regional Leadership Meeting

The DG Treasury Regional Office as the Regional Chief Economist is expected to not only encourage the acceleration of State Budget (APBN) spending by ministries/agencies and regional budgets (APBD) by regional governments, but also to monitor and evaluate the effectiveness of regional spending in producing outputs or outcomes for becoming the instruments of policy formulation.

9 SEPTEMBER
September

Rapat Pimpinan DJPb Regional Kalimantan

Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto mendorong jajarannya untuk dapat menjalankan peran sebagai *Regional Chief Economist* (RCE) melalui penguatan koordinasi bersama Pemda. Kanwil DJPb juga perlu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan melakukan pendampingan, agar dapat mendorong Pemda mempercepat realisasi anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskalnya, terutama dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

DG Treasury Kalimantan Regional Leadership Meeting

Director General of Treasury Hadiyanto encouraged his team to perform its role of Regional Chief Economist (RCE) by strengthening coordination with local governments. The DG Treasury Regional Office also needs to enhance its communication abilities and provide assistance to encourage the local government to accelerate budget spending and increase its fiscal capacity, especially by enhancing locally-generated revenues (PAD).

14 SEPTEMBER
September

Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Menteri Keuangan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh kementerian negara/ lembaga dan pemerintah daerah yang terus menjaga dan mengelola keuangan negara, menjaga integritas, dan membangun tata kelola dengan baik.

National Working Meeting on Government Financial Accounting and Reporting

The Minister of Finance expressed her appreciation and gratitude to all ministries/agencies and local governments that continue to safeguard and manage state finances, uphold integrity, and build good governance.

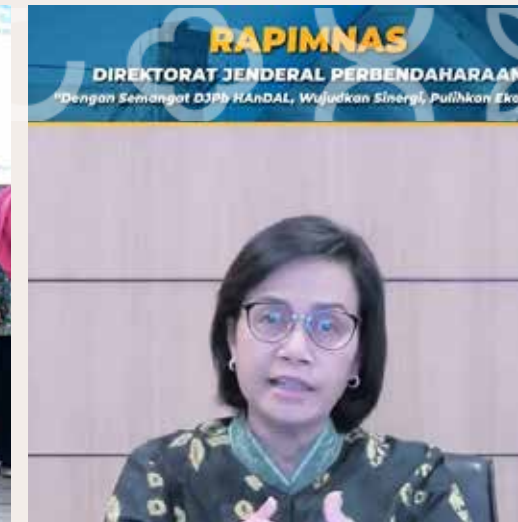
17 SEPTEMBER
September

Rapat Pimpinan DJPb Regional Sumatera

Kanwil DJPb bertindak sebagai *Regional Chief Economist* tidak saja melaksanakan agenda Ditjen Perbendaharaan, tetapi juga memperoleh tanggung jawab dari Menteri Keuangan maupun Wakil Menteri Keuangan.

DG Treasury Sumatra Regional Leadership Meeting

The DG Treasury Regional Office acting as Regional Chief Economist not only carries out the agenda of the Directorate General of Treasury, but also has responsibilities from the Minister of Finance and the Vice Minister of Finance.



9 OKTOBER
October

Kunjungan Kerja Wakil Menteri Keuangan di Kanwil DJPb Provinsi DIY

Menteri Keuangan dan Wamenkeu telah memberikan arahan agar DJPb menyusun timeline program dan target kinerja *Piloting RCE* sampai dengan akhir tahun 2021, serta membangun diskusi dengan *local expert* universitas.

Vice Minister of Finance Working Visit to the DG Treasury Regional Office of Yogyakarta Province

The Minister of Finance and the Vice Minister of Finance have provided directives for DG Treasury to develop a program timeline and performance targets for RCE Piloting until the end of 2021, as well as to engage in discussions with local university experts.

25 OKTOBER
October

Treasury Goes to Campus untuk Edukasi Pengelolaan Kas Negara

Edukasi mengenai tugas pokok dan fungsi DJPb serta *current issue* terkait pelaksanaan APBN melalui Seminar *Treasury Goes to Campus* (TGC) yang di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Banten.

'Treasury Goes to Campus' for Instruction on State Treasury Management

Familiarization to the DG Treasury and current issues related to State Budget execution through the *Treasury Goes to Campus* (TGC) Seminar program was held at the Faculty of Economics and Business (FEB) campus of Sultan Ageng Tirtayasa University (Untirta) Serang, Banten.

10 NOVEMBER
November

Rapat Pimpinan Nasional DJPb 2021

Menteri Keuangan berpesan agar DJPb mampu membuat analisis ekonomi lebih dalam yang dikaitkan dengan dampak terhadap masyarakat. Bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari aspek kemiskinan, penciptaan tenaga kerja, kenaikan income masyarakat, atau pertumbuhan kesejahteraan.

DG Treasury National Leadership Meeting 2021

The Minister of Finance advised DG Treasury to be able to conduct a deeper analysis of the economy in relation to its impacts on society. In this regard, the analysis should not only in terms of economic growth, but also include the aspects of poverty, job creation, enhancing the people's income, and welfare growth.

16 NOVEMBER
November

Akselerasi Perekonomian Melalui BLU Expo 2021

BLU Expo merupakan upaya menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk akselerasi perekonomian Indonesia melalui BLU sebagai agen pemerintah yang sangat diperlukan sinerginya dalam pemulihan ekonomi, baik antar satker BLU, BLUD, BUMN, dan pemerintah daerah dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Economic Acceleration Through BLU Expo 2021

The BLU Expo represents an effort to reaffirm the government's commitment to provide a boost to the Indonesian economy through public service agencies (BLU) as government agents. In this regard, there is much need for developing synergies towards economic recovery, both between BLU work units, regional public service agencies (BLUD), SOEs, and local governments in providing the best service to the community.

26 NOVEMBER
November

Menkeu Kunjungi Layanan DJPb di Jayapura

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melakukan kunjungan ke Kanwil DJPb Papua dan KPPN Jayapura sebelum meresmikan Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura yang akan digunakan sebagai operasional layanan instansi vertikal Kemenkeu.

Minister of Finance Visits DG Treasury Services in Jayapura

Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati paid a visit to the DG Treasury Regional Office of Papua and KPPN Jayapura before inaugurating the Jayapura State Finance Building (GKN), which will be used to deliver operational services by the Ministry's vertical agencies.

29 NOVEMBER
November

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK 2021 pada Empat Unit Kantor Pusat DJPb

Direktorat Pelaksanaan Anggaran (PA), Sistem Manajemen Investasi (SMI), Sistem Perbendaharaan (SP), dan Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) melakukan penandatanganan piagam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi tahun 2021 di Jakarta.

Development of Integrity Zones Towards WBK 2021 at Four DG Treasury Head Office Units

Directorates of Budget Execution (PA), Investment Management System (SMI), Treasury System (SP), and Treasury Information Systems and Technology (SITP) signed a charter for the development of an integrity zone towards a Corruption Free Area (WBK) 2021 in Jakarta.



27 DESEMBER
December

Menteri Keuangan Tinjau Layanan Akhir Tahun KPPN Jakarta VII

Jelang akhir tahun 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi layanan KPPN yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada para stakeholders hingga akhir tahun. Termasuk di lingkup Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, di mana sebanyak Rp2.166 triliun atau 77,8% dari total alokasi belanja APBN tahun 2021 dikelola.

Minister of Finance Inspects the Year-End Service of KPPN Jakarta VII

Towards the end of 2021, Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati appreciated KPPN's efforts in delivering superior services to stakeholders until the end of the year. This includes the DG Treasury Regional Office of DKI Jakarta Province, where a sum of IDR 2,166 trillion or 77.8% of the total State Budget 2021 expenditure allocation is managed.

31 DESEMBER
December

Tutup Kas 2021 Bersama Menteri Keuangan

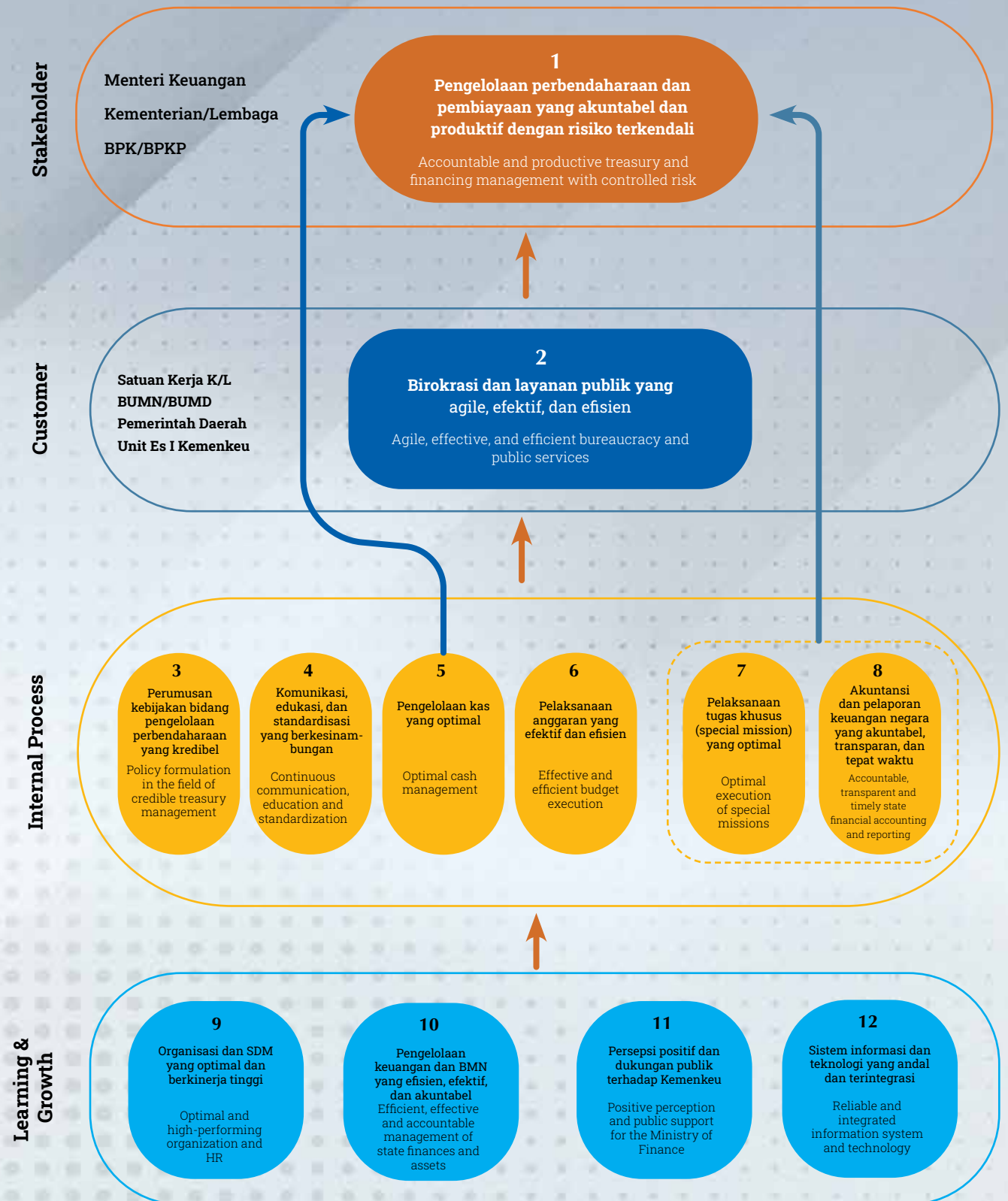
Menteri Keuangan menyampaikan bahwa tahun 2021 adalah sebuah tahun luar biasa. Diawali dengan optimisme bahwa bangsa akan pulih, namun kemudian diuji di tengah tahun dengan berbagai ujian Covid. Namun dengan tetap fokus, akhirnya berhasil berada di penghujung tahun untuk menutup kas.

Closing the Books for 2021 with the Minister of Finance

The Minister of Finance stated that 2021 was an extraordinary year. It started with optimism that the nation would recover but was then tested in mid-year with the spread of various Covid variants. However, by staying focused, the nation has finally managed to close the books at the year's end.

Peta Strategis, Capaian IKU, Inisiatif Strategis, dan NKO
Strategic Map, KPI Achievements, Strategic Initiatives and NKO

PETA STRATEGI
Map of Strategy





DJPb telah menetapkan sasaran strategis untuk tahun 2021 yang dituangkan dalam peta strategis untuk dijadikan bagian dari milestone DJPb. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis atau capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur bagi DJPb dalam membuat inisiatif strategis. Di tahun 2021, capaian IKU DJPb telah mencapai target yang ditetapkan pada masing-masing sasaran strategis.

The DG Treasury established strategic objectives for 2021 as outlined in the strategy map to be part of the DG Treasury milestones. Success in achievement of the strategic objectives or Key Performance Indicators (KPI) represent a benchmark for DG Treasury in making strategic initiatives. In 2021, DG Treasury's KPI achievements reached the targets set for each respective strategic objective.

NILAI KERJA ORGANISASI Organizational Performance Score

Kode SS/IKU SO Code/ KPI	Sasaran Strategis/IKU Strategic Objective/KPI	Target Target	Realisasi Realization	Pol Pol	V/C* V/C*	Bobot Weightage	Bobot Tertimbang Balanced Weightage	Capaian IKU/NSS/ Np KPI Achievement Index
STAKEHOLDER (25%)								117,78
Pengelolaan perbendaharaan dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko terkendali <i>Accountable and productive management of treasury and financing under controlled risks</i>								117,78
1a-CP	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang <i>Index of cash optimization against debt interest</i>	3.00	4.00	Max	PM	14.00%	29.79%	120.00
1b-CP	Indeks efektivitas investasi pemerintah <i>Government investment effectiveness index</i>	4.00	4.50	Max	PM	14.00%	29.79%	112.50
1c-CP	Indeks opini BPK atas LKPP <i>Index of BPK Opinion on LKPP</i>	4.00	4.00	Max	PL	19.00%	40.43%	120.00
CUSTOMER (15%)								109.89
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien <i>Bureaucracy and public service that is agile, effective and efficient</i>								109.89
2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan <i>Service user satisfaction index</i>	4.60	4.59	Max	PM	14.00%	50.00%	99.78
2b-N	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan <i>Treasury regulation effectiveness index</i>	3.25	4.00	Max	PM	14.00%	50.00%	120.00
INTERNAL PROCESS (30%)								113.97
Perumusan kebijakan bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel <i>Credible policy formulation on treasury management</i>								120.00
3a-N	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas <i>Priority policy/regulation completion index</i>	100.00	120.00	Max	PM	14.00%	100.00%	120.00
Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan <i>Continuing communications, education, and standardization</i>								113.92
4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi <i>Education and communications effectiveness index</i>	87.50	94.36	Max	PM	14.00%	50.00%	107.83
4b-N	Persentase implementasi jabatan fungsional bidang perbendaharaan <i>Percentage implementation of treasury functional positions</i>	75.00	94.15	Max	PM	14.00%	50.00%	120.00
Pengelolaan kas yang optimal <i>Optimal cash management</i>								120.00
5a-N	Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat <i>Deviations from central government cash planning projections</i>	4.50	1.77	Min	PL	19.00%	57.58%	120.00
5b-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara <i>State treasury management digitization index</i>	3.00	3.95	Max	PM	14.00%	42.42%	120.00
Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien <i>Effective and efficient budget execution</i>								107.74
6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L <i>Performance scores of budget execution at ministries/agencies</i>	89.00	94.30	Max	PL	19.00%	57.58%	105.96

Kode SS/IKU SO Code/ KPI	Sasaran Strategis/IKU Strategic Objective/KPI	Target Target	Realisasi Realization	Pol Pol	V/C* V/C*	Bobot Weightage	Bobot Tertimbang Balanced Weightage	Capaian IKU/NSS/ Np KPI Achievement Index
6b-N	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa <i>Performance score on disbursements of Transfers to Regions and Village Fund</i>	90.00	99.13	Max	PM	14.00%	42.42%	110.15
Pelaksanaan tugas khusus (special mission) yang optimal <i>Optimum execution of special missions</i>								115.45
7a-CP	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus <i>Effectiveness Index of execution of special missions</i>	100.00	144.76	Max	PL	19.00%	36.54%	120.00
7b-N	Persentase pencapaian target pendapatan BLU <i>Percentage achievement of BLU revenue targets</i>	100.00	214.34	Max	PL	19.00%	36.54%	120.00
7c-N	Persentase BLU yang kinerjanya baik <i>Percentage of BLU recording good performance</i>	94.00	96.90	Max	PM	14.00%	26.92%	103.09
Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu <i>Accounting and reporting of state finances that are accountable, transparent and timely</i>								106.73
8b-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti <i>Percentage of BPK recommendations on LKPP and LK BUN that have been followed up</i>	89.50	96.18	Max	PL	14.00%	42.42%	107.46
8a-N	Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP <i>Percentage of central government institutions obtaining the unqualified (WTP) opinion</i>	92.00	97.70	Max	PL	19.00%	57.58%	106.20
LEARNING AND GROWTH (30%)								109.41
Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi <i>Optimal and high-performing organization and HR</i>								113.52
9a-N	Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency <i>Percentage of compliance with soft and hard competency standards</i>	94.00	107.64	Max	PM	14.00%	22.95%	114.51
9b-CP	Indeks integritas organisasi <i>Organizational integrity index</i>	95.25	103.34	Max	PL	19.00%	31.15%	108.49
9c-CP	Persentase penyelesaian program RBTK <i>Percentage of completion of the RBTK program</i>	87.50	98.77	Max	PM	14.00%	22.95%	112.88
9d-CP	Tingkat implementasi learning organization <i>Level of implementation of the Learning Organization</i>	77.00	98.36	Max	PM	14.00%	22.95%	120.00
Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel <i>Financial and State-Owned Assets (BMN) management that is efficient, effective and accountable</i>								106.52
10a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran <i>Percentage of budget execution quality</i>	95.50	97.46	Max	PM	14.00%	50.00%	102.05
10b-N	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 <i>Index of BA 015 financial reporting quality</i>	100.00	100.00	Max	PM	14.00%	50.00%	110.99
Persepsi positif dan dukungan publik terhadap Kementerian Keuangan <i>Positive vibes and public support for the Ministry of Finance</i>								107.61
11a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik <i>Public communications effectiveness index</i>	3.55	3.82	Max	PM	14.00%	100.00%	107.61
Sistem informasi dan teknologi yang andal dan terintegrasi <i>Reliable and integrated information systems and technology</i>								110.00
12a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK <i>Index of ICT systems management quality</i>	100.00	140.30	Max	PM	14.00%	50.00%	120.00
12b-N	Persentase tingkat implementasi SAKTI <i>Percentage of SAKTI implementation level</i>	100.00	100.00	Max	PM	14.00%	50.00%	100.00
Nilai Kinerja Organisasi Organizational Performance Score								112.94



Highlight Laporan Keuangan Financial Report Highlights

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Statement of Budget Realization

Selama TA 2021, pagu anggaran lingkup DJPb mengalami kenaikan yang cukup signifikan disebabkan karena adanya tambahan pagu belanja pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit milik satuan kerja BLU Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk penyaluran selisih harga biodiesel. Perubahan pagu berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut.

During FY 2021, DG Treasury's budget ceiling saw a significant increase due to the additional allocations for managing palm oil plantation funds belonging to the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) as a public service agency (BLU) for disbursing the difference in biodiesel prices. The changes in the ceiling based on the revenue source and the expenditure type are as follows.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DJPb TAHUN 2021

Statement of Budget Realization DG of Treasury FY 2021

(Dalam Rupiah | IDR)

Uraian Description	31 Desember 2021 31 December 2021	
	Anggaran Awal Initial Budget	Anggaran Revisi Revised Budget
Pendapatan Revenue		
Pendapatan Revenue	13.763.212.872.000	13.851.300.615.000
Pedapatan Revenue	13.763.212.872.000	13.851.300.615.000
Belanja Expenditure		
Belanja Pegawai Personnel Expenditure	526.607.081.000	515.248.588.000
Belanja Barang Goods Expenditure	835.537.931.000	610.512.214.000
Belanja Modal Capital Expenditure	442.508.619.000	446.563.671.000
Total Belanja Total Expenditure	1.804.653.631.000	1.572.324.473.000
Belanja BLU BLU Expenditure		
Belanja Barang - BLU BLU Goods Expenditure	5.950.097.747.000	53.847.027.327.000
Belanja Modal - BLU BLU Capital Expenditure	4.284.162.000	5.255.826.000
Total Belanja BLU Total BLU Expenditure	5.954.381.909.000	53.852.283.153.000
Total Belanja Total Expenditure	7.759.035.540.000	55.424.607.626.000

Realisasi pendapatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 236,5% dibandingkan TA 2020. Kenaikan pendapatan secara umum disebabkan antara lain:

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU, yaitu Pendapatan Dana Perkebunan

The realized revenue for FY 2021 experienced an increase of 236.5% over FY 2020. In general, the increase in revenue was due to, among others:

BLU General Service Revenues, namely Palm Oil Plantation Fund revenues due to the tariff increase

Kelapa Sawit karena kenaikan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya.

Kenaikan pendapatan non-BLU merupakan hasil pengelolaan gedung dan bangunan (sewa kantin, sewa ruangan untuk mesin ATM, dan sewa ruangan untuk operasional perbankan) milik pemerintah lingkup DJPb, penerimaan kembali belanja modal TAYL dan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan pemerintah.

on plantation fund levies with respect to exports of palm oil, Crude Palm Oil (CPO), and derivative products.

Increase in non-BLU income from the management of buildings and structures (canteen rentals, room rental for ATM machines, room rental for banking operations) belonging to the government within the scope of DG Treasury, reimbursement of TAYL capital expenditures back and fines for late completion of government work.

PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN DJPb TAHUN 2021 DAN 2020

Comparison of Expenditure Realization per Expenditure Type FY 2021 and FY 2020

(Dalam Rupiah | IDR)

Uraian Description	31 Desember 2021 31 December 2021	31 Desember 2020 31 December 2020	Perubahan Change(%)
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha Revenue from State Owned Assets Management and Business Entity Fees	9.000.522.549	5.920.747.262	52,02
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan Interest Income from Bank Accounts Management	48.022.740	187.948.874	(74,45)
Pendapatan Denda Revenue from Fines	1.407.412.043	118.215.412	1.090,55
Pendapatan Lain-Lain Other Revenues	18.128.946.490	3.927.014.241	361,65
Jumlah Total	28.584.903.822	10.153.925.789	181,52
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU Income from BLU General Services	71.872.413.484.049	20.406.557.737.667	252,20
Pendapatan Hibah BLU Income from BLU Grants	7.363.097.606	-	-
Pendapatan BLU Lainnya Other BLU Income	1.039.923.318.066	1.260.314.307.725	(17,49)
Jumlah BLU Total of BLUs	72.919.699.899.721	21.666.872.045.392	236,55
Pengembalian Pendapatan Refund	6.326.854	754.452	738,60
Jumlah Netto Net Total	72.948.278.476.689	21.677.025.216.729	236,52

Dibandingkan TA 2020, Realisasi Belanja DJPb TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 70,42%. Kenaikan realisasi belanja tersebut disebabkan antara lain:

Belanja non-BLU mengalami peningkatan karena adanya pembangunan gedung lingkup DJPb yang terbesar pada satuan kerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat dan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara serta Pengadaan Lisensi Perangkat Lunak Peningkatan Kapasitas Infrastruktur SAKTI Tahun 2021.

Compared to FY 2020, DG Treasury's realized expenditures for FY 2021 saw an increase of 70.42%. The increase in expenditures was due to, among others:

Increase in non-BLU spending due to the construction of the largest DG Treasury building at the West Sulawesi Province Regional Office and North Kalimantan Province Regional Office, along with procurement of the SAKTI Infrastructure Capacity Building Software License in 2021.



Belanja BLU mengalami kenaikan pada realisasi pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit pada satuan kerja BLU BPDPKS yang digunakan untuk pengelolaan dana, penyaluran selisih harga biodiesel, penelitian, dan peremajaan kelapa sawit.

Increase in BLU spending on the management of palm oil plantation funds by BPDPKS, which was used for fund management, disbursement of difference in biodiesel prices, research, and palm oil rejuvenation.

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA DJPB PER JENIS BELANJA TAHUN 2021 DAN 2020

Comparison of Expenditure Realization per Expenditure Type FY 2021 and FY 2020

(Dalam Rupiah | IDR)

Uraian Description	31 Desember 2021 31 December 2021	31 Desember 2020 31 December 2020	Perubahan Change(%)
Belanja Pegawai Personnel Expenditure	512.979.304.213	525.089.502.797	-2,31
Belanja Barang Goods Expenditure	599.966.335.154	3.325.071.300.587	-81,96
Belanja Modal Capital Expenditure	439.178.173.850	264.993.716.961	65,73
Jumlah Total	1.552.123.813.217	4.115.154.520.345	-62,28
Belanja Barang - BLU BLU Goods Expenditure	53.680.518.449.084	28.293.955.999.670	89,72
Belanja Modal - BLU BLU Capital Expenditure	4.916.241.790	4.913.731.600	0,05
Jumlah BLU Total of BLUs	53.685.434.690.874	28.298.869.731.270	89,71
Pengembalian Belanja Refund	563.746.842	847.703.434	-33,50
Jumlah Netto Net Total	55.236.994.757.249	32.413.176.548.181	70,42

Realisasi anggaran belanja penanganan pandemi Covid-19 di lingkup DJPB TA 2021 mencapai 91,65% dari pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut.

The budget realization for Covid-19 mitigation within the scope of DG Treasury for FY 2021 reached 91.65% of the budget ceiling as per the following details.

REALISASI BELANJA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 LINGKUP DJPB TA 2021

Comparison of Expenditure Realization per Expenditure Type FY 2021 and FY 2020

(Dalam Rupiah | IDR)

Uraian Description	31 Desember 2021 31 December 2021		%
	Anggaran Budget	Realisasi Realization	
Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19 Expenditure of Operational Goods - Covid-19 Mitigation	5.247.460.000	5.147.370.964	98,09
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 Expenditure of Non-Operational Goods - Covid-19 Mitigation	-	-	0,00
Belanja Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 Inventory Expenditures - Covid-19 Mitigation	2.089.660.000	2.075.787.087	99,34
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 Expenditure on Services - Covid-19 Mitigation	4.686.923.000	4.443.084.305	94,80
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19 Expenditure on Buildings Maintenance - Covid-19 Mitigation	2.268.000	2.000.000	88,18
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19 Capital Expenditures on Equipment and Machinery - COVID-19 Mitigation	14.925.000	12.467.720	83,54
Jumlah Total	12.041.236.000	11.680.710.076	97,01

Uraian Description	31 Desember 2021 31 December 2021		%
	Anggaran Budget	Realisasi Realization	
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 BLU Goods Expenditure - Covid-19 Mitigation	570.109.000	381.962.743	67,00
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 BLU Services Expenditure - COVID-19 Mitigation	881.800.000	323.942.599	36,74
Jumlah BLU Total of BLUs	1.451.909.000	705.905.342	48,62
Pengembalian Belanja Refund	-	19.900.000	0,00
Jumlah Netto Net Total	13.493.145.000	12.366.715.418	91,65

LAPORAN OPERASIONAL Operating Report

Pada Laporan Operasional secara umum mengalami surplus, hal ini disebabkan antara lain:

Kenaikan Pendapatan Lain-lain BLU, khususnya Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mencapai Rp71,6 triliun.

Kenaikan beban operasional-LO, khususnya Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mencapai Rp54,3 triliun.

In general, the Operating Report experienced a surplus due to the following factors:

Increase in BLU-Other Income, particularly on Palm Oil Plantation Fund revenues which totaled IDR 71.6 trillion.

An increase in OR-operating expenses, particularly on the Palm Oil Plantation Fund Management Expenses which reached IDR 54.3 trillion.

PERBANDINGAN LAPORAN OPERASIONAL DJPB TAHUN 2021 DAN 2020

Comparison of Operating Report DG of Treasury FY 2021 and FY 2020

(Dalam Rupiah | IDR)

Uraian Description	31 Desember 2021 31 December 2021	31 Desember 2020 31 December 2020	Naik/Turun Increase/Decrease	Perubahan Change(%)
Kegiatan Operasional Operating Activities				
Pendapatan Revenue	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak Non-Tax State Revenue	72.916.068.314.437	21.641.990.463.029	51.274.077.851.408	29,68
Jumlah Pendapatan Total Revenue	72.916.068.314.437	21.641.990.463.029	51.274.077.851.408	29,68
Beban Expenses				
Jumlah Beban Total Expenses	56.486.207.959.027	34.556.029.316.752	21.930.178.642.275	61,18
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Surplus/Deficit from Operational Activities	16.429.860.355.410	-12.914.038.853.723	29.343.899.209.133	-78,60
Kegiatan Non-operasional Non-operational Activities				
Surplus/Defisit Kegiatan Non-operasional Surplus/Deficit from Non-operational Activities	8.016.334.554	22.170.660.448	-14.154.325.894	276,57
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Surplus/Deficit Before Extraordinary Items	16.437.876.689.964	-12.891.868.193.275	29.329.744.883.239	-78,43
Pos Luar Biasa Extraordinary Items	-	-	-	-
Surplus/Defisit Laporan Operasional Surplus/Deficit of Operating Report	16.437.876.689.964	-12.891.868.193.275	29.329.744.883.239	-78,43



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Statement of Changes in Equity

Ekuitas TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp15,6 triliun atau 69,51% dibandingkan TA 2020, terutama disebabkan karena surplus Laporan Operasional.

Equity in FY 2021 increased by IDR 15.6 trillion or 69.51% compared to FY 2020, mainly due to a surplus in the Operating Report.

PERBANDINGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DJPB TAHUN 2021 DAN 2020

Comparison of Statement of Changes in Equity DG of Treasury FY 2021 and FY 2020

(Dalam Rupiah | IDR)

Uraian Description	31 Desember 2021 31 December 2021	31 Desember 2020 31 December 2020	Naik/Turun Increase/Decrease	Perubahan Change(%)
Ekuitas Awal Starting Equity	22.580.761.526.507	30.449.639.863.135	-7.868.878.336.628	-25,84%
Surplus/Defisit LO Operating Report Surplus/Deficit	16.437.876.689.964	-12.891.868.193.275	29.791.212.073.270	-43,27%
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Cumulative Impact of Accounting Policy Changes/Fundamental Errors	-	-	-	-
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Corrections that Increase/Decrease Equity	298.059.042.543	988.149.692.830	-932.430.136.776	-94,36%
Penyesuaian Nilai Aset Adjustments In Asset Value	-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan Corrections In Value Of Inventories	-	-	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi Corrections Against Reclassifications	-	-48.421.277	48.421.277	-100,00%
Selisih Revaluasi Aset Tetap Difference In Fixed Asset Revaluation	-	6.178.000	6.178.000	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non-revaluasi Corrections In Non-Revaluation Of Fixed Assets	55.889.280.288	11.525.194.262	44.160.257.306	383,16%
Lain-lain Others	242.169.762.255	976.666.741.845	-976.632.637.359	-100,00%
Transaksi Antarentitas Transactions Between Entities	-1.258.752.135.731	4.034.840.163.817	-5.293.592.299.548	-76,22%
Ekuitas Akhir Ended Equity	38.057.945.123.283	22.580.761.526.507	15.477.183.596.776	68,54%

NERACA

Balance Sheet

Pada Neraca TA 2021 terdapat kenaikan sebesar 43,55% dibandingkan TA 2020. Kenaikan Aset signifikan pada Aset Lancar berupa Kas pada BLU, khususnya BLU BDPKKS sebesar Rp25,1 triliun dan Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada BLU PIP sebesar Rp5,4 triliun. Selain itu, Kewajiban Jangka Pendek sebagian besar merupakan utang pembayaran insentif biodiesel dan pembayaran pekerjaan jasa surveyor dalam rangka verifikasi permintaan pembayaran dana insentif biodiesel bulan Desember 2021 pada BLU BDPKKS. Sedangkan Ekuitas mengalami kenaikan sebesar selisih kenaikan nilai aset dan kenaikan nilai kewajiban.

In the Balance Sheet of FY 2021, there has been an increase of 43.55% compared to FY 2020. A significant increase in Current Assets was seen Cash at BLU, especially BDPKKS that amounted to IDR 25.1 trillion, along with Non-Permanent Long-Term Investment at PIP amounting to IDR 5.4 trillion. In addition, the Short-Term Liabilities are mostly debts for payment of biodiesel incentives and payments for surveyor services in the context of verifying requests for payment of biodiesel incentive funds in December 2021 at BDPKKS. Meanwhile, Equity increased by the difference between the increase in the value of assets and the increase in the value of liabilities.

PERBANDINGAN NERACA DJPB TAHUN 2021 DAN 2020

Comparison of Balance Sheet DG of Treasury FY 2021 and FY 2020

(Dalam Rupiah | IDR)

Uraian Description	31 Desember 2021 31 December 2021	31 Desember 2020 31 December 2020	Naik/Turun Increase/Decrease	Perubahan Change(%)
Aset Assets				
Aset Lancar Current Assets	30.211.626.295.744	14.809.607.211.296	17.089.701.549.965	115,40%
Investasi Jangka Panjang Long-Term Investments	6.751.023.287.558	5.883.528.125.110	1.094.336.563.027	18,60%
Piutang Jangka Panjang Long-Term Receivables	40.795.000	52.735.000	40.794.204	77,36%
Aset Tetap Fixed Assets	11.271.664.780.302	11.263.420.938.023	11.799.075.707	0,10%
Aset Lainnya Other Assets	5.446.708.402.270	4.196.173.308.126	-1.065.407.187.579	-25,39%
Jumlah Aset Total Assets	53.681.063.560.874	36.152.782.317.555	17.130.470.795.324	47,38%
Kewajiban Assets				
Kewajiban Jangka Pendek Current Liabilities	3.608.535.738.591	3.557.438.092.048	51.097.646.543	1,44%
Kewajiban Jangka Panjang Non-Current Liabilities	12.014.582.699.000	10.014.582.699.000	-	0,00%
Jumlah Kewajiban Total Liabilities	15.623.118.437.591,00	13.572.020.791.048	51.097.646.543	0,38%
Ekuitas Equity				
Ekuitas Equity	38.057.945.123.283	22.580.761.526.507	Rp15.477.183.596.776	68,54%
Jumlah Ekuitas Total Equity	38.057.945.123.283	22.580.761.526.507	15.477.183.596.776	68,54%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	53.681.063.560.874	36.152.782.317.555	15.528.281.243.319	42,95%



Saung Angklung Udjo, Bandung
Fotografer: Ivan Setiawan, Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat

Amanah bermakna menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan tepat sasaran, dengan berorientasi pada hasil terbaik. Program strategis dilakukan dengan mengawal pelaksanaan APBN tepat sasaran, tepat waktu, dan tanpa biaya, serta menjunjung tinggi nilai integritas, dan perilaku budaya anti korupsi.

Trustworthy means upholding the trust given and being able to carry out tasks with full responsibility, on time, and on target, with the best result oriented. The strategic program is carried out by overseeing the implementation of the APBN on target, on time, and at no cost, as well as upholding the value of integrity and anti-corruption cultural behavior.



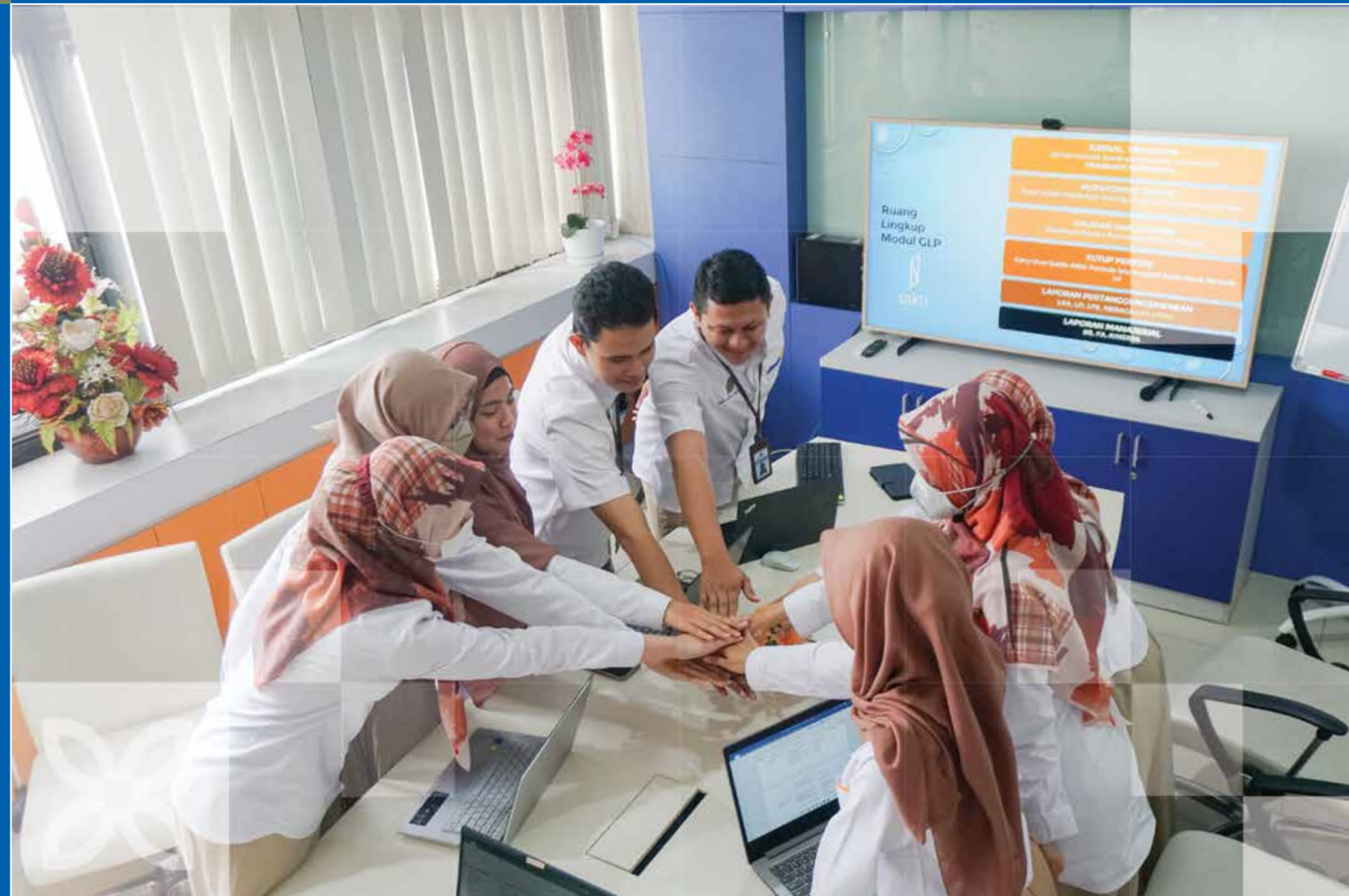
02

Profil Organisasi

Organizational Profile

Untuk mengawal pencairan APBN agar tepat sasaran ke seluruh tanah air, diperlukan sinergi dan koordinasi yang efektif pada semua lini. Dari berbagai penjurusan nusantara, sebaran kantor DJPb siap mendukung peran sebagai Regional Chief Economist yang andal.

To ensure that State Budget disbursements are on target to all parts of the country, effective synergy and coordination is needed on all fronts. Located in all parts of the archipelago, DG Treasury offices are ready to support the organization's role of a reliable Regional Chief Economist.





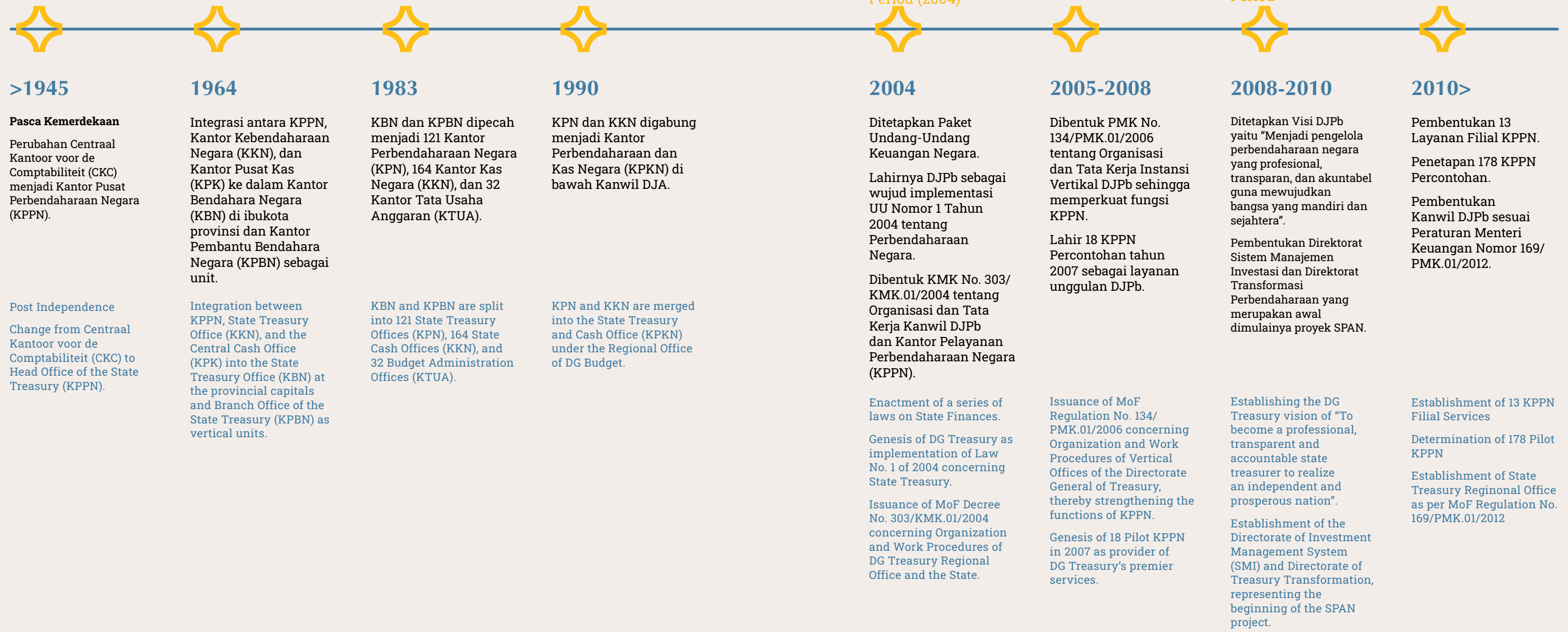
Sejarah Perbendaharaan History of the Treasury

DJPb sebagai unit eselon I Kementerian Keuangan yang berperan mengawal pencairan APBN terus berinovasi dari masa ke masa, menyesuaikan dinamika dan perkembangan teknologi, sehingga kualitas penyaluran APBN tetap terjaga optimal.

As an echelon I unit of the Ministry of Finance, DG Treasury has the role of overseeing State Budget (APBN) disbursements and continues to innovate from time to time by adjusting to various dynamics and technological developments, and ensuring that State Budget disbursements remain of the highest order.

Periode Prareformasi Keuangan dan Perbendaharaan (sebelum 2004)

Finance and Treasury Pre-Reform Period (before 2004)





Periode Transformasi Kelembagaan

Institutional Transformation Period





Visi and Misi Vision and Mission

Visi DJPb Tahun 2020-2024

Vision of DG Treasury's vision for 2020-2024

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia untuk mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan: "Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan"

To be a world-class state treasury manager to support the vision and mission of the Ministry of Finance: "A State Finance Manager to Realize a Productive, Competitive, Inclusive, and Equitable Indonesian Economy"

Misi Mission

DJPb mendukung misi Kementerian Keuangan nomor 3 (Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif) dan nomor 4 (Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) melalui:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang pruden, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

DG Treasury supports the Ministry of Finance Mission number 3 (Ensuring fair, effective, efficient, and productive state spending) and number 4 (Managing the central government balance sheet innovatively with minimum risk) through:

1. Realizing state treasury management that is prudent, efficient, and optimal
2. Providing support to State Budget execution that is efficient, effective, and accountable
3. Realizing government accounting and financial reporting that is accountable, transparent, reliable, and timely
4. Realizing government investment governance that is modern, inclusive, and sustainable
5. Realizing management of public service agency financial services that is innovative and modern
6. Realizing management of resources, business processes, and treasury information technology systems that is modern, effective, and adaptive





Nilai Handal Values Handal

Dalam rangka menguatkan image branding serta visualisasi visi dan misi DJPb yang menjadi bagian dari semangat, identitas, serta attitude dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perbendaharaan, melalui KEP-165/PB/2021 ditetapkan jargon DJPb HANDAL yang terdiri dari nilai-nilai berikut:

- Harmonis** Memiliki komunikasi yang baik, rasa saling percaya, dan sikap menghargai perbedaan, untuk bersama-sama menjalankan tugas demi tercapainya visi dan misi organisasi.
- Amanah** Menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan tepat sasaran, dengan berorientasi pada hasil terbaik.
- Digital** Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan proses bisnis untuk penyempurnaan layanan perbendaharaan yang unggul dan berkualitas.
- Akuntabel** Memastikan seluruh pekerjaan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan yang berlaku.
- Loyal** Memiliki tekad dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi, serta sanggup mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

With the objective of strengthening the brand image and give a visual identity to DG Treasury's vision and mission that are part of the spirit, identity, and attitude in performing the duties and functions of the treasury, the jargon of DG Treasury HANDAL (an acronym based on the Indonesian words Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel and Loyal) has been formalized through KEP-165/PB/2021. This jargon comprises the following values:

- Harmonious** To develop good communications, mutual trust, respect for differences, and to jointly carry out tasks to achieve the organization's vision and mission.
- Trustworthy** To uphold the trust placed in us and being able to perform the tasks with full responsibility, timeliness, on target, and oriented towards the best outcomes.
- Digital** To optimize the use of information technology in business processes towards realizing improvements in superior and high-quality treasury services.
- Accountable** To ensure that all work is carried out with prudence and can be accounted for in accordance with applicable principles and regulations.
- Loyal** To be highly determined and dedicated to the organization, and to be able to apply it in the performance of day-to-day tasks.





Tugas dan Fungsi Duties and Function

TUGAS Duties

DJPb mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

DG Treasury has the task of formulating and implementing policies and technical standards in the field of state treasury.

FUNGSI Functions

Dalam menyempurnakan pelaksanaan tugas, DJPb menyelenggarakan fungsi:

In conducting its duties and responsibilities, DG Treasury performs the following functions:

1. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara;
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

1. formulate policies in the field of state treasury;
2. implement policies in the field of state treasury;
3. draw up norms, standards, procedures and criteria in the field of state treasury;
4. provide technical guidance and evaluation in the field of state treasury;
5. conduct administration of the Directorate General of Treasury.



Nilai - Nilai Kementerian Keuangan Ministry of Finance Values

INTEGRITAS Integrity

Bersikap Jujur, tulus dan dapat dipercaya, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

Think, speak, behave, and act properly and strongly hold code of conduct and moral principles.

PROFESIONALISME Professionalism

Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati, menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

Work thoroughly and accurately pursuant to the best competence with full responsibility and high commitment.

SINERGI Sinergy

Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan, bersikap proaktif dan cepat tanggap.

Service-oriented to the satisfaction of stakeholders, to be proactive and responsive.

PELAYANAN Service

Melakukan perbaikan terus menerus, mengembangkan inovasi kreativitas.

Provide satisfactory services to stakeholders, which is conducted in a wholehearted, transparent, rapid, accurate, and safe way

KESEMPURNAAN Excellence

Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, bekerja dengan hati.

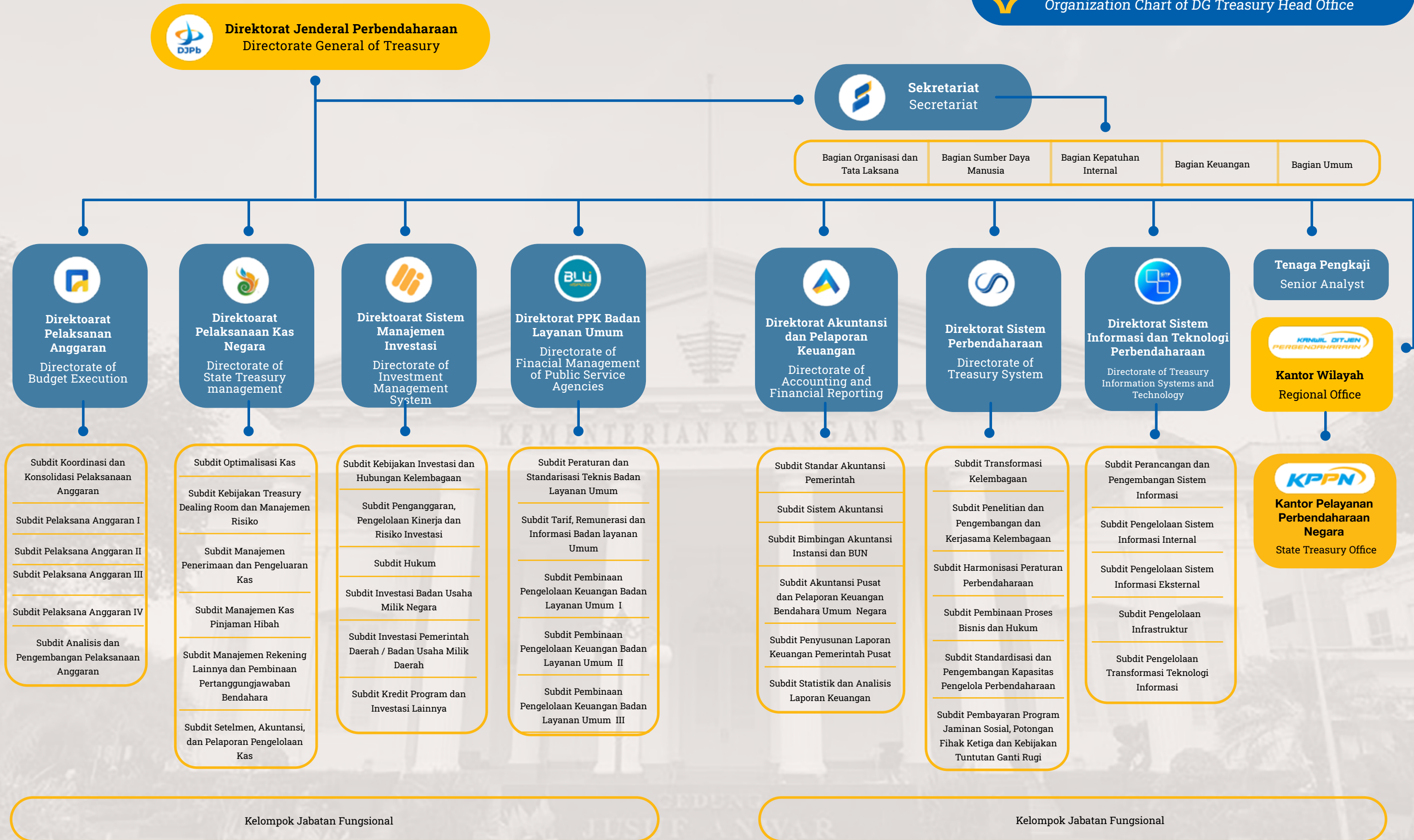
Continually conduct improvements in every field to become and provide the best.



Tata Nilai dan Perilaku Utama Code of Conduct

Integritas Integrity	Profesionalisme Professionalism	Sinergi Sinergy	Pelayanan Service	Kesempurnaan Excellence
Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya Being honest, sincere and trustworthy	Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas Possessing skills and knowledge	Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati Thoughtful, trusty and respect each other	Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan Serving based on stakeholder satisfaction	Berwawasan ke depan dan adaptif Insightful and adaptive
Bertindak transparan dan konsisten Act transparently and consistently	Memiliki kepercayaan diri yang tinggi Self-confidence	Berkomunikasi dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan Communicative and respect differences	Menghindari arogansi kekuasaan Avoiding the arrogance of power	Melakukan perbaikan terus menerus Continuous improvement
Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela Retaining dignity and doing based on moral principles	Bekerja efisien dan efektif Work efficiently and effectively	Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik Find and implement the best solution	Bersikap ramah dan santun Being friendly and polite	Mengembangkan inovasi dan kreatifitas Develop innovation and creativity
Bertanggung jawab atas hasil kerja Responsible for work	Bekerja cerdas, cepat, cermat dan tuntas Work smart, fast, carefully and thoroughly	Berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambah Result oriented that provides added value	Bersikap proaktif dan cepat tanggap Being proactive and responsive	Peduli lingkungan Caring for the environment
Bersikap obyektif Being objective	Bekerja dengan hati Work with heart			

Bagan Organisasi Kantor Pusat DJPb
Organization Chart of DG Treasury Head Office



Pejabat Kantor Pusat

Board of Director

Depan, dari kanan ke kiri:

Fahma Sari Fatma
Hadiyanto
Didyk Choiroel

Belakang, dari kanan ke kiri:

Syafriadi
Saiful Islam
Agung Yulianta
Mei Ling
Noor Faisal Achmad
Ludiro
Tri Budhianto





Profil Pejabat Kantor Pusat DJPb Leader Profile of DG Treasury Head Offices

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

DR. Hadiyanto, S.H, LL.M.

Hadiyanto lahir di Ciamis tahun 1962. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1986. Kemudian pada tahun 1993 Beliau meraih gelar Master of Law dari Harvard University Amerika Serikat. Setelah itu pada tahun 2012 Beliau meraih gelar Doktor Studi Ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung.

Director General Of Treasury

Hadiyanto was born in Ciamis in 1962. He earned a Bachelor of Law degree in 1986 from Padjadjaran University, Bandung. Subsequently, in 1993 he earned a Master of Law degree from Harvard University, United States. Following this in 2012 he earned a Doctorate in Legal Studies from Padjadjaran University, Bandung.

Hadiyanto memulai karir di Kementerian Keuangan pada 1 Maret 1987 dan pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada 2005. Kemudian sejak 2006, Beliau memimpin Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pada tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2021 Beliau menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Selanjutnya, pada tanggal 12 Maret 2021, Beliau dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan hingga saat ini.

Sebagai Dirjen Perbendaharaan, Beliau memimpin 7006 pegawai terdiri dari 36 Pejabat Eselon II, 370 Pejabat Eselon III, 1537 Pejabat Eselon IV, 388 Pejabat Fungsional, dan 4674 Pelaksana pada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, 7 Direktorat, Tenaga Pengkaji, 34 Kanwil DJPb, dan 182 KPPN.

Hadiyanto began his career at the Ministry of Finance on March 1, 1987 and served as Head of the Legal Bureau of the Ministry's Secretariat General in 2005. In 2006, he led the Directorate General of State Assets Management. From 2015 to early 2021, he served as Secretary General of the Ministry of Finance. Subsequently, on March 12, 2021, he was inaugurated by the Minister of Finance as Director General of Treasury until the present.

As Director General of Treasury, he leads 7,006 employees consisting of 36 echelon II officials, 370 echelon III officials, 1,537 echelon IV officials, 388 functional officers, and 4,674 implementers at the Secretariat of the Directorate General of Treasury, 7 directorates, treasury analysts, 34 Regional Treasury Offices, and 182 KPPN.



SEKRETARIS DITJEN PERBENDAHARAAN

Didyk Choiroel, S.Sos., M.M., M.Si



Didyk Choiroel lahir di Malang, 16 April 1971. Beliau meraih gelar Diploma III Keuangan Spesialisasi Anggaran dari STAN Jakarta tahun 1993 dan gelar Sarjana Ilmu Administrasi tahun 1998 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram. Gelar Magister Manajemen diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta tahun 2001, sedangkan Magister Sains dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 2005.

Secretary Of The Directorate General Of Treasury

Didyk Choiroel was born in Malang, April 16, 1971. He earned a Diploma III Finance in 1993 with Budgeting Specialization from STAN Jakarta, and a Bachelor of Administration Science in 1998 from Mataram College of Administration. He obtained a Master of Management degree in 2001 from the Jakarta College of Economics, followed by a Master of Science in 2005 from Gadjah Mada University Yogyakarta.

Didyk Choiroel menjabat sebagai Kepala KPPN Blitar pada 2008 dan pada 2010 sebagai Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana. Pada tahun 2014 Beliau menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, kemudian pada 2016 sebagai Direktur Pelaksanaan Anggaran dan pada 2018 sebagai Direktur Pengelolaan Kas Negara. Pada 2021 hingga saat ini, Beliau menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Beliau memimpin 358 pegawai terdiri dari 5 Pejabat Eselon III, 19 Pejabat Eselon IV, 12 Pejabat Fungsional, dan 321 Pelaksana pada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

In 2008, he served as Head of KPPN Blitar and in 2010 as Head of Organization and Administration. In 2014, he served as Head of Regional Treasury Office of Riau Archipelago Province, then in 2016 as Director of Budget Execution. In 2018, he was Director of State Treasury Management. From 2021 onwards, he has served as Secretary of the Directorate General of Treasury.

As Secretary of the Directorate General of Treasury, he leads 358 employees consisting of 5 echelon III officials, 19 echelon IV officials, 12 functional officers, and 321 implementers at the Secretariat of the Directorate General of Treasury.

DIREKTUR PELAKSANAAN ANGGARAN

Tri Budhianto, S.p.,M.t.



Tri Budhianto lahir di Solo tahun 1970, Beliau meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Brawijaya Malang pada 1994 dan menamatkan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung tahun 2006.

Director Of Budget Execution

Tri Budhianto earned a bachelor's degree in agriculture in 1994 from Brawijaya University Malang and completed a Master of Urban and Regional Planning degree in 2006 from the Bandung Institute of Technology.

Tri Budhianto bekerja sebagai CPNS Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Maret 1997. Pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara pada 2016, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau pada 2017, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali pada 2019. Beliau kemudian dilantik menjadi Direktur Pelaksanaan Anggaran sejak 2021 hingga saat ini.

Sebagai Direktur Pelaksanaan Anggaran, Beliau memimpin 97 pegawai yang terdiri dari 6 Pejabat Eselon III, 25 Pejabat Eselon IV, 4 Pejabat Fungsional, dan 61 Pelaksana pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Tri Budhianto began his career as a civil servant at the Ministry of Finance on March 1, 1997. In 2016, he served as Head of the Regional Treasury Office of North Maluku Province, in 2017 as Head of the Regional Treasury Office of Riau Province, and in 2019 as Head of the Regional Treasury Office of Bali Province. In 2021, he was appointed as Director of Budget Execution.

As Director of Budget Execution, he leads 97 employees consisting of 6 echelon III officials, 25 echelon IV officials, 4 functional officers, and 61 implementers at the Directorate of Budget Execution.

DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA

Noor Faisal Achmad, S.E., Ak., M.Sc., Ph.D



Noor Faisal Achmad lahir di Sukabumi. Beliau meraih gelar Diploma III Keuangan dari STAN Jakarta, kemudian memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Sumatera Utara, gelar Master dari University of Birmingham, dan gelar Doktor dari Flinders University.

Director Of State Treasury Management

Noor Faisal Achmad earned a Diploma III in Finance from STAN Jakarta, then obtained a bachelor's degree from the University of North Sumatra, a master's degree from the University of Birmingham, and a Doctorate from Flinders University.

Noor Faisal Achmad memulai karier sebagai pelaksana pada Kantor Akuntansi Regional Medan, Badan Akuntansi Keuangan Negara pada 1994. Kemudian Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subdit Optimalisasi Kas, Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada 2016. Pada 2019 Beliau dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku dan pada 30 April 2021 dilantik sebagai Direktur Pengelolaan Kas Negara hingga saat ini.

Sebagai Direktur Pengelolaan Kas Negara, Beliau memimpin 100 pegawai terdiri dari 6 Pejabat Eselon III, 23 Pejabat Eselon IV, 6 Pejabat Fungsional, dan 64 Pelaksana pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

In 1994, Noor Faisal Achmad started his career as an implementer at the Medan Regional Accounting Office, State Financial Accounting Agency. In 2016 he served as Head of Cash Optimization Sub-Directorate, Directorate of State Treasury Management. In 2019 he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of Maluku Province, and on April 30, 2021, he was appointed as Director of State Treasury Management.

As Director of State Treasury Management, he leads 100 employees consisting of 6 echelon III officials, 23 echelon IV officials, 6 functional officers, and 64 implementers at the Directorate of State Treasury Management.

DIREKTUR SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

Syafriadi, S.E., M.Ec., Ph.D.



Syafriadi lahir di Pontianak tahun 1972. Beliau meraih gelar Sarjana tahun 1996 dari STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta. Dari Saga University, Jepang, Beliau meraih gelar Master pada 2007 dan pada 2010 meraih gelar Doktor.

Director Of Investment Management System

Syafriadi was born in Pontianak in 1972. He earned a bachelor's degree in 1996 from STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta. Further, he obtained a master's degree in 2007 and a Doctorate in 2010 from Saga University, Japan.

Syafriadi pernah menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan tahun 2018 kemudian pada 2020 sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh dan pada 2022 hingga saat ini sebagai Direktur Sistem Manajemen Investasi.

Sebagai Direktur Sistem Manajemen Investasi, Beliau memimpin 94 pegawai terdiri dari 6 Pejabat Eselon III, 25 Pejabat Eselon IV, 3 Pejabat Fungsional, dan 59 Pelaksana pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

Syafriadi served as Treasury Analyst in 2018, and in 2020 was Head of Regional Treasury Office of Aceh Province. From 2022 onwards he has been the Director of Investment Management System.

As Director of Investment Management System, he leads 94 employees consisting of 6 echelon III officials, 25 echelon IV officials, 3 functional officers, and 59 implementers at the Directorate of Investment Management System.

DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Agung Yulianta, S.E.,M.Si. M.M., M.Si



Agung Yulianta lahir di Klaten tahun 1970. Beliau meraih gelar Diploma III Keuangan Spesialisasi Anggaran dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada 1992. Kemudian dilanjutkan meraih Sarjana Ekonomi tahun 1998 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan gelar Magister Administrasi Pembangunan dari Universitas Hasanuddin pada 2005.

Director Of Financial Management Of Public Service Agencies

Agung Yulianta was born in Klaten in 1970. He obtained a Diploma III in Finance with specialization in Budgeting in 1992 from the State College of Accountancy. Continuing his education, he earned a Bachelor of Economics in 1998 from Muhammadiyah University Yogyakarta and a Master of Development Administration in 2005 from Hasanuddin University.

Agung Yulianta pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua pada 2018 dan pada 2019 sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan. Pada 2021 hingga saat ini Beliau menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Sebagai Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Beliau memimpin 85 pegawai terdiri dari 5 Pejabat Eselon III, 16 Pejabat Eselon IV, 2 Pejabat Fungsional, dan 61 Pelaksana pada Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

In 2018, Agung Yulianta served as Head of Regional Treasury Office of Papua Province, and in 2019 as Director of Treasury System. From 2021 onwards he has served as Director of Financial Management of Public Service Agencies.

As Director of Financial Management of Public Service Agencies, he leads 85 employees consisting of 5 echelon III officials, 16 echelon IV officials, 2 functional officers, and 61 implementers at the Directorate of Financial Management of Public Service Agencies.

DIREKTUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Fahma Sari Fatma, S.E. Ak. , M.S.E., CA.



Fahma Sari Fatma lahir di Padang tahun 1973. Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi pada 1997, gelar Ilmu Ekonomi pada 2006, dan memperoleh Register Negara Akuntan No. RNA 11004

Director Of Accounting And Financial Reporting

Fahma Sari Fatma was born in Padang in 1973. She earned a bachelor's degree in accounting in 1997, an economics degree in 2006, and became a Chartered Accountant under RNA No. 11004.

Fahma Sari Fatma memulai karier sebagai pelaksana pada Kantor Tata Usaha Anggaran Jambi, Direktorat Jenderal Anggaran pada 1998. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo pada 2018 dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung pada 2020. Beliau kemudian dilantik menjadi Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada 4 Oktober 2021.

Sebagai Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Beliau memimpin 127 pegawai terdiri dari 6 Pejabat Eselon III, 25 Pejabat Eselon IV, 2 Pejabat Fungsional, dan 93 Pelaksana pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

In 1998, Fahma Sari Fatma began her career as an implementer at the Jambi Budget Administration Office, Directorate General of Budget. In 2018, she served as Head of the Regional Treasury Office of Gorontalo Province, and in 2020 as Head of the Regional Treasury Office of Bangka Belitung Province. She was inaugurated as Director of Accounting and Financial Reporting on October 4, 2021.

As Director of Accounting and Financial Reporting, she leads 127 employees consisting of 6 echelon III officials, 25 echelon IV officials, 2 functional officers, and 93 implementers at the Directorate of Accounting and Financial Reporting.

DIREKTUR SISTEM PERBENDAHARAAN

Ludiro, S.E.,M.M.



Ludiro lahir di Magetan tahun 1968. Beliau meraih gelar Diploma III dan Diploma IV Keuangan Spesialisasi Anggaran dari BPLK Jakarta pada 1990 dan 1996. Kemudian dilanjutkan meraih Sarjana Ekonomi tahun 2002 dari Universitas Terbuka dan gelar Magister Manajemen dari STIE IPWI Jakarta pada 2009.

Director Of Treasury System

Ludiro was born in Magetan in 1968. He earned a Diploma III in 1990 and a Diploma IV in Finance in 1996 from BPLK Jakarta, with specialization in Budgeting. Subsequently, he obtained a Bachelor of Economics degree in 2002 from the Indonesia Open University and a Master of Management degree in 2009 from STIE IPWI Jakarta.

Ludiro pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah pada 2015, Kanwil DJPb Provinsi DIY pada 2016, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur pada 2018, Kanwil DJPb Provinsi Jakarta pada 2019, dan pada 2020 sebagai Direktur Sistem Manajemen Investasi. Pada 1 Januari 2022 Beliau dilantik menjadi Direktur Sistem Perbendaharaan hingga saat ini.

Sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan, Beliau memimpin 118 pegawai terdiri dari 6 Pejabat Eselon III, 22 Pejabat Eselon IV, dan 87 Pelaksana pada Direktorat Sistem Perbendaharaan.

In 2015, Ludiro served as Head of the Regional Treasury Office of Central Kalimantan Province, in 2016 as Head of Regional Treasury Office of DIY Province, in 2018 as Head of Regional Treasury Office of East Java Province, in 2019 as Head of Regional Treasury Office of Jakarta Province, and in 2020 as Director of Investment Management System. On January 1, 2022, he was appointed as Director of Treasury System.

As Director of Treasury System, he leads 118 employees consisting of 6 echelon III officials, 22 echelon IV officials, and 87 implementers at the Directorate of Treasury System.

DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN

Saiful Islam, S.E., M.B.A., Ph.D.



Syaiful Islam lahir di Sumber Pucung tahun 1968. Beliau menempuh pendidikan Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kosgoro, Jakarta pada Tahun 1999, memperoleh gelar Master of Business Administration, Naval Postgraduate School Tahun 2004, menempuh pendidikan di Public Administration, Yonsei University, Korsei Tahun 2015,

Director Of Treasury Information Systems And Technology

Syaiful Islam was born in Sumber Pucung in 1968. She obtained a bachelor's degree in 1999 at the Kosgoro School of Management, Jakarta, and earned a Master of Business Administration degree in 2004 at the Naval Postgraduate School in 2004. In 2015, he studied Public Administration at Yonsei University, South Korea.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan pada 2018, Syaiful Islam pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sulawesi Barat sejak Tahun 2017 sd Tahun 2018, sebagai Kepala Subdirektorat Penganggaran, Pengelolaan Kinerja dan Risiko Investasi Direktorat Sistem Manajemen Investasi 2015.

Sebagai Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Beliau memimpin 209 pegawai terdiri dari 5 Pejabat Eselon III, 20 Pejabat Eselon IV, 70 Fungsional dan 113 Pelaksana pada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

Prior to serving as Director of Treasury Information Systems and Technology, in 2018 Syaiful Islam was Head of the DG PBN Regional Office of West Sulawesi Province, and in 2015 was Head of Sub-Directorate of Budgeting, Performance Management and Investment Risk at the Directorate of Investment Management System.

As Director of Treasury Information Systems and Technology, he leads 209 employees consisting of 5 echelon III officials, 20 echelon IV officials, 70 functional officers and 113 implementers at the Directorate of Treasury Information Systems and Technology.

TENAGA PENGAJI BIDANG PERBENDAHARAAN

Mei Ling, S.E., Ak., M.B.A., Ph.D.,
CA, Cert. IPSAS

TENAGA
PENGAJI
- Bidang Perbendaharaan



Mei Ling lahir di Jakarta tahun 1979. Beliau meraih gelar Diploma III Akuntansi dari STAN tahun 1999 kemudian dilanjutkan gelar Sarjana dari Universitas Indonesia tahun 2002. Beliau melanjutkan studi di Waseda University Jepang dan meraih gelar Master pada 2005 dan Doktor pada 2010.

Senior Treasury Analyst

Mei Ling was born in Jakarta in 1979. She earned a Diploma III in Accounting in 1999 from STAN, then continued her education and received a bachelor's degree in 2002 from the University of Indonesia. She continued her studies at Waseda University Japan and earned a master's degree in 2005 and a Doctorate in 2010.

Mei Ling memulai karier di Badan Akuntansi Keuangan Negara pada 2000. Pada 2016 Beliau menjadi Kepala Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kemudian Beliau dilantik menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan pada 30 Desember 2021 hingga sekarang.

She started her career at the State Financial Accounting Agency in 2000. In 2016, she became Head of the Sub-Directorate of Statistics and Financial Statement Analysis of the Directorate of Accounting and Financial Reporting. On December 30, 2021, she was appointed as the Senior Treasury Analyst.





Profil Kantor Wilayah

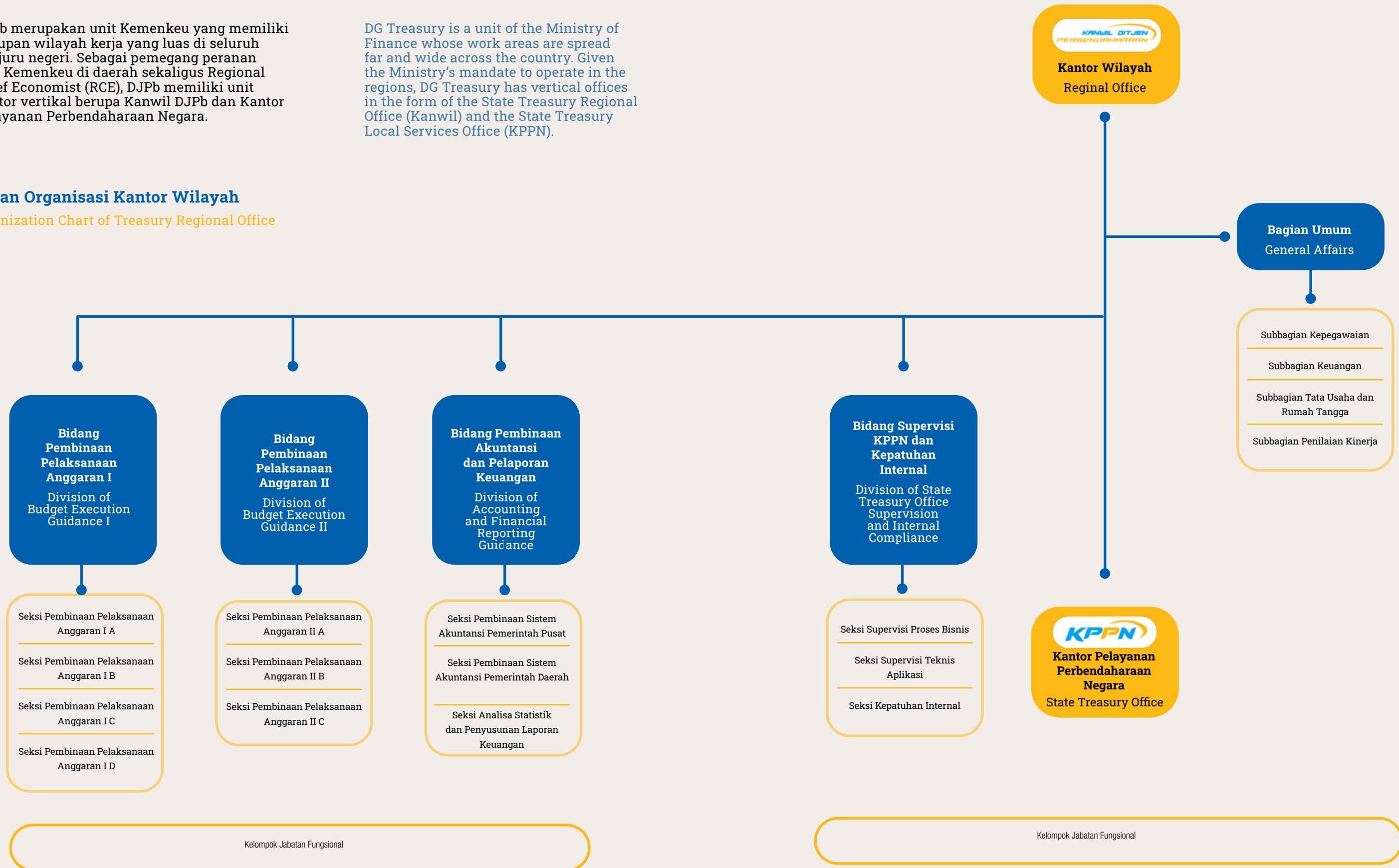
Profile of State Treasury Regional Offices

DJPb merupakan unit Kemenkeu yang memiliki cakupan wilayah kerja yang luas di seluruh penjuru negeri. Sebagai pemegang peranan dari Kemenkeu di daerah sekaligus Regional Chief Economist (RCE), DJPb memiliki unit kantor vertikal berupa Kanwil DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

DG Treasury is a unit of the Ministry of Finance whose work areas are spread far and wide across the country. Given the Ministry's mandate to operate in the regions, DG Treasury has vertical offices in the form of the State Treasury Regional Office (Kanwil) and the State Treasury Local Services Office (KPPN).

Bagan Organisasi Kantor Wilayah

Organization Chart of Treasury Regional Office





Profil Pejabat Kantor Wilayah DJPb

Leader Profile of DG Treasury Regional Offices



Kanwil DJPb Provinsi Aceh

Meliputi 7 KPPN yaitu Banda Aceh, Langsa, Meulaboh, Tapaktuan, Lhokseumawe, Kutacane, dan Takengon, dengan jumlah SDM sebanyak 189 pegawai terdiri dari 11 Pejabat Eselon III, 47 Pejabat Eselon IV, 11 Fungsional, dan 119 Pelaksana.

The Regional Office oversees 7 KPPNs, namely Banda Aceh, Langsa, Meulaboh, Tapaktuan, Lhokseumawe, Kutacane, and Takengon. Total human resources include 189 employees, consisting of 11 echelon III officials, 47 echelon IV officials, 11 functional officers and 119 implementers.

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara

Meliputi 11 KPPN yaitu Medan I, Medan II, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Padang Sidempuan, Tanjung Balai, Gunung Sitoli, Rantau Prapat, Sibolga, Sidikalang, dan Balige, dengan jumlah SDM sebanyak 309 pegawai terdiri dari 15 Pejabat Eselon III, 65 Pejabat Eselon IV, 16 Fungsional, 213 Pelaksana

The Regional Office oversees 11 KPPNs namely Medan I, Medan II, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Padang Sidempuan, Tanjung Balai, Gunung Sitoli, Rantau Prapat, Sibolga, Sidikalang, and Balige. Total human resources include 309 employees, consisting of 15 echelon III officials, 65 echelon IV officials, 16 functional officers and 213 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat

Heru Pudyo Nugroho, S.E., M.B.A.

Heru Pudyo Nugroho lahir di Pacitan tahun 1972. Beliau mendapat gelar S1 Sarjana Ekonomi tahun 1997 dari Universitas Jember dan Magister Manajemen Keuangan tahun 2009 dari Universitas Gajah Muda. Beliau memulai karier tahun 1998 pada Kantor Tata Usaha Anggaran Palangkaraya. Di tahun 2014 beliau menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, pada 2018 sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Yogyakarta dan pada 2020 sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Beliau memimpin wilayah kerja 6 KPPN yaitu Padang, Bukit Tinggi, Solok, Lubuk Sikaping, Sijunjung, dan Painan dengan jumlah SDM 171 pegawai terdiri dari 11 Pejabat Eselon III, 42 Pejabat Eselon IV, 5 Fungsional, dan 112 Pelaksana.

Heru Pudyo Nugroho was born in Pacitan in 1972. He earned a bachelor's degree in Economics in 1997 from the University of Jember and a master's in financial management in 2009 from the University of Gajah Muda. He started his career in 1998 at the Palangkaraya Budget Administration Office. In 2014 he served as Head of Regional Treasury Office of Riau Islands Province, and in 2018 as Head of Regional Treasury Office of Yogyakarta Province. In 2020, he was Head of Regional Treasury Office for West Sumatra Province. As the Head of Regional Treasury Office of West Sumatra Province, he oversees the work of 6 KPPN, namely Padang, Bukit Tinggi, Solok, Lubuk Sikaping, Sijunjung, and Painan. Total human resources supervised include 171 employees, consisting of 11 echelon III officials, 42 echelon IV officials, 5 functional officers, and 112 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau

Ismed Saputra, S.E., M.M.

Ismed Saputra lahir di Pekanbaru tahun 1971. Beliau meraih gelar S1 Sarjana Manajemen tahun 1995 dari Universitas Bung Hatta dan Magister Manajemen Keuangan tahun 2001 dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora. Pada 2016 Ismed Saputra menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. Kemudian pada 2018 sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dan pada 5 Februari 2021 dilantik sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau hingga saat ini. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Beliau memimpin wilayah kerja 3 KPPN yaitu Pekanbaru, Dumai, dan Rengat dengan SDM sejumlah 110 pegawai terdiri dari 7 Pejabat Eselon III, 31 Pejabat Eselon IV, 3 Fungsional, 68 Pelaksana.

Ismed Saputra was born in Pekanbaru in 1971. He earned a bachelor's degree in Management in 1995 from Bung Hatta University and a Master of Financial Management in 2001 from the Labora Management College. In 2016, he served as Head of Regional Treasury Office of Gorontalo Province. In 2018, he was Head of Regional Treasury Office of Bengkulu Province and on February 5, 2021, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of Riau Province. As Head of Regional Treasury Office of Riau Province, he oversees the work of 3 KPPN, namely Pekanbaru, Dumai, and Rengat. Total human resources include 110 employees, consisting of 7 echelon III officials, 31 echelon IV officials, 3 functional officers, and 68 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau

Indra Soeparjanto, S.E., M.A.P.

Indra Soeparjanto lahir di Semarang tahun 1971. Beliau memperoleh gelar Diploma III Keuangan Spesialisasi Anggaran dari Badan Diklat Keuangan Jakarta pada 1993, kemudian melanjutkan meraih gelar S1 Sarjana Ekonomi Universitas Islam Jakarta pada 1999 dan gelar S2 Magister Administrasi Pembangunan dari Universitas Brawijaya pada 2005. Beliau memulai karier di Bagian Kepegawaian pada 1992. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada 2016. Pada 2021 hingga saat ini sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, Beliau memimpin wilayah kerja meliputi 2 KPPN yaitu Tanjung Pinang dan Batam dengan jumlah SDM 91 pegawai terdiri dari 7 Pejabat Eselon III, 27 Pejabat Eselon IV, 2 Fungsional, 54 Pelaksana.

Indra Soeparjanto was born in Semarang in 1971. He obtained a Diploma III Finance in 1993 with specialization in Budgeting from the Jakarta Financial Training Agency. He then received a bachelor's Degree in Economics from the Islamic University of Jakarta in 1999 and a master's degree in Development Administration from Brawijaya University in 2005. In 1992, Indra started his career in the Personnel Department. In 2016, he served as Head of the Sub-Directorate of Cash Receipts and Expenditure Management. In 2021 was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of Riau Islands Province. As the Head of Regional Treasury Office of Riau Islands Province, he oversees the work of 2 KPPN, namely Tanjung Pinang and Batam. Total human resources supervised include 91 employees, consisting of 7 echelon III officials, 27 echelon IV officials, 2 functional officers, and 54 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi

Supendi, S.E.

Supendi lahir di Kuningan tahun 1967. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi tahun 1995 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I tahun 1995. Pada 1987 Supendi memulai karier di Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Pada 2014 Supendi menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dan pada 2017 sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung. Beliau kemudian dilantik sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi pada 9 September 2019. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Beliau memimpin wilayah kerja meliputi 5 KPPN yaitu Jambi, Muara Bungo, Sungai Penuh, Kuala Tungkal, dan Bangko dengan SDM sejumlah 138 pegawai terdiri dari 9 Pejabat Eselon III, 37 Pejabat Eselon IV, 7 Fungsional, 84 Pelaksana.

Supendi was born in Kuningan in 1967. He earned a Bachelor of Economics degree in 1995 from the Y.A.I College of Economics. In 1987, Supendi began his career at the Inspectorate General of the Ministry of Finance. In 2014, Supendi served as Head of Regional Treasury Office of West Kalimantan Province and in 2017 as Head of Regional Treasury Office of Bangka Belitung Province. On September 9, 2019, he was sworn in as Head of Regional Treasury Office of Jambi Province. As Head of Regional Treasury Office of Jambi Province, he oversees the work of 5 KPPN, namely Jambi, Muara Bungo, Sungai Penuh, Kuala Tungkal, and Bangko. Total human resources include 138 employees, consisting of 9 echelon III officials, 37 echelon IV officials, 7 functional officers, and 84 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan

Lydia Kurniawati Christyana, M.M.

Lydia Kurniawati lahir di Mojokerto tahun 1968. Beliau memperoleh gelar Diploma IV Keuangan Spesialis Anggaran Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1996 kemudian menyelesaikan Pasca Sarjana Program Magister Manajemen Universitas Sebelas Maret tahun 2007. Beliau menjabat sebagai Kepala KPPN Madiun pada 2016. Pada 2018 Beliau menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada 30 April 2021 dilantik sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, Beliau memimpin wilayah kerja meliputi 5 KPPN yaitu Palembang, Baturaja, Lahat, Sekayu, Lubuk Linggau dengan SDM sejumlah 174 pegawai terdiri dari 8 Pejabat Eselon III, 39 Pejabat Eselon IV, 9 Fungsional, 117 Pelaksana.

Lydia Kurniawati was born in Mojokerto in 1968. He obtained her Diploma IV Finance in 1996, with specialization in Budgeting from the State College of Accountancy. She then received a Master of Management degree in 2007 from Sebelas Maret University. In 2016, She served as Head of KPPN Madiun and in 2018 was appointed as Head of Regional Treasury Office of East Nusa Tenggara Province. On April 30, 2021, she was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of South Sumatra Province. As Head of Regional Treasury Office of South Sumatra Province, she oversees the work of 5 KPPN, namely Palembang, Baturaja, Lahat, Sekayu, and Lubuk Linggau. Total human resources include 174 employees, consisting of 8 echelon III officials, 39 echelon IV officials, 9 functional officers, and 117 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Mohammad Dody Fachrudin, S.E., M.Si.

Mohammad Dody Fachrudin lahir di Pamekasan tahun 1971. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari STIE Perbanas Jakarta tahun 1998 dan gelar Magister dari Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2007. Beliau menjabat sebagai Auditor Madya di Inspektorat Jenderal tahun 2014, sebagai Inspektur pada 2019, dan sebagai Kanwil DJPb Provinsi Lampung tahun 2021. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Beliau memimpin wilayah kerja meliputi 4 KPPN yaitu Bandar Lampung, Metro, Kota Bumi, Liwa dengan SDM sejumlah 142 pegawai terdiri dari 7 Pejabat Eselon III, 34 Pejabat Eselon IV, 7 Fungsional, 93 Pelaksana.

Mohammad Dody Fachrudin was born in Pamekasan in 1971. He obtained his bachelor's degree in 1998 from STIE Perbanas Jakarta, and a master's degree in 2007 from Muhammadiyah University Jakarta. In 2014, he served as Associate Auditor at the Inspectorate General, in 2019 as an Inspector, and in 2021 as Head of Regional Treasury Office of Lampung Province. As Head of Regional Treasury Office of Lampung Province, he oversees the work of 4 KPPN, namely Bandar Lampung, Metro, Kota Bumi, and Liwa. Total human resources include 142 employees, consisting of 7 echelon III officials, 34 echelon IV officials, 7 functional officers, and 93 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu

Syarwan, S.E., M.M.

Syarwan lahir di Palembang tahun 1965. Beliau memperoleh gelar Diploma III Jurusan Administrasi Niaga pada Universitas Sriwijaya tahun 1986, gelar Sarjana Program Studi Manajemen pada Universitas Respati Indonesia pada 2003, dan gelar Magister Manajemen pada Universitas Sriwijaya pada 2005. Pada 2017 dilantik sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua dan pada 2018 sebagai Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pada 2021, Beliau dilantik menjadi Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu hingga saat ini. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, Beliau memimpin wilayah kerja meliputi 4 KPPN yaitu Bengkulu, Manna, Curup, Mukomuko dengan SDM sejumlah 118 pegawai terdiri dari 8 Pejabat Eselon III, 35 Pejabat Eselon IV, 5 Fungsional, 69 Pelaksana.

Syarwan was born in Palembang in 1965. He obtained a Diploma III Business Administration in 1986 from Sriwijaya University, a bachelor's degree in management in 2003 from Respati Indonesia University in 2003, and a Master of Management degree in 2005 from Sriwijaya University. In 2017, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of Papua Province, and in 2018 as Head of Regional Treasury Office of the West Nusa Tenggara Province. In 2021, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of Bengkulu Province. As Head of Regional Treasury Office of South Sumatra Province, he oversees the work of 4 KPPN, namely Bengkulu, Manna, Curup, and Mukomuko. Total human resources include 118 employees, consisting of 8 echelon III officials, 35 echelon IV officials, 5 functional officers, and 69 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung

Dr. Edih Mulyadi, S.E., M.Si

Edih Mulyadi lahir di Sukabumi tahun 1969. Beliau mendapat gelar Ahli Madya Penilai dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1992, Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka tahun 1998, Magister Sains dari Universitas Gadjah Mada tahun 2001, dan Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Diponegoro tahun 2015. Beliau menjabat sebagai Kepala KPKNL Tasikmalaya Jawa Barat tahun 2015, Kepala Kanwil DJKN Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019, dan pada 2021 hingga saat ini sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, Beliau memimpin wilayah kerja 2 KPPN yaitu Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan dengan SDM sejumlah 82 pegawai terdiri dari 7 Pejabat Eselon III, 26 Pejabat Eselon IV, 9 Fungsional, 39 Pelaksana.

Edih Mulyadi was born in Sukabumi in 1969. He received the title of Associate Assessor in 1992 from the State College of Accountancy (STAN). He then obtained a Bachelor of Economics degree in 1998 from the Indonesia Open University, Master of Science degree in 2001 from Gadjah Mada University, and Doctor of Economics in 2015 from Diponegoro University. In 2015, he was appointed as Head of KPKNL Tasikmalaya West Java, in 2017 as Head of DGSAM Regional Office of West Kalimantan Province, and in 2019 as Head of Regional Treasury Office of West Kalimantan Province. In 2021, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of Bangka Belitung Province. As the Head of the Regional Treasury Office of Bangka Belitung Province, he oversees the work of 2 KPPN, namely Pangkal Pinang and Tanjung Pandan. Total human resources include 82 employees, consisting of 7 echelon III officials, 26 echelon IV officials, 9 functional officers, and 39 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten

Drs. Ade Rohman, MSi

Ade Rohman lahir di Garut tahun 1962. Beliau mendapat gelar Doctorandus dari Sekolah Tinggi Ilmu Sospol YPI Garut tahun 1993 dan gelar Master Sains dari Universitas Garut tahun 2003. Ade Rohman memulai karier tahun 1982 pada Direktorat Jenderal Anggaran. Beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten tahun 2020. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten, Beliau memimpin wilayah kerja 3 KPPN yaitu Serang, Tangerang, Rangkas Bitung dengan SDM sejumlah 113 pegawai terdiri dari 7 Pejabat Eselon III, 30 Pejabat eselon IV, 6 Fungsional, 69 Pelaksana.

Ade Rohman was born in Garut in 1962. He obtained the title of Doctorandus in 1993 from YPI Garut College of Political Sciences, and a Master of Science degree in 2003 from Garut University. In 1982, he started his career at the Directorate General of Budget. In 2014, he served as Head of Budget Execution Development Division II of the Regional Treasury Office of East Kalimantan Province, in 2015 as Head of Regional Treasury Office of East Kalimantan Province, in 2017 as Head of Regional Treasury Office of West Sumatra Province. In 2020, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of Banten Province. As Head of Regional Treasury Office of Banten Province, he oversees the work of 3 KPPN, namely Serang, Tangerang, and Rangkas Bitung. Total human resources include 113 employees, consisting of 7 echelon III officials, 30 echelon IV officials, 6 functional officers, and 69 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta

Alfiker Siringoringo, S.E., M.Ec.

Alfiker Siringoringo lahir di Parapat tahun 1963. Beliau mendapat gelar Sarjana Fakultas Ekonomi dari Universitas Kristen Indonesia Jakarta tahun 1987 dan gelar Master dari North Carolina State University tahun 1993. Beliau memulai karier tahun 1995 di Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran Lampung. Beliau menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011. Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 hingga saat ini. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Beliau memimpin wilayah kerja 10 KPPN yaitu Jakarta I, Jakarta II, Jakarta III, Jakarta IV, Jakarta V, Jakarta VI, Jakarta VII, KPPN Khusus Penerimaan, KPPN Khusus Investasi, serta KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dengan SDM sejumlah 474 pegawai terdiri dari 15 Pejabat Eselon III, 67 Pejabat Eselon IV, 20 Fungsional, 371 Pelaksana.

Alfiker Siringoringo was born in Parapat in 1963. He received a bachelor's degree in economics from the Indonesian Christian University Jakarta in 1987, and a master's degree from North Carolina State University in 1993. In 1995, he began his career at the Regional Office of the Directorate General of Budget in Lampung. In 2011, he served as Head of Regional Treasury Office of East Nusa Tenggara Province. In 2020, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of Jakarta SCR Province. As Head of the Regional Treasury Office of Jakarta SCR Province, he oversees the work of 10 KPPN, namely Jakarta I, Jakarta II, Jakarta III, Jakarta IV, Jakarta V, Jakarta VI, Jakarta VII, Special KPPN for Revenue, Special KPPN for Investment, and Special KPPN for Loans and Grants. Total human resources include 474 employees, consisting of 15 echelon III officials, 67 echelon IV officials, 20 functional officers, and 371 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

Drs. Dedi Sopandi, M.A.P.

Dedi Sopandi lahir di Garut tahun 1962. Beliau mendapat gelar Diploma III dari Badan Diklat Keuangan tahun 1988, gelar Sarjana dari STISP – YPI Garut tahun 1993, dan gelar Magister dari Universitas Pendidikan Nasional Denpasar tahun 2019. Beliau menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali tahun 2017, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur tahun 2019, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, Beliau memimpin wilayah kerja 12 KPPN yaitu Bandung I, Bandung II, Bogor, Bekasi, Sukabum, Cirebon, Tasikmalaya, Kuningan, Purwakarta, Garut, Karawang, Sumedang dengan SDM sejumlah 355 pegawai terdiri dari 15 Pejabat Eselon III, 70 Pejabat Eselon IV, 29 Fungsional, 240 Pelaksana.

Dedi Sopandi was born in Garut in 1962. He obtained a Diploma III in 1998 from the Financial Training Agency, a bachelor's degree in 1993 from STISP – YPI Garut, and a master's degree in 2019 from the Denpasar National Education University. In 2015, Dedi served as Head of Regional Treasury Office of South Kalimantan Province, in 2017 as Head of Regional Treasury Office of Bali Province, and in 2019 as Head of Regional Treasury Office of East Java Province. In 2021, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of West Java Province. As Head of Regional Treasury Office of West Java Province, he oversees the work of 12 KPPN, namely Bandung I, Bandung II, Bogor, Bekasi, Sukabum, Cirebon, Tasikmalaya, Kuningan, Purwakarta, Garut, Karawang, and Sumedang. Total human resources include 355 employees, consisting of 15 echelon III officials, 70 echelon IV officials, 29 functional officers, and 240 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

Midden Sihombing

Midden Sihombing lahir di Tarutung tahun 1962 mendapat gelar Diploma III Keuangan Spesialisasi Anggaran tahun 1988, Diploma IV Keuangan Spesialisasi Anggaran tahun 1966, dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Mulawarman tahun 2021. Beliau memulai karier tahun 1990 di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Malang. Beliau menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat tahun 2015, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Beliau memimpin wilayah kerja 15 KPPN yaitu Semarang I, Semarang II, Surakarta, Pati, Kudus, Pekalongan, Tegal, Purwokerto, Magelang, Klaten, Sragen, Purworejo, Purwodadi, Banjarnegara, Cilacap dengan SDM sejumlah 458 pegawai terdiri dari 17 Pejabat Eselon III, 76 Pejabat Eselon IV, 23 Fungsional, 341 Pelaksana.

Midden Sihombing was born in Tarutung in 1962. He received a Diploma III Finance with specialization in Budgeting in 1988, a Diploma IV in Finance with specialization in Budgeting in 1986, and a Master of Management degree from Mulawarman University in 2021. In 1990, he his career at the Malang State Treasury Office. In 2015, he served as Head of Regional Treasury Office of West Papua Province, and in 2017 as Head of Regional Treasury Office of West Kalimantan Province. In 2021, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of Central Java Province. As the Head of Regional Treasury Office of Central Java Province, he oversees the work of 15 KPPN, namely Semarang I, Semarang II, Surakarta, Pati, Kudus, Pekalongan, Tegal, Purwokerto, Magelang, Klaten, Sragen, Purworejo, Purwodadi, Banjarnegara, and Cilacap. Total human resources include 458 employees, consisting of 17 echelon III officials, 76 echelon IV officials, 23 functional officers, and 341 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta

Arif Wibawa, S.Sos, M.M.

Arif Wibawa lahir di Boyolali tahun 1970. Beliau mendapat gelar Sarjana Sosial dari Universitas 17 Agustus 1945 tahun 1996 dan gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta tahun 2001. Beliau memulai karier tahun 1992 di Kanwil VII Direktorat Jenderal Anggaran Bandung, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Cirebon. Beliau menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat tahun 2018, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2021. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta, Beliau memimpin wilayah kerja 3 KPPN yaitu Yogyakarta, Wonosari, Wates dengan SDM sejumlah 146 pegawai terdiri dari 7 Pejabat Eselon III, 29 Pejabat Eselon IV, 8 Fungsional, 101 Pelaksana.

Arif Wibawa was born in Boyolali in 1970. He received a Bachelor of Social Studies degree in 1996 from the 17 August 1945 University, and a master's degree in management in 2001 from the Jakarta College of Management Sciences. In 1992, Arif began his career at Regional Office VII of the Directorate General of Budget Bandung, Cirebon State Treasury Office. In 2018, he served as Head of Regional Treasury Office of West Papua Province, and in 2019 as Head of Regional Treasury Office of Sulawesi Tenggara Province. In 2021, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of SR Yogyakarta Province. As Head of Regional Treasury Office of SR Yogyakarta Province, he oversees the work of 3 KPPN, namely Yogyakarta, Wonosari, and Wates. Total human resources include 146 employees, consisting of 7 echelon III officials, 29 echelon IV officials, 8 functional officers, and 101 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur

Taukhid, S.E., M.B.A., M.Sc.I.B.

Taukhid lahir di Cirebon tahun 1968. Beliau mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka Jakarta tahun 1999, gelar Master of Science in International Business (M.Sc.I.B.) dari University of Stirling, Scotland, UK tahun 2009, dan gelar Master of Business Administration (MBA) dari Universitas Gajah Mada tahun 2010. Beliau memulai karier tahun 1991 di Direktorat Jenderal Anggaran. Beliau menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018, dan sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Beliau memimpin wilayah kerja 15 KPPN yaitu Surabaya I, Surabaya II, Sidoarjo, Malang, Pamekasan, Bondowoso, Madiun, Kediri, Blitar, Mojokerto, Jember, Bojonegoro, Banyuwangi, Tuban, Pacitan dengan SDM sejumlah 430 pegawai terdiri dari 18 Pejabat Eselon III, 85 Pejabat Eselon IV, 35 Fungsional, 291 Pelaksana.

Taukhid was born in Cirebon in 1968. He received a Bachelor of Economics degree in 1999 from the Indonesia Open University Jakarta, a Master of Science in International Business (M.Sc.I.B.) in 2009 from the University of Stirling, Scotland, UK, and a Master of Business Administration (MBA) in 2010 from Gajah Mada University. In 1991, he started his career at the Directorate General of Budget. In 2021, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of East Java Province. As Head of Regional Treasury Office of East Java Province, he oversees the work of 15 KPPN, namely Surabaya I, Surabaya II, Sidoarjo, Malang, Pamekasan, Bondowoso, Madiun, Kediri, Blitar, Mojokerto, Jember, Bojonegoro, Banyuwangi, Tuban, and Pacitan. Total human resources include 430 employees, consisting of 18 echelon III officials, 85 echelon IV officials, 35 functional officers, and 291 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat

Imik Eko Putro, S.E.

Imik Eko Putro lahir di Banyuwangi tahun 1969. Beliau mendapat gelar Ahli Madya Kepabeanan dan Cukai dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1991 dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Jakarta tahun 1996. Beliau memulai karier tahun 1992 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Beliau menjabat sebagai Direktorat Kepabeanan Internasional dan AntarLembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2019, kemudian menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 dan sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Beliau memimpin wilayah kerja 6 KPPN yaitu Pontianak, Sintang, Singkawang, Sanggau, Ketapang, Putussibau dengan SDM sejumlah 164 pegawai terdiri dari 10 Pejabat Eselon III, 43 Pejabat Eselon IV, 3 Fungsional, 107 Pelaksana.

Imik Eko Putro was born in Banyuwangi in 1969. He received the title of Customs and Excise Expert in 1991 from the State College of Accountancy, and a Bachelor of Economics degree in 1996 from the Islamic University of Jakarta. In 1992, he started his career at the Directorate General of Customs and Excise. In 2019, he served as Head of the Regional Sub-Directorate, Directorate of International and Interagency Customs, Directorate General of Customs and Excise, then in the same year became Head of Regional Treasury Office of West Sulawesi Province in 2019. In 2021, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of West Kalimantan Province. As Head of Regional Treasury Office of West Kalimantan Province, he oversees the work of 6 KPPN, namely Pontianak, Sintang, Singkawang, Sanggau, Ketapang, and Putussibau. Total human resources include 164 employees, consisting of 10 echelon III officials, 43 echelon IV officials, 3 functional officers, and 107 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah

Hari Utomo, S.E., M.M.

Hari Utomo Lahir di Surabaya tahun 1969 mendapat gelar Diploma dari Badan Diklat Keuangan Jakarta tahun 1990, gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Mercu Buana Jakarta tahun 1997, dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana Bekasi tahun 2010. Beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV, Direktorat Pelaksanaan Anggaran tahun 2014, sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat tahun 2019, dan sebagai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, Beliau memimpin wilayah kerja 4 KPPN yaitu Palangkaraya, Buntok, Pangkalanbun, Sampit dengan SDM sejumlah 125 pegawai terdiri dari 9 Pejabat Eselon III, 34 Pejabat Eselon IV, 3 Fungsional, 78 Pelaksana.

Hari Utomo was born in Surabaya in 1969. He earned a Diploma in 1990 from the Jakarta Financial Training Agency, and a Bachelor of Economics degree in 1997 from Mercu Buana University Jakarta. Furthermore, he received a master's degree in management in 2010 from Krisnadwipayana University Bekasi. In 2014, he served as Head of Sub-Directorate of Budget Implementation IV, Directorate of Budget Execution, and in 2019 as Head of Regional Treasury Office of West Papua Province. In 2021, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of Central Kalimantan Province. As Head of Regional Treasury Office of Central Kalimantan Province, he oversees the work of 4 KPPN, namely Palangkaraya, Buntok, Pangkalanbun, and Sampit. Total human resources include 125 employees, consisting of 9 echelon III officials, 34 echelon IV officials, 3 functional officers, and 78 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Sulaimansyah, S.E.

Sulaimansyah lahir di Jakarta tahun 1971 mendapat gelar Sarjana Akuntansi dari STIE Yapis Jayapura tahun 1997. Beliau menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara tahun 2015, sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016, sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, dan sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Beliau memimpin wilayah kerja 5 KPPN yaitu Banjarmasin, Pelaihari, Barabai, Tanjung, Kotabaru dengan SDM sejumlah 161 pegawai terdiri dari 10 Pejabat Eselon III, 39 Pejabat Eselon IV, 5 Fungsional, 106 Pelaksana.

Sulaimansyah was born in Jakarta in 1971. He received a bachelor's degree in accounting in 1997 from STIE Yapis Jayapura. In 2015, he served as Head of Regional Treasury Office of North Maluku Province, in 2016 as Head of Regional Treasury Office of North Sulawesi Province, and in 2018 as Head of Regional Treasury Office of Central Java Province. In 2021, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of South Kalimantan Province. As Head of Regional Treasury Office of South Kalimantan Province, he oversees the work of 5 KPPN, namely Banjarmasin, Pelaihari, Barabai, Tanjung, and Kotabaru. Total human resources include 161 employees, consisting of 10 echelon III officials, 39 echelon IV officials, 5 functional officers, 106 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur

Muhdi, S.E., S.Ip., MIS, Ph.D.

Muhdi lahir di Pati tahun 1971 mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada, Master of Information Sciences dari Tohoku University, Japan dan Doctor of Philosophy dari Tohoku University, Japan. Beliau menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat tahun 2017, sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018, dan sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur, Beliau memimpin wilayah kerja 3 KPPN yaitu Samarinda, Balikpapan, Tanjung Redep dengan SDM sejumlah 108 pegawai terdiri dari 7 Pejabat Eselon III, 30 Pejabat Eselon IV, 4 Fungsional, 66 Pelaksana.

Muhdi was born in Pati in 1971. He earned a Bachelor of Economics degree from the Islamic University of Indonesia, a Bachelor of Political Science from Gadjah Mada University, a Master of Information Sciences from Tohoku University, Japan and a Doctor of Philosophy from Tohoku University, Japan. In 2017, he served as Head of Regional Treasury Office of West Papua Province, and in 2018 as Head of Regional Treasury Office of North Sulawesi Province. In 2021, he was inaugurated as Head of DG Treasurer Regional Office of East Kalimantan Province. As Head of Regional Treasury Office of East Kalimantan Province, he oversees the work of 3 KPPN, namely Samarinda, Balikpapan, and Tanjung Redep. Total human resources include 108 employees, consisting of 7 echelon III officials, 30 echelon IV officials, 4 functional officers, and 66 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara

Wahyu Prihantoro, S.E., M.P.

Wahyu Prihantoro lahir di Yogyakarta tahun 1972. Beliau mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Bhakti Pembangunan Jakarta tahun 1996 dan gelar Magister Profesional dari Institut Pertanian Bogor tahun 2005. Beliau memulai karier tahun 1997 di Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara. Beliau menjabat sebagai Kepala KPPN Jakarta VI tahun 2016, sebagai Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan tahun 2020, dan sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, Beliau memimpin wilayah kerja 3 KPPN yaitu Tarakan, Tanjung Selor, Nunukan dengan SDM sejumlah 92 pegawai terdiri dari 7 Pejabat Eselon III, 29 Pejabat Eselon IV, 3 Fungsional, 53 Pelaksana.

Wahyu Prihantoro was born in Yogyakarta in 1972. He received a Bachelor of Economics degree in 1996 from STIE Bhakti Pembangunan Jakarta, and a Master of Professionals degree in 2005 from the Bogor Agricultural Institute. In 1997, Wahyu Prihantoro started his career at the Directorate of Treasury and State Treasury. In 2016, he served as Head of KPPN Jakarta VI, and in 2020 as Head of the Sub-Directorate of Research and Development and Institutional Cooperation, Directorate of Treasury Systems. In 2021, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of North Kalimantan Province. As Head of Regional Treasury Office of North Kalimantan Province, he oversees the work of 3 KPPN, namely Tarakan, Tanjung Selor, and Nunukan. Total human resources include 92 employees, consisting of 7 echelon III officials, 29 echelon IV officials, 3 functional officers, and 53 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali

Teguh Dwi Nugroho, S.E., M.M.

Teguh Dwi Nugroho lahir di Purworejo tahun 1969. Beliau mendapat gelar Diploma III STAN Spesialisasi Anggaran dari Badan Diklat Keuangan tahun 1992, gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Jakarta 21 tahun 1997, dan gelar Magister dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA Jakarta tahun 2005. Beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia tahun 2015, sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017, sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019, dan sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali tahun 2021. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Beliau memimpin wilayah kerja 3 KPPN yaitu Denpasar, Singaraja, Amlapura dengan SDM sejumlah 129 pegawai terdiri dari 8 Pejabat Eselon III, 30 Pejabat Eselon IV, 6 Fungsional, 84 Pelaksana.

Teguh Dwi Nugroho was born in Purworejo in 1969. He received a Diploma III with Budgeting specialization in 1992 from the Financial Training Agency, a Bachelor of Economics degree in 1997 from the Islamic University of Jakarta, and a master's degree in 2005 from IPWIJA Jakarta College of Economics. In 2015, he served as Head of Human Resources Section, in 2017 as Head of Regional Treasury Office of North Kalimantan Province, and in 2019 as Head of Regional Treasury Office of Riau Islands Province. In 2021, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of Bali Province. As Head of Regional Treasury Office of Bali Province, he oversees the work of 3 KPPN, namely Denpasar, Singaraja, and Amlapura. Total human resources include 129 employees, consisting of 8 echelon III officials, 30 echelon IV officials, 6 functional officers, and 84 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sudarmanto, S.E., M.M.

Sudarmanto lahir di Semarang tahun 1963. Beliau mendapat gelar Diploma III STAN Spesialisasi Anggaran dari Badan Diklat Keuangan Jakarta tahun 1987, gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah tahun 1997, dan gelar Magister Manajemen dari STIE IPWIJA Jakarta tahun 2006. Beliau memulai karier pada tahun 1986 di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Magelang. Beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran tahun 2015, sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku tahun 2017, sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, dan sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat, Beliau memimpin wilayah kerja 4 KPPN yaitu Mataram, Selong, Sumbawa Besar, Bima dengan SDM sejumlah 121 pegawai terdiri dari 9 Pejabat Eselon III, 33 Pejabat Eselon IV, 4 Fungsional, 74 Pelaksana.

Sudarmanto was born in Semarang in 1963. He received a Diploma III in Finance with Budgeting specialization in 1987 from the Jakarta Financial Training Agency, a Bachelor of Economics degree in 1997 from Muhammadiyah University, and a Master of Management degree in 2006 from STIE IPWIJA Jakarta. In 1986, he started his career at the Magelang State Treasury Office. In 2015, he served as Head of the Sub-Directorate of Budget Execution Analysis and Development, in 2017 as Head of Regional Treasury Office of Maluku Province, and in 2018 as Head of Regional Treasury Office of South Sulawesi Province. In 2021, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of West Nusa Tenggara Province. As Head of Regional Treasury Office of West Nusa Tenggara Province, he oversees the work of 4 KPPN, namely Mataram, Selong, Sumbawa Besar, and Bima. Total human resources include 121 employees, consisting of 9 echelon III officials, 33 echelon IV officials, 4 functional officers, and 74 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur

Catur Ariyanto Widodo, S.E., M.Int.Dev.Ec

Catur Ariyanto Widodo lahir di Ungaran tahun 1971. Beliau mendapat gelar Diploma III Keuangan Spesialisasi Anggaran dari Badan Diklat Keuangan Jakarta tahun 1993, gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1999, dan gelar Master Of Arts dari Australian National University tahun 2005. Beliau memulai karier pada tahun 1992 di Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran. Beliau menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2020 dan sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur, Beliau memimpin wilayah kerja 6 KPPN yaitu Kupang, Waingapu, Ruteng, Atambua, Larantuka, Ende dengan SDM sejumlah 160 pegawai terdiri dari 11 Pejabat Eselon III, 43 Pejabat Eselon IV, 5 Fungsional, 100 Pelaksana.

Catur Ariyanto Widodo was born in Ungaran in 1971. He received a Diploma III in Finance with Budgeting specialization in 1993 from the Jakarta Financial Training Agency. He then earned a Bachelor of Economics degree in 1999 from the University of Indonesia and a Master of Arts degree in 2005 from the Australian National University. In 1992, he started his career in the Personnel Section of the Secretariat of the Directorate General of Budget. In 2020, he served as Senior Treasury Analyst at the Directorate General of Treasury, and in 2022 was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of East Nusa Tenggara Province. As the Head of Regional Treasury Office of East Nusa Tenggara Province, he oversees the work of 6 KPPN, namely Kupang, Waingapu, Ruteng, Atambua, Larantuka, and Ende. Total human resources include 160 employees, consisting of 11 echelon III officials, 43 echelon IV officials, 5 functional officers, and 100 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan

Syaiful, S.E., Ak., M.M.

Syaiful lahir di Salo tahun 1970. Beliau mendapat gelar Sarjana Ekonomi, Akuntansi dari Universitas Riau tahun 1995 dan gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI tahun 2001. Beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah tahun 2015, sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua tahun 2019, dan sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Beliau memimpin wilayah kerja 9 KPPN yaitu Makasar I, Makasar II, Pare-Pare, Palopo, Bantaeng, Sinjai, Benteng, Watampone, Makale dengan SDM sejumlah 250 pegawai terdiri dari 13 Pejabat Eselon III, 58 Pejabat Eselon IV, 19 Fungsional, 159 Pegawai Pelaksana.

Syaiful born in Solo in 1970. He received a Bachelor of Economics, Accounting degree in 1995 from Riau University and a master's degree in management in 2001 from the IPWI College of Economics. In 2015, Syaiful served as Head of the Sub-Directorate of Cash Management for Loans and Grants, and in 2019 as Head of Regional Treasury Office of Papua Province. In 2021, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of South Sulawesi Province. As Head of Regional Treasury Office of South Sulawesi Province, he oversees the work of 9 KPPN, namely Makasar I, Makasar II, Pare-Pare, Palopo, Bantaeng, Sinjai, Benteng, Watampone, and Makale. Total human resources include 250 employees, consisting of 13 echelon III officials, 58 echelon IV officials, 19 functional officers, and 159 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat

M. Syaibani S.E., M.E.

M. Syaibani lahir di Pekanbaru tahun 1970. Beliau mendapat gelar Diploma III STAN Spesialisasi Anggaran dari Badan Diklat Keuangan Jakarta tahun 1991, gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Kusuma Negara Jakarta tahun 2000, dan gelar Magister Ilmu Ekonomi dan Akuntansi dari Universitas Indonesia Jakarta tahun 2006. Beliau memulai karier pada tahun 1991 di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Tanjung Pinang. Beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III tahun 2019 dan sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, Beliau memimpin wilayah kerja 2 KPPN yaitu Mamuju dan Majene dengan SDM sejumlah 83 pegawai terdiri dari 6 Pejabat Eselon III, 24 Pejabat Eselon IV, 4 Fungsional, 49 Pelaksana.

M. Syaibani was born in Pekanbaru in 1970 received a Diploma III with Budgeting specialization in 1991 from the Jakarta Financial Training Agency, a Bachelor of Economics degree in 2000 from STIE Kusuma Negara Jakarta, and a master's degree in Economics and Accounting in 2006 from the University of Indonesia Jakarta. In 1991, he started his career at the Tanjung Pinang State Treasury Office. In 2019, he served as Head of the Sub-Directorate of Financial Management Development of Public Service Agency III, and in 2021 was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of West Sulawesi Province. As Head of Regional Treasury Office of West Sulawesi Province, he oversees the work of 2 KPPN, namely Mamuju and Majene. Total human resources include 83 employees, consisting of 6 echelon III officials, 24 echelon IV officials, 4 functional officers, and 49 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah

Irfa Ampri, Ak., M.A, PhD

Irfa Ampri lahir di Binjai tahun 1965. Beliau mendapat gelar DIV Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1993, gelar S2 Accounting and Finance University of Lancaster tahun 1997, dan gelar S3 Business Administration Yokohama National University tahun 2003. Beliau memulai karier pada tahun 1986 di Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan. Beliau menjabat sebagai Sekretariat Badan, Badan Kebijakan Fiskal tahun 2014, sebagai Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal tahun 2015 dan pada 2019 sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah, Beliau memimpin wilayah kerja 4 KPPN yaitu Palu, Poso, Luwuk, Toli-Toli dengan SDM sejumlah 124 pegawai terdiri dari 8 Pejabat Eselon III, 34 Pejabat Eselon IV, 5 Fungsional, 76 Pelaksana.

Irfa Ampri was born in Binjai in 1965 received a Diploma IV Accounting in 1993 from the State College of Accountancy, a master's in accounting and finance in 1997 from the University of Lancaster, and a Doctorate in Business Administration in 2003 from Yokohama National University. In 1986, he began his career at the Inspectorate General of the Ministry of Finance. In 2014, he served as Secretary of the Fiscal Policy Agency, and in 2015 as Head of the Regional and Bilateral Policy Center of the Fiscal Policy Agency. In 2019, he was appointed as Head of Regional Treasury Office of Central Sulawesi Province. As Head of Regional Treasury Office of Central Sulawesi Province, he oversees the work of 4 KPPN, namely Palu, Poso, Luwuk, and Toli-Toli. Total human resources include 124 employees, consisting of 8 echelon III officials, 34 echelon IV officials, 5 functional officers, and 76 implementers.



Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Meliputi 4 KPPN yaitu Kendari, Bau-Bau, Raha, Kolaka dengan jumlah SDM sebanyak 123 pegawai terdiri dari 9 Pejabat Eselon III, 33 Pejabat Eselon IV, 4 Fungsional, 77 Pelaksana.

The Regional Office oversees the work of 4 KPPN, namely Kendari, Bau-Bau, Raha, and Kolaka. Total human resources include 123 employees, consisting of 9 echelon III officials, 33 echelon IV officials, 4 functional officers, and 77 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo

Sugiyarto, S.E., Ak., M.Sc., Ph.D.

Sugiyarto lahir di Cilacap tahun 1970. Beliau mendapat gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada tahun 1993, gelar Gelar Master of Science in Public Policy and Management, Concentration Management Information System dari Carnegie Mellon University tahun 2000, dan gelar Doctor of Philosophy in Public Administration dari University of Canberra tahun 2019. Beliau memulai karier pada tahun 1994 di Badan Akuntansi Keuangan Negara. Beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2018, dan sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2021. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Beliau memimpin wilayah kerja 2 KPPN yaitu Gorontalo dan Marisa dengan SDM sejumlah 83 pegawai terdiri dari 7 Pejabat Eselon III, 25 Pejabat Eselon IV, 5 Fungsional, 45 Pelaksana.

Sugiyarto was born in Cilacap in 1970. He received a Bachelor of Economics in 1993, majoring in Accounting from Gadjah Mada University, a Master of Science in Public Policy and Management in 2000, with concentration in Management Information System from Carnegie Mellon University, and a Doctor of Philosophy in Public Administration in 2019 from the University of Canberra. In 1994, he started his career at the State Financial Accounting Agency. In 2018, he served as as Head of the Human Resources Section of the Secretariat of the Directorate General of Fiscal Balance. In 2021, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of Gorontalo Province. As Head of Regional Treasury Office of Gorontalo Province, he oversees the work of 2 KPPN, namely Gorontalo and Marisa. Total human resources include 83 employees, consisting of 7 echelon III officials, 25 echelon IV officials, 5 functional officers, and 45 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara

Ratih Hapsari Kusumawardani, S.Si., M.A., M.T.

Ratih Hapsari Kusumawardani lahir di Kediri tahun 1971. Beliau mendapat gelar Sarjana Sains dari Universitas Gadjah Mada tahun 1996, gelar Master Of Arts dari IHS Rotterdam tahun 2007, dan Magister Perencanaan Kota dari Universitas Gadjah Mada tahun 2007. Beliau memulai karier pada tahun 1997 di Direktorat Pembinaan Anggaran III. Beliau menjabat sebagai Kepala KPPN Kuningan tahun 2015, sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017, dan sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Beliau memimpin wilayah kerja 4 KPPN yaitu Manado, Kotamobagu, Tahuna, Bitung dengan SDM sejumlah 129 pegawai terdiri dari 9 Pejabat Eselon III, 33 Pejabat Eselon IV, 8 Fungsional, 78 Pelaksana.

Ratih Hapsari Kusumawardani was born in Kediri in 1971. She received a Bachelor of Science degree in 1996 from Gadjah Mada University, a Master of Arts degree in 2007 from IHS Rotterdam, and a Master of Urban Planning degree in 2007 from Gadjah Mada University. In 1997, she started her career at the Directorate of Budget Development III. In 2015, she served as Head of KPPN Kuningan, and in 2017 as Head of Regional Treasury Office of Central Kalimantan Province. In 2021, she was appointed as Head of Regional Treasury Office of North Sulawesi Province. As Head of Regional Treasury Office of North Sulawesi Province, she oversees the work of 4 KPPN, namely Manado, Kotamobagu, Tahuna, and Bitung. Total human resources include 129 employees, consisting of 9 echelon III officials, 33 echelon IV officials, 8 functional officers, and 78 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara

Adnan Wimbyarto, S.E., M.M.

Adnan Wimbyarto lahir di Yogyakarta tahun 1973. Beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Indonesia tahun 1996 dan Universitas Patria Artha tahun 2004. Beliau menjabat sebagai Kepala KPPN Mataram tahun 2016, sebagai Kepala Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat DJPb tahun 2019, dan sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara tahun 2022. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Beliau memimpin wilayah kerja 2 KPPN yaitu Ternate dan Tobelo dengan SDM sejumlah 81 pegawai terdiri dari 6 Pejabat Eselon III, 25 Pejabat Eselon IV, 3 Fungsional, 47 Pelaksana.

Adnan Wimbyarto was born in Yogyakarta in 1973. He completed his education at the Islamic University of Indonesia in 1996 and Patria Artha University in 2004. In 2016, he served as Head of KPPN Mataram, and in 2019 as Head of Internal Compliance Section of the DG Treasury Secretariat. In 2022, he was inaugurated as Head of the Regional Treasury Office of North Maluku Province. As Head of Regional Treasury Office of North Maluku Province, he oversees the work of 2 KPPN, namely Ternate and Tobelo. Total human resources include 81 employees, consisting of 6 echelon III officials, 25 echelon IV officials, 3 functional officers, and 47 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku

Moudy Hermawan, S.E., M.M., Ph.D.

Moudy Hermawan lahir di Jakarta tahun 1975. Beliau mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Riau Pekanbaru tahun 1999, gelar Magister Manajemen dari Universitas Borobudur Jakarta tahun 2002, gelar Doctor of Philosophy dari Ritsumeikan Asia Pacific University Jepang tahun 2012. Beliau memulai karier pada tahun 1995 di Kantor Tata Usaha Anggaran Pekanbaru, Riau. Beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat PPK BLU I Direktorat PPK BLU tahun 2020 dan sebagai Kepala Kanwil DJPb Maluku tahun 2022. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Beliau memimpin wilayah kerja 4 KPPN yaitu Ambon, Masohi, Tual, Saumlaki dengan SDM sejumlah 121 pegawai terdiri dari 9 Pejabat Eselon III, 35 Pejabat Eselon IV, 4 Fungsional, 73 Pelaksana.

Moudy Hermawan was born in Jakarta in 1975. He received a Bachelor of Economics degree in 1999 from Riau University Pekanbaru, a Master of Management degree in 2002 from Borobudur University Jakarta, and a Doctor of Philosophy degree in 2012 from Ritsumeikan Asia Pacific University Japan. In 1995, he started his career at the Pekanbaru Budget Administration Office, Riau. In 2020, he served as Head of the PPK BLU I Sub-Directorate of the PPK BLU Directorate, and in 2022 was made Head of Regional Treasury Office of Maluku Province. As Head of Regional Treasury Office of Maluku Province, he oversees the work of 4 KPPN, namely Ambon, Masohi, Tual, and Saumlaki. Total human resources include 121 employees, consisting of 9 echelon III officials, 35 echelon IV officials, 4 functional officers, and 73 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat

Bayu Andy Prasetya, S.E., M.Si.

Bayu Andy Prasetya lahir di Cilacap tahun 1976. Beliau mendapat gelar Diploma III Keuangan Spesialisasi Anggaran dari Badan Diklat Keuangan Cilacap tahun 1997, gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Mataram tahun 2000, dan gelar Pascasarjana Magister Sains) dari Universitas Gadjah Mada tahun 2005. Beliau memulai karier pada tahun 1996 di Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran. Beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum tahun 2019, sebagai Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara tahun 2019, dan sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat tahun 2021. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, Beliau memimpin wilayah kerja 3 KPPN yaitu Manokwari, Fak-Fak, Sorong dengan SDM sejumlah 101 pegawai terdiri dari 7 Pejabat Eselon III, 29 Pejabat Eselon IV, 2 Fungsional, 61 Pelaksana.

Bayu Andy Prasetya was born in Cilacap in 1976. He received a Diploma III in Finance in 1997 with specialization in Budgeting from the Cilacap Financial Training Agency. He then earned a Bachelor of Economics degree in 2000 from Mataram University, and a Postgraduate Master of Science degree in 2005 from Gadjah Mada University. In 1996, he began his career at the Secretariat of the Directorate General of Budget. In 2019, he served as Head of the Sub-Directorate of Technical Regulation and Standardization of the Public Service Agencies and then as Head of Regional Treasury Office of North Maluku Province. In 2021, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of West Papua Province. As Head of Regional Treasury Office of West Papua Province, he oversees the work of 3 KPPN, namely Manokwari, Fak-Fak, and Sorong. Total human resources include 101 employees, consisting of 7 echelon III officials, 29 echelon IV officials, 2 functional officers, and 61 implementers.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua

Drs. Burhani AS, M.M.

Burhani lahir di Gunung Terang tahun 1965. Beliau mendapat gelar Sarjana Sosial Politik STISOSPOL Tanjung Karang tahun 1991 dan gelar Manajemen Keuangan dari Universitas Lampung tahun 2003. Beliau memulai karier pada tahun 1985 di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung. Beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Kanwil DJPb Provinsi Maluku tahun 2015, sebagai Kepala KPPN Metro tahun 2019, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua tahun 2021. Sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, Beliau memimpin wilayah kerja 7 KPPN yaitu Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Timika dengan SDM sejumlah 164 pegawai terdiri dari 11 Pejabat Eselon III, 45 Pejabat Eselon IV, 6 Fungsional, 101 Pelaksana.

Burhani was born in Gunung Terang in 1965. He received a bachelor's degree in socio-politics in 1991 from STISOSPOL Tanjung Karang, and a degree in financial management in 2003 from the University of Lampung. In 1985, he started his career at the Bandar Lampung State Treasury Office. In 2015, he served as Head of Budget Execution Development Division I, Regional Treasury Office of Maluku Province, and in 2019 as Head of KPPN Metro. In 2021, he was inaugurated as Head of Regional Treasury Office of Papua Province. As Head of Regional Treasury Office of Papua Province, he oversees the work of 7 KPPN, namely Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Nabire, Wamena, and Timika. Total human resources include 164 employees, consisting of 11 echelon III officials, 45 echelon IV officials, 6 functional officers, and 101 implementers.

Tantangan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia ke depan akan makin meningkat. Dengan kolaborasi HANdAL dan semangat The New DJPb in Town, kita perkuat pengelolaan APBN melalui berbagai program yang ada agar manfaatnya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat dan berdaya guna dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui kantor vertikal DJPb.

Hadiyanto- Dirjen Perbendaharaan

HANdAL
Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal



Profil Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Profile of State Treasury Office

Pelayanan perbendaharaan akan benar-benar sampai pada masyarakat/pengguna jasa secara langsung melalui KPPN. Peran penerimaan negara maupun verifikasi anggaran yang keluar dalam bentuk belanja negara mutlak berada di kantor yang bertanggung jawab langsung kepada masing-masing kanwil setempat.

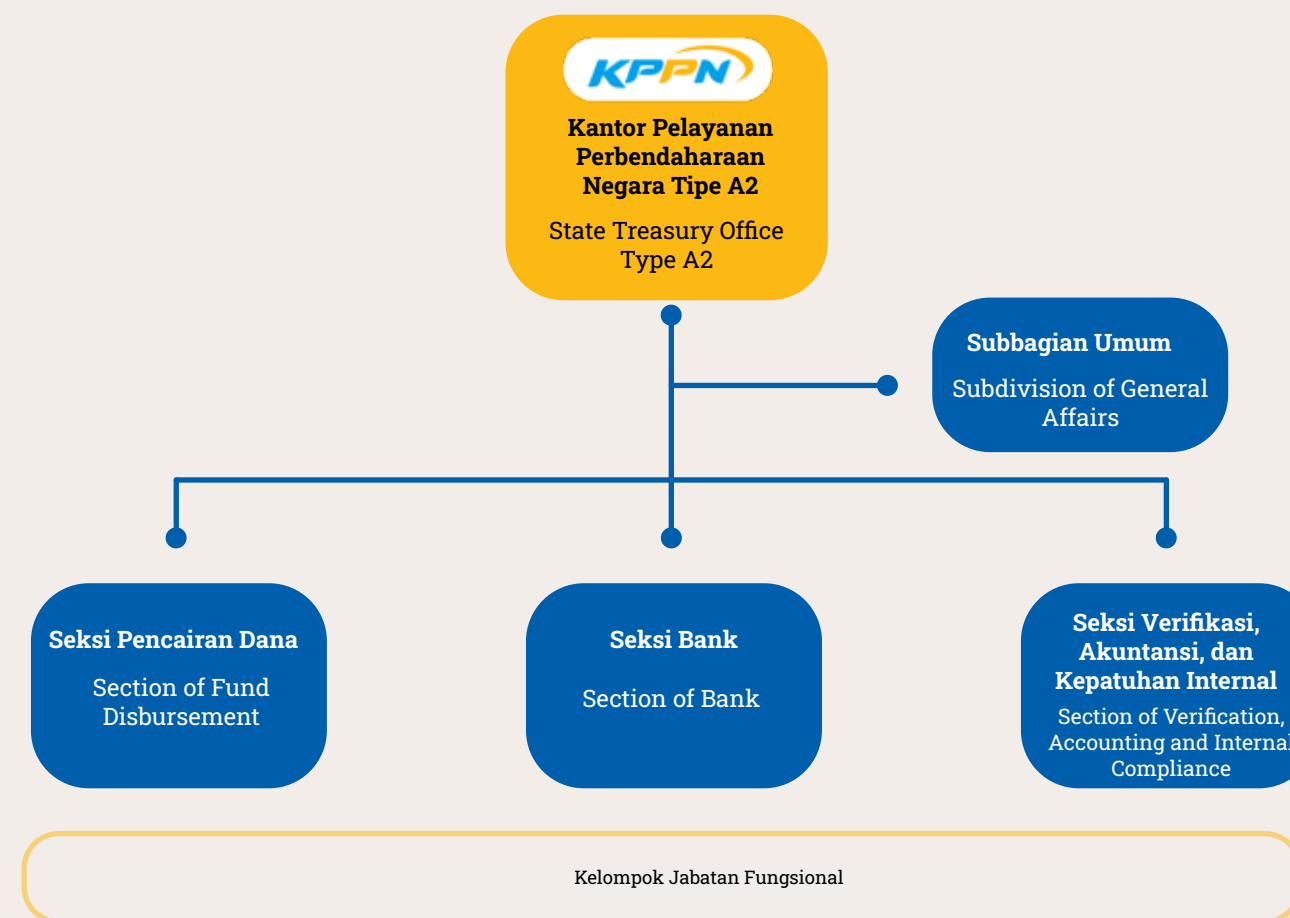
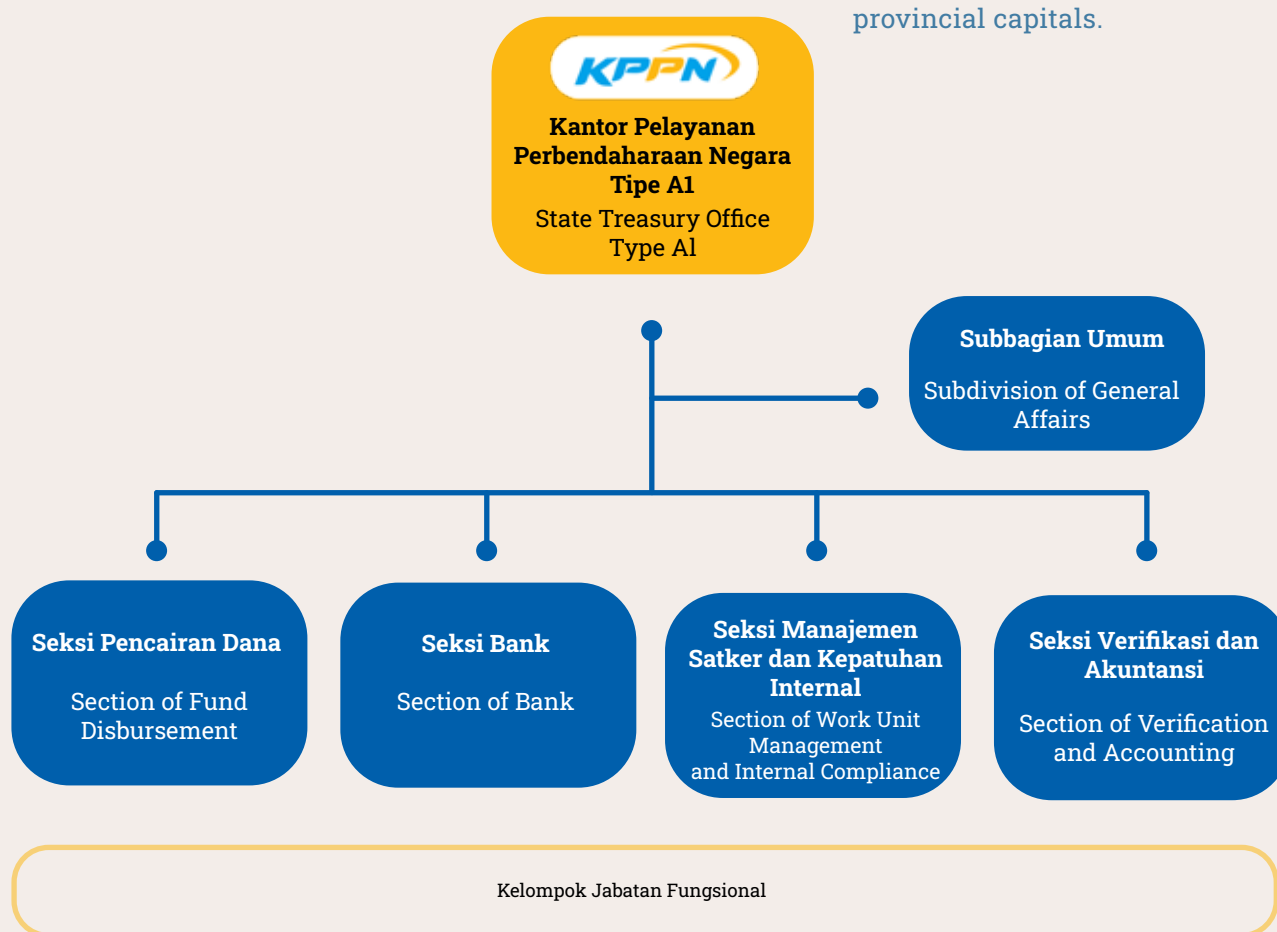
Treasury services truly reach the community/ service users directly through the KPPN offices. State revenues and verification of expenditures from the state budget is absolutely the responsibility of the respective KPPN office that is accountable to its corresponding Regional Office.

KPPN Tipe A1 dan A2

State Treasury Services Office Type A1 and A2

Penyaluran atas beban APBN maupun penerimaan negara pada tiap wilayah dikelola oleh KPPN Tipe A1 dan A2. Pada umumnya KPPN Tipe A1 berada di ibukota provinsi maupun kota besar non ibukota provinsi dengan jumlah stakeholder yang lebih tinggi daripada KPPN Tipe A2 yang berada di luar ibukota provinsi.

Disbursements from the State Budget and state revenues in each region are managed by KPPN Type A1 and A2 offices. In general, a KPPN Type A1 office is located in the provincial capital and non-provincial capital cities with a higher number of stakeholders than KPPN Type A2 offices that are located outside of provincial capitals.



Profil Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Profile of Special State Treasury Services Office

Pembentukan KPPN Khusus pada tahun 2015 merupakan wujud konkret dari inovasi peningkatan kualitas layanan publik pada DJPb. KPPN khusus memiliki struktur organisasi, tugas, maupun fungsi yang berbeda sesuai dengan jenis stakeholder yang dilayani. DJPb mempunyai tiga jenis KPPN Khusus yaitu KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, KPPN Khusus Penerimaan, dan KPPN Khusus Investasi

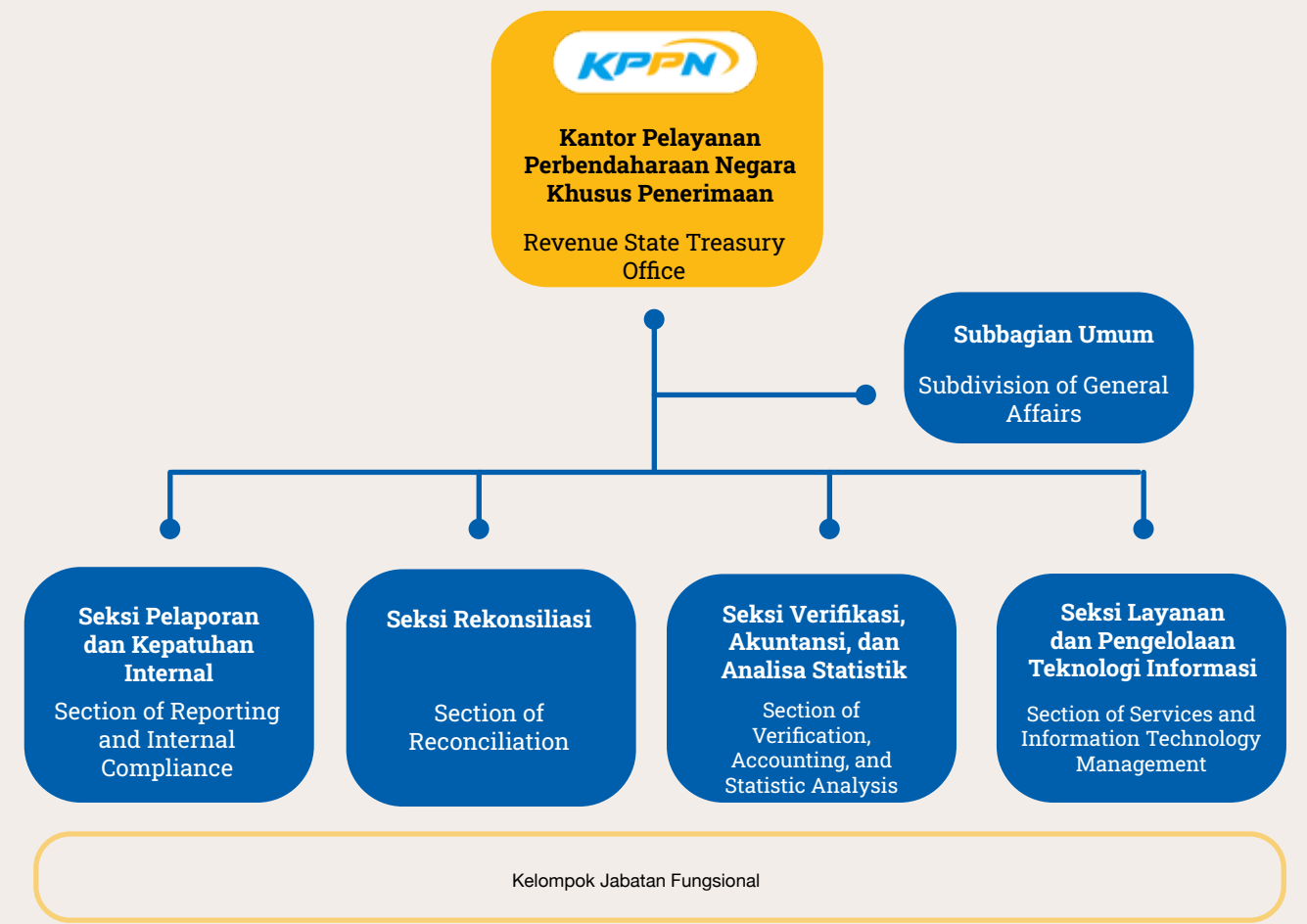
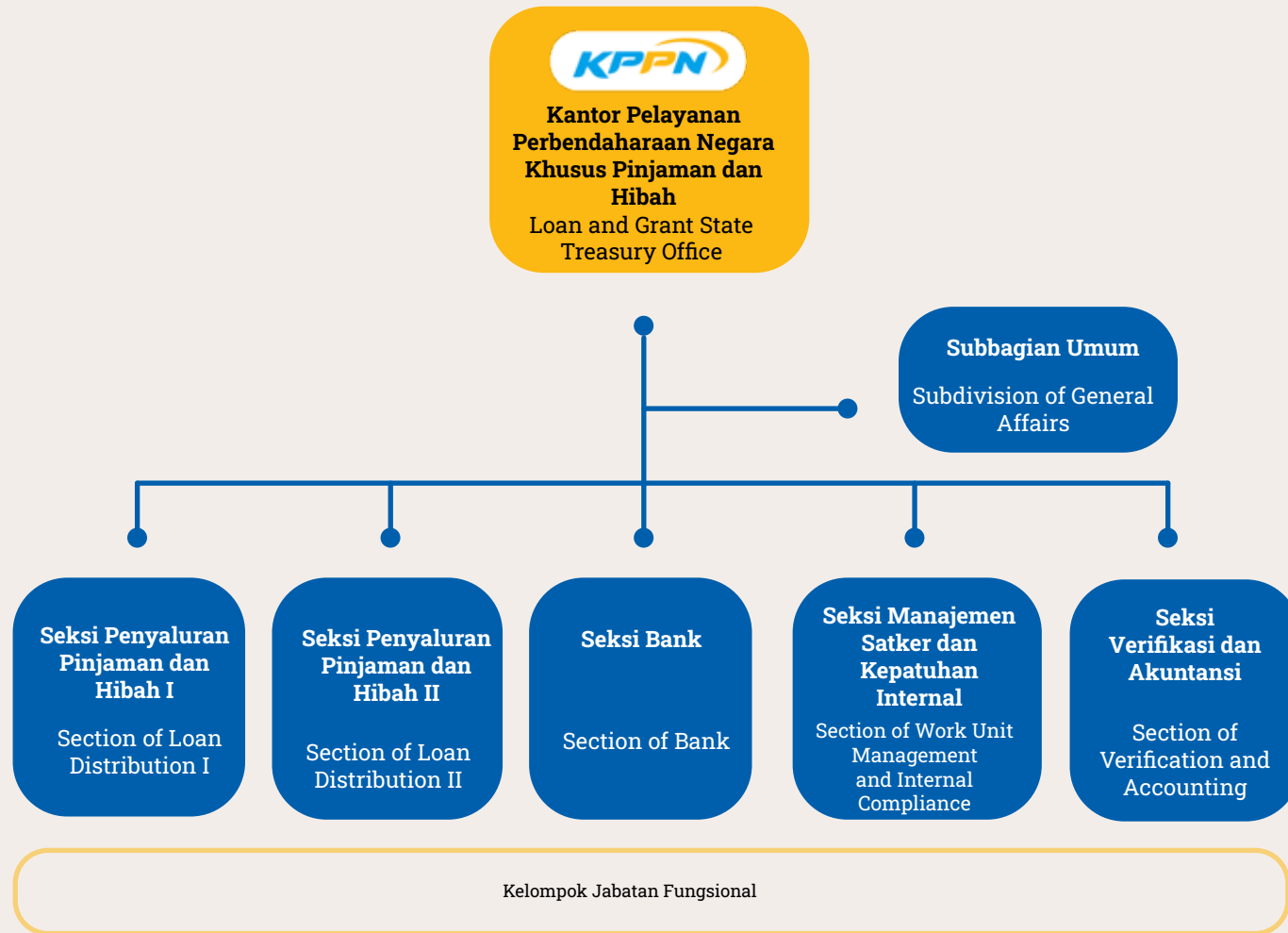
The establishment of the Special KPPN in 2015 represents a concrete innovation in improving the quality of public services at DG Treasury. A special KPPN has a different organizational structure, tasks and functions according to the type of stakeholder being served. DG Treasury has three types of Special KPPN, namely Special KPPN for Loans and Grants, Special KPPN for Receipts, and Special KPPN for Investment.

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah merupakan kantor vertikal DJPb yang khusus mengelola pendanaan bersumber dari pinjaman yang pada umumnya dari luar negeri maupun manajemen hibah atau penyaluran barang-barang.

Special KPPN for Loans and Grants

Special KPPN for Loans and Grants is a DG Treasury vertical office that specifically manages funding sourced from loans, which are generally overseas loans, as well as managing grants or the distribution of goods.



KPPN Khusus Penerimaan

Pengelolaan penerimaan negara menjadi hal yang perlu mendapat perhatian DJPb. Untuk itulah dibentuk KPPN Khusus Penerimaan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang secara organisatoris berada di bawah Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya KPPN Khusus Penerimaan diharapkan penerimaan negara dapat meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitasnya.

KPPN Khusus Investasi

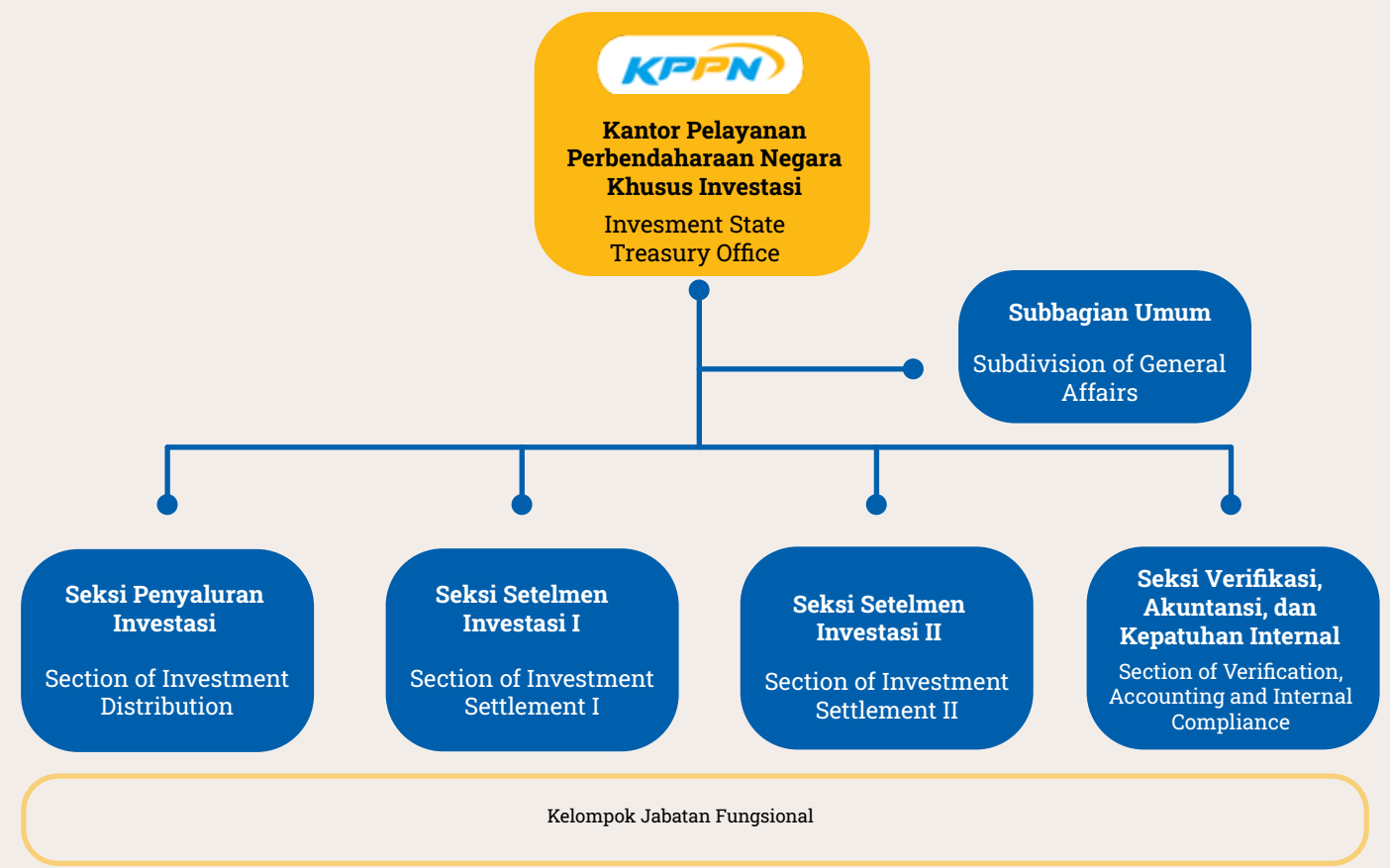
Dalam rangka melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya dibentuklah KPPN Khusus Investasi.

Special KPPN for Revenue

The management of state revenue is a matter requiring the attention of DG Treasury. For this reason, the Special KPPN for Receipts was established which is directly responsible to the Directorate of State Treasury Management. In terms of organization, the Special KPPN is under the State Treasury Regional Office of Special Capital Region of Jakarta Province. With the establishment of this Special KPPN, it is expected that state revenue can be enhanced in terms of both quantity and quality.

Special KPPN for Investment

The Special KPPN for Investment was formed in the framework of administering the text of investment agreement, channeling of government investment funds, calculation, billing, and issuance of orders to pay for government investment, forwarding loans, program loans, and other investments.





📍 **Matabesi, Atambua**
Fotografer: Fatih Walia Muthahhari, KPPN Atambua

Digital bermakna mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan proses bisnis untuk penyempurnaan layanan perbendaharaan yang unggul dan berkualitas. Program strategis dilakukan dengan terus melakukan perbaikan dan menciptakan inovasi dan simplifikasi proses bisnis, serta responsif dan adaptif terhadap dinamika perubahan serta mendorong digitalisasi pelaksanaan APBN.

Digital means optimizing the use of information technology in the implementation of business processes for the improvement of superior and quality treasury services. The strategic program is carried out by continuously making improvements and creating innovation and simplification of business processes, as well as being responsive and adaptive to the dynamics of change and encouraging the digitization of the implementation of the State Budget.

03

Sumber Daya Manusia

Human
Resources
Management



Memainkan fungsi Regional Chief Economist membutuhkan dukungan dari seluruh jajaran Insan Perbendaharaan. Ditjen Perbendaharaan memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan siap untuk terus meningkatkan kapasitas dalam membangun organisasi.

Fulfilling the function of the Regional Chief Economist requires the support of all Treasury Personnel. In this regard, the Directorate General of Treasury has qualified Human Resources and is ready to continue to increase capacity in building the organization.





Profil Sumber Daya Manusia Human Resources Profile

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu unsur penting penentu keberhasilan kinerja organisasi. Ditjen Perbendaharaan (DJPb) terus berupaya menghadirkan beragam inovasi guna meningkatkan kualitas layanan pengelolaan SDM demi menunjang pencapaian kinerja organisasi.

Human Resources (HR) represents an important element in determining the success of organizational performance. The Directorate General of Treasury continues to initiate various innovations to improve the quality of HR management to support the achievement of organizational goals.

Komposisi pegawai DJPb per 31 Desember 2021 sebanyak 7.006 pegawai, terdiri dari beragam latar belakang berdasarkan jenjang pendidikan, kelompok generasi, usia, jabatan, jenis kelamin, status kepegawaian, maupun status kepangkatan sebagai berikut.

As of December 31, 2021, DG Treasury had 7,006 employees with diverse backgrounds in terms of education level, generation group, age, position, gender, employment status, and rank as per the following.

Berdasarkan Jenis Kelamin Based on Gender



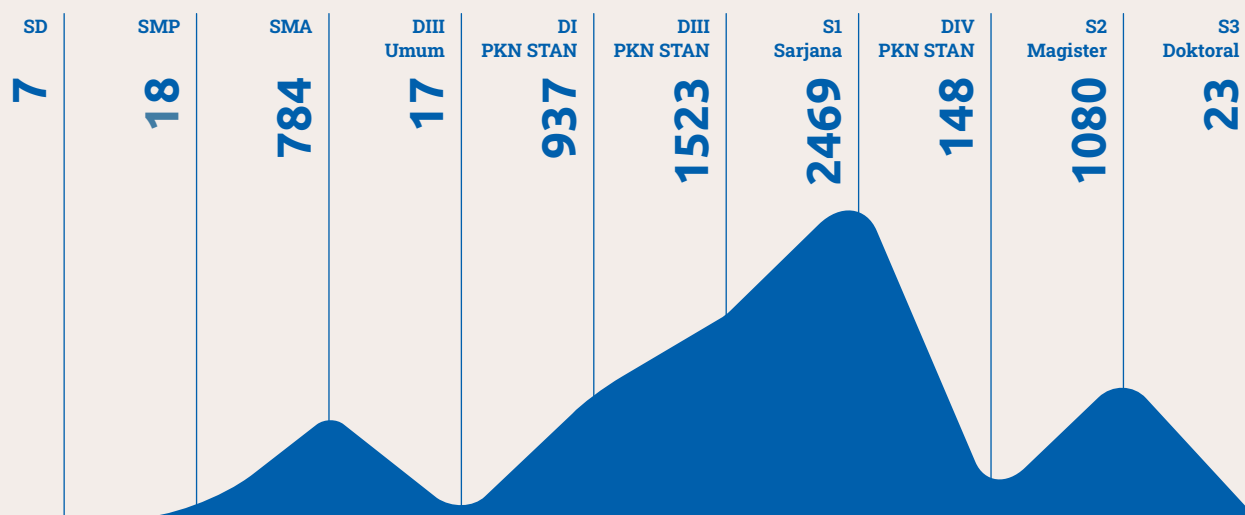
Berdasarkan Status Kepegawaian Based on Employment Status

492	3	4	34
CPNS	MPP	CTLN	PIP
6368	66	28	11
PNS	TB	BPDPKS	BPDLH

Berdasarkan Kepangkatan Based on Rank



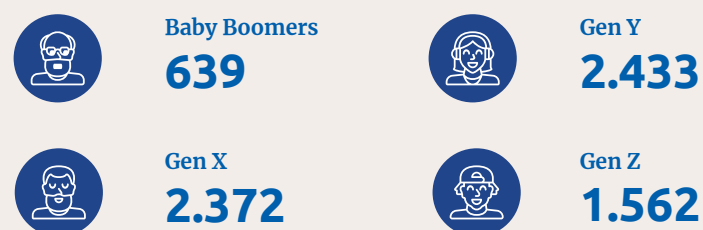
Berdasarkan Pendidikan Based on Education Level



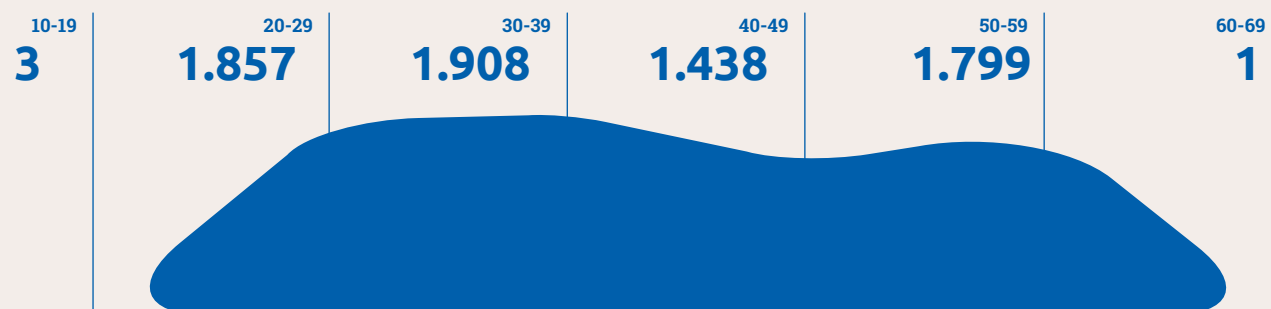
Berdasarkan Jabatan Based on Position

Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Pelaksana
1	36	370	1.537	388	4.674

Berdasarkan Generasi Based on Generation Group



Berdasarkan Umur Based on Age



Pendidikan dan Pelatihan Education and Training

Pendidikan Education

Selama tahun 2021, terdapat 14 program beasiswa yang ditawarkan kepada pegawai DJPb yaitu:

1. Beasiswa *Fulbright* (Masters Program) dari American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF);
2. Beasiswa Program Pascasarjana Pusbindiklatren Bappenas dan *Split-Site Master Program* Australia dari Bappenas;
3. Beasiswa *Program in Economic Public Policy* (PEPP) dari Universitas Tsukuba, Jepang;
4. Beasiswa program S1, S2, dan S3 dari *Islamic Development Bank* (IsDB);
5. Beasiswa Magister Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo);
6. Beasiswa *Australia Awards Scholarship* (AAS);
7. Beasiswa *Korea International Cooperation Agency* (KOICA);
8. Beasiswa Kementerian Keuangan (*Ministerial Scholarship*);
9. Beasiswa Pendidikan Indonesia Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);
10. Beasiswa DIII dan DIV Politeknik Keuangan Negara STAN;
11. Beasiswa S1 Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (PIK-BKN);
12. Beasiswa Lee Kuan Yew School of Public Policy Master Degree di Singapura;
13. Beasiswa *Chevening*; dan
14. Beasiswa Pascasarjana *Japan-IMF Scholarship Program for Asia* (JISPA).

During 2021, DG Treasury personnel were offered to attend 14 scholarship programs, as follows:

1. *Fulbright Scholarship* (Masters Program) from the American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF);
2. *Pusbindiklatren Bappenas Postgraduate Scholarship* and *Australian Split-Site Master Program* from Bappenas;
3. *Scholarship in Economic Public Policy* (PEPP) from Tsukuba University, Japan;
4. *Scholarships in bachelors, masters and Ph.D degree programs* from the Islamic Development Bank (IsDB);
5. *Ministry of Communication and Informatics (Kominfo) Internal Masters Scholarships*;
6. *Australia Awards Scholarship* (AAS);
7. *Korea International Cooperation Agency* (KOICA) *Scholarship*;
8. *Ministry of Finance Scholarship* (*Ministerial Scholarship*);
9. *Indonesia Endowment Fund for Education* (LPDP) *Scholarship*;
10. *Diploma III and DIV Scholarships* from the STAN State Finance Polytechnic;
11. *Civil Service Education Bachelors Scholarship* from the State Employment Agency (PIK-BKN);
12. *Lee Kuan Yew School of Public Policy Master Degree Scholarship* in Singapore;
13. *Chevening Scholarships*; and
14. *Postgraduate Scholarships* under *Japan-IMF Scholarship Program for Asia* (JISPA).

Sejumlah 29 pegawai DJPb dinyatakan lolos seleksi dan berhak mendapatkan beasiswa.

A total 29 employees were passed the selection and entitled to receive scholarships.

Pengelolaan Pendidikan di Luar Kedinasan Management of Non-Service Education Programs

Selama Tahun 2021, terdapat 301 pegawai yang melanjutkan pendidikan di luar kedinasan

During 2021, a total of 301 employees attended non-service continuing education programs

Program ini dilaksanakan dalam rangka pemerataan akses dalam melanjutkan pendidikan dan penyeimbangan kebutuhan pendidikan lanjutan bagi pegawai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup DJPb. Program tersebut dikelola sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.01/2012, dan dalam menentukan pilihan program studi yang menjadi kebutuhan organisasi berpedoman pada Program Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil/Human Capital Development Program (PPKPNS/HCDP) DJPb 2018 - 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 827/KM.1/2019. Selama Tahun 2021, terdapat 301 pegawai yang melanjutkan pendidikan di luar kedinasan dengan rincian sebagai berikut:

1. pendidikan S1, sebanyak 235 pegawai;
2. pendidikan S2, sebanyak 59 pegawai;
3. pendidikan S3, sebanyak 7 pegawai.

The non-service education scheme is implemented to equalize access in continuing education and to balance the capacity building requirements of employees in line with their roles and functions within DG Treasury. This program is managed with reference to guidelines in the Minister of Finance Regulation No. 148/PMK.01/2012, and the determination of study programs required by the organization is guided by the DG Treasury Human Capital Development Program (HCDP) 2018 - 2023 in line with Minister of Finance Decree No. 827/KM.1/2019. During 2021, a total of 301 employees attended non-service continuing education programs as per the following details:

1. Bachelors level education, with 235 employees;
2. Master's level education, with 59 employees;
3. Ph.D level education, with 7 employees.

Monitoring dan Evaluasi Pegawai Tugas Belajar

Monitoring and Evaluation of Employees Undergoing Study Assignments

Kegiatan monev dilaksanakan dengan peserta sebanyak 65 pegawai, yang terdiri dari 51 peserta dari universitas dalam negeri, dan 14 peserta dari universitas luar negeri

Monev was conducted against 65 employees, comprising 51 participants from domestic universities and 14 participants from foreign universities

DJPb menaruh perhatian tinggi terhadap pegawai yang melaksanakan tugas belajar. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun.

Tujuan kegiatan ini sebagai sarana pemantauan perkembangan studi dan *problem solving* berbagai kendala akademik maupun non akademik para pegawai tugas belajar DJPb, sehingga diharapkan pegawai tugas belajar dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Selain itu, pada kegiatan monev tahun 2021 ini menjadi sarana sosialisasi terkait perkembangan pengelolaan jurnal

DG Treasury pays high attention to employees who are undergoing study assignments. One way of keeping track is through monitoring and evaluation (monev), which is held regularly every year.

The objective of this activity is to monitor the progress of studies and solve various academic and non-academic issues for DG Treasury employees underdoing study assignments, with the hope that they would be able to complete their studies on time. Furthermore, the 2021 monev cycle was also a means of disseminating DG Treasury scientific

karya tulis ilmiah DJPb, yaitu Jurnal Indonesian Treasury Review (ITRev) dan Jurnal Manajemen Perbendaharaan, kepada para pegawai tugas belajar.

Dengan mengusung tema "Awardee HAnDAL dan Tetap Berprestasi di Era New Normal", kegiatan monev dilaksanakan dengan peserta sebanyak 65 pegawai, yang terdiri dari 51 peserta dari universitas dalam negeri, dan 14 peserta dari universitas luar negeri, dan komposisi peserta monev berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut.

1. Tujuh peserta pendidikan Doktoral (S3);
2. Lima puluh sembilan peserta pendidikan Magister (S2);
3. Tujuh peserta pendidikan Sarjana (DIV/S1); dan
4. Tiga peserta pendidikan Diploma III (D3).

Re-Entry Program Re-Entry Program

Selama tahun 2021, terdapat 54 pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar dan melaksanakan program re-entry pada Kantor Pusat DJPb

During 2021, 54 personnel having completed their study assignments joined the re-entry program at the DG Treasury Head Office

Setiap pegawai yang telah selesai tugas belajar akan melaksanakan re-entry program sebelum ditempatkan kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi. Program ini harus dilalui untuk memperbarui pengetahuan teknis pegawai dengan perubahan dinamika proses bisnis DJPb.

Pelaksanaan re-entry program minimal pada dua Unit Eselon II dengan norma waktu paling lama enam bulan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 982/KMK.01/2017 tentang Program Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (PPKPNS) di Lingkungan Kementerian Keuangan, selama melaksanakan program re-entry, setiap pegawai akan diberikan penugasan dalam tim *task force*, *project assignment*, melakukan analisis/evaluasi dan memberi masukan atas proses bisnis pada unit penerima, pelaksanaan sharing session, serta penugasan lainnya yang diberikan unit kerja tempat re-entry.

journals such as the Indonesian Treasury Review (ITRev) Journal and the Treasury Management Journal to the students undergoing study assignments.

Under the theme of "Awardee HAnDAL and Tetap Berprestasi di Era New Normal" (Reliable Awardee and Continuous Achievement in the New Normal Era), monev was conducted against 65 employees, comprising 51 participants from domestic universities and 14 participants from foreign universities. The composition of the monitoring and evaluation participants based on education level was as follows:

1. Seven participants in Doctorate level education;
2. Fifty Nnine participants in Masters level education;
3. Seven participants in Undergraduate education;
4. Three participants in Diploma III (D3) level education.

Each employee who has completed a study assignment needs to go through a re-entry program before being re-assigned as per organizational needs. This program is aimed at updating employees' technical knowledge with changes in DG Treasury business processes.

The re-entry program is implemented at a minimum of two echelon II units for a maximum period of six months. Based on Minister of Finance Decree No. 982/KMK.01/2017 concerning Competency Development Program for Civil Servants in the Ministry of Finance, each employee in the re-entry program is assigned to the task force and project assignment teams, conducts analysis and provides inputs on business processes of the relevant unit, organizes sharing sessions, and performs other assignments given by the re-entry work unit.

Selama tahun 2021, terdapat 54 pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar dan melaksanakan program re-entry pada Kantor Pusat DJPb dan komposisi pegawai re-entry berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut:

1. pendidikan Sarjana (DIV/S1), sebanyak 23 pegawai;
2. pendidikan Magister (S2), sebanyak 26 pegawai;
3. pendidikan Doktoral (S3), sebanyak 5 pegawai.

Pelatihan Training

Selama tahun 2021, terdapat 5.669 jam pelatihan yang ditawarkan melalui 186 pelatihan, dengan peserta sebanyak 17.290 pegawai di berbagai pelatihan

During 2021, a total of 5,669 hours of training were offered through 186 training programs, with total 17,290 participants attended in various training programs

DJPb menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk mengembangkan *soft competency* dan *hard competency* setiap pegawai yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi. Jika dilihat pada kerangka pengembangan kompetensi SDM DJPb terdapat dua jalur pelatihan, yaitu klasikal dan nonklasikal. Desain pelatihan DJPb menggunakan pendekatan perancangan dan pelaksanaan program pembelajaran dengan proporsi 70% pembelajaran secara terintegrasi di tempat kerja atau experience, 20% pembelajaran dilakukan secara kolaboratif dalam sebuah komunitas atau bimbingan, dan 10% pembelajaran dilakukan secara terstruktur melalui pelatihan atau studi mandiri.

Selama tahun 2021 DJPb melaksanakan program pelatihan yang diadministrasikan secara terpadu melalui Aplikasi Training dan terdapat 5.669 jam pelatihan yang ditawarkan melalui 186 pelatihan. Adapun jumlah peserta yang mengikuti pelatihan adalah sebanyak 17.290 peserta. Sebagian besar pelatihan yang diselenggarakan pada tahun 2021 dilakukan melalui kerjasama

During 2021, 54 personnel having completed their study assignments joined the re-entry program at the DG Treasury Head Office. In this regard, the composition of re-entry employees based on education level was as follows:

1. Bachelors level education, with 23 employees;
2. Masters level education, with 26 employees;
3. Doctorate level education, with 5 employees.

DG Treasury organizes various trainings to impart soft competency and hard competency skills to employees that are expected to deliver a positive impact on organizational performance. If we look at the framework for developing DG Treasury's HR competencies, there are two training paths, i.e. classical and non-classical. The trainings have been designed using an integrated approach, with 70% integrated learning in the workplace or experience, 20% learning done collaboratively in a community or mentoring, and 10% learning conducted in a structured manner through training or independent study.

During 2021, DG Treasury conducted various training initiatives that were administered in an integrated manner through the Training Application. In this regard, a total of 5,669 hours of training were offered through 186 training programs. Overall, 17,290 participants attended the various training programs. In 2021, most of the DG Treasury training was delivered in collaboration with the Financial Education and Training Agency (BPPK) or other agencies. Furthermore,

DJPb dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) atau instansi lainnya. Selain itu, terdapat program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara swakelola, yaitu:

1. Shortcourse

a. Shortcourse Analisis Dampak Belanja Pemerintah

Seiring dengan perkembangan organisasi DJPb untuk melaksanakan fungsi *Regional Chief Economist* (RCE), sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan negara, diperlukan dukungan SDM di lingkungan DJPb yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tinggi, serta mampu melakukan identifikasi dan analisis permasalahan. Salah satu program peningkatan kompetensi SDM yang telah dilaksanakan DJPb adalah Program *Shortcourse Analisis Dampak Belanja Pemerintah* yang diikuti 40 orang peserta, terdiri dari 6 Pejabat/Pegawai Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan 34 Pejabat/Pegawai perwakilan seluruh Kanwil DJPb.

Shortcourse tersebut menghadirkan tim pengajar dari LPEM Universitas Indonesia dan dilaksanakan dengan konsep pembelajaran terintegrasi dengan menggabungkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring. Output yang dihasilkan berupa Data Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Laporan Analisis Dampak KEK. Para peserta diharapkan dapat berkontribusi secara optimal pada penyusunan laporan dan/atau kajian strategis seperti Kajian Fiskal Regional, *Spending Review*, *Review Pelaksanaan Anggaran* dan output lainnya.

various self-managed competency development programs were delivered, as follows:

1. Shortcourse

a. Shortcourse on Government Expenditure Impact Analysis

In line with the current development where DG Treasury has been tasked to perform the role of *Regional Chief Economist* (RCE) and become a strategic partner of regional governments in managing state finances, the support of qualified HR having high competence and qualifications within the organization is vital for identifying and analyzing problems. In this regard, one of the HR competency development programs implemented by DG Treasury is the *Short Course on Government Expenditure Impact Analysis*, which was attended by 40 participants, comprising 6 officials/employees from the Directorate of Budget Execution and 34 officials/employees from DG Treasury regional offices.

This short course was delivered by a teaching team from LPEM, University of Indonesia and involved an integrated learning concept through online learning. The output of this activity was *Special Economic Zone* (SEZ) data and *Impact Analysis Report of SEZs*. Going forward, participants are expected to contribute to the preparation of reports and/or strategic studies such as *Regional Fiscal Studies*, *Spending Review*, *Budget Execution reviews* and other outputs.



b. Shortcourse Data Science for Non Programmers

Program Shortcourse Data Science For Non Programmers merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas Tim Champion Analis DJPb. Sebagai organisasi modern yang menuju data-driven organization, serta penguatan analisis kebijakan treasury yang berbasis data, program ini menjadi kebutuhan dalam pengembangan kompetensi SDM DJPb.

2. Workshop

a. Workshop Crash Program Analisis Dampak Belanja Pemerintah

Kegiatan Workshop Analisis Dampak Belanja Pemerintah dilaksanakan secara daring, mulai tanggal 8 November s.d. 19 November 2021. Peserta kegiatan berjumlah 30 peserta yang merupakan anggota Tim Champion Analis DJPb. Kegiatan Workshop Analisis Dampak Belanja Pemerintah melibatkan narasumber dari LPPM IPB. Materi disampaikan secara terstruktur, mulai dari konsep teori makroekonomi, fiskal, dan berbagai metode analisis dampak, contoh penerapan analisis dampak, serta simulasi penggunaan tool ekonometrika (STATA) dalam analisis dampak.

b. Workshop Crash Program Analisis Treasury

Kegiatan Workshop Analisis Treasury DJPb dilaksanakan secara daring, mulai tanggal 23 November s.d. 25 November 2021, dengan 19 peserta yang merupakan anggota Tim Champion Analis DJPb. Materi yang disampaikan meliputi, Strategi Pengelolaan Pembiayaan dan Manajemen Risiko Pembiayaan, Manajemen Risiko Fiskal, Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam

b. Short Course on Data Science for Non Programmers

The Data Science For Non Programmers Short Course is one part of a series of capacity building activities for the DG Treasury Champion Analyst Team. As a modern institution that is moving towards a data-driven organization and to strengthen data-based treasury policy analysis, this program has become a necessity in developing DG Treasury HR competencies.

2. Workshops

a. Crash Program Workshop on Government Expenditure Impact Analysis

The Government Expenditure Impact Analysis Workshop was held online on 8 – 19 November 2021. This activity was attended by 30 participants and members of the DG Treasury Champion Analyst Team. This workshop involved resource persons from LPPM IPB. The workshop materials were delivered in a structured manner, beginning with macroeconomic theory, fiscal theory, various impact analysis methods, examples of the application of impact analysis, and simulations of using econometric tools (STATA) in impact analysis.

b. Crash Program Workshop on Treasury Analysis

The Treasury Analysis Workshop was held online on 23 – 25 November 2021 and was attended by 19 participants from the DG Treasury Champion Analyst Team. The presented materials included Financing Management Strategy and Financing Risk Management, Fiscal Risk Management, Basic Macroeconomic Assumptions in the Preparation of the State Budget, Impact of the State Budget on the

Penyusunan APBN, Dampak APBN pada Ekonomi Makro, serta Dampak Pengelolaan Fiskal pada Sektor Moneter.

3. Leadership Development Program

Leadership Development Program (LDP) merupakan program pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pegawai, sebagai salah satu strategi leaders factory DJPb dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. LDP terdiri dari dua jenis kegiatan, yaitu persiapan menghadapi Assessment Center dan pembekalan bagi pegawai yang diangkat pada jabatan struktural setingkat lebih tinggi atau posisi jabatan lain yang dianggap strategis di lingkungan Kementerian Keuangan.

Adapun materi yang disampaikan meliputi kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dengan penekanan secara khusus pada aspek-aspek yang dibutuhkan sesuai kebutuhan peserta.

4. Secondment

Secondment merupakan program pengayaan pengalaman dan pengembangan kompetensi serta keahlian pegawai melalui keterlibatan dalam proses kerja pada unit target pada jangka waktu tertentu dengan output berupa rekomendasi perbaikan Standar Operating Procedure (SOP) atau peraturan atau kebijakan pada unit target. Pada tahun 2021, terdapat dua program secondment yaitu Secondment Kementerian Keuangan yang diselenggarakan sebanyak

Macro Economy, and Impact of Fiscal Management on the Monetary Sector.

3. Leadership Development Program

The Leadership Development Program (LDP) is a managerial and socio-cultural competency development program for employees, and represents one of DG Treasury's leaders factory strategies to achieve the organization's vision and mission. LDP consists of two types of activities, namely preparation for the Assessment Center and debriefing for employees who are appointed to higher-level structural positions or other positions that are considered strategic within the Ministry of Finance.

In this regard, the training material imparted includes managerial and socio-cultural competencies in accordance with the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation No. 38 of 2017 concerning Competency Standards for State Civil Service Positions with special emphasis on required aspects as per the needs of participants.

4. Secondment

Secondment is an experience enrichment program to develop employee competence and expertise through involvement in work processes at a target unit for a certain period. The expected outputs are in the form of recommendations for improving the Standard Operating Procedures (SOP) or regulations or policies in the target unit. In 2021, two types of secondment programs were held, i.e., Secondment at the Ministry of Finance that was held in two phases



dua tahap oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Secondment pada BLU di lingkungan DJPb yang diselenggarakan sebanyak dua tahap oleh Sekretariat DJPb sesuai dengan permintaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

5. E-Learning Leader as a Coach Tahun 2021

Dalam rangka membekali para Pejabat Administrator baru dengan kompetensi *coaching* dan *leadership*, serta mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-3/MK.1/2021 tentang Pelaksanaan Pembelajaran *Coaching*, Mentoring dan *Counseling* di lingkungan Kementerian Keuangan, DJPb menyelenggarakan kegiatan *E-Learning Leader as a Coach*, yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi *coaching* bagi Pejabat Administrator baru pada tahun 2021.

6. Program Induksi dan Orientasi

Dalam rangka memberikan gambaran umum dan pendalaman tugas, fungsi, dan proses bisnis bagi para pegawai baru, DJPb melaksanakan program Induksi dan Orientasi Pegawai Baru. Program ini dibutuhkan untuk memperkenalkan dan menanamkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan budaya organisasi, serta memotivasi dan melatih kemampuan dan keterampilan pegawai baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2021, DJPb menerima 511 pegawai baru yang terdiri dari 21 pegawai baru/CPNS Rekrutmen Umum Formasi Tahun 2019, dan 490 pegawai baru/CPNS Lulusan PKN STAN Tahun 2020.

Dalam implementasi Program Induksi dan Orientasi Pegawai Baru, DJPb mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 948/KMK.01/2016 tentang Pedoman Orientasi Calon Aparatur Sipil

by the Ministry's Secretariat, and Secondment at DG Treasury public service agencies (BLU) that was organized in two phases by the DG Treasury Secretariat in accordance with the request of the Directorate of Investment Management System.

5. E-Learning Leader as a Coach' Activity in 2021

With the objective of imparting coaching and leadership competencies to new Administrators, and to execute the Minister of Finance Circular No. SE-3/MK.1/2021 concerning Implementation of Coaching, Mentoring and Counseling Learning within the Ministry of Finance, DG Treasury organized the 'E-Learning Leader as a Coach' activity, which was intended to enhance the coaching competence of new Administrator officers in 2021.

6. Induction and Orientation Program

To provide an overview and deeper understanding of the duties, functions, and business processes for new employees, DG Treasury conducts the New Employee Induction and Orientation program. This program is required to introduce and instill the Ministry of Finance values and organizational culture, and to motivate and train new employees in carrying out their duties and functions.

In 2021, DG Treasury accepted 511 new employees into the organization, which comprise of 21 new employees from General Recruitment 2019, and 490 new employees from PKN STAN 2020 graduates.

Implementation of the New Employee Induction and Orientation Program is guided by the Minister of Finance Decree No. 948/KMK.01/2016 concerning Orientation Guidelines for State Civil Servant Candidates within the

Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-497/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Program Induksi dan Orientasi Pegawai Baru di Lingkungan DJPb. Kegiatan induksi orientasi bagi pegawai baru/CPNS DJPb lulusan Rekrutmen Umum dan PKN STAN dilaksanakan mulai dari pembekalan awal yang dikemas dalam bentuk *In Class Training/ Pembelajaran Jarak Jauh, On the Job Training (OJT)*, dan penugasan untuk mengikuti beberapa pelatihan sebagai bekal para CPNS dalam memahami tugas dan fungsi organisasi.

7. Tes Online Hard Competency

DJPb melaksanakan Tes *Online Hard Competency (TOHC)* setiap tahun untuk mengetahui tingkat penguasaan teknis para pegawai pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan uraian jabatan masing-masing. Para pegawai DJPb memiliki IKU Nilai Penguasaan Terhadap Hard Competency dengan nilai ambang batas sebesar 78.

Peserta TOHC adalah seluruh pegawai DJPb yang berstatus PNS, memiliki IKU Nilai Penguasaan terhadap *Hard Competency*, tidak sedang menjalankan tugas belajar, dan tidak menduduki jabatan fungsional. TOHC tahun 2021 dilaksanakan dalam enam batch, dimulai pada tanggal 6 September sampai dengan 22 Oktober 2021. Jumlah peserta tes pada tahun 2021 yang *eligible* sebanyak 4.062 pegawai dengan tingkat partisipasi sebesar 100%, dan sebanyak 4.057 pegawai (99,88%) dinyatakan lulus yang berarti pegawai tersebut berhasil mendapatkan nilai di atas ambang batas 78.

Ministry of Finance, and Director General of Treasury Decree No. KEP-497/PB/2017 concerning Technical Guidelines for New Employee Induction and Orientation Program within the DG Treasury. Orientation for new employees involves an initial debriefing through *In Class Training/Distance Learning*, and other activities such as *On the Job Training (OJT)* and assignments to participate in several trainings for understanding the various tasks and functions of the organization.

7. Online Hard Competency Test

DG Treasury conducts an *Online Hard Competency Test* every year to determine the level of technical mastery of implementers in accordance with their respective fields of duty and job descriptions. DG Treasury employees have a KPI on mastery of hard competency with a threshold value of 78.

The *Online Hard Competency Test* is meant for DG Treasury employees as civil servants who have the KPI of *Mastery of Hard Competency*, currently not undergoing study assignments, and currently not working in functional positions. The *Online Hard Competency Test* 2021 was held in six batches from September 6 to October 22, 2021. The number of eligible test participants for the year was 4,062, and saw a participation rate of 100%. Overall, 4,057 employees (99.88%) were deemed to have passed the test, meaning that they successfully received a score above the threshold of 78.

8. Training Impact Analysis

Training Impact Analysis (TIA) dilaksanakan untuk mengukur tingkat implementasi kompetensi yang didapatkan dari suatu pelatihan, serta menganalisis dampak pelatihan dimaksud terhadap peningkatan kinerja pegawai dan organisasi. Objek TIA DJPb tahun 2021 adalah 5 pelatihan strategis, yaitu Pelatihan Government Spending Analysis, Pelatihan Penajaman Fungsi Revisi, Pengelolaan Hibah, dan Pengelolaan Pinjaman, Pelatihan Kebijakan Analisis Fiskal dan Ekonomi Makro, Pelatihan Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan K/L, dan Pelatihan SIKRI Modul Pelaporan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei on the spot dengan memberikan kuesioner dan in-depth interview kepada 38 responden utama (alumni pelatihan), dan 78 responden pendukung (peer, atasan langsung, dan pimpinan unit kerja).

9. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas

Pada tahun 2021, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Pusdiklat PSDM) telah menyelenggarakan UPKP V, dan UD Tingkat I secara daring di unit kerja masing-masing peserta. UPKP V Tahun 2021 diselenggarakan pada tanggal 22 November s.d. 23 November 2021, dan UD Tingkat I Tahun 2021 diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober s.d. 29 Oktober 2021. Sebagai persiapan sebelum mengikuti UPKP V dan UD Tingkat I, para peserta dibekali dengan e-learning yang berisikan materi-materi yang akan diujikan pada UPKP V dan UD Tingkat I Tahun 2021 melalui Kemenkeu Learning Center (KLC).

8. Impact Analysis Training

The Impact Analysis Training aims to measure the competencies imparted from training programs, and to analyze the impact of trainings on improving employee and organizational performance. The objects of the DG Treasury Impact Analysis Training in 2021 were 5 strategic trainings, namely Government Spending Analysis Training; Honing of the Revision Function, Grant and Loan Management Training; Fiscal and Macroeconomic Analysis Policy Training; Training for Personnel Overseeing the Compilation of Ministry/Agency Financial Reports; and SIKRI Reporting Module Training. In this context, data was collected by an on-the-spot survey through questionnaires and in-depth interviews against 38 main respondents (training alumni), and 78 supporting respondents (peers, direct supervisors, and work unit leaders).

9. Promotion (UPKP) and Service (UD) Exams

In 2021, the Financial Education and Training Agency's Human Resource Education and Training Center organized the UPKP V and UD Level I online exams at the work units of the respective participants. The UPKP V 2021 exam was held on 22 – 23 November 2021, while the UD Level I 2021 exam was held on 25 – 29 October 2021. As preparation for taking these exams, participants were provided with e-learning along with exam materials through the Ministry of Finance Learning Center (KLC).



Program Strategis Pengelolaan SDM Strategic Programs on HR Management

Pengembangan Kapasitas Analisis Pegawai Capacity Building on Conducting Analysis

Tailor-Made training merupakan pelatihan yang didesain secara khusus dengan kurikulum yang mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kompetensi existing pegawai

Tailor-made trainings are specially designed activities with a curriculum that considers organizational needs and the existing competence of employees

Dalam rangka mendukung peranan DJPb yang semakin strategis, khususnya dalam bidang analisis, Bagian SDM telah melaksanakan program pengembangan kapasitas pegawai analis. Pada tahun 2021, hal ini diwujudkan dengan piloting Pembentukan Tim Champion Analisis Kantor Pusat.

Tim Champion Analisis Kantor Pusat sebanyak 56 pegawai telah diikuti dalam Workshop Analisis Dampak, Workshop Analisis Treasury, Workshop Data Science, dan Persiapan Certified Treasury Professional. Pelaksanaan pelatihan tersebut mengusung konsep Tailor-Made Training bekerja sama dengan akademisi, lembaga perbankan, dan lembaga profesional.

Tailor-Made training merupakan pelatihan yang didesain secara khusus dengan kurikulum yang mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kompetensi existing pegawai. Hal ini berbeda dengan pelatihan pada umumnya, dimana terkadang kurikulum yang diberikan cenderung terlalu umum sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi atau materi yang diberikan tidak mempertimbangkan kapasitas peserta, sehingga peserta tidak mampu memahami materi yang diberikan dengan baik.

To support the increasingly strategic role of DG Treasury, particularly in the field of analysis, the HR Division conducted a capacity building program for analyst employees. In 2021, this was realized by piloting the formation of the Head Office Champion Analyst Team.

The Head Office Champion Analyst Team of 56 employees has been included in various activities such as Impact Analysis Workshop, Treasury Analysis Workshop, Data Science Workshop, and Preparation of Certified Treasury Professional. These training activities were conducted under the Tailor-Made Training concept in collaboration with academics, banking institutions, and other professional institutions.

Tailor-made trainings are specially designed activities with a curriculum that considers organizational needs and the existing competence of employees. This is different from training in general, where sometimes the curriculum provided tends to be too general, thereby not matching the organization's needs, or the material provided does not consider the capacity of the participants, who therefore are unable to properly understand the material.

Pengelolaan Pegawai Muda DJPb

Management of Young Employees at DG Treasury

Dengan pengelolaan yang tepat, maka pegawai muda DJPb akan bertumbuh menjadi pimpinan yang baik, dan akan mendorong DJPb menjadi lebih maju

With proper management, these young employees will grow to become good leaders, and will encourage DG Treasury to become a more advanced organization

Bagian SDM DJPb memberikan perhatian khusus terhadap pegawai mudanya. Hal ini didasari oleh perspektif *forward-looking*, di mana para pegawai muda DJPb merupakan calon pimpinan DJPb di masa depan. Dengan pengelolaan yang tepat, maka pegawai muda DJPb akan bertumbuh menjadi pimpinan yang baik, dan akan mendorong DJPb menjadi lebih maju.

Program-program pengelolaan pegawai muda yang telah dilaksanakan di tahun 2021, dan akan dikembangkan di tahun 2022 antara lain:

1. Penguatan dan Pengembangan Karakter Pegawai Muda DJPb;
2. Dukungan Pengembangan Kompetensi Analisis dan Komunikasi bagi pegawai muda;

3. Channeling Pegawai Muda dalam Komunitas Sosial / Intelektual; dan
4. Pengembangan Pusat Studi Perbendaharaan Negara.

Dalam rangka menggali aspirasi pegawai muda DJPb, Bagian SDM menyelenggarakan kegiatan dialog antara Dirjen Perbendaharaan dengan para pegawai *Centennial* di lingkungan DJPb. Acara tersebut diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2021 dengan *tagline* *T-Lounge: "Empowering Centennial, Unlocking the Potential for the New DJPb in Town"*.

The DG Treasury HR Department pays special attention to its young employees. This is based on a forward-looking perspective, where young employees are considered as future leader candidates. With proper management, these young employees will grow to become good leaders, and will encourage DG Treasury to become a more advanced organization.

The young employee management programs implemented in 2021 and to be developed in 2022 include the following:

1. Strengthening and Character Development of DG Treasury's Young Employees;
2. Support for Development of Competency Analysis and Communication for young employees;

3. Channeling of Young Employees in Social / Intellectual Communities; and
4. Development of the State Treasury Study Center.

To explore the aspirations of young employees, the HR Division held a dialogue between the Director General of Treasury and *Centennial* employees within DG Treasury. This event was held on December 9, 2021 with the *T-Lounge* tagline: "Empowering Centennials, Unlocking the Potential for the New DG Treasury in Town".





Peningkatan Peran Pejabat Fungsional APN dan PTPN Enhancing the Role of APN and PTPN Functional Officers

Mengantisipasi peningkatan peran Jabatan Fungsional di lingkungan DJPb dan dampak potensi delayering Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional, Bagian SDM menginisiasi beberapa program untuk meningkatkan peran Pejabat Fungsional Analis Perbendaharaan Negara (APN) dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN).

Hal tersebut dilakukan dengan mendorong pembentukan formasi Jabatan Fungsional (JF) APN sampai dengan jenjang Ahli Madya. Bagian SDM juga memformulasikan variasi pola kerja untuk JF, yang meliputi cross-functional team (tim lintas fungsi, mengerjakan proyek tertentu), self-managing team (tim lintas fungsi, mengerjakan tugas rutin), dan flow-to-hierarchy (kelompok JF yang melaksanakan tugas rutin masing-masing). Di samping itu, Bagian SDM juga menyelenggarakan peningkatan kompetensi teknis perbendaharaan dan kemampuan analisis JF melalui pelatihan fungsional.

In anticipation of the increasing role of functional positions within the Directorate General of Treasury and the potential impact of delayering structural positions into functional positions, the HR Division has initiated several schemes to enhance the role of State Treasury Analyst functional officers (APN) and State Treasury Technical Supervisors (PTPN).

This has the objective of encouraging the formation of APN functional positions (JF) up to the Associate Expert (Ahli Madya) level. The HR department has also formulated various work patterns for JF, which includes cross-functional teams (cross-functional teams, working on specific projects), self-managing teams (cross-functional teams, doing routine tasks), and flow-to-hierarchy (JF groups that carry out their respective routine tasks). In addition, the HR Division also organizes technical competence enhancement on treasury issues and JF analytical skills through appropriate functional training.

Rekomposisi Pegawai Analis dan Klerikal dalam rangka Implementasi Prinsip The Right Man in The Right Place

Recomposition of Analytical and Clerical Employees Under The Right Man in The Right Place Principle

Dalam rangka menopang berjalannya tugas dan fungsi DJPb yang semakin strategis, diperlukan komposisi SDM yang tepat kompetensi dalam setiap unit kerja di lingkungan DJPb (*The Right Man in The Right Place*). Untuk itu, Bagian SDM telah melakukan mapping organisasi dan SDM Unit Strategis. Hasil identifikasi menunjukkan apakah komposisi kompetensi SDM dalam unit strategis DJPb sudah cukup tepat untuk mendukung kinerja yang optimal di unit berkenaan. Untuk selanjutnya, implementasi prinsip *The Right Man in The Right Place* juga didukung

To support the increasingly strategic tasks and functions of DG Treasury, it is necessary to have the right composition of human resources with competence in each work unit within the organization (*The Right Man in The Right Place*). To that end, the HR Department has mapped the organization and HR of strategic units. The exercise outcomes indicate that the composition of HR competencies in DG Treasury strategic units is currently appropriate enough to support optimal performance in the relevant units. Henceforth, implementation of 'The Right Man in The Right Place' principle

oleh berbagai inovasi di bidang SDM seperti Aplikasi PRIDE dan Aplikasi Job Matching.

Aplikasi *Performance and Individual Evaluation* (PRIDE) merupakan tools yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi terhadap ketepatan dalam pengisian dan penempatan PNS sesuai dengan jabatannya (*the right man in the right place*). Aplikasi tersebut dikembangkan pada pertengahan tahun 2021 untuk memantau dan mengevaluasi kinerja bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

PRIDE dilakukan melalui pendekatan perilaku (*behavior*) dengan menggunakan 4 indikator, yaitu integritas, teknis pelaksanaan tugas, komitmen dan dedikasi, serta kemampuan pembelajar dan inovasi. Selain itu, juga terdapat catatan khusus keahlian dan pengembangan karier berikutnya oleh pimpinan unit kerja yang diperbarui setiap triwulan. Pada tahun 2021, PRIDE telah diimplementasikan pada triwulan III dan akan dilanjutkan pada triwulan IV yang dimulai awal Januari 2022.

Saat ini, hasil PRIDE dimanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan mutasi, pengembangan karier pegawai, sebagai data kepegawaian yang mendukung pelaksanaan data-driven organization di bidang ke-SDM-an. Data PRIDE ini akan disinkronisasikan dengan data *Self Assessment* Pemetaan Minat dan Kompetensi yang nantinya menjadi sebuah tools analisis ketepatan penempatan pegawai (*the right man in the right place*).

Aplikasi Job Matching disusun dengan konsep untuk mengkuantifikasi kecocokan setiap pegawai di setiap jabatan. Kuantifikasi tersebut dilakukan berdasarkan formulasi yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan kompetensi di masing-masing jabatan, serta kompetensi-

will also be supported by various HR-related innovations such as the PRIDE and Job Matching applications.

The Performance and Individual Evaluation (PRIDE) application is a tool to monitor and evaluate accuracy in fulfilling and placing civil servants in accordance with their competencies (the right man in the right place). This application was developed in mid-2021 to monitor and evaluate performance for Administrator and Supervisory level officers.

The PRIDE application uses a behavioral approach through 4 indicators, namely integrity, technical implementation of tasks, commitment and dedication, and learning ability and innovation. In addition, notes on special skills and subsequent career development potential by work unit leaders is updated on a quarterly basis. In 2021, PRIDE was implemented in Q3 and will be continued in Q4 starting in early January 2022.

Currently, the PRIDE outcomes are used as one of the considerations for employee transfers and continuing career development, and acts as personnel data for the drive towards a data-driven organization in the field of HR. Going forward, the PRIDE data will be synchronized with the Interest and Competency Mapping Self-Assessment data which will later be a tool for analyzing the appropriateness of employee placements (the right man in the right place).

The Job Matching application has been prepared with the concept of quantifying the suitability of each employee in each position. Quantification involves a formulation that considers the competency needs of each position, as well as the competencies possessed by each employee. This application started



kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Pada tahun 2021, aplikasi ini mulai dikembangkan dan disimulasikan hasil kuantifikasinya. Aplikasi ini akan disempurnakan di tahun 2022.

Selanjutnya, integrasi aplikasi dan pemanfaatan data SDM juga akan dilakukan di tahun 2022. Aplikasi yang akan diintegrasikan meliputi aplikasi PRIDE, aplikasi Job Matching, aplikasi PbnOpen, aplikasi mutasi (Sitasi), dan aplikasi pelatihan (Training). Dengan integrasi beberapa aplikasi tersebut, diharapkan pengelolaan SDM dan pengambilan keputusan atas rekomposisi SDM dapat dilakukan dengan pertimbangan informasi yang lebih komprehensif.

Penguatan Manajemen Karier

Enhancing Career Management

DJPb senantiasa memperkuat pelaksanaan sistem merit dimana pengelolaan SDM dilaksanakan dengan basis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan kompetensi dan pengembangan karier yang sesuai untuk pencapaian visi, misi, dan strategi DJPb. Beberapa program strategis yang telah dilakukan terkait hal ini adalah Manajemen Talenta dan Assessment Center.

Manajemen talenta dikembangkan untuk mencari, mengelola, mengembangkan dan mempertahankan pegawai terbaik yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan. Program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan organisasi dengan menyiapkan talent untuk mengisi posisi yang setingkat lebih tinggi atau posisi lain yang dianggap strategis dimana dapat memberi dampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi. Lebih jauh lagi, Manajemen Talenta memiliki

development in 2021 and a simulation of the quantification results was conducted during the year. The application is slated to undergo further refinements in 2022.

Furthermore, application integration and utilization of HR data will also be carried out in 2022. The applications to be integrated include PRIDE, Job Matching, PbnOpen, employee transfers (Sitasi), and training apps. With the integration of these applications, it is hoped that HR management and decision making on HR recomposition can be carried out by considering more comprehensive information.

DG Treasury continues to strengthen the merit system in which HR management is performed based on employee qualifications, competence, and performance. In this context, enhancement involves competence building and appropriate career development for the achievement of organization's vision, mission, and overall strategy. Strategic programs that have been carried out in this regard include Talent Management and Assessment Center.

Strengthening talent management involves finding, managing, developing, and retaining the best employees who are prepared as future leaders. The program is designed to answer the organizational needs by preparing talent to fill higher-level positions or other positions deemed strategic which can have a significant impact on the achievement of the organization's vision, mission, and strategy. Furthermore, Talent Management has several stages, namely: Talent Needs Analysis, Talent Identification, Talent Development, and Talent Evaluation. During 2021, Talent Management processes were implemented against

beberapa tahapan yaitu: Analisis Kebutuhan Talent, Identifikasi Talent, Pengembangan Talent, dan Evaluasi Talent. Selama tahun 2021, telah dilaksanakan Manajemen Talenta terhadap 719 pegawai dan didapatkan sejumlah 365 pegawai yang siap untuk naik ke jenjang karier yang lebih tinggi atau jabatan strategis.

Di sisi lain, Assessment Center merupakan upaya DJPb untuk menjaga kualitas kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dari para pegawai dan calon pejabat. Untuk mencapai hal tersebut, program ini dilaksanakan menggunakan beberapa metode penilaian dan melibatkan assessor / penilai independen yang dikhususkan untuk memprediksi pengetahuan, kompetensi, serta sikap/perilaku dari para pegawai dan calon pejabat dalam pelaksanaan tugasnya baik pada posisi saat ini maupun pada jenjang karier yang lebih tinggi. Pada tahun 2021, Assessment Center telah menilai kompetensi pegawai sebanyak 562 orang.

Ke depan, DJPb tengah menyusun Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.01/2020 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan untuk terus mendorong kinerja pegawai sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan DJPb.

Selain itu, guna mencetak talenta-talenta yang semakin kompetitif, akan dilaksanakan penguatan Talent Competitiveness, melalui rangkaian Kegiatan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi para calon talent di lingkungan DJPb. Program ini bertujuan untuk menjadikan para pegawai DJPb sebagai pemimpin masa depan yang semakin andal dalam menjawab tantangan perubahan organisasi dan tuntutan publik.

719 employees, where 365 employees were deemed ready to move up to a higher career level or strategic position.

On the other hand, the Assessment Center is DG Treasury's initiative to safeguard standards in terms of technical competence, managerial competence, and socio-cultural competence of employees and prospective officers. To achieve this, the program involves using several assessment methods and independent assessors/ appraisers who are devoted to predicting the knowledge, competencies, and attitudes/behaviors of employees and prospective officials in carrying out their duties both in their current position and at a higher career level. In 2021, the Assessment Center assessed the competence of 562 employees.

In the future, DG Treasury will issue a Director General of Treasury Regulation to follow up the Minister of Finance Regulation No. 224/PMK.01/2020 concerning Career Management within the Ministry of Finance. This has the objective of encouraging continuous employee performance in accordance with the dynamics in organizational requirements, and to improve the quality of infrastructure for human resource management within the Directorate General of Treasury.

In addition, to produce more competitive talents, Talent Competitiveness will be enhanced through a series of Cultural, Social and Managerial Competency Improvement activities for prospective talents within the organization. This program aims to make DG Treasury employees as future leaders who are increasingly reliable in responding to the challenges of organizational change and public demand.

Implementasi Learning Organization

Creating a Learning Organization

Di tahun 2021, DJPb terus menyempurnakan instrumen penilaian masing-masing komponen tersebut, baik dari sisi substansi komponen maupun indikator pengukuran

In 2021, DG Treasury continued to refine the assessment instruments for each of these components, both in terms of component substance and measurement indicators

DJPb memiliki aspirasi untuk menjadi organisasi yang dapat terus belajar secara berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan implementasi *Learning Organization* di Kementerian Keuangan dalam rangka memfasilitasi pembelajar agar mampu berkembang dan bertransformasi secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian kinerja DJPb dan Kementerian Keuangan. Implementasi *Learning Organization* di Kementerian Keuangan mensyaratkan kualifikasi dan komponen pelaksanaan sebagai berikut: *Strategic Fit and Management Commitment; Learning Function Organization; Learners; Knowledge Management Implementation; Learning Value Chain; Learning Solutions; Learning Spaces; Learners' Performance; Leaders' Participation in Learning Process; dan Feedback.*

Di tahun 2021, DJPb terus menyempurnakan instrumen penilaian masing-masing komponen tersebut,

DG Treasury aspires to become a first-class organization of continuous learning. This aspiration is in line with the implementation of the Ministry of Finance Learning Organization to facilitate learners in developing and transforming in a sustainable manner to support organizational performance and the Ministry of Finance as a whole. Implementing the Ministry of Finance Learning Organization requires the following qualifications and components: *Strategic Fit and Management Commitment; Learning Function Organization; Learners; Knowledge Management Implementation; Learning Value Chain; Learning Solutions; Learning Spaces; Learners' Performance; Leaders' Participation in Learning Process; and Feedback.*

In 2021, DG Treasury continued to refine the assessment instruments for each of these components, both in

baik dari sisi substansi komponen maupun indikator pengukuran. Pengukuran tingkat implementasi *Learning Organization* tahun 2021 dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu survei, self-assessment penerapan masing-masing komponen *Learning Organization*, dan penilaian komite *Learning Organization*. Dari proses penilaian tersebut, DJPb mendapatkan nilai tingkat implementasi *Learning Organization* sebesar 98,36, dan lebih tinggi daripada target yaitu sebesar 77.

Pada tahun berikutnya, dengan tetap mengacu pada konsep *Learning Organization* Kementerian Keuangan, DJPb akan terus berupaya meningkatkan kesesuaian implementasi *Learning Organization* melalui penyusunan strategi dan kerangka kerja yang lebih optimal serta melaksanakan internalisasi *Learning Organization* kepada unit vertikal secara lebih masif guna mewujudkan organisasi yang mampu melakukan perbaikan berkelanjutan guna mendukung pencapaian kinerja pemerintah bagi masyarakat.

terms of component substance and measurement indicators. Measuring the implementation level of the Learning Organization in 2021 was conducted in several stages, namely through surveys, self-assessment of the implementation of each Learning Organization component, and assessment of the Learning Organization committee. From the assessment process, DG Treasury received a learning organization implementation level score of 98.36, which was higher than the target of 77.

For the following year, by continuous reference to the Ministry of Finance Learning Organization concept, DG Treasury will strive to improve the suitability of the Learning Organization implementation through the formulation of more optimal strategies and frameworks and perform internal dissemination to vertical units on a bigger scale. This has the objective of creating an organization that can produce sustainable improvements and development in support of government services towards the community.



Penguatan Sistem Informasi dan Layanan SDM Strengthening Information Systems and HR Services

Bagian SDM Sekretariat DJPb akan senantiasa melakukan integrasi dan kolaborasi database pengelolaan SDM, serta penguatan validitas dan kualitas database SDM

The DG Treasury Secretariat's HR Department will continue to integrate and collaborate on HR management databases, and strengthen the validity and quality of databases

Seiring dengan dinamika yang berkembang, kemajuan teknologi, dan tuntutan dari stakeholders dalam hal pemenuhan layanan yang memuaskan dan mendekati sempurna, maka setiap unit kerja yang memiliki core business Seiring dengan dinamika yang berkembang, kemajuan teknologi, dan tuntutan dari stakeholders dalam hal pemenuhan layanan yang memuaskan dan mendekati sempurna, maka setiap unit kerja yang memiliki core business maupun penyelenggara pelayanan publik, dituntut untuk dapat memberikan layanan yang mampu memenuhi harapan stakeholder, dan mampu memberikan kesan positif yang mendalam atas layanan yang telah diberikan.

Pada tahun 2021, Bagian SDM telah melakukan integrasi data absensi secara online dari e-DJPb dan Office Automation e-Kemenkeu ke dalam aplikasi SiLAP yang bertujuan untuk multi sumber data kehadiran (presensi) pegawai, memberikan ragam pilihan yang fleksibel bagi pegawai untuk melakukan presensi, dan memudahkan pengelola kepegawaian dalam melakukan administrasi data kehadiran pegawai, serta mendukung pelayanan pemenuhan hak-hak pegawai, dalam hal ini pembayaran tunjangan kinerja, pembayaran uang makan dan uang lembur.

Selain itu, sebagai upaya untuk terus meningkatkan pelayanan, Bagian SDM juga melakukan survei kepuasan layanan kepada pegawai sebagai pengguna layanan untuk memperoleh umpan balik dan evaluasi dari stakeholders, serta menggali informasi, ide-ide, saran dan masukan guna

In accordance with current dynamics, technological advances, and stakeholder demand for delivering satisfactory and near-perfect services, every work unit that has a core business or providing a public service is required to deliver In accordance with current dynamics, technological advances, and stakeholder demand for delivering satisfactory and near-perfect services, every work unit that has a core business or providing a public service is required to deliver those services as per expectations, and to be able to leave a significant favorable impression on the services rendered.

In 2021, the HR Department integrated the online attendance data from e-DJPb and Office Automation e-Kemenkeu into the SiLAP application, which is intended to be a multi-source of employee attendance. This application also provides a variety of flexible options for employees to mark attendance and facilitate personnel managers in administering employee attendance data. Furthermore, the application has features for fulfilling employee rights, in this case payment of performance allowances, payment of meal allowances and overtime pay.

In addition, as an effort to continuously improve services, the HR Department also conducts service satisfaction surveys for employees as service users to obtain feedback and evaluation from stakeholders, as well as compiling ideas, suggestions, and input to improve HR management services.

peningkatan layanan pengelolaan SDM. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan UKP dan KGB tahun 2021 sebesar 98.30% (0,98) dengan kriteria sangat puas, dan rata-rata tingkat kepuasan sebesar 4,92 dari skala 5 yaitu kategori sangat puas.

Ke depan, Bagian SDM Sekretariat DJPb akan senantiasa melakukan integrasi dan kolaborasi database pengelolaan SDM, serta penguatan validitas dan kualitas database SDM guna mendukung analisis dan pengambilan kebijakan pengelolaan SDM yang lebih modern dan strategis.

In 2021, the Community Satisfaction Index for UKP and KGB services was 98.30% (0.98) under the criteria of 'very satisfied', and the average satisfaction level was 4.92 from a scale of 5, or the 'very satisfied' category.

In future, the DG Treasury Secretariat's HR Department will continue to integrate and collaborate on HR management databases, and strengthen the validity and quality of databases to support more modern and strategic analysis and policy-making for HR management.





Rumah Betang, Sanggau
Fotografer: Siti Nurhaliza, KPPN Sanggau

Akuntabel bermakna memastikan seluruh pekerjaan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan yang berlaku. Program strategis tersebut ialah mampu menjelaskan setiap aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan pada organisasi, serta mengawal akuntabilitas pelaksanaan APBN dan mewujudkan kualitas laporan keuangan terbaik.

Accountability means ensuring that all work is carried out with prudence and can be accounted for in accordance with applicable principles and regulations. The strategic program is able to explain every activity and work carried out in the organization, as well as overseeing the accountability of the implementation of the State Budget and realizing the best quality of financial reports.



04

Pencapaian Kinerja

Performance Achievement

Pengelolaan APBN yang kredibel, akuntabel, dan tepat sasaran, merupakan modal berharga sebagai Regional Chief Economist sehingga menghasilkan data yang akurat dalam pengambilan keputusan. Melalui elaborasi peran dari setiap fungsinya, Ditjen Perbendaharaan terus mengawal pencairan APBN sebagai instrumen utama pembangunan negeri.

The management of the State Budget in a credible, accountable, and targeted manner is an asset in the role of the Regional Chief Economist, which is intended to produce accurate data in decision making. Through the elaboration of the roles of each function, the Directorate General of Treasury continues to oversee State Budget disbursements as the main instrument of national development.





Fungsi Pelaksanaan Anggaran The Budget Execution Function

Direktorat Pelaksanaan Anggaran mengemban tugas dalam perumusan kebijakan pelaksanaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan yang efektif, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Berbagai penyempurnaan di bidang regulasi pelaksanaan anggaran terus dilakukan dengan tetap menjaga tata kelola yang baik (*good governance*).

The Directorate of Budget Execution has the main duties of formulating budget implementation policies, effective treasury management, as well as monitoring and evaluating budget implementation. Various improvements in the field of budget implementation regulations continue to be carried out while maintaining good governance.

Pelaksanaan APBN 2021 State Budget Execution in 2021

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.003,1 triliun, tumbuh 21,6% dibandingkan realisasi tahun 2020. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp2.786,8 triliun atau meningkat 7,4 persen

The realization of state revenues amounted to IDR 2.003.1 trillion, growth of 21.6% as against the 2020. On the other hand, the realization of state spending amounted to IDR 2,786.8 trillion or an increase of 7.4%

Dalam merespons perubahan kondisi dan sebagai langkah penanganan dampak pandemi seiring dengan merebaknya Covid-19, dilakukan 4 kali refocusing APBN pada tahun 2021. Langkah *refocusing* berupa realokasi belanja APBN untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut menggambarkan wujud APBN yang responsif, antisipatif, dan fleksibel menghadapi ketidakpastian akibat Covid-19, dengan rincian sebagai berikut:

1. Refocusing pertama dilakukan pada Maret 2021 dengan pemangkasan anggaran belanja kementerian dan TKDD karena terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pada Februari dan Maret lalu. Refocusing anggaran pada saat itu sebesar Rp59,1 triliun dari anggaran belanja K/L dan 15 Triliun dari TKDD.
2. Refocusing kedua dilakukan pada Juni 2021 yaitu pemangkasan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp12,4 triliun.
3. Refocusing ketiga dilakukan pada Juli 2021 untuk meningkatkan belanja PEN dalam menghadapi penyebaran varian Delta. Refocusing ketiga sebesar Rp26,2 triliun dan 6 triliun dari TKDD. Lalu pada refocusing ini, anggaran PEN naik dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,7 triliun.
4. Refocusing keempat dilakukan pada Agustus 2021 dengan memangkas lagi anggaran K/L sebanyak Rp26,3 triliun.

Sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan dukungan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan pendekatan kontra-siklus dalam menghadapi dampak pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi, realisasi APBN

In response to changing conditions and to deal with the harmful impacts brought about by the Covid-19 pandemic, a refocus of the State Budget posture was conducted 4 times during 2021. The various refocus initiatives involved a reallocation of expenditures for Covid-19 mitigation and the National Economic Recovery (PEN) program, which was intended to shape a State Budget that was responsive, pre-emptive, and flexible in dealing with the uncertainties brought about by Covid-19. The details of the respective budget refocus are as follows:

1. The first refocus was realized in March 2021 by cutting ministries' and regional transfer (TKDD) budgets due to the spike in Covid-19 cases in February and March. Here, the refocused budget was IDR 59.1 trillion from ministries/agencies budget and 15 trillion from TKDD.
2. The second refocus took place in June 2021, i.e involving a cut in the Religious Festival Allowance (THR) and 13th salaries of civil servants (ASN) totaling IDR 12.4 trillion.
3. The third refocus happened in July 2021 to increase PEN spending in dealing with the spread of the Delta variant. On this occasion, the refocused budget amounted to IDR 26.2 trillion with another IDR 6 trillion coming from TKDD. In this regard, the PEN budget increased from IDR 699.43 trillion to IDR 744.7 trillion.
4. The fourth refocus was carried out in August 2021 through a reduction in ministries/agencies budgets totaling IDR 26.3 trillion.

In line with improving economic activity and to support an expansionary fiscal policy with a countercyclical approach in dealing with pandemic's impacts and accelerating economic recovery, State Budget realization experienced a



mengalami peningkatan/pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.003,1 triliun, melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021 (114,9% dari target atau tumbuh 21,6% dibandingkan realisasi tahun 2020). Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp2.786,8 triliun atau meningkat 7,4 persen dari realisasi tahun 2020. Dengan kondisi tersebut, maka tingkat realisasi defisit anggaran tahun 2021 mencapai Rp783,7 triliun (4,65% terhadap PDB).

Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan anggaran tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp868,6 triliun. Realisasi tersebut diantaranya terdiri atas realisasi pembiayaan utang, yang sebagian digunakan untuk pembiayaan investasi pemerintah pada BUMN dan BLU, serta membiayai keberlanjutan penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka pengadaan vaksin, mendorong pemulihan ekonomi nasional, dan mendukung penguatan reformasi.

Sesuai tema APBN, belanja negara pada tahun 2021 diarahkan untuk mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi, serta penguatan reformasi struktural sebagai pondasi perekonomian yang kokoh, kompetitif, produktif, dan inovatif dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju. Belanja negara difokuskan untuk melanjutkan penanganan kesehatan akibat Covid-19 (peningkatan *supply side* dan antisipasi pengadaan vaksin), melanjutkan program perlinfos untuk akselerasi pemulihan (Kartu Sembako, PKH, Prakerja), serta memberikan dukungan program/kegiatan pada sektor terdampak (Pangan, Pariwisata), serta perluasan akses modal UMKM melalui subsidi bunga KUR.

growth in comparison to the preceding year.

Overall, the realization of state revenues amounted to IDR 2.003.1 trillion, which exceeds the State Budget 2021 target (114.9% of the target or growth of 21.6% as against the 2020 realization). On the other hand, the realization of state spending amounted to IDR 2,786.8 trillion or an increase of 7.4% from the 2020 realization. Under these conditions, the budget deficit in 2021 amounts to IDR 783.7 trillion (4.65% of GDP).

The deficit was covered through deficit financing for 2021 with a realization of IDR 868.6 trillion. This figure includes debt financing, which was partly used to finance government investment in SOEs and public service agencies (BLU), as well as financing for sustaining Covid-19 mitigation efforts in the context of procuring vaccines, encouraging national economic recovery, and strengthening reforms.

In accordance with the State Budget theme for 2021, state spending during the year was directed at supporting the continued handling of the pandemic, encouraging economic recovery, and strengthening structural reforms as a solid, competitive, productive, and innovative economic foundation in realizing economic transformation towards an Advanced Indonesia. In this regard, state spending was focused on continuing health efforts on Covid-19 (increasing the supply side and anticipating vaccine procurement), continuing the social protection program to accelerate recovery (Basic Food, Family Hope Program, and Pre-Employment Cards), support for programs/activities in the affected sectors (Food, Tourism), and expanding access to MSME capital through subsidies in KUR interest payments.

Belanja Pemerintah Pusat Central Government Expenditure

Realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.001,1 triliun atau meningkat 9,2 persen dari realisasi tahun 2020, yang terdiri dari:

- a. Realisasi belanja K/L mencapai Rp1.189,1 triliun lebih tinggi dari realisasi tahun 2020 sebesar 12,2 persen. Beberapa faktor yang memengaruhi realisasi tersebut antara lain:
 1. Peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung penanganan Covid-19 dan berbagai program PEN di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan juga bantuan pelaku UMKM. Tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk program vaksinasi, biaya perawatan pasien covid, insentif nakes, serta dukungan sarana dan prasarana di Rumah Sakit. Tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk Program Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sembako PPKM, Bantuan Subsidi Upah, serta Bantuan Subsidi Kuota Internet.
 2. Dilakukan kebijakan realokasi dan refocusing belanja K/L sebagai upaya untuk mendukung program penanganan dampak pandemi Covid-19, termasuk tidak dibayarkannya komponen tunjangan kinerja dalam pemberian Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya.
 3. Perubahan pagu yang bersumber antara lain dari PNB/BLU, pinjaman, serta hibah yang melebihi target.

Central Government expenditure for the year totaled IDR 2.001.1 trillion, representing an increase of 9.2% from spending in 2020 and was comprised of the following:

- a. Spending of ministries/agencies totaled IDR 1,189.1 trillion, which was 12% higher from 2020. This higher spending was due to the following factors:
 1. Increase in the spending ceiling of ministries/agencies to support Covid-19 mitigation and various PEN programs in the fields of health, social protection, specific sectors, and assistance for MSME players. Additional spending in the health sector was mainly for vaccination programs, costs for treating covid patients, health workers incentives, and development of hospital facilities and infrastructure. Extra spending in the social protection sector was primarily for the Basic Food Card, Social Cash Assistance, Social Distancing Basic Food Assistance, Wage Subsidy Assistance, and Internet Quota Subsidy Assistance programs.
 2. Implementation of the reallocation and refocusing policy of ministry/agency expenditures to support the Covid-19 impact mitigation program, including the non-payment of the performance allowance component in 13th salaries and the Religious Festival Allowance.
 3. Changes in the budget ceiling originating, among others, from PNB/BLU, loans, and grants that exceed the target.



- b. Realisasi belanja non-K/L mencapai Rp812,0 triliun meningkat 5,0 persen apabila dibandingkan realisasinya tahun 2020, antara lain terdiri dari:
1. Pembayaran bunga utang mencapai Rp343,5 triliun atau lebih rendah dari pagu dalam APBN tahun 2021 sebesar Rp373,3 triliun. Efisiensi pembayaran bunga utang didukung oleh imbal hasil utang yang lebih rendah, pemanfaatan SAL, serta kerja sama pemerintah dengan Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) I, SKB II, dan SKB III berperan cukup signifikan dalam penurunan beban bunga utang atas penerbitan SBN dalam rangka penanganan Covid-19 dan program PEN.
 2. Subsidi sebesar Rp243,1 triliun atau meningkat 23,9 persen dari tahun 2020 yang digunakan untuk mendukung program PEN melalui pembebasan/diskon listrik, subsidi bunga UMKM, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM dan korporasi, serta subsidi pajak DTP. Subsidi tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan.

- b. Spending of non-ministries/agencies totaled IDR 812.0 trillion, representing an increase of 5.0% from 2020 which comprised of the following:
1. Payment of debt interest totaling IDR 343.5 trillion or lower than State Budget 2021 ceiling of IDR 373.3 trillion. The efficiency in debt interest payments was generated by lower debt yields, use of Accumulated Budget Surplus (SAL), and the government's collaboration with Bank Indonesia based on Joint Decree (SKB) I, SKB II, and SKB III which played a significant role in reducing debt interest expense on the issuance of Government Securities (SBN) in the framework of Covid-19 mitigation and the PEN program.
 2. Subsidies of IDR 243.1 trillion or an increase of 23.9% from 2020 to support the PEN program through electricity exemptions/discounts, MSME interest subsidies, MSME and corporate guarantee fees (IJP), and subsidies towards government-borne taxes (P-DTP). These subsidies were intended to provide protection for the community, especially the weaker and vulnerable sections of society.



Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Transfers to Regions and Village Fund

Realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021 mencapai Rp785,7 triliun atau 98,8% dari APBN tahun 2021, meningkat 3,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Realisasi anggaran TKDD tersebut antara lain dipengaruhi oleh tambahan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil, kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Transfer Khusus dan pemanfaatan Dana Desa untuk pemberian BLT Desa.

Pemerintah terus melakukan perbaikan dalam penyaluran dan penggunaan TKDD untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran TKDD di daerah. Sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang masih terjadi pada tahun 2021 maka dilakukan berbagai langkah kebijakan pelaksanaan TKDD dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di daerah, diantaranya yaitu:

1. Penggunaan anggaran belanja wajib minimal 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) pada tahun 2021 diarahkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia termasuk dukungan penyelenggaraan pendidikan.
2. Penggunaan paling sedikit sebesar 8 persen alokasi DAU yang diterima

In 2021, the realization of the Transfer to Regions and Village Fund (TKDD) budget was IDR 785.7 trillion or 98.8% of the State Budget 2021, representing an increase of 3.0% from 2020.

The TKDD budget realization was influenced, among others, by additional allocation of Revenue Sharing Fund underpayments, regional performance in fulfilling the requirements for disbursement of Special Transfer Fund and the use of Village Fund for the provision of direct cash assistance.

The government continued to improve the disbursement and use of TKDD to increase the efficiency and effectiveness of the TKDD budget in the regions. Due to the continuing Covid-19 pandemic in 2021, various policy initiatives on TKDD implementation were carried out to support economic recovery in the regions, including the following:

1. Use of the mandatory expenditure budget of at least 25% of the General Transfer Fund (DTU) in 2021 was directed to support regional economic recovery and human development programs, including various education schemes.
2. Use of at least 8% of the DAU allocation received by the regions



daerah diarahkan untuk belanja kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

3. Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dikaitkan dengan kinerja daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak untuk DBH pajak dan pengelolaan lingkungan untuk DBH SDA.
4. Percepatan penyelesaian kurang bayar DBH sampai dengan tahun 2020 untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah.
5. Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik diarahkan untuk mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal dan penggunaan bahan baku lokal serta pelaksanaan DAK nonfisik khususnya Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) provinsi/kabupaten/kota dan BOK Puskesmas dialokasikan sebesar 35%-40% untuk upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dan perpanjangan batas waktu penyaluran DAK Fisik untuk Tahap I dan Tahap II.
6. Penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) minimal sebesar 30% untuk bidang kesehatan dan sisanya dapat digunakan untuk bidang pendidikan, penguatan perekonomian di daerah dan/atau perlindungan sosial.
7. Penggunaan Dana Keistimewaan DIY dapat digunakan untuk penanganan Covid-19.
8. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk jaring pengaman sosial berupa BLT Desa dan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi di daerah. Selain itu dalam rangka mendukung program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem untuk mencapai target single digit kemiskinan di Indonesia, pemerintah juga menerapkan kebijakan pemberian tambahan (top up) BLT Desa di 35 kabupaten prioritas.

was directed towards health spending in the context of Covid-19 mitigation.

3. Disbursement of Revenue Sharing Fund (DBH) was associated with regional performance in optimizing tax revenues for tax DBH and environmental management for SDA DBH.
4. Speeding up settlement of DBH underpayments until 2020 to strengthen regional financial capacity in the context of Covid-19 mitigation and economic recovery in the regions.
5. The execution of Physical Special Allocation Fund (DAK) was prioritized towards employment of local workers and the use of local raw materials, while the execution of non-physical DAK and especially the Provincial/District/City Health Operational Assistance Fund (BOK) and the Health Center BOK involved allocations of 35%-40% for Covid-19 prevention and control programs, and included extensions in the time limit for the disbursement of Physical DAK for Phase I and Phase II.
6. Use of Regional Incentive Fund (DID) of at least 30% for the health sector, with the rest being allowed for education, strengthening the regional economy and/or social protection.
7. The Special Region of Yogyakarta (DIY) Privilege Fund was allowed to be used for Covid-19 mitigation efforts.
8. Use of the Village Fund was prioritized for social safety nets in the form of direct cash transfers (BLT Desa), support for Covid-19 mitigation efforts and economic recovery in the regions. In addition, to speed up the handling of extreme poverty to achieve the target of single digit poverty rate in Indonesia, the government also implemented a policy of providing additional (top up) BLT Desa in 35 priority districts.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Monitoring and Evaluation of Budget Execution in 2021

DJPb sebagai bagian dari komponen pemerintah yang menjalankan fungsi strategis dalam pengelolaan keuangan negara dituntut untuk berperan aktif mendukung keberhasilan pelaksanaan APBN dan memastikan belanja APBN tereksekusi dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Salah satu bentuk upaya nyata yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan anggaran Belanja Pemerintah, yang difokuskan baik pada Belanja K/L secara umum maupun belanja untuk program prioritas/strategis nasional seperti PC-PEN. Terdapat beberapa inisiatif yang dilaksanakan untuk memberi value added terhadap peran dan fungsi pelaksanaan anggaran, diantaranya:

1. Penyusunan Spending Reviu dan Reviu Pelaksanaan Anggaran

Spending reviu dilakukan melalui analisis/reviu terhadap belanja pemerintah (baik alokasi maupun realisasi) dengan menitikberatkan pada aspek *value for money* belanja (ekonomi, efektif, dan efisien). Pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu reviu efektivitas dan reviu efisiensi. Reviu pelaksanaan anggaran dilakukan melalui pemeriksaan dan analisis atas pelaksanaan program/kegiatan/proyek pada K/L untuk mengidentifikasi kendala/permasalahan teknis pelaksanaan anggaran sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk perumusan/ penyempurnaan kebijakan.

2. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Belanja APBN (Laporan Reguler dan PCPEN Mingguan)

Penyusunan Laporan Mingguan Realisasi Belanja dimaksudkan untuk mendukung pihak manajemen

As a part of the government apparatus that performs strategic functions in managing state finances, DG Treasury is required to play an active role in supporting the successful execution of the State Budget and ensuring that all expenditures are transacted effectively, efficiently and in an accountable manner. In this regard, a tangible effort involves the Monitoring and Evaluation (Monev) of government expenditures, which is focused on ministry/agency expenditures in general as well as expenditures for national priority/strategic programs such as PC-PEN. To that end, several initiatives have been carried out to provide added value to the role and function of budget execution, including the following:

1. Preparation of Spending Review and Budget Execution Review

Spending review was carried out through analysis/review of government spending (both allocation and realization) by focusing on the value for money aspect (economic, effectiveness, and efficiency). The review was performed using two approaches, namely the effectiveness review and the efficiency review. The budget execution review involved examination and analysis of the implementation of programs/activities/projects at ministries/agencies to identify technical constraints/problems in budget execution, with the objective of producing recommendations for policy formulation/improvement.

2. Preparation of State Budget Expenditure Report (Regular and Weekly PC-PEN Reports)

Preparation of the Weekly Expenditure Report is intended to support the management



(terutama top level manajemen) dalam memperoleh informasi terkini setiap minggu mengenai progress realisasi anggaran belanja, sehingga dapat menjadi instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan belanja APBN dan masukan dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan berkelanjutan. Laporan Mingguan memuat data dan informasi terkait belanja APBN dengan fokus pada komponen belanja yang menjadi domain peran Direktorat PA yaitu Belanja K/L, DAK Fisik, Dana Desa dan BOS DAK Nonfisik. Data dan informasi yang disajikan terutama mengenai tingkat realisasi anggaran dan output (fisik), tren dan pertumbuhan realisasi, komponen belanja signifikan, dan kendala pelaksanaan anggaran (jika ada).

3. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bulanan dan Pengembangan secara elektronik

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dilaksanakan dengan metode one on one meeting dengan K/L, terutama K/L yang terindikasi mengalami permasalahan dalam pelaksanaan anggaran dan/atau merupakan pelaksana dari program strategis dan prioritas nasional. EPA difokuskan pada aspek troubleshooting kendala/permasalahan pelaksanaan anggaran yang dihadapi K/L untuk mengawal pelaksanaan agar sesuai dengan perencanaan dan mendukung akselerasi belanja. Dalam rangka memberikan ekstra pengawalan pada program penting seperti PC-PEN, maka EPA dilaksanakan secara bulanan, baik di tingkat pusat antara Eselon I K/L dengan Direktorat PA, maupun di tingkat daerah antara satker dengan Kanwil DJPb dan KPPN.

(especially top-level management) in obtaining the latest information regarding the progress of budgetary spending, thereby becoming an instrument for evaluating the execution of programs/activities in the State Budget and generating inputs towards policy making for continuous improvement. The Weekly Report contains data and information related to State Budget expenditures with a focus on spending that is within the domain of the Directorate of Budget Execution, namely ministry/agency expenditures, Physical DAK, Village Fund and Non-Physical DAK BOS. The data and information presented mainly concern the level of budget realization and output (physical), trends and realization growth, significant expenditure components, and budget implementation constraints (if any).

3. Monthly Budget Execution Evaluation and Development of Electronic Methods

The Budget Execution Evaluation (EPA) activity is conducted through regular one-on-one meetings with ministries/agencies, and especially those that are indicated to have budget execution problems and/or are implementers of strategic programs and national priorities. The EPAs are focused towards troubleshooting of budget execution constraints/problems faced by ministries/agencies so that all activities are aligned to prior planning and to speed up spending. With the objective to provide extra accompaniment for important programs such as PC-PEN, the EPAs are conducted monthly, both at the central level between echelon I level units at ministries/agencies and the Budget Execution Directorate, and at the regional level between work units and DG Treasury regional offices and state treasury service offices (KPPN).

4. Reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan belanja K/L yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*), serta memberikan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel, telah ditetapkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengganti PER-4/PB/2020.

5. Penajaman Kajian Fiscal Regional untuk Mendukung Regional Chief Economist

Kajian Fiskal Regional (KFR) merupakan telaah makro pelaksanaan anggaran untuk mengkaji keterkaitan antara implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian *outcome*-nya yang terwujud dalam capaian perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan KFR secara struktur dan konten terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan agar optimal dalam menyediakan informasi bagi para stakeholder di bidang kebijakan fiskal baik di pusat dan daerah.

Pada Tahun 2021, dalam rangka penguatan peran Kanwil DJPb sebagai *Regional Chief Economist* (RCE), penyusunan KFR dilakukan penajaman pada aspek-aspek sebagai berikut:

- Simplifikasi analisis fiskal regional dengan menggabungkan analisis kinerja APBN, APBD, dan Konsolidasian;
- Penguatan analisis dan interpretasi data melalui penajaman analisis permasalahan dan solusinya, termasuk analisis atas capaian output belanja;

4. Reformulation of Budget Execution Performance Indicators

With the objective of realizing higher quality budgetary expenditures at ministries/agencies, spending better, to be aligned with good governance principles, and to provide a more transparent and accountable assessment of budget execution performance indicators, the Director General of Treasury Regulation No. PER-4/PB/2021 concerning Technical Guidelines for Assessment of Budget Execution Performance Indicators of State Ministry/Agency Expenditures was issued as replacement for PER-4/PB/2020.

5. Honing the Regional Fiscal Study to Support the Regional Chief Economist

The Regional Fiscal Study (KFR) is a macro study on budget execution to examine the relationship between fiscal policy implementation and the achievement of outcomes which are manifested in economic outputs and community welfare. The KFR structure and content continues to be honed and improved to be fit for purpose in providing information for stakeholders in the field of fiscal policy both at the central and regional levels.

In 2021, with the intention of strengthening the role of the DG Treasury regional offices as Regional Chief Economist (RCE), the KFR preparation was honed on the following aspects:

- Simplification of regional fiscal analysis by combining performance analysis of the State Budget, regional budgets (APBD), and the Consolidated Budget;
- Strengthening data analysis and interpretation by honing problem analysis and their solutions, which includes analysing the achievement of expenditure outcomes;



- c. Dilakukan percepatan penyusunan melalui KFR *Preliminary* dengan mengutamakan identifikasi dan analisis permasalahan dan solusi; serta
- d. Penyusunan analisis tematik pada setiap penyusunan KFR.

Selain itu, substansi penajaman KFR juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas analisis dengan tujuan untuk mempertajam analisis korelasi/transmisi fiskal fungsi APBN dan APBD seperti alokasi, distribusi, stabilisasi dalam perekonomian serta mempertajam analisis dampak/tematik atas peran fiskal APBN dan APBD dalam meningkatkan kesejahteraan.

Untuk mengawal penajaman KFR dalam rangka penguatan peran Kanwil DJPb sebagai RCE sebagai uji coba, ditetapkan 6 Kanwil DJPb yang melaksanakan KFR hasil penajaman pada tahun 2021 yaitu Kanwil DJPb Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat yang melaksanakan penyusunan KFR dengan konsep baru.

6. Capaian Output Strategis Nasional

Dalam rangka implementasi penganggaran berbasis kinerja serta sejalan dengan arahan Presiden RI bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa program pemerintah tidak hanya terlaksana (*sent*) namun juga tersampaikan manfaatnya kepada masyarakat (*delivered*), maka manfaat program pemerintah dapat tercapai apabila output belanja pemerintah dapat terpenuhi sesuai target yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA). Dengan demikian, data capaian *output* menjadi salah satu elemen penting dalam mengukur kinerja pelaksanaan anggaran Satker.

- c. Speeding up the process through the Preliminary KFR by prioritizing identification and analysis of problems and solutions;
- d. Conducting thematic analysis during each KFR.

In addition, KFR honing was also directed at improving analysis in terms of the correlation between the role of the State Budget and regional budgets with respect to allocation, distribution, economy stabilization, along with sharpening impact/thematic analysis of the fiscal role of the State Budget and regional budgets in improving the people's welfare.

To oversee KFR honing to strengthen the role of DG Treasury regional offices as RCE on a trial basis, 6 DG Treasury regional offices were designated for the trial, namely the DG Treasury Regional Office in Aceh, Jakarta SCR, East Kalimantan, Central Sulawesi, East Nusa Tenggara, and West Papua. In 2021, these offices prepared their KFR based on the new concept.

6. Aggregation of National Strategic Output Achievements

In the context of implementing performance-based budgeting and in line with the President of the Republic of Indonesia's directive that the government needs to ensure its programs are not only implemented (*sent*) but also generate benefits to the community (*delivered*). In this context, the benefits of government programs can be achieved if expenditure outputs can be met according to the established targets as specified in the budget execution document (DIPA). Consequently, the output achievement data represents one of the important elements in measuring budget execution performance at the work unit level.

Untuk mendukung kebutuhan pengukuran dan monitoring kinerja, maka Satker K/L telah diwajibkan untuk melaporkan data capaian output pada Aplikasi SAS/SAKTI/OMSPAN. Terhadap data tersebut telah dilakukan pemetaan dan penyusunan referensi Rincian Output (RO) Strategis berdasarkan informasi APBN 2021 dengan fokus pada 8 sektor/bidang prioritas, yaitu: sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan, pariwisata, teknologi informasi komunikasi, dan pertahanan keamanan.

Dalam rangka optimalisasi data capaian RO strategis dimaksud, telah dirilis Modul Agregasi Capaian Output TA 2021 pada Aplikasi OMSpan, sehingga capaian output strategis dimaksud dapat dikonsolidasikan dan dilakukan monev secara periodik sekaligus dapat dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas monev pelaksanaan anggaran.

Implementasi proses pelaporan dan konfirmasi data capaian output DIPA tahun 2021 pada Satker pengguna Aplikasi SAS dan Aplikasi SAKTI telah dimulai awal Maret 2021. Berdasarkan hasil monitoring, jumlah RO di level Program/Kegiatan/KRO/RO tahun 2021 mencapai 24 ribu RO dan tersebar pada lebih dari 19 ribu Satker. Sebanyak 2 ribu lebih RO ditandai sebagai RO Strategis untuk menjadi prioritas monev pelaksanaan anggaran tahun 2021. Pada prosesnya terdapat perubahan berupa penambahan/eliminasi RO yang bersifat strategis seiring kebijakan refocusing anggaran dan terbitnya Perdirjen Anggaran Nomor PER-5/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penandaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau PEN.

To support the need for performance measurement and monitoring, work units at line ministries/agencies have been required to report their output achievement data on the SAS/SAKTI/OMSPAN application. The data has been mapped and referenced to the Output Details (RO) based on information from the State Budget 2021 with a focus on 8 priority sectors/areas, namely: education, healthcare, infrastructure, social protection, food security, tourism, information and communications technology, and defence & security.

In the context of optimizing the RO achievement data, the Output Achievement Aggregation Module FY 2021 has been released on the OMSpan Application with the objective of consolidating the strategic output achievements and conducting periodic monitoring and evaluation, while at the same time the data can be used in various budget execution monev activities.

The reporting process and confirmation of the 2021 DIPA output achievement data for work units using the SAS and SAKTI applications was begun in early March 2021. Based on monitoring outcomes, there were 24,000 RO for programs/activities in 2021 spread over more than 19,000 work units. In this context, more than 2,000 ROs were marked as Strategic RO to be prioritized for budget execution monitoring and evaluation during the year. In the process, changes were made regarding addition/elimination of strategic RO which was in line with the policy of budget refocusing and the issuance of the Director General of Budget Regulation No. PER-5/AG/2021 concerning Technical Guidelines for Budget Marking in the Context of Covid-19 Mitigation and/or the PEN program.



Dukungan Program Prioritas Nasional Support for National Priority Programs

Program Pemulihan Ekonomi

1. Padat Karya

Program Padat Karya merupakan salah satu program PEN pada Cluster Program Prioritas. Pada tahun 2021 program Padat Karya dialokasikan pada 4 Kementerian dengan total alokasi sebesar Rp36,25 triliun dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 (realisasi sementara) Rp32,74 triliun (90,3%) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alokasi Rp24,04 triliun dengan realisasi Rp21,96 triliun (91,3%);
- b. Kementerian Perhubungan, alokasi Rp7,29 triliun dengan realisasi Rp6,95 triliun (95,4%);
- c. Kementerian Pertanian, alokasi Rp2,13 triliun dengan realisasi Rp1,96 triliun (92%);
- d. Kementerian Kelautan dan Perikanan, alokasi Rp0,16 triliun dengan realisasi Rp0,15 triliun (97%);

Program padat karya tunai yang terkawal efektif diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Artinya, dengan program padat karya tunai masyarakat secara langsung dapat menerima uang tunai yang dimaksud dari hasil kerja yang mereka kerjakan. Skema *cash for work* merupakan salah satu bentuk kegiatan padat karya dengan memberikan upah langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat (harian/mingguan) dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Economic Recovery Program

1. Labor-Intensive Program

The Padat Karya or Labor-Intensive Program is one of the PEN schemes in the Priority Program Cluster. In 2021, 4 Ministries carried out the program with a total allocation of IDR 36.25 trillion and expenditure realization of IDR 32.74 trillion (90.3%) until December 31, 2021 (provisional) with the following details:

- a. Ministry of Public Works and Public Housing, allocation of IDR 24.04 trillion with expenditure realization of IDR 21.96 trillion (91.3%);
- b. Ministry of Transportation, allocation of IDR 7.29 trillion with expenditure realization of IDR 6.95 trillion (95.4%);
- c. Ministry of Agriculture, allocation of IDR 2.13 trillion with expenditure realization of IDR 1.96 trillion (92%);
- d. Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, allocation of IDR 0.16 trillion with expenditure realization of IDR 0.15 trillion (97%);

Through effective monitoring, the cash payment labor-intensive program was expected to provide a solution towards reducing the unemployment and poverty rates. This program allowed the community to receive direct cash payments for the work rendered. The cash for work scheme is a form of labor-intensive activity by providing direct cash wages to workers involved (daily/weekly) with the objective of strengthening the people's purchasing power, increasing economic growth, and delivering social welfare.



2. Program Stimulus Bangsa Buatan Indonesia

Program Stimulus Bangsa Buatan Indonesia adalah jenis bantuan pemerintah yang termasuk jenis bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. Bantuan ini merupakan stimulus yang diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif sub sektor Fashion, Kuliner, dan Kriya.

Bentuk bantuan berupa uang dalam bentuk voucher penjualan senilai Rp100 ribu. Tiap penerima bantuan akan mendapatkan voucher penjualan dengan kuota paling banyak sebanyak 500 voucher

2. Proud of Indonesian-made Products Stimulus Program

The Proud of Indonesian-made Products (Bangga Buatan Indonesia) Program is a type of other government assistance scheme having the characteristic of Government Assistance determined by the Budget User. This stimulus is given to creative economy players in the fashion, culinary, and craft sub-sectors.

The form of assistance involves cash through sales voucher worth IDR 100,000. In this regard, each beneficiary receives a maximum quota of 500 sales vouchers that can be used in e-commerce transactions



penjualan yang dapat dipergunakan dalam transaksi e-Commerce yang diselenggarakan platform digital dengan tiap transaksi jual beli minimal senilai Rp200.000,-.

Penerima bantuan dari program ini adalah merchant dalam bentuk usaha perseorangan atau badan dengan persyaratan sebagai berikut.

- a. Produk merupakan buatan Indonesia yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan;
- b. Produk diutamakan memiliki sertifikat merek yang masih berlaku dan bukan merupakan hasil pelanggaran HKI dan/atau tidak melanggar HKI pihak lain;
- c. Merchant dimiliki oleh WNI;
- d. Merupakan produsen atau distributor atau penerima waralaba resmi yang dibuktikan dengan surat perjanjian distributor dan surat perjanjian waralaba;
- e. Memiliki NIB atau sedang proses pendaftaran NIB atau dokumen lainnya yang membuktikan sebagai pelaku usaha;
- f. Bukan sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI dan Pegawai BUMN dan BUMD yang masih aktif.

Program Perlindungan Sosial

Pemerintah menganggarkan Rp179,24 triliun untuk belanja perlindungan sosial yang meliputi beberapa program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras BULOG, kartu sembako, bantuan sembako PPKM, Bantuan Sosial Tunai (BST), bantuan tambahan untuk kemiskinan ekstrim, kartu prakerja, diskon listrik, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, bantuan subsidi upah, subsidi kuota internet, bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan bantuan lainnya.

on digital platforms with each buying and selling transaction of a minimum of IDR 200,000.

The program beneficiaries are merchants in the form of individual businesses or entities with the following requirements.

- a. The product is made in Indonesia as stated in a Declaration Letter;
- b. Priority is given to products having valid brand certificates that do not violate IPR, nor violating the IPR of other parties;
- c. Merchants are Indonesian citizens;
- d. Merchants are producers, distributors or official franchisee as evidenced by a distributor agreement letter and a franchise agreement letter;
- e. Merchants have a Business Identification Number (NIB) or are currently in the process of registering one or have other documents proving them as valid entrepreneurs;
- f. Merchants are not active civil servants or members of the Indonesian Military (TNI) or National Police (Polri), nor are they employees of State-Owned Enterprises (BUMN) or Region-Owned Enterprises (BUMD).

Social Protection Program

The government budgeted IDR 179.24 trillion for social protection spending which includes several initiatives such as the Family Hope Program (PKH), BULOG rice assistance, basic food card, PPKM basic food assistance, Social Cash Assistance (BST), additional assistance for extreme poverty, pre-employment card, electricity discount, Village Cash Direct Assistance (BLT), wage subsidy assistance, internet quota subsidy, Single Tuition Assistance (UKT), and others.

1. Program Kartu Prakerja

Pada tahun 2021, program Kartu Prakerja masih menjadi program prioritas pemerintah terutama dalam upaya pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19. Dalam APBN tahun 2021 alokasi anggaran program Kartu Prakerja sebesar Rp21,2 triliun, dalam mendukung upaya peningkatan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan kebutuhan industri, pemerintah juga melaksanakan penguatan vokasi melalui peningkatan link and match dengan industri, serta penguatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi dan adopsi TIK.

Menindaklanjuti PMK nomor 25/PMK.05/2020 serta dalam rangka membiayai program Kartu Prakerja tahun 2021, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp21,2 triliun untuk membiayai komponen utama berupa biaya pelatihan dan insentif serta komponen pendukung berupa dana operasional pendukung program kartu prakerja. Pendanaan Program Kartu Prakerja bersumber dari APBN yang dianggarkan pada Bagian Anggaran BUN 999.08. Sampai dengan saat ini, Satuan Kerja Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah merealisasikan dana DIPA sebesar 99,48% atau 21,08 triliun yang terdiri atas penyerapan komponen biaya pelatihan dan insentif sebesar 99,83% atau Rp21,01 triliun yang telah disalurkan kepada 5.929.329 orang penerima Kartu Prakerja.

2. Program Kartu Sembako

Program Kartu Sembako ditujukan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan masing-masing keluarga menerima Rp200 ribu per bulan, sedangkan untuk PKH ditujukan kepada 10 juta KPM dengan total jumlah besaran manfaatnya senilai Rp28,31 triliun. Pada bulan Juli, pemerintah menerapkan PPKM dan mengalokasikan anggaran

1. Pre-Employment Card Program

In 2021, the Pre-Employment Card scheme continued to be a priority program, especially with respect to recovering the economy from the impacts of the Covid-19 pandemic. In this respect, the program outlay in the State Budget 2021 was IDR 21.2 trillion, which was intended to enhance the skills of job seekers in accordance with industry needs. Furthermore, the government implemented vocational strengthening by increasing link and match with industry, as well as improving research and development to encourage innovation and ICT adoption.

As a follow up to MoF Regulation No. 25/PMK.05/2020 and to finance the Pre-Employment Card 2021 program, the government allocated IDR 21.2 trillion to finance the scheme's main components, i.e training and incentive costs, along with operational funds in support of the program. In this regard, the program's funding from the State Budget was accounted under the BUN Budget Section 999.08. To date, the Pre-Employment Card Program Management Unit has realized 99.48% of the DIPA funds or IDR 21.08 trillion, which comprises expenditure on the training and incentive component of IDR 21.01 trillion or 99.83% that was disbursed to 5,929,329 program beneficiaries.

2. Basic Food Card Program

The Basic Food Card program is targeted towards 18.8 million beneficiary families (KPM) with each family receiving a monthly sum of IDR 200,000. Likewise, the Family Hope Program (PKH) is aimed at 10 million KPM with total benefits of IDR 28.31 trillion. In July 2021, the government reimplemented social distancing (PPKM) rules and allocated an



tambahan sebesar Rp7 triliun untuk bantuan sembako PPKM kepada 5,9 juta penerima manfaat.

Di tahun 2021 juga terdapat program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan oleh PT POS dan BNI kepada 10 juta KPM dengan anggaran Rp17,3 triliun. Penyaluran BST dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2021 sebesar Rp300 ribu per bulan per KPM. Di tahun 2021 ini juga terdapat program perlindungan baru, yaitu bantuan untuk kemiskinan ekstrim yang ditujukan kepada 10% masyarakat miskin terbawah penerima KPM sembako sebanyak 1,23 juta KPM dengan besaran Rp300 ribu per bulan per KPM selama tiga bulan (Oktober - Desember 2021).

3. Program Bantuan Penanganan Kemiskinan Ekstrim

Di tahun 2021 ini juga terdapat program perlindungan baru yaitu bantuan untuk kemiskinan ekstrim yang ditujukan kepada 10% masyarakat miskin terbawah penerima KPM sembako sebanyak 1,23 juta KPM dengan besaran Rp300 ribu per bulan per KPM selama tiga bulan (Oktober – Desember 2021).

Bantuan Penanganan Kemiskinan Ekstrim ditujukan kepada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 Paritas Daya Beli. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 4%. Bantuan Penanganan Kemiskinan Ekstrim merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada tanggal 4 Maret 2021.

Alokasi bantuan Penanganan Kemiskinan Ekstrim disahkan menjadi pagu pada tanggal 8 Desember 2021 dengan total anggaran sebesar Rp1.113,03 miliar.

additional budget of IDR 7 trillion for PPKM basic food assistance to 5.9 million beneficiaries.

During the year, the Social Cash Assistance (BST) program was also implemented with a budget of IDR 17.3 trillion, where PT POS and BNI disbursed assistance to 10 million KPM. The BST disbursements were conducted from January to August 2021, involving cash transfers of IDR 300,000 per month per KPM. In 2021 a new social protection program was also launched, i.e assistance for those living under extreme poverty and targeted at the bottom 10% of the poor receiving basic food assistance or totaling 1.23 million KPM. Under this program, each KPM received a monthly assistance of IDR 300,000 for three months (October - December 2021).

3. Extreme Poverty Assistance Program

In 2021 a new social protection program was also launched, i.e assistance for those living under extreme poverty conditions and targeted at the bottom 10% of the poor receiving basic food assistance or totaling 1.23 million KPM. Under this program, each KPM received a monthly assistanc of IDR 300,000 for three months (October - December 2021).

The Extreme Poverty Relief Assistance scheme was aimed at people living below the extreme poverty line - equivalent to US\$ 1.9 Purchasing Power Parity. In 2021, the extreme poverty rate in Indonesia was 4%. This program represents a follow-up to the Indonesian President's directive in the Restricted Meeting on Poverty Reduction Strategy held on March 4, 2021.

The outlay for the Extreme Poverty Management program was approved as a budget ceiling on December 8, 2021 with a total allocation of IDR 1,113.03 billion. The Extreme

Program Penanganan Kemiskinan Ekstrim diampu oleh tiga satuan kerja antara lain Direktorat PFM (Penanganan Fakir Miskin) Wilayah I, Direktorat PFM (Penanganan Fakir Miskin) Wilayah II, Direktorat PFM (Penanganan Fakir Miskin) Wilayah III. Program Penanganan Fakir Miskin menargetkan 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat. Program Penanganan Fakir Miskin termasuk kedalam program PC PEN. Mekanisme penyaluran Program Kemiskinan Ekstrim dilakukan dengan menggunakan mekanisme BSA (Basic Saving Account) kepada penerima manfaat.

4. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Untuk memberikan perlindungan dan kepastian keberlangsungan pendapatan (dalam kurun waktu tertentu) bagi tenaga kerja yang terkena PHK agar dapat mempertahankan perekonomian keluarga, maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk program jaminan pengangguran yang telah dituangkan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan nama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Program JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/ buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Penyelenggaraan Program JKP dimaksudkan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan.

Tujuan dilaksanakan penyaluran dana awal dan dana iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah sebagai berikut.

- a. Dana Awal dapat dikembangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan aset jaminan sosial BPJS

Poverty Management Program was supported by three work units, i.e. the Region I PFM (Poverty Handling) Directorate, Region II PFM (Poverty Handling) Directorate, and Region III PFM (Poverty Handling) Directorate. The program was targeted towards 1.2 million KPM. The Poverty Handling Program is also part of the overall PC-PEN program. Disbursements under the program was conducted using the BSA (Basic Saving Account) mechanism to beneficiaries.

4. Job Loss Guarantee Program

To provide protection and certainty of continuing income (within a certain period) for workers affected by layoffs, the government considered it necessary to establish an unemployment insurance program as stated under Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation under the name of Job Loss Insurance (JKP).

The JKP program is a social security scheme provided to workers/laborers who experience termination of employment. The program provides for cash benefits, access to labor market information, and job training. The JKP program was implemented to ensure that affected parties can maintain a decent standard of living in the event of job losses.

The objectives of the seed funding and Job Loss Guarantee contributions are as follows:

- a. Seed funding can be further developed by BPJS Ketenagakerjaan in accordance with Government Regulations concerning the management of BPJS Ketenagakerjaan social

Ketenagakerjaan;

- b. Menjadi dana cadangan (reserve fund) JKP dan digunakan untuk membayar manfaat kepada peserta, manfaat uang tunai, dan manfaat pelatihan kerja;
- c. Pemberian dana awal program JKP sebagai DJS Kehilangan Pekerjaan untuk membentuk dana cadangan yang cukup kuat;
- d. Dana awal ini juga dapat digunakan sebagai bagian dari (subsidi) iuran yang dibayarkan pemerintah.

Penyaluran dana untuk penyelenggaraan program JKP tahun 2021 berupa penyaluran Dana Awal dan penyaluran Iuran Program JKP kepada BPJS Ketenagakerjaan telah direalisasikan 100%. Dana awal Program JKP tahun 2021 disalurkan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan sebesar Rp6.000 miliar, sedangkan Iuran Peserta Program JKP yang menjadi kewajiban Pemerintah tahun 2021 yang disalurkan melalui Bagian Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp823,9 miliar.

Program Penyaluran TKDD

Pada tahun 2021, DJPb melalui KPPN melakukan penyaluran TKDD yang meliputi DAK Fisik, DAK Nonfisik-Dana BOS, dan Dana Desa. Kinerja penyaluran TKDD yang dilakukan oleh KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

security assets;

- b. To be a JKP reserve fund which can be used to pay cash benefits and provide job training opportunities to beneficiaries;
- c. Provision of seed funding for the JKP program acts as a Job Loss Social Security Fund to form a sufficiently strong reserve fund;
- d. The seed funding can also be used as part of the contribution (subsidy) paid by the government.

The disbursement of funds for the JKP program in 2021 was through provision of Seed Funding and JKP Program Contribution to BPJS Ketenagakerjaan, with 100% realization. The seed funding was channeled through the Budget Section of the State General Treasurer of the Ministry of Finance in the amount of IDR 6,000 billion, while the JKP Program Contribution which became the Government's obligation in 2021 was channeled through the Budget Section of the Ministry of Manpower in the amount of IDR 823.9 billion.

TKDD Disbursements

In 2021, DG Treasury through KPPN disbursed TKDD which includes Physical DAK, Non-Physical DAK-BOS Fund, and the Village Fund. The TKDD disbursement performance as conducted by KPPN as the KPA for Physical DAK and Village Fund disbursement in FY 2021 is as follows:

Jenis TKDD TKDD Type	2021		
	Pagu Ceiling	Realisasi Realization	Persentase Percentage
Dana Desa Village Fund	72.000,00	71.853,71	99,80%
DAK Fisik Physical DAK	63.500,52	57.062,75	89,86%
Dana BOS BOS Fund	53.459,12	52.562,97	98,32%

Realisasi penyaluran Dana Desa TA 2021 sebesar Rp71,85 triliun atau 99,80% dari pagu, lebih rendah dibandingkan penyaluran tahun 2020 yang sebesar Rp71,1 triliun atau 99,87% dari pagu. Tantangan dalam penyaluran Dana Desa diantaranya karena adanya pandemi Covid-19, kesulitan kondisi geografis desa-desa yang tersebar hingga ke pelosok tanah air, dan penyalahgunaan dana desa yang berakibat pada terhambatnya pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran.

Sedangkan untuk mendorong percepatan penyaluran, telah ditetapkan PMK nomor 94/PMK.07/2021 dalam rangka percepatan penyaluran dana desa dan telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya nota dinas Direktur PA nomor ND-653/PB.2/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Relaksasi Persyaratan Penyaluran Dana Desa.

Penyaluran DAK Fisik tahun 2021 mengalami kontraksi bila dibandingkan dengan penyerapan DAK Fisik tahun sebelumnya. Tahun 2021 yang masih di dalam kondisi pandemi memberikan tantangan tersendiri dalam penyaluran DAK Fisik TA 2021. Adapun kenaikan harga pasar yang signifikan, keterbatasan bahan baku, dan keterlambatan pendistribusian barang merupakan permasalahan yang myoritas muncul di semua daerah. Untuk tetap mengoptimalkan penyaluran DAK Fisik tahun 2021, Kemenkeu mengambil kebijakan relaksasi memperpanjang batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran khususnya penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II.

Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021 merupakan tahun ke-2 penyaluran Dana BOS langsung ke rekening sekolah melalui 34 KPPN. Pada TA 2021, frekuensi terjadinya retur dalam penyaluran Dana BOS masih tinggi, hal ini disebabkan belum terstandarnya rekening sekolah dan seringnya sekolah melakukan perubahan rekening.

The realization of Village Fund disbursement in FY 2021 was IDR 71.85 trillion or 99.80% of the ceiling, which is lower than the 2020 disbursement of IDR 71.1 trillion or 99.87% of the ceiling. The various challenges experienced in disbursing the Village Fund include the continuing Covid-19 pandemic, geographical location of villages that are spread in remote areas of the country, and misuse of village funds which results in delays in fulfilling the required documents for conducting disbursements.

Meanwhile, MoF Regulation No. 94/PMK.07/2021 was issued to speed up the disbursement of village funds, which has been followed up with the issuance of Director of Budget Execution Memo No. ND-653/PB.2/2021 dated July 21, 2021 concerning Relaxation of Village Fund Disbursement Requirements.

The disbursement of Physical DAK in 2021 experienced a contraction when compared to the preceding year. The year 2021 continued to be overshadowed by pandemic conditions, thereby presenting challenges to Physical DAK disbursements during the year. The significant increase in market prices, limited supply of raw materials, and delays in the distribution of goods represented problems that were seen across all regions. In this regard, to optimize Physical DAK in 2021 disbursements, the Ministry of Finance adopted a flexible policy by extending the deadline for submitting the requisite documents, especially the submission of the required phase I and phase II documents.

Disbursement of the School Operational Assistance (BOS) Fund in 2021 is the 2nd year where funds were directly transferred to school accounts through 34 KPPNs. In FY 2021, the frequency of retransfers of BOS funds remained high, which was due to the non-standardization of school

Proses penyelesaian retur Dana BOS yang dilakukan secara terpusat, menyebabkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan retur Dana BOS. Alokasi Dana BOS yang dilakukan per provinsi berimplikasi kepada KPPN penyalur Dana BOS yang hanya dilakukan oleh 34 KPPN di wilayah provinsi, hal ini menyebabkan kurang dekatnya layanan dan menghambat kualitas monev.

Dari sisi Pemda, hal ini menyebabkan rantai yang panjang dalam pengelolaan Dana BOS. Pada tahun 2021 Direktorat PA telah melakukan reviu penyaluran Dana BOS dan telah menyampaikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan proses bisnis penyaluran Dana BOS melalui nota dinas nomor ND-473/PB.2/2021 kepada Direktur Dana Transfer Khusus dan Direktur SITP. Atas dasar hal tersebut telah ditetapkan PMK-119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik. Dari sisi standarisasi rekening sekolah, usulan telah diakomodir Kemendikbud dengan menerbitkan Permendikbud nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan dalam penyaluran BOS, BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.

accounts and schools frequently changing their bank accounts. The retransferred BOS Fund settlement process was carried out centrally, causing lengthy processing times. The allocation of BOS Fund based on province had implications for KPPNs as the disbursement agents. With 34 KPPNs spread in the provinces, there was a significant gap between the recipient and the services, which consequently hampered the quality of monitoring and evaluation.

From the perspective of local governments, the new procedures have created a long chain in the management of the BOS Fund. In 2021, the Budget Execution Directorate reviewed the BOS Fund disbursement process and submitted recommendations for improving policies and business processes through Memo No. ND-473/PB.2/2021 to the Director of Special Transfer Funds and the Director of Information System and Treasury Technology (SITP). Based on this, MoF Regulation No. PMK-119/PMK.07/2021 has been issued concerning Management of Non-Physical DAK. In terms of standardizing school accounts, the Ministry of Education and Culture has accepted the proposal by issuing Minister of Education and Culture Regulation No. 19 of 2021 concerning Management of Education Institution Accounts in the disbursement of BOS, PAUD BOP and Equality Education funds.

Simplifikasi dan Modernisasi Proses Bisnis Pelaksanaan Anggaran Simplification and Modernization Of Budget Execution Business Processes

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel serta menjawab tuntutan kebutuhan penyelesaian permasalahan anggaran yang muncul, maka dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan memperhatikan best practice internasional dilakukan upaya simplifikasi dan modernisasi proses bisnis pelaksanaan anggaran.

1. Pengembangan Platform Pembayaran Pemerintah

Platform pembayaran pemerintah merupakan sistem utama shared service untuk penyediaan layanan dokumentasi digital. Platform pembayaran pemerintah juga dapat diartikan sebagai interkoneksi sistem antara core system pembayaran pemerintah, yaitu SAKTI dan SPAN dengan sistem eksternal dalam rangka pelaksanaan pembayaran pemerintah. Platform pembayaran pemerintah bertujuan untuk penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran dengan penggunaan teknologi digital. Capaian signifikan telah dicapai oleh tim Platform Pembayaran Pemerintah pada tahun 2021 antara lain terlaksananya pembayaran belanja pegawai dan common expenses pada Satker piloting lingkup Kementerian Keuangan. Selain itu juga telah diselesaikan kajian pembayaran tunjangan kinerja, kajian pembayaran uang makan dan uang lembur, serta kajian pengadaan sederhana.

2. Digitalisasi Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pengembangan proses bisnis penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP PNBP) secara elektronik diharapkan

With the objective of realizing a more effective, efficient, and accountable budget execution and to respond to the demands of resolving budget problems, efforts are being made to simplify and modernize the budget execution business process by considering developments in information technology and international best practices.

1. Development of Government Payment Platform

The government payment platform is the main shared service system for providing digital documentation services. The government payment platform can also be viewed as an interconnected network between the core government payment systems, i.e SAKTI and SPAN, and external systems in the context of executing government payments. This platform aims to simplify the budget execution business process by using digital technologies. Significant achievements have been achieved by the Government Payment Platform team in 2021, including payments for personnel expenditures and common expenses at the piloting work units within the Ministry of Finance. In addition, a study on the payment of performance allowances, a study on the payment of meal and overtime pay, and a simple procurement study have also been completed.

2. Digitization of Maximum Disbursement of Non-Tax State Revenue

The development of a business process for determining the Maximum Disbursement of Non-Tax State Revenue (MP PNBP)



dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses penetapan MP PNBPN sehingga dapat mempercepat satuan kerja dalam pencairan belanja sumber dana PNBPN. Selain itu dengan digitalisasi penetapan MP PNBPN bisa menjadi solusi sekaligus inovasi bagi Direktorat PA dalam memberikan layanan yang lebih baik, efektif dan efisien terhadap stakeholder.

3. Dashboard Kartu Kredit Pemerintah

Saat ini, telah dikembangkan Dashboard Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam negeri yang merupakan otomasi penyajian informasi penggunaan KKP melalui sistem online berupa Dashboard dalam rangka pemantauan penggunaan KKP yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Tujuan dari pengembangan dashboard ini adalah untuk membangun mekanisme penyediaan laporan penggunaan KKP secara periodik sebagai sarana monitoring dan evaluasi transaksi KKP oleh Direktorat PA sesuai dengan ketentuan pada PMK No.196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Kawal Penajaman KFR agar Optimal bagi RCE

Escorting KFR Refinement to be Optimal for RCE

Selama ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan posisinya yang strategis telah menjalankan peran sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah. Ada peran sebagai fasilitator dan katalisator untuk menjalankan dan membantu mengawal pelaksanaan APBN lewat pelaksanaan belanja di daerah. Kanwil DJPb juga sudah melakukan berbagai hal yang menyerupai peran Regional Chief Economist (RCE) misalnya lewat Kajian Fiskal Regional (KFR). Dengan kedekatannya, link dengan tugas dan fungsinya, Kanwil DJPb bisa memosisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah maupun instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di daerah.

electronically is expected to help speed up and simplify the process and expedite work units in disbursing expenditures based on PNBPN sourcing. In addition, digitizing the determination of MP PNBPN can be a solution as well as innovation for the Budget Execution Directorate in providing better, effective, and efficient services to stakeholders.

3. Government Credit Card Dashboard

Currently, a domestic Government Credit Card (KKP) Dashboard has been developed which automatically presents information on the use of such cards through an online Dashboard in the context of monitoring KKP use that can be accessed by stakeholders. The purpose of the dashboard development is to establish a mechanism for providing periodic reports on KKP use as a means of monitoring and evaluating transactions by the Budget Execution Directorate in accordance with the provisions of MoF Regulation No. 196/PMK.05/2018 concerning Payment Procedures and Use of Government Credit Cards.

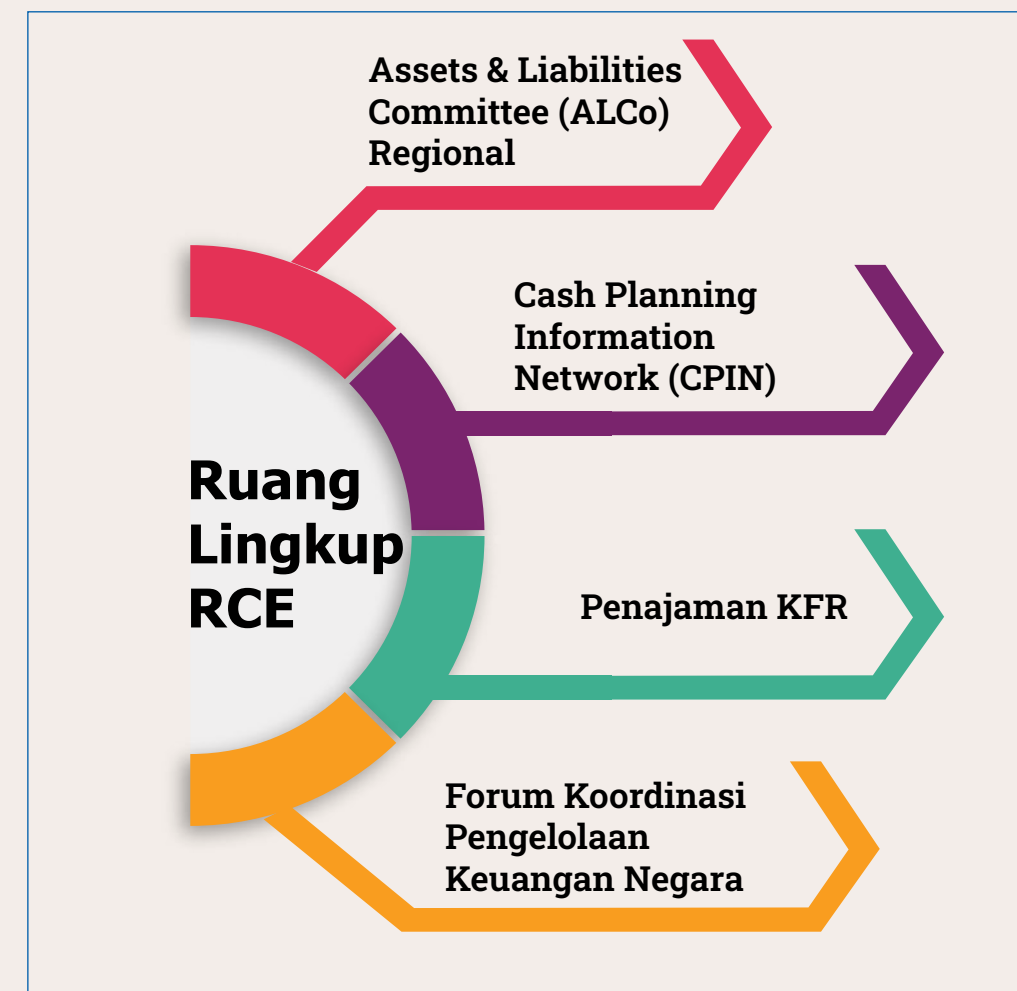
As of now, with their strategic position DG Treasury regional offices have played a role as Ministry of Finance representatives in the regions. These offices also play the role of facilitator and catalyst in overseeing State Budget execution through regional expenditures. In this regard, DG Treasury regional offices have performed various tasks that resemble the role of a Regional Chief Economist (RCE), for example through the Regional Fiscal Study (KFR). Given their proximity and linkages to duties and functions, DG Treasury regional offices can position themselves as strategic partners of regional governments and vertical agencies of other ministries/agencies in the regions.

Direktorat PA menjadi salah satu yang bertugas mengawal piloting RCE, khususnya KFR. Untuk langkah awal, telah didesain penyesuaian dan penajaman sehingga KFR akan lebih fokus dan bermakna. Telah dilakukan penyusunan guideline dan pembentukan grup untuk sharing informasi maupun pelatihan-pelatihan dengan bekerja sama BKF serta ke depannya ingin mengundang BI Institute.

Banyak data atau informasi keuangan yang dimiliki DJPb sehingga akan sangat bermanfaat apabila mampu menghubungkan antara fiskal dengan ekonominya. Kanwil DJPb dapat memotret kondisi fiskal maupun ekonomi di daerah. Lalu bagaimana data tersebut diolah sehingga bisa menjadi produk yang ditunggu-tunggu stakeholders di daerah karena bisa memberi insight.

The Budget Execution Directorate has overseen the piloting of RCE, and especially KFR. For the first step, adjustments and refinements have been made so that KFR will be more focused and meaningful. Guidelines have been prepared and groups formed to share information and trainings in collaboration with the Fiscal Policy Agency (BKF) and future collaboration with the BI Institute.

DG Treasury owns a lot of financial data or information that will be very useful if a link can be made between the fiscal and the economic aspects. DG Treasury regional offices can take a snapshot of the fiscal and economic conditions in the regions. How the available data is processed to become a product that regional stakeholders have been waiting for to provide insights is something to consider.





Fungsi Pengelolaan Kas Negara The State Treasury Management Function

Sebagai salah satu komponen dari pengelolaan keuangan publik, perbaikan dan peningkatan pengelolaan kas pemerintah menjadi sebuah keharusan dalam reformasi pengelolaan keuangan publik. Menjawab tuntutan itu, Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) telah melakukan serangkaian reformasi sebagai upaya mewujudkan pengelolaan kas negara yang efektif bagi seluruh wilayah, di samping juga mewujudkan Regional Chief Economist (RCE) yang andal.

As a component of public financial management, continuous enhancement and improvement of government cash management is a necessity with respect to public financial management reform. In response to this demand, the Directorate of State Treasury Management (PKN) has carried out a series of reforms to realize effective state treasury management in all regions, as well as realizing a reliable Regional Chief Economist (RCE).

Penempatan Dana Program PEN kepada masyarakat tidak dilanjutkan pada tahun 2022, dengan mempertimbangkan bahwa sendi-sendi perekonomian telah pulih

The placement of PEN Program funds to the public will be discontinued in 2022, considering an ongoing recovery in the economic foundations

Penempatan Dana dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Fund Placement in relation to National Economic Recovery

Salah satu bentuk pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu penempatan dana pada Bank Umum Mitra. Bank tersebut menggunakan dana penempatan untuk disalurkan kepada debitur berupa kredit/pembiayaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan ekosistem UMKM dan koperasi sebagai upaya untuk mendukung percepatan PEN.

Penempatan dana PEN pada tahun 2021 sebesar Rp29,45 triliun dan dana PEN per 10 Desember 2021 telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp29,45 triliun, sehingga Outstanding penempatan dana PEN per 10 Desember 2021 telah nihil. Penyaluran kredit secara akumulatif per tanggal 10 Desember 2021 pada Bank Himbara ialah sebesar Rp330,93 triliun, BPD sebesar Rp113,67 triliun dan Bank Syariah sebesar Rp13,11 triliun.

Secara khusus, Bank Umum Mitra juga menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur UMKM dan BPR untuk mendukung dan mengembangkan UMKM dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bank Umum Mitra juga telah menyalurkan kredit kepada BPR yang menjadi ujung tombak penyaluran kredit kepada masyarakat yang masuk kategori unbankable. Sampai dengan 10 Desember 2021, BPR yang telah memperoleh penyaluran kredit sebanyak 378 debitur dengan nilai total sebesar Rp1,93 triliun.

Penempatan Dana Program PEN kepada masyarakat tidak dilanjutkan pada tahun 2022, mempertimbangkan bahwa sendi-sendi perekonomian telah pulih yang ditandai dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II dan III pada 2021 serta telah diturunkannya status zona pandemi Covid-19 dari level 3 menjadi level 1, sehingga aktivitas perekonomian masyarakat telah berjalan normal.

One of the methods of raising funds for the National Economic Recovery (PEN) program is through fund placement at commercial partner banks. The banks then channel these funds to debtors as credit/financing that can be used to develop the MSME and cooperatives ecosystem in the endeavor to support the acceleration of PEN.

In 2021, total placement of PEN funds amounted to IDR 29.45 trillion. As of December 10, 2021, the total repaid funds amounted to IDR 29.45 trillion, consequently the outstanding placement of PEN funds was nil. As of December 10, 2021, the accumulative credit disbursements to Himbara banks was IDR 330.93 trillion, with another IDR 113.67 trillion to regional development banks (BPD) and a further IDR 13.11 trillion to Sharia banks.

In this context, the commercial partner banks specifically disbursed credit/financing to MSME borrowers and rural banks to support and foster MSMEs towards accelerating national economic recovery. In this regard, the partner banks have also disbursed loans to rural banks (BPR) that provide lending to people who are generally categorized as unbankable. As of December 10, 2021, a total of 378 BPRs had received credit disbursements with a total value of IDR 1.93 trillion.

The placement of PEN Program funds to the public will be discontinued in 2022, considering an ongoing recovery in the economic foundations, which is marked by improved economic growth in Q3 and Q4 of 2021 and the lowering of the Covid-19 outbreak status from level 3 to level 1. This has also allowed the general public to conduct their economic activities in a normal manner.



Pembiayaan Tahun 2021

Financing in 2021

Sehubungan dengan kondisi penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2021 pemerintah menerapkan kebijakan fiskal countercyclical yang dituangkan dalam APBN. Anggaran pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.743.648,5 miliar, sedangkan anggaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp2.750.028,0 miliar. Dengan demikian, defisit anggaran untuk TA 2021 direncanakan sebesar Rp1.006.379,5 miliar. Sebagai konsekuensi dari anggaran defisit, maka dibutuhkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut.

Hingga akhir Desember 2021, realisasi pembiayaan tercatat Rp861.731,4 miliar (85,6% dari target yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2020). Dibandingkan dengan nilai realisasi pada akhir periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp1.101.500,8 miliar, realisasi Desember 2021 tumbuh negatif 34,6% (y-o-y). Realisasi Pembiayaan sebesar Rp861.731,4 miliar tersebut merupakan akumulasi dari nilai realisasi Pembiayaan Utang Rp877.506 miliar, Pembiayaan Investasi (Rp113.182,8 miliar), Kewajiban Penjaminan sebesar (Rp2.715,7 miliar), Pemberian Pinjaman (Rp2.923,6 miliar), dan Pembiayaan Lainnya Rp97.200,3 miliar.

Due to the continuing uncertainties brought about by the Covid-19 pandemic, in 2021 the government implemented a countercyclical fiscal policy as outlined in the State Budget. For the year, the state revenue budget was set at IDR 1,743,648.5 billion, while the state expenditure budget was fixed at IDR 2,750,028.0 billion. As a result, the budget deficit for FY 2021 was planned to be IDR 1,006,379.5 billion. Consequently, additional financing was needed to cover this deficit.

At the end of December 2021, the realization of financing was recorded at IDR 861,731.4 billion (85.6% of the target set in Presidential Decree No. 113 of 2020). Compared to the realized financing of IDR 1,101,500.8 billion at the end of the same period in 2020, financing by December 2021 recorded a negative growth of 34.6% (y-o-y). The figure of IDR 861,731.4 billion represents the accumulation of realized Debt Financing (IDR 877,506 billion), Investment Financing (IDR 113,182.8 billion), Guarantee Obligations (IDR 2,715.7 billion), Loans Provision (IDR 2,923.6 billion), and Other Financing (IDR 97,200.3 billion).

REALISASI PEMBIAYAAN S.D. 31 DESEMBER 2021 (DALAM MILIAR RUPIAH)

REALIZATION OF FINANCING AS OF DECEMBER 31, 2021 (IN IDR BILLION)

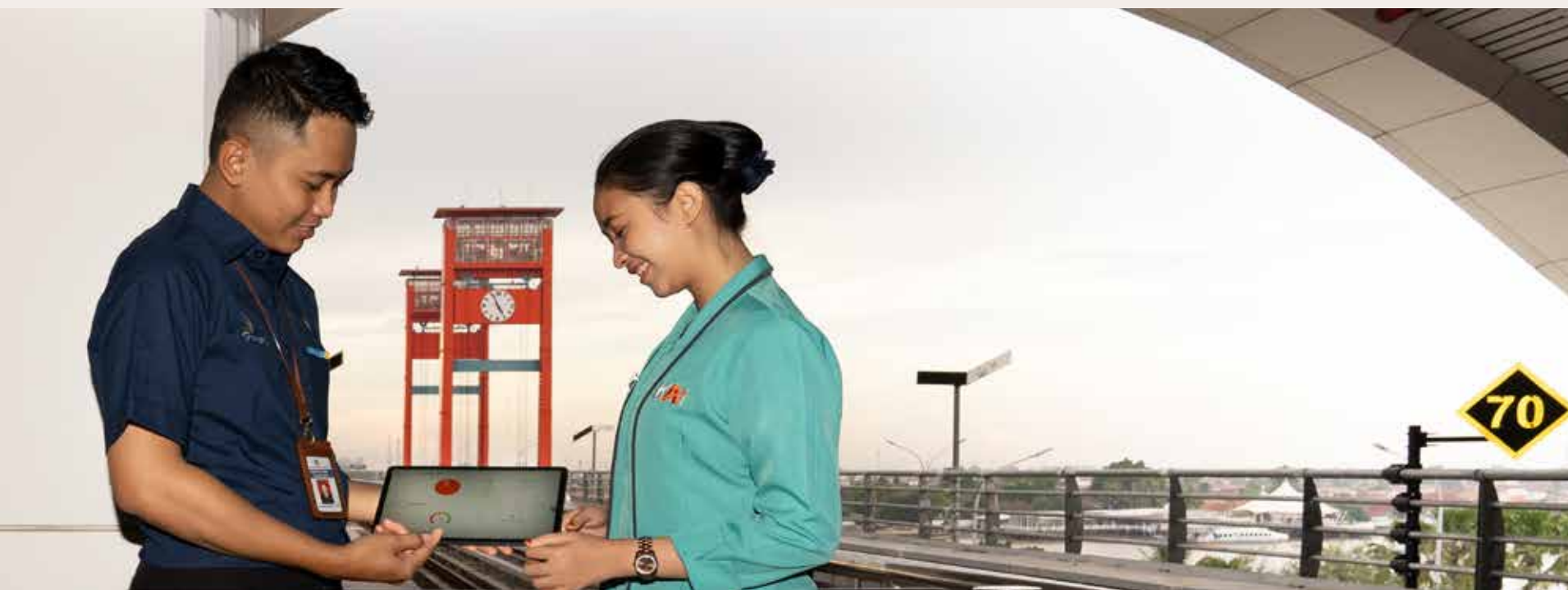
Uraian Description	APBN 2021 State Budget 2021 (Perpres 113/2020)	Realisasi Realization	
		Jumlah Total	%
Pembiayaan	1.006.379,5	861.731,4	85,6
A. Pembiayaan utang Financing	1.177.350,9	877.506,0	74,4
1. Surat berharga negara State Securities	1.207.267,1	877.506,0	72,7
2. Pinjaman Loans	(29.916,3)	(9.924,5)	33,1
C. Pembiayaan investasi Investment financing	(184.459,5)	(113.182,8)	61,3
D. Pemberian Pinjaman Loans provision	448,1	2.923,6	652,5
E. Kewajiban penjaminan Guarantee obligations	(2.715,7)	(2.715,7)	100
F. Pembiayaan lainnya Other financing	15.755,8	97.200,3	616,9

Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bruto untuk Pembiayaan TA 2021 hingga akhir bulan Desember 2021 mencapai Rp1.318.200 miliar atau 97,4% dari target kebutuhan penerbitan SBN bruto. Sedangkan enam jadwal lelang SUN dan SBSN berikutnya di bulan Desember 2021 dibatalkan karena pemerintah akan melaksanakan SKB III (Nomor 347/KMK.08/2021 dan Nomor 23/11/KEP.GBI/2021) sehingga di bulan Desember 2021 tidak ada realisasi penerimaan dari hasil lelang Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Khusus bulan Desember 2021, realisasi penerimaan pembiayaan SBN berasal dari pembelian SBN oleh Bank Indonesia sesuai dengan SKB III Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia sebesar Rp215,0 triliun yang terbagi dalam Cluster A dan Cluster B.

Realisasi penjualan SUN bulan Januari sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp996.200,0 miliar atau 90,4% dari target penerbitan SUN untuk TA 2021. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari hasil penjualan SUN domestik dan SUN valas dalam mata uang USD dan

As of end-December 2021, the issuance of Government Securities (SBN) for FY 2021 Financing recorded a gross value of IDR 1,318,200 billion or 97.4% of the requirement for gross SBN issuance. Meanwhile, six Government Bond (SUN) and Government Islamic Securities (SBSN) auctions in December 2021 were canceled as the government was going to implement Joint Decree (SKB) III (Number 347/KMK.08/2021 and Number 23/11/KEP.GBI/2021). Consequently, in December 2021 no funds were raised from SUN and SBSN auctions. Specifically for December 2021, SBN receipts of IDR 215.0 trillion were derived from the purchase of SBN by Bank Indonesia in accordance with SKB III of the Minister of Finance and Governor of Bank Indonesia and divided into Cluster A and Cluster B.

In a different vein, SUN sales from January to December 2021 amounted to IDR 996,200.0 billion or 90.4% of the SUN issuance target for FY 2021. This figure represents the accumulated sales of domestic SUN and foreign currency denominated SUN in USD and Euro.





Euro. Per 31 Desember 2021, total nilai SUN domestik mencapai Rp864.400 miliar atau 89,1% dari target penerbitan SUN domestik tahun 2021. Sementara hasil penjualan SUN valas untuk periode yang sama adalah sebesar Rp131.767,7 miliar atau 100,3% dari target penerbitan SUN valas.

Di sisi lain, sampai dengan bulan Desember 2021 realisasi penjualan SBSN tercatat sebesar Rp322.015,8 miliar atau 69,4% dari target penerbitan SBSN tahun 2021. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari hasil penjualan SBSN domestik dan SBSN valas dalam mata uang USD. Per 31 Desember 2021, total nilai SBSN domestik mencapai Rp.279.229,9 miliar atau 66,3% dari target penerbitan SBSN domestik tahun 2021. Nilai perolehan tersebut utamanya berasal dari penerbitan Project Based Sukuk, dengan nilai realisasi sebesar Rp198.800,0 miliar. Project Based Sukuk merupakan SBSN yang telah di-earmark untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Sementara hasil penjualan SBSN valas untuk periode yang sama adalah sebesar Rp42.786,0 miliar atau 100% dari target penerbitan SBSN valas.

Dari sisi pinjaman, target pinjaman (neto) dalam APBN 2021 dalam Perpres Nomor 113 tahun 2020 ditetapkan sebesar negatif Rp29.916,3 miliar. Hingga 31 Desember 2021, pinjaman (neto) terealisasi sebesar negatif Rp9,924,5 miliar atau 33,1% dari target. Komponen pinjaman (neto) terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri (neto) dan Pinjaman Luar Negeri (neto). Pinjaman Dalam Negeri (neto) merupakan hasil dari Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (bruto) dikurangi dengan Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri. Realisasi Pinjaman Dalam Negeri (neto) di akhir bulan Desember 2021 adalah sebesar negatif Rp75,9 miliar atau negatif 7,7% dari target APBN 2021, yang berasal dari realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (bruto) sebesar Rp1.276,8 miliar dikurangi realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp1.352,7 miliar.

As of December 31, 2021, the total value of domestic SUN was IDR 864,400 billion or 89.1% of the 2021 domestic SUN issuance target. In contrast, sales of foreign currency SUN for the same period amounted to IDR 131,767.7 billion or 100.3% of the foreign currency SUN issuance target.

Conversely, the realization from SBSN sales was recorded at IDR 322,015,8 billion or 69.4% of the SBSN issuance target for 2021. This figure is the accumulation of proceeds from the sale of domestic SBSN and foreign currency denominated SBSN in USD. As of December 31, 2021, the total value of domestic SBSN sales was IDR 279,229.9 billion or 66.3% of the target for domestic SBSN issuance in 2021. This figure is mainly derived came from Project Based Sukuk issuance with a realization of IDR 198,800.0 billion. Project Based Sukuk are SBSNs that have been earmarked for financing infrastructure development. Meanwhile, the sale of foreign currency SBSN for the same period was IDR 42,786.0 billion or 100% of the target for foreign currency SBSN issuance.

In terms of loans, the target (net) in the State Budget 2021 as per Presidential Decree No. 113 of 2020 was set at negative (-) IDR 29,916.3 billion. As of December 31, 2021, the actual loan (net) was negative (-) IDR 9,924.5 billion or 33.1% of the target. The loan (net) is comprised of Domestic Loans (net) and Foreign Loans (net). Domestic Loans (net) is the result of Domestic Loan Withdrawals (gross) minus the Payment of Domestic Loan Principal Installments. As of end-December 2021, Domestic Loans (net) was negative (-) IDR 75.9 billion or negative (-) 7.7% of the 2021 APBN target, which comprised Domestic Loan Withdrawals (gross) of IDR 1,276.8 billion minus the Payment of Domestic Loan Principal Installment amounting to IDR1,352.7 billion.

TABEL REALISASI PEMBIAYAAN S.D. 31 DESEMBER 2021 (DALAM MILIAR RUPIAH)
REALIZATION OF FINANCING AS OF DECEMBER 31, 2021 (IN IDR BILLION)

Uraian Description	Target SBN (Bruto) SBN target (Gross)	Realisasi Realization	
		Jumlah Total	%
A. SUN	1.101,2	996,2	90,4
SUN rupiah	969,8	864,4	89,1
SUN valas	131,4	131,8	100,3
B. SBSN	464	322,0	69,4
SBSN rupiah	421,2	279,2	66,3
SBSN valas	42,8	42,8	100

Pinjaman Dalam Negeri (neto) tumbuh negatif 103,7% (y-o-y) dari realisasi Desember 2020.

Sedangkan Target Pinjaman Luar Negeri (neto) untuk tahun 2021 adalah negatif Rp30.894,6 miliar. Total realisasi pembiayaan dari Pinjaman Luar Negeri (neto) per 31 Desember 2021 tercatat sebesar negatif Rp9.848,6 miliar atau 31,9% dari target. Nilai tersebut merupakan hasil dari realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto) sebesar Rp71.351,1 miliar (138,0% target) dikurangi dengan realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp81.199,7 miliar (98,7% alokasi). Nilai realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto) merupakan akumulasi realisasi penarikan Pinjaman Program sebesar Rp41.564,2 miliar dan Pinjaman Proyek sebesar Rp22.786,8 miliar.

Domestic Loans (net) grew negatively (-) by 103.7% (y-o-y) from the realization in December 2020.

Meanwhile, the Foreign Loan target (net) for 2021 was negative (-) IDR 30,894.6 billion. Total realization of financing from Foreign Loans (net) as of December 31, 2021 was negative (-) IDR 9,848.6 billion or 31.9% of the target. This figure is derived from the realization of Foreign Loan Withdrawals (gross) of IDR 71,351.1 billion (138.0% of target) minus the realization of Payment of Foreign Loan Principal Installments of IDR 81,199.7 billion (98.7% of allocation). Foreign Loan Withdrawals (gross) is the accumulated realization of withdrawal of Program Loans of IDR 41,564.2 billion and Project Loans of IDR 22,786.8 billion.

TABEL REALISASI/POTENSI PINJAMAN PROGRAM TAHUN 2021
REALIZATION/POTENTIAL OF PROGRAM LOANS IN 2021

(DALAM JUTA RUPIAH | in IDR million)

Lender	Mata Uang Currency	Komitmen Commitment	Potensi Penarikan Potential Withdrawal	Realisasi Penarikan Realized Withdrawal
World Bank	USD	3.129,55	1.564,55	1.052,75
ADB	USD	2.800	2.500	1.000
AIF	USD	15	15	-
AIIB	USD	537,50	162,50	37,50
KfW	EUR	1.900	1.150	200
AFD	EUR	300	300	100
JICA	JPY	50.000	50.000	50.000
EDCF	USD	60	60	-
	USD	6.542,05	4.302,05	2.390,25
Total	EUR	2.200	1.450	300
	JPY	50.000	50.000	50.000

Kinerja Modul Penerimaan Negara Generasi 3
Performance of the Third Generation State Revenue Module

Modul Penerimaan Negara (MPN) merupakan perangkat penatausahaan penerimaan negara berbasis digital dan didukung oleh kanal-kanal pembayaran elektronik guna mempermudah penyetoran penerimaan negara. MPN terus bermetamorfosis menuju ke arah yang lebih baik sebagai bagian dari penyempurnaan sistem penerimaan negara. MPN saat ini telah sampai pada generasi ketiga, yang kemudian sering disebut sebagai MPN-G3.

Kinerja MPN G3 pada tahun 2021, ditunjukkan dengan jumlah transaksi yang dibukukan sebanyak 89.460.972 transaksi dengan nominal Rp2.105 triliun. Transaksi penerimaan negara tersebut mencakup penerimaan Pajak, Bea Cukai, PNB, Hibah, Pengembalian Belanja, Penerimaan Pembiayaan, dan Penerimaan Non Anggaran.

Dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan mendukung semangat digitalisasi penerimaan negara serta

The State Revenue Module (MPN) is a digital-based state revenue administration platform that is supported by electronic payment channels to facilitate state revenue payments. MPN continues to be developed in a better direction as part of improving the state revenue system. MPN is currently in its third generation, which is often referred to as MPN-G3.

MPN G3's performance in 2021 can be gauged by the number of recorded transactions, i.e., totaling 89,460,972 transactions with a nominal value of IDR 2,105 trillion. These transactions cover tax receipts, customs and excise, non-tax state revenue (PNBP), grants, expenditure refunds, financing receipts, and non-budget revenues.

To improve policies and support the digitalization of state revenue administration along with simplifying

simplifikasi regulasi telah ditetapkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Seiring dengan penyempurnaan tersebut dan untuk meningkatkan layanan penerimaan negara, terus dilakukan berbagai inovasi digitalisasi penerimaan negara yang terhubung pada kanal-kanal penerimaan Negara, yaitu:

1. Penerimaan Negara melalui Lembaga Penerimaan Negara Lainnya (LPL) *Fintech* dan *E-Commerce*, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Finnet, Mitra Pajakku, Online Pajak, Indomaret, DANA, BMS, dan Nebula. Pada tahun 2021 Penerimaan Negara yang dihimpun melalui *Fintech* dan *E-Commerce* sebagai Lembaga Persepsi Lainnya mencapai 1,3 juta transaksi dengan nominal Rp3,5 triliun.
2. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) Penerimaan Negara bertujuan untuk menjangkau UMKM dan daerah terpencil serta mengeliminasi gap literasi keuangan digital. Pada tahun 2021 tercatat bergabung 4.000 Agen Laku Pandai Penerimaan Negara dan mencatatkan 140.108 transaksi dengan nominal Rp 35,9 milyar. Tahap selanjutnya terdapat 12.705 agen yang berpotensi berkerja sama dengan Bank Himbara untuk memperluas Laku Pandai Penerimaan Negara.
3. Penyetoran Pajak ke Kas Negara Terintegrasi Pencairan Belanja Daerah merupakan sistem elektronik yang dikembangkan Bank Persepsi yang terhubung secara online dan mengintegrasikan Aplikasi Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Billing Ditjen Pajak, dan Sistem MPN-G3 dengan menggunakan Kanal Internet Banking Pajak Belanja Pemda (Kanal 7020 MPN G3) yang bertujuan untuk mempercepat setoran pajak Belanja Pemda ke Kas Negara.

regulations, the Minister of Finance Regulation No. 225/PMK.05/2020 concerning Electronic State Revenue System has now been stipulated. Further refinements and improvements on state revenue services are being carried out through innovations such as digitalization of state revenue that is connected to state revenue channels, namely as follows:

1. State Revenue collection through *fintech* and *e-commerce* platforms as other state revenue institutions (LPL), namely Tokopedia, Bukalapak, Finnet, Mitra Pajakku, Online Pajak, Indomaret, DANA, BMS, and Nebula. In 2021, these *fintech* and *e-commerce* platforms also as Other Perception Institutions generated 1.3 million transactions with a nominal value of IDR 3.5 trillion.
2. The Officeless Financial Service for Financial Inclusion or Laku Pandai State Revenue service aims to reach MSMEs and remote areas and eliminate digital financial literacy gaps. In 2021, 4,000 Laku Pandai State Revenue agents joined and recorded 140,108 transactions with a nominal value of IDR 35.9 billion. In the next stage, there will potentially be 12,705 agents working with Himbara banks to expand the Laku Pandai State Revenue network.
3. Payment of Taxes to the Integrated State Treasury for Disbursement of Regional Expenditures is an electronic system developed by perception banks that is connected online and integrates the finance applications of regional governments, billing system of the Directorate General of Taxes, and MPN-G3 using the Regional Government Expenditure Tax Internet Banking Channel (Channel 7020 MPN G3) which aims to speed up the deposits of local government expenditure taxes to the state treasury.



Kinerja Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi Performance of Operational Banks and Perception Banks/Posts

Pada tahun 2021, indeks kepatuhan Bank Operasional (BO) dan Bank/Pos Persepsi dalam melaksanakan kontrak sebesar 4 dari skala indeks 4. Capaian tersebut diperoleh dari ukuran kepatuhan BO dalam menihilkan saldo Rekening Pembantu Kuasa BUN Pusat (RPKBUNP), kepatuhan Bank Operasional/Bank Penyalur Gaji menyalurkan SP2D Gaji tepat waktu, jumlah Surat Teguran peringatan Bank/Pos Persepsi yang terlambat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setiap hari, jumlah Surat Peringatan Bank/Pos Persepsi belum disetorkannya pengenaan denda oleh KPPN kepada Bank/Pos Persepsi, jumlah surat pengenaan denda keterlambatan Bank/Pos Persepsi yang melaksanakan pelimpahan penerimaan negara tepat waktu, dan ketepatan waktu rekonsiliasi rekening koran elektronik.

Direktorat PKN terus mengupayakan peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada BO/Bank Penyalur Gaji/Bank dan pos persepsi setiap hari melalui sarana komunikasi yang tersedia, monitoring dan evaluasi kepatuhan BO/Bank Penyalur Gaji/Bank dan Pos Persepsi, serta melakukan pengawasan penihilan BO dilakukan setiap hari sepanjang tahun 2021 dengan memanfaatkan fasilitas Cash Management System (CMS) yang disediakan oleh BO dan terkoneksi dengan SPAN.

Pada tahun 2021 terdapat penyesuaian sistem di SPAN dan sistem pembayaran sebagai dampak dari merger Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI merupakan penggabungan dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Dalam ekosistem pembayaran APBN, BSI merupakan mitra strategis Pemerintah melalui peran dan kedudukannya sebagai Bank Persepsi, Bank Penyalur Gaji, Bank Pengelola

In 2021, the compliance index of Operational Banks (BO) and Perception Banks/Posts in carrying out their contracts was 4 from a scale of 4. This score is calculated from BO compliance in nullifying the balance of the Central BUN Proxy Account (RPKBUNP), Operational Banks/Salary Disbursing Banks compliance in disbursing salaries (S2PD) on time, the number of warning notices against Banks/Perception Posts that are late in submitting daily Audit Report (LHP), the number of notices against Banks/Perception Posts that have not paid fines imposed by KPPN, the number of notices of fines against Perception Banks/Posts for being late in transferring state revenues, and the timely reconciliation of electronic checking accounts.

During 2021, the PKN Directorate endeavored to improve coordination and information dissemination on a daily basis to BO/Salary Disbursing Banks and perception posts through available communication facilities. Furthermore, the PKN Directorate strived to conduct monitoring and evaluation on compliance of BO/Salary Disbursing Banks and Perception Posts, and conduct daily supervision of account nullification by BO through the Cash Management System (CMS) facility provided by BO and connected to SPAN.

In 2021, adjustments were needed to be made to the SPAN and payment systems following the establishment of Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI represents a merger of BRI Syariah, BNI Syariah, and Bank Syariah Mandiri. In the State Budget payment ecosystem, BSI is a strategic partner of the Government through its role and position as a Perception Bank, Salary Disbursement Bank, Account Management Bank for State Ministries/

Rekening Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, dan Bank Rekening Khusus Pemerintah dalam pengelolaan SBSN.

Mengingat peran strategis BSI dalam kerangka pembayaran APBN tersebut, merger BSI kemudian diikuti dengan upaya mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul, khususnya dalam penyaluran dana APBN, salah satunya yaitu keandalan sistem BSI untuk menghindari disrupted sistem pembayaran pemerintah. Dalam perjalannya, proses penyesuaian sistem SPAN dan sistem pembayaran BSI (migrasi data/SIT/UAT) dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tetap mampu menjamin kelancaran penyaluran dana APBN.

Digital Payment - Marketplace Digital Payment - Marketplace

Salah satu inisiatif strategis yang dilaksanakan Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2021 adalah *Digital Payment-Marketplace* (Digipay). Digipay hadir sebagai inovasi yang menjawab tantangan perkembangan teknologi digital di era Revolusi Industri 4.0. Implementasi Digipay didasarkan pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER- 20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui *Marketplace* dan *Digital Payment* pada Satuan kerja.

Awalnya inovasi ini dikembangkan melalui kerja sama dengan Bank Himbara (BRI, BNI, Bank Mandiri) melalui 3 *platform marketplace*, yaitu Govstore, Digipro, dan Belanja Mandiri. Dalam perjalannya ketiga platform tersebut dikukuhkan menjadi aplikasi milik Kemenkeu selaku BUN dengan nama Digipay. Pengukuhan dilaksanakan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang di dalamnya memuat klausul kepemilikan aplikasi milik BUN serta kerja sama *maintenance* dan pengembangan tetap dilakukan bersama Bank Himbara.

Agencies, and Government Special Account Bank in managing SBSN.

Given the strategic role of BSI in the APBN payment framework, the BSI merger was then followed up by risk mitigation efforts against potential issues, particularly in relation to State Budget disbursements where the BSI system hoped to avoid causing disruptions to the government payment system. However, adjustments to the SPAN system and the BSI payment system (data migration/SIT/UAT) could be carried out appropriately to ensure the smooth disbursement of State Budget funds.

One of the strategic initiatives implemented by the Directorate General of Treasury in 2021 is the *Digital Payment-Marketplace* (Digipay). Digipay represents an innovation in response to the challenges of digital technologies in the Industrial Revolution 4.0 era. Digipay has been implemented under Director General of Treasury Regulation No. PER-20/PB/2019 concerning Trial Use of Inventory Money through *Marketplace* and *Digital Payment* in Work Units.

Initially, this innovation was developed in collaboration with Himbara Banks (BRI, BNI, Bank Mandiri) through 3 *marketplace platforms*, namely Govstore, Digipro, and Belanja Mandiri. In its development, the three platforms were turned into an application of the Ministry of Finance as BUN under the name of Digipay. The application's launch involved the signing of a Cooperation Agreement (PKS), which contains a clause on ownership by BUN as well as maintenance and development cooperation with the Himbara Banks.



Digipay merupakan sistem yang mengintegrasikan alur pengadaan barang/jasa dengan sistem pembayaran digital dalam rangka penggunaan uang persediaan yang efektif dan efisien. Sistem ini dilandasi dengan perkembangan sistem pembayaran yang mengarah pada digital payment, di mana pembayaran dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening pengeluaran secara elektronik dengan *Cash Management System (CMS)* atau pendebitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Tujuan strategis pengembangan Digipay yaitu (i) mendorong transaksi non-tunai dalam penggunaan uang persediaan; (ii) menyediakan sistem pembayaran pemerintah yang efisien dan efektif; (iii) mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara; dan (iv) meningkatkan pengelolaan kas negara.

Transaksi Digipay terus berkembang sejak piloting pada November 2019. Saat ini, jumlah Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerapkan Digipay mencapai 76 K/L. Perkembangan signifikan terjadi pada jumlah satker, transaksi, dan nominal transaksi. Pada awal piloting hanya terdapat 10 satker, 13 vendor, dan 165 transaksi senilai Rp250 juta. Sampai dengan 31 Desember 2021, telah bergabung 4.940 satker dan 920 vendor, dengan realisasi transaksi mencapai 11.435 transaksi senilai Rp25,34M.

Digipay integrates the procurement of goods/services with a digital payment system for using inventory money in an effective and efficient manner. This system is built on the current trends of digital payment platforms, where payments are effected by means of an electronic book-entry mechanism from an expense account using a *Cash Management System (CMS)* or a *Government Credit Card (KKP)* debit. The strategic objectives of Digipay's development are (i) to encourage non-cash transactions in the use of inventory money; (ii) to provide an efficient and effective government payment system; (iii) to support efficiencies in state financial management; and (iv) to improve state treasury management.

Digipay transactions have continued to grow since its pilot launch in November 2019. Currently, 76 state ministries/agencies are using the Digipay system, and significant developments have occurred in terms of implementing work units, transactions, and nominal value of transactions. At the time of pilot launch only 10 work units and 13 vendors had joined covering 165 transactions worth IDR 250 million. As of December 31, 2021, 4,940 work units and 920 vendors had enrolled in the system, recording a total of 11,435 transactions worth IDR 25.34 billion.

Restrukturisasi Rekening Pemerintah Restructuring of Government Accounts

Penerapan rekening virtual tidak hanya pada rekening pengeluaran, rekening penerimaan dan rekening lainnya akan dilakukan modernisasi

Going forward, virtual accounts will not only be set up for expenditure accounts, but revenue and other accounts will be gradually modernized

Terbitnya PMK 183/PMK.05/2019 tentang pengelolaan rekening pengeluaran milik Kementerian/Lembaga menjadi tonggak digitalisasi dalam pengelolaan rekening pemerintah. Gambaran rekening pemerintah dalam bentuk giro yang jumlahnya sangat banyak dan sulit dimonitor serta pengoperasian yang masih menggunakan cara konvensional secara bertahap terus disempurnakan.

Digitalisasi yang dilakukan adalah dengan melakukan restrukturisasi rekening pemerintah dari sebelumnya berbentuk rekening giro diubah menjadi rekening induk di level eselon I dan rekening virtual di level satker yang selalu terkonsolidasi saldonya. Sebelum restrukturisasi ada sekitar 24.000 rekening pengeluaran yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu maka setelah restrukturisasi rekening jumlahnya hanya sekitar 781 rekening induk yang mampu mengkonsolidasikan sekitar 21.000 rekening virtual di satker.

The issuance of Minister of Finance Regulation No. 183/PMK.05/2019 concerning management of expenditure accounts belonging to Ministries/Agencies embodies a digitalization milestone in terms of management of government accounts. Presently, the government accounts ecosystem is quite complex with numerous current accounts that are difficult to monitor and using conventional methods in their operation. In this regard, improvements are being gradually made to the system.

Digitalization is taking place by restructuring government accounts from the earlier checking accounts to master accounts at the echelon I level, with virtual accounts opened for the work unit level whose balances are always consolidated. Prior to the restructuring, there were around 24,000 expense accounts managed by the Expenditure Treasurer and the Assistant Expenditure Treasurer. After restructuring, only about 781 master accounts remain that can consolidate around 21,000 virtual accounts of the work units.



Dilihat dari kelengkapan rekening virtual yang terdiri dari user dashboard, fasilitas Cash Management System (CMS), dan kartu debit akan memberikan kemudahan bendahara dalam melakukan transaksi. Fasilitas tersebut sangat relevan dengan kondisi pandemi saat ini yang menuntut bendahara tetap dapat menjalankan belanja APBN meskipun tidak berada di kantor. Dengan CMS, bendahara cukup melakukan transaksi pembayaran ke pihak ketiga maupun penerima hak kapan saja dan di mana saja tanpa perlu datang ke bank. Hal ini tentunya mendorong budaya cashless dalam pelaksanaan APBN melengkapi fasilitas Kartu Kredit Pemerintah yang sudah dijalankan oleh bendahara. Namun apabila diperlukan penarikan dengan nominal tertentu bendahara juga masih dapat memanfaatkan layanan melalui teller dengan membawa Surat Pendebitan Rekening (SPR) tanpa lagi menggunakan cek/bilyet giro.

Dalam masa pandemi, manfaat rekening virtual juga memudahkan dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai bagi pedagang kaki lima (PKL) dan atau warung (BTPKLW) yang dilaksanakan oleh Markas Besar Kepolisian RI melalui Polres di daerah sehingga saldo atas rekening dapat termonitor.

Penerapan rekening virtual tidak hanya pada rekening pengeluaran, rekening penerimaan dan rekening lainnya pada gilirannya akan dilakukan modernisasi. Pada rekening penerimaan yang telah digagas ujitobanya melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-10/PB/2021 tentang Ujicoba Restrukturisasi Pengelolaan Rekening Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga. Saat ini rekening virtual pada rekening penerimaan telah digunakan untuk mendukung layanan SIM online yang digagas oleh Kepolisian RI.

Virtual account facilities include a user dashboard, Cash Management System (CMS), and a debit card that makes it easier for treasurers to make transactions. These facilities are especially more relevant amid the ongoing pandemic that require treasurers to perform state budget expenditures even while not being present in the office. Through CMS, treasurers can make payments to third parties and beneficiaries anytime and anywhere without the need to come to the bank. This certainly encourages a cashless culture with respect to State Budget execution and complements the Government Credit Card already in operation with treasurers. However, if a specific cash withdrawal is required, the treasurer may use the present system by approaching a teller and submitting a Debit Authorization Letter (SPR) rather than issuing checks.

During the pandemic, the virtual accounts also facilitated the disbursement of Direct Cash Assistance by the Indonesian National Police Headquarters to street vendors (PKL) or food stalls (BTPKLW) through regional police stations, by enabling the account balances to be monitored on a continuing basis.

Going forward, virtual accounts will not only be set up for expenditure accounts, but revenue and other accounts will be gradually modernized. Regarding revenue accounts, the trial launch has been initiated through Director General of Treasury Regulation No. PER-10/PB/2021 concerning Trial Restructuring of Revenue Account Management within Work Units of Ministries/Agencies. As of now, virtual revenue accounts have been opened to support the online SIM service initiated by the Indonesian National Police.

Pengelolaan Rekening Dana Cadangan Alutsista Management of the Primary Weapon Systems Reserve Fund Account

Rekening Dana Cadangan (RDC) Alutsista adalah Rekening Pemerintah Lainnya milik BUN yang berada di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung alokasi dana pengadaan alutsista di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia TA tertentu dan akan disalurkan pada TA berikutnya. Pengelolaan RDC Alutsista dilakukan dengan berpedoman pada PMK No.143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dana rekening tersebut digunakan untuk mengganti dana Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang digunakan untuk membayar kontrak kegiatan pengadaan Alutsista. Penggantian dana RKUN tersebut dilakukan setelah SP2D terkait diterbitkan, paling lambat satu hari kerja setelah tanggal SP2D.

Pada kondisi normal, sesuai dengan PMK No.143/PMK.05/2018, saldo dana yang masih tersedia RDC Alutsista sampai dengan akhir bulan November tahun berkenaan akan diperintahkan untuk disetor ke Kas Negara. Namun demikian, sehubungan dengan adanya pandemi Covid 19 dan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan S-1154/MK.05/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Dispensasi Penggunaan Rekening Dana Cadangan Alutsista Tahun Anggaran 2019, dana pengadaan alutsista TA 2019 di RDC Alutsista sebesar Rp50.751.142.342 dengan rincian Rp32.964.170.100 untuk UO TNI Angkatan Udara (4 kontrak) dan Rp17.786.972.242 untuk UO TNI Angkatan Darat (2 kontrak) mendapat dispensasi untuk diselesaikan sampai dengan Tahun Anggaran 2021. Sedangkan pengadaan alutsista di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia TA 2020 yang disalurkan pada TA 2021 berjumlah Rp4.898.824.746.966 (152 kontrak) dan USD 832.130,28 (1 kontrak) yang terdiri atas UO Kemhan (37 kontrak), TNI AD (20 kontrak), dan TNI AU (95 kontrak IDR dan 1 kontrak USD).

The Primary Weapon Systems (Alutsista) Reserve Fund Account (RDC) is an Other Government Account belonging to BUN at Bank Indonesia, which is used to allocate funds for the procurement of defense equipment within the Ministry of Defense and the Indonesian National Armed Forces for certain FYs, and for disbursement in subsequent FYs. In this regard, RDC management is performed with reference to Ministry of Finance Regulation No. 143/PMK.05/2018 concerning Mechanism for State Budget Execution at the Ministry of Defense and the Indonesian National Armed Forces. The account funds are meant to reimburse those from the State General Treasury Account (RKUN) that were used to pay for weapons procurement contracts. The RKUN funds are reimbursed once the relevant Fund Disbursement Order (SP2D) is issued, no later than one working day from the SP2D date.

Under normal conditions, as per Minister of Finance Regulation No. 143/PMK.05/2018, the RDC Alutsista remaining balance as of end-November will be deposited into the State Treasury. However, considering the Covid-19 outbreak and in accordance with Minister of Finance Letter No. S-1154/MK.05/2020 dated December 15, 2020 concerning Dispensation on Use of the Alutsista Reserve Fund Account for FY 2019, funds for weapons systems procurement in FY 2019 at Alutsista RDC amounting to IDR 50,751,142,342, with IDR 32,964,170,100 for the Indonesian Air Force (4 contracts) and IDR 17,786,972,242 for the Indonesian Army (2 contracts), have received dispensation for resolution until the end of FY 2021. Meanwhile, the procurement of defense equipment within the Ministry of Defense and the Indonesian National Armed Forces in FY 2020 for payment in FY 2021 amounted to IDR 4,898,824,746,966 (152 contracts) and US\$ 832,130,28 (1 contract) that comprises of Ministry of Defense (37 contracts), Indonesian Army (20 contracts), and Indonesian Air Force (95 IDR contracts and 1 US\$ contract).



Setelmen Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Settlement of Incoming and Outgoing Transactions

Bentuk pengelolaan kas berikutnya adalah setelmen atas transaksi penerimaan dan pengeluaran. Setelmen transaksi telah menggunakan sarana elektronik berupa aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Core Banking System (CBS) Bank Indonesia. Penggunaan sarana elektronik tersebut memberikan jaminan bahwa penyelesaian transaksi pemerintah dapat berjalan lebih cepat dengan pengendalian transaksi yang lebih baik dibanding dengan mekanisme manual.

Penyelesaian transaksi pemerintah tersebut dapat berjalan dengan lancar salah satunya merupakan hasil kerjasama antara DJPb dan Bank Indonesia dalam kerangka koordinasi baik secara kebijakan maupun teknis pelaksanaan APBN tahun 2021. Beberapa bentuk kerja sama atau koordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian transaksi pemerintah antara lain:

1. Forum Harmonisasi Kemenkeu dan Bank Indonesia

Forum Harmonisasi (Forhar) antara Kemenkeu dan Bank Indonesia bertujuan untuk membahas topik terkait pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Kemenkeu yang memerlukan koordinasi kedua belah pihak.

2. Pengembangan Interface Core Banking System Bank Indonesia dengan SPAN/OMSPAN Kemenkeu

Core Banking System (CBS) Bank Indonesia merupakan platform yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dalam rangka mendukung transformasi digital layanan perbankan dan transaksi pemerintah yang akan menggantikan sistem Bank Indonesia Government Electronic Banking (BIGeB).

The next form of cash management is the settlement of incoming and outgoing transactions. In this regard, settlements have been accomplished by electronic means through the State Treasury and Budget System (SPAN) and Bank Indonesia Core Banking System (CBS) applications. The use of these electronic means provides a guarantee that government transactions can be settled faster with better control compared to manual mechanisms.

The fact that government transactions have been settled smoothly is also the result of collaboration between the Directorate General of Treasury and Bank Indonesia in the framework of coordination both in terms of policy and technical implementation of the State Budget 2021. The various forms of collaboration or coordination with Bank Indonesia for the settlement of government transactions are as follows.

1. Ministry of Finance and Bank Indonesia Harmonization Forum

The Ministry of Finance and Bank Indonesia Harmonization Forum (Forhar) is intended for discussing topics related to the execution of tasks of both institutions that require coordination between the two parties.

2. Development of the Bank Indonesia Core Banking System Interface with the Ministry of Finance SPAN/OMSPAN

The Core Banking System (CBS) is a platform developed by Bank Indonesia to support the digital transformation of banking services and government transactions, which is intended to replace the Bank Indonesia Government Electronic Banking (BIGeB) system. In this regard, synergies between the Ministry of Finance and Bank

Sinergi Kemenkeu bersama Bank Indonesia dalam pengembangan Core Banking System (CBS) telah diinisiasi sejak tahun 2017, melalui serangkaian peran aktif Kemenkeu c.q. DJPb. Berdasarkan hasil koordinasi dan uji coba bersama pemerintah dan perbankan, Bank Indonesia memutuskan untuk mengimplementasikan secara penuh Core Banking System (CBS) Bank Indonesia pada tanggal 13 September 2021.

Dengan diimplementasikannya Core Banking System (CBS) Bank Indonesia yang terkoneksi dengan SPAN Kemenkeu, layanan jasa perbankan Bank Indonesia kepada pemerintah akan dapat diproses secara online dan straight to processing, sehingga dapat semakin mendukung modernisasi pengelolaan fiskal pemerintah.

Indonesia on Core Banking System (CBS) development have been initiated since 2017 through a series of active initiatives by the Ministry of Finance c.q. DG Treasury. Based on coordination and joint trials between government and banks, Bank Indonesia decided to fully implement the Bank Indonesia Core Banking System (CBS) on September 13, 2021.

With the integration of Bank Indonesia's Core Banking System (CBS) with the Ministry of Finance SPAN, Bank Indonesia's banking services to the government can now be processed online and go straight to processing, to further support the modernization of government fiscal management.

Pengelolaan Rekening Bank Account Management

Pengelolaan Rekening BUN

Pada tahun 2021 terdapat 132 rekening di Bank Indonesia yang dikelola oleh Direktorat PKN sehubungan dengan proses pengeluaran dan penerimaan negara baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing. Tiga valuta asing yang saat ini dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) adalah US Dollar, Japan YEN, dan Euro. Pengelolaan rekening-rekening tersebut menghasilkan remunerasi (bunga) yang kemudian dicatat sebagai pendapatan Negara bukan pajak (PNBP). Selama tahun 2021 penerimaan remunerasi dari pengelolaan kas dalam rekening-rekening milik BUN di Bank Indonesia adalah sebagai berikut.

BUN Account Management

In 2021, the PKN Directorate managed 132 accounts at Bank Indonesia in connection with state expenditures and revenues both in rupiah and foreign currencies. The three foreign currencies currently managed by the State General Treasurer (BUN) are US Dollar, Japanese Yen, and Euro. The management of these accounts generates returns (interest) which are subsequently recorded as non-tax state income (PNBP). During 2021, the returns from cash management in BUN's accounts at Bank Indonesia are as follows:



Jenis Valuta Currency	Total Penerimaan Total Receipts	Rata-rata Penerimaan Bulanan Average Monthly Receipts
Rupiah	IDR 6.809.350.009.060	IDR 567.445.834.088
US Dollar	USD 7.016.654	USD 584.721
Japanese Yen	JPY 10.808.248	JPY 900.687
Euro	EUR 950.059	EUR 79.172
KfW	EUR	1.900

Pengelolaan Rekening Pembangunan Hutan

Selain mengelola rekening milik BUN, Direktorat PKN juga mengemban tugas untuk mengelola Dana Reboisasi pada Rekening Pembangunan Hutan (RPH). Dana Reboisasi pada RPH dikelola dengan melakukan penyimpanan dana pada Bank Umum. Penyimpanan Dana Reboisasi pada Rekening Pembangunan Hutan di bank umum dilaksanakan dalam rangka optimalisasi kas atas dana menganggur (*idle cash*) milik pemerintah. Seluruh proses transaksi dalam rangka optimalisasi kas diselesaikan melalui *Treasury Dealing Room* milik DJPb sehingga pemerintah memperoleh tingkat imbal hasil (*yield*) yang lebih baik. Pelaksanaan transaksi dalam rangka optimalisasi kas melalui *Treasury Dealing Room* juga akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas karena pemanfaatan teknologi sistem informasi.

Saat ini terdapat empat Bank BUMN yang menjadi bank mitra penyimpanan Dana Reboisasi pada RPH, yaitu BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri. Direktorat PKN pada periode tertentu (umumnya setiap tiga bulan) akan melakukan evaluasi penyimpanan Dana Reboisasi pada RPH berdasarkan kondisi perkembangan tingkat suku bunga simpanan dan faktor lain sesuai ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2021, penyimpanan Dana Reboisasi pada RPH menghasilkan remunerasi sebesar Rp141.164.993.786,-.

Pengelolaan kas penerimaan (remunerasi) bulanan RPH dilaksanakan sesuai ketentuan

Management of Forest Development Account

Besides managing BUN accounts, the PKN Directorate also has the task of managing the Reforestation Fund in the Forest Development Account (RPH). The RPH Reforestation Funds are managed by making deposits at Commercial Banks. The Reforestation Funds are deposited in Forest Development Accounts at commercial banks for the purpose of optimizing idle cash owned by the government. The entire transaction process in the context of cash optimization is completed through the Treasury Dealing Room of DG Treasury to enable the government to obtain a better yield. In this regard, cash optimization transactions through the Treasury Dealing Room will also increase efficiency and accountability with the aid of information technology.

Currently, four state-owned banks act as partner banks in the RPH Reforestation Fund scheme, namely BRI, BNI, BTN and Bank Mandiri. After a certain period (generally every three months), the PKN Directorate evaluates the deposited RPH Reforestation Fund based on current conditions, prevailing interest rates and other factors in accordance with applicable regulations. During 2021, the RPH Reforestation generated a return of IDR 141,164,993,786.

The management of RPH monthly cash returns (remuneration) is carried out in accordance with prevailing laws

peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Hal ini diperlukan karena remunerasi dari pengelolaan dana Rekening Pembangunan Hutan merupakan bagian dari dana Rekening Pembangunan Hutan sehingga memerlukan penanganan khusus. Pengelolaan Rekening Pembangunan Hutan termasuk penggunaan dananya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021.

Pengelolaan Rekening Penanganan Dampak Pandemi Covid-19

Seiring dengan upaya percepatan penanganan kasus dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 utamanya terhadap aspek kesehatan dan kemanusiaan, maka pemenuhan kebutuhan pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan perlu menjadi prioritas selain mekanisme pembiayaan *Public Goods* dan *Non Public Goods* yang telah diimplementasikan.

Oleh karena itu, Kemenkeu sebagai institusi yang berwenang dalam menjalankan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 perlu untuk segera melakukan penyesuaian atas mekanisme dan tata cara pengelolaan hasil Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di antaranya melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 103/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Reksus dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN.

Pembiayaan anggaran penanganan Kesehatan dan kemanusiaan dikelompokkan menjadi dua *cluster*, yaitu *cluster A* dan *cluster B* dengan matriks sebagai berikut.

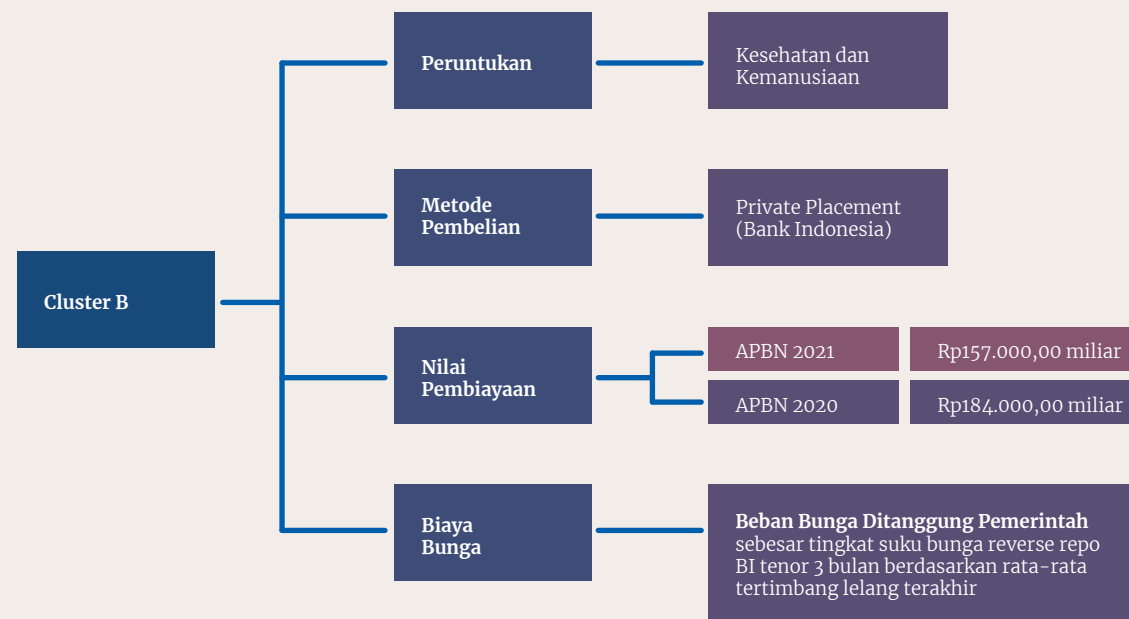
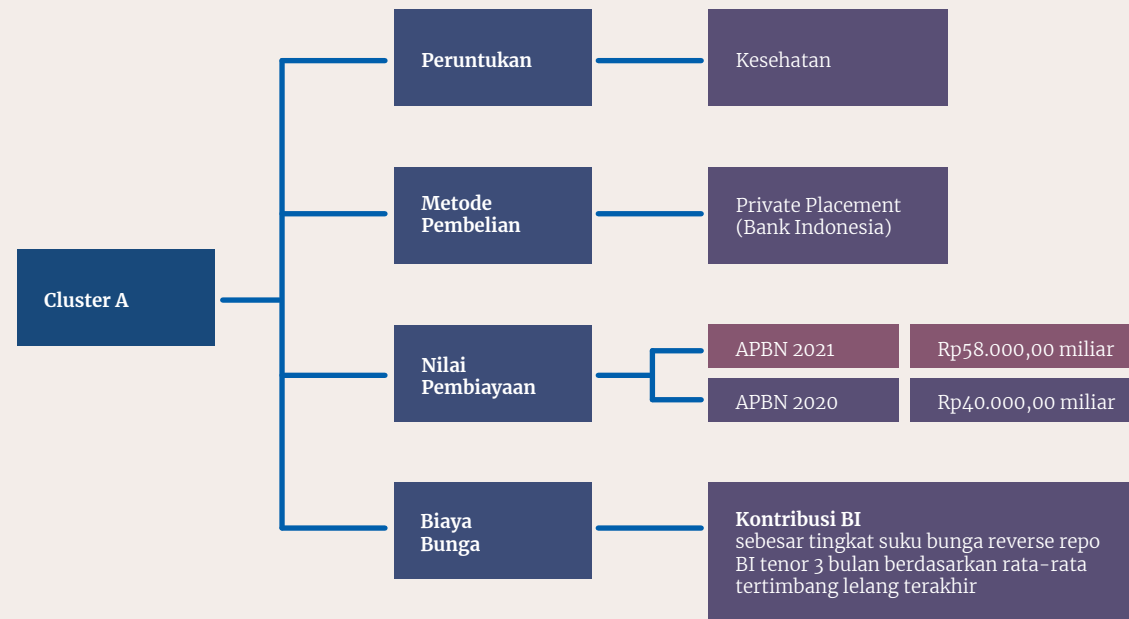
and regulations aimed at increasing accountability for fund management in the Central Government Financial Reports. This is necessary because remuneration from RPH management is part of the Forest Development Account funds, thereby requiring special handling. Management of the Forest Development Account including the use of funds is regulated under Government Regulation No. 23 of 2021.

Management of Covid-19 Mitigation Account

In line with the efforts to accelerate the Covid-19 pandemic mitigation, especially on health and humanitarian aspects, fulfilling the financing needs for these aspects needs to be a priority in addition to the implemented Public Goods and Non-Public Goods financing mechanisms.

In this regard, the Ministry of Finance as the authorized institution for carrying out the mandate of Government Regulation No. 23 of 2020 as amended by Government Regulation No. 43 of 2020 needed to adjust the mechanisms and procedures for managing the proceeds of the Purchase of Government Securities and/or Sharia Securities by Bank Indonesia in the Primary Market in the context of Financing the Covid-19 Impacts and the National Economic Recovery (PEN) program. This also includes the stipulation of Minister of Finance Regulation No. 146/PMK.05/2021 concerning Amendment to PMK No. 103 /PMK.05/2020 concerning Procedures for Special Account Management in the context of Financing for COVID-19 Mitigation Efforts and PEN.

The health and humanitarian budget financing is grouped into two clusters, namely cluster A and cluster B with the following matrix.



Sejak tahun 2018 capaian tahunan Direktorat PKN selalu pada level 100 % ketercapaian target

Since 2018 the annual achievement of the PKN Directorate has always been 100% of the target

Penyusunan Laporan Keuangan Preparation of Financial Statements

Bentuk pengelolaan kas selanjutnya adalah penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (UAKBUN-P) sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan kas. Laporan Keuangan UAKBUN-P yang disusun oleh Direktorat PKN selaku UAKBUN-P menjadi salah satu bagian dari Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat (UAPBUN-AP) yang juga disusun oleh Direktorat PKN selaku UAPBUN-AP serta bagian dari LKBUN yang disusun oleh Direktorat APK selaku UABUN.

LKBUN Tahun 2020 kembali mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Peningkatan kualitas atas Laporan Keuangan UAKBUN-P yang disusun tersebut merupakan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Direktorat PKN, Direktorat APK dan Direktorat SITP. Hal tersebut dapat terlihat dari trend penurunan jumlah temuan BPK yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat PKN dari tahun ke tahun. Dalam hal pencapaian target penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN, sejak tahun 2018 capaian tahunan Direktorat PKN selalu pada level 100 persen ketercapaian target. Seiring dengan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Direktorat PKN, jumlah rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti juga terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2021 hanya terdapat 3 rekomendasi dari BPK yang harus ditindaklanjuti dan seluruh rekomendasi tersebut telah diusulkan selesai.

The next form of cash management is the preparation of the Financial Statements of the Accounting Unit of the Central State General Treasurer (UAKBUN-P) as accountability towards cash management. The UAKBUN-P Financial Report compiled by the PKN Directorate as UAKBUN-P becomes one part of the Financial Statements of the Central Accounting State Assistant General Treasurer Accounting Unit (UAPBUN-AP) which is also prepared by the PKN Directorate as UAPBUN-AP and part of the LKBUN compiled by the APK Directorate as UABUN.

The LKBUN 2020 again received the Unqualified (WTP) opinion from the State Audit Board (BPK RI). The improvement in the quality of the prepared UAKBUN-P Financial Report is the result of coordination by the PKN Directorate, APK Directorate and SITP Directorate. This can be seen from the decreasing trend in the number of BPK findings that are directly related to the duties and functions of the PKN Directorate from year to year. In terms of achieving the target for completion of BPK's recommendations for LKPP and LKBUN, since 2018 the annual achievement of the PKN Directorate has always been 100% of the target. Besides enhancing the quality of the PKN Directorate Financial Report, the number of BPK recommendations that must be followed up has also declined, where in 2021 only 3 BPK recommendations require to be followed up. To that end, all of these recommendations have been proposed as being completed.



Mengawal ALCo Regional sebagai Payung Hukum RCE Escorting Regional ALCo as RCE's Legal Framework

Melalui kelembagaan yang kuat, DJPb bisa bertransformasi menjadi real RCE

Through strong institutions, DG Treasury can transform into a real RCE

Peran *Regional Chief Economist* (RCE) sudah menjadi sebuah konsekuensi logis ketika DJPb telah berhasil mengembangkan IFMIS (*Integrated Financial Management Information System*) melalui SPAN dan SAKTI. Kemudian bagaimana ke depan dengan menggunakan sistem yang telah terbangun ini DJPb mampu membaca, menganalisa, dan menyampaikan hasilnya kepada para pemangku kepentingan. APBN yang semakin besar juga menuntut agar memberi dampak yang semakin efektif dan efisien. Peran inilah yang harus dilakukan oleh DJPb bagaimana agar tidak hanya mengolah dan memastikan APBN berjalan dengan baik tetapi juga mampu memberikan feedback positif kepada pusat maupun mitra di daerah. Peluang itulah yang penting untuk diisi oleh RCE.

Melakukan *shifting function* tentu memerlukan proses karena adanya gap dari existing terhadap ekspektasi sehingga perlu dilakukan pendekatan bertahap melalui penguatan dari sisi fungsi level teknis. Oleh karenanya, Direktorat Pengelolaan Kas Negara PKN mengawal *Asset-Liability Committee* (ALCo) regional yang memerlukan payung hukum.

ALCo regional menjadi penting sebab akan berperan sebagai payung hukum bagi peran RCE lainnya seperti penajaman Kajian Fiskal Regional (KFR) maupun pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) sebab ALCo merupakan forum yang paling rutin melakukan kegiatan aktif setiap bulan.

Berbagai langkah telah dilakukan dengan tujuan agar membuat daerah mampu mandiri, baik secara SDM ataupun secara data. Dengan melakukan koordinasi dengan ALCo pusat, maka pembinaan dengan ALCo regional dapat dilakukan dengan baik.

The role of the *Regional Chief Economist* (RCE) has become a logical consequence when DG Treasury succeeded in developing IFMIS (*Integrated Financial Management Information System*) through SPAN and SAKTI. For the future, through this system DG Treasury is able to read, analyze, and convey the outcomes to stakeholders. The continuous growth of the State Budget also requires that it be more impactful in an effective and efficient manner. This is exactly the function that must be performed by DG Treasury, i.e. not only ensuring that State Budget execution runs well but also be able to provide positive feedback to the center and regional partners. This opportunity is exactly what is to be fulfilled by the RCE.

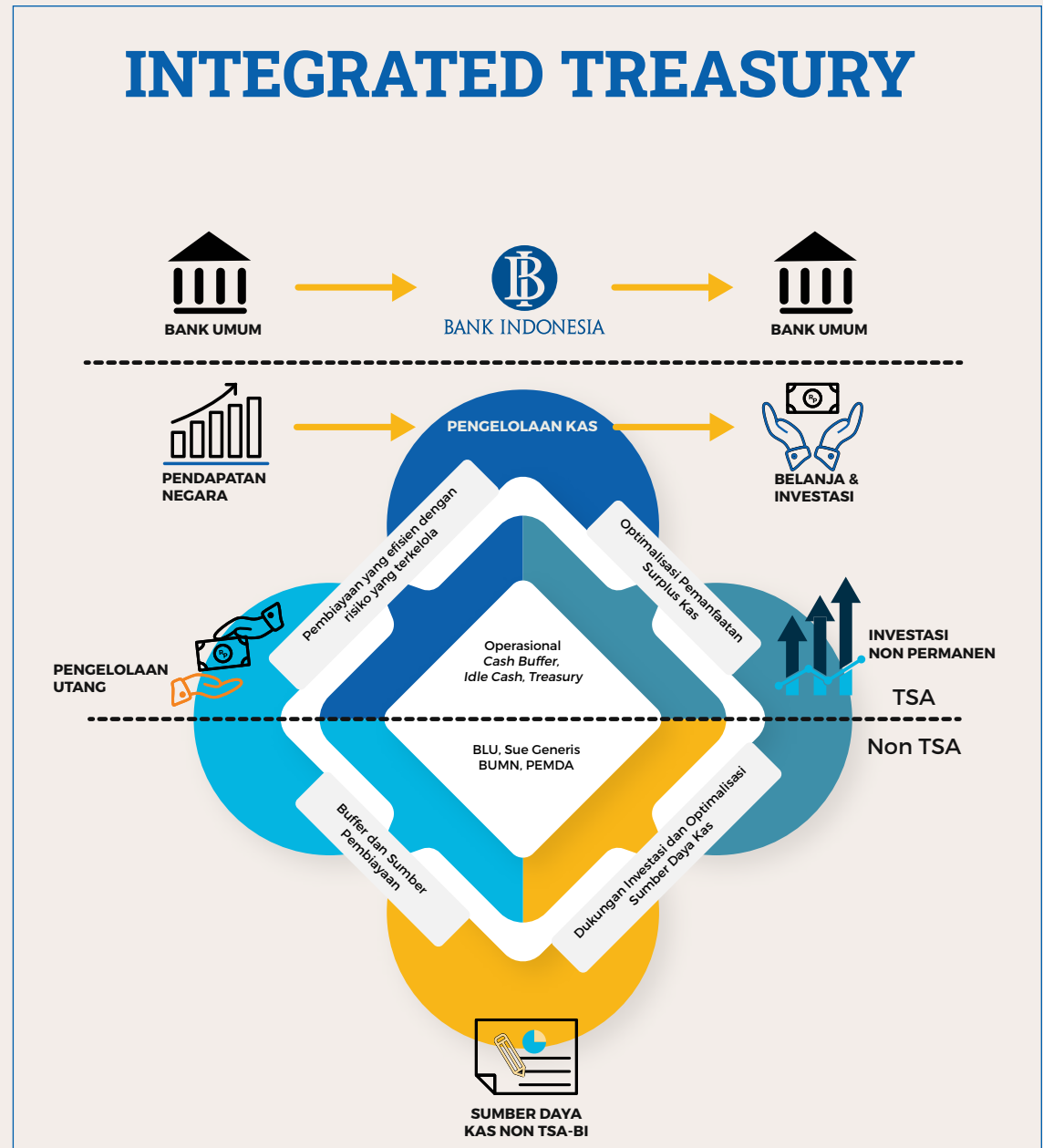
Carrying out a *shifting function* certainly requires a process because there is a gap from the existing to expectations, therefore it is necessary to take a gradual approach through strengthening in terms of functions at the technical level. Consequently, the PKN Directorate oversees the regional *Asset-Liability Committee* (ALCo) that requires a legal framework.

The regional ALCo is important because it will act as a legal framework for other RCE roles, such as honing the *Regional Fiscal Study* (KFR) and establishing the *State Financial Management Coordination Forum* (FKPKN). This is because ALCo is the forum that routinely carries out activities every month.

Various steps have been taken with the aim of making the regions self-sufficient, both in terms of human resources and data. By coordinating with the central ALCo, mentoring with regional ALCos can be carried out in a proper manner. Several DG

Beberapa Kanwil DJPb juga telah ditunjuk sebagai *pilot project* ALCo regional yang kemudian secara intensif mengawal kegiatan yang dilaporkan. Apabila Kanwil satu dan yang lain memiliki inisiatif yang berbeda, maka ketika digabungkan justru akan dapat saling menguatkan. Hal tersebut merupakan sinergi yang dilakukan bukan hanya Kanwil DJPb, tetapi juga bersinergi dengan Kanwil DJP atau DJBC sebagai kesatuan sharing data bersama sehingga dapat disampaikan kepada publik secara masif. Melalui kelembagaan yang kuat, DJPb bisa bertransformasi menjadi real RCE.

Treasury regional offices have also been appointed as regional ALCo pilots which then intensively oversee the reported activities. If one regional office and another have different initiatives, when combined they can actually strengthen each other. These synergies are carried out not only at DG Treasury regional offices, but also with DG Taxes regional offices or DG Customs & Excise as a joint data sharing unit for being able to convey accurate information to the public on a large scale. Through strong institutions, DG Treasury can transform into a real RCE.





Fungsi Manajemen Investasi

The Investment Management System Function

Analisis kebutuhan investasi menjadi semakin penting terutama dalam mengemban peran sebagai *Regional Chief Economist (RCE)* agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat terakselerasi. Melalui Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI), berbagai kebijakan dan standardisasi teknis dilaksanakan untuk meningkatkan kemakmuran bangsa.

In the present era, analyses of investment needs is becoming increasingly important, especially in performance of the role of Regional Chief Economist (RCE) to accelerate economic growth in sub-national regions. In this regard, the Directorate of Investment Management System (SMI) has the role of formulating various policies and technical standards to enhance the prosperity of the nation.

Peningkatan Inklusi Keuangan

Increasing Financial Inclusion

Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro

Pemerintah melalui DJPb mengelola Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang menasar masyarakat usaha mikro lapisan terbawah yang belum dapat difasilitasi oleh perbankan melalui program KUR. Pembiayaan tersebut diregulasi oleh Direktorat SMI dan secara operasional dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan BLU di bawah regulasi dan struktur organisasi DJPb. Pembiayaan UMi diberikan dengan mempertimbangkan keberadaan kelompok usaha mikro dengan tingkat feasibility yang baik, namun tidak cukup bankable untuk mengakses pembiayaan perbankan.

Jumlah yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank hingga 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.062,31 miliar kepada 5.392.705 debitur. Adapun sebaran penyaluran Pembiayaan UMi adalah sebagai berikut.

Provision of Ultra Micro Financing

Through DG Treasury, the government manages the Ultra Micro Financing (UMi) scheme which is targeted towards the lowest-level micro-enterprise community that cannot be facilitated by banks under the KUR program. This type of financing is regulated by the SMI Directorate and operationally carried out by the Government Investment Center (PIP) which is a Public Service Agency (BLU) as regulated under the DG Treasury organizational structure. UMi financing is provided by considering the existence of micro business groups that have good feasibility prospects, but who are generally not bankable enough to access bank financing.

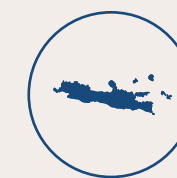
As of December 31, 2021, financing disbursed through Non-Bank Financial Institutions was IDR 18,062.31 billion to 5,392,705 debtors. The details of UMi financing is as follows:



Sumatera
949.597
Debitur
3,16 T
Rupiah



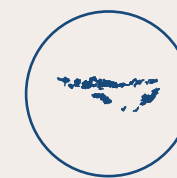
Kalimantan
98.263
Debitur
358,56 M
Rupiah



Jawa
3.819.840
Debitur
12,70 T
Rupiah



Sulawesi
265.494
Debitur
922,46 M
Rupiah



Bali Nusa Tenggara
241.857
Debitur
841,36 M
Rupiah



Maluku Papua
17.924
Debitur
71,09 M
Rupiah

**SEBARAN DEBITUR PER PROVINSI
(TERBESAR KE TERKECIL)
DEBTORS BY PROVINCE
(LARGEST TO SMALLEST)**

Provinsi Province	Jumlah Debitur Number of Debtors	Provinsi Province	Jumlah Debitur Number of Debtors
DKI Jakarta	1.053.062	Kalimantan Selatan	31.843
Jawa Barat	915.845	Kalimantan Barat	31.682
Jawa Timur	890.641	Sulawesi Tengah	26.769
Jawa Tengah	716.784	Gorontalo	26.452
Sumatera Utara	267.160	Kalimantan Timur	25.828
Lampung	199.007	Sulawesi Barat	23.472
Banten	194.121	Sulawesi Tenggara	20.899
Nusa Tenggara Barat	162.724	Bengkulu	16.777
Sumatera Selatan	152.855	Bali	15.895
Sulawesi Selatan	135.625	Kepulauan Riau	11.932
Sumatera Barat	87.992	Bangka Belitung	11.452
Aceh	82.370	Maluku	8.878
Riau	72.661	Kalimantan Tengah	7.196
Nusa Tenggara Timur	62.968	Papua	4.710
D.I. Yogyakarta	49.387	Papua Barat	2.223
Jambi	47.391	Maluku Utara	2.113
Sulawesi Utara	32.277	Kalimantan Utara	1.714

Berdasarkan data di atas, pembiayaan UMi telah menjangkau 34 provinsi di Indonesia. Tiga besar penyaluran berada di provinsi DKI Jakarta (1.053.062 debitur), Jawa Barat (915.845 debitur), dan Jawa Timur (890.641 debitur). Adapun penyaluran terkecil berada di provinsi Kalimantan Utara (1.714 debitur).

Kinerja penyaluran pembiayaan UMi tahun 2021 ditunjukkan pada tabel berikut. Sebanyak tiga Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) terlibat dalam penyaluran yaitu PT Penanaman Modal Madani (PNM), PT Pegadaian, dan PT Bahana Artha Ventura (BAV). Sampai dengan tahun

Based on the data above, UMi financing has covered 34 provinces in Indonesia. In terms of value, the top three disbursements were in the provinces of Jakarta (1,053,062 debtors), West Java (915,845 debtors), and East Java (890,641 debtors). Conversely, the lowest disbursement was in the province of North Kalimantan (1,714 debtors).

The UMi financing disbursements in 2021 is shown in the following table. In all, three Non-Bank Financial Institutions (LKBB) were involved in making the disbursements, namely PT Penanaman Modal Madani (PNM), PT Pegadaian, and PT Bahana Artha Ventura (BAV). As of 2021, the largest

2021, PNM menyalurkan pembiayaan UMi terbanyak melalui produk Mekaar dengan nilai total sebesar Rp12.535,67 miliar atau 69,4% dari total pembiayaan UMi. Jumlah tersebut dipinjamkan kepada 4.034.010 debitur atau 74,80% dari total debitur UMi. Berbeda dengan PNM dan Pegadaian, BAV menyalurkan Pembiayaan UMi melalui LKBB binaannya yang berjumlah 44 koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

share of financing was through PNM's Mekaar product with a total value of IDR 12,535.67 billion or 69.4% of total UMi financing. Of this figure, a total of 4,034,010 debtors were provided financing or 74.80% of total debtors. In contrast to PNM and Pegadaian, BAV provided UMi financing through its 44 fostered cooperatives as LKBBs spread throughout Indonesia.

Penyalur/Linkage Disbursing Institution	Debitur Debtors	Rp IDR
PT PNM	4.034.010	12.535.668.882.266
PT Pegadaian	431.467	2.063.054.481.768
Koperasi Konsumen Syariah An Nisa	38	304.000.000
KSPPS Bakti Huria Syariah	251	838.650.000
KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jatim	193	1.604.578.400
BAV (44 Koperasi/LKMA/BMT)	926.746	3.460.843.642.880

Pembiayaan UMi merupakan program strategis yang memiliki dampak langsung pada pemberdayaan wanita
UMi financing is a strategic program that has a direct impact on women's empowerment

Prinsip pembiayaan UMi adalah enhancing and empowering. Jumlah debitur UMi hingga tahun 2021 sebanyak 5.392.705 debitur dengan proporsi mayoritas merupakan wanita (94,76%). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pembiayaan UMi merupakan program strategis yang memiliki dampak langsung pada pemberdayaan wanita. Sebagai contoh, salah satu produk yang paling banyak menyalurkan pembiayaan UMi, yaitu Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), memberikan modal dan pendampingan kepada wanita prasejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha maupun yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha.

The principle of UMi financing is enhancing and empowering. As of 2021, there were 5,392,705 UMi debtors with the majority being women (94.76%). This fact is an indication that UMi financing is a strategic program that has a direct impact on women's empowerment. For example, one of the products that has seen the majority of UMi financing, i.e., Fostering a Prosperous Family Economy (Mekaar), provides capital and assistance to underprivileged women who do not have the capital to open a business or who need capital to develop a business.

Laki-laki

282.629

Debitur

1.428.255.085.827

Rupiah

Wanita

5.110.076

Debitur

16.634.059.149.487

Rupiah

Berdasarkan nilai akadnya, sebanyak 35,49% akad bernilai di bawah Rp2,5 juta. Sedangkan 55,59% lainnya bernilai antara Rp2,5 - Rp5 juta. Hal tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan UMi menysasar pada usaha-usaha ultra mikro yang membutuhkan akses pembiayaan yang sangat kecil. Plafon pembiayaan UMi hanya Rp10 juta sesuai dengan kebutuhan modal pada segmen usaha ultra mikro.

Based on the contract value, 35.49% of contracts were worth less than IDR 2.5 million, while another 55.59% were valued at between IDR 2.5 – IDR 5 million. This fact explains that UMi financing is targeted towards ultra-micro businesses that require access to low funding support. In this context, UMi financing has a maximum ceiling of IDR 10 million in accordance with the capital requirements of the ultra-micro business segment.

Nilai Akad (Rp) Contract Value (IDR)	Debitur Debtors	Jumlah Penyaluran (Rp) Total Disbursement (IDR)
> 10.000.000	2.089	37.235.750.000
0 - 2.500.000	1.913.990	3.817.202.967.409
2.500.001 - 5.000.000	2.997.983	10.598.490.096.680
5.000.001 - 7.500.000	311.949	2.075.632.221.062
7.500.001 - 10.000.000	166.694	1.533.753.200.163
Total	5.392.705	18.062.314.235.314

Berdasarkan usia, sebagian besar pembiayaan UMi diakses oleh debitur pada kelompok 40-49 tahun sebesar 32%, kelompok 30-39 tahun sebesar 28%, dan kelompok usia lebih dari 50 tahun sebesar 25%.

Based on age group, the majority of UMi financing was accessed by debtors in the 40-49 age group at 32%, followed by the 30-39 age group at 28%, and the over 50 age group at 25%.

Usia Age	Debitur Debtors	Jumlah Penyaluran (Rp) Total Disbursement (IDR)
< 20	17.858	50.179.704.312
>=50	1.344.547	4.570.134.563.637
20-29	759.295	2.368.862.042.668
30-39	1.549.745	5.178.689.963.473
40-49	1.721.260	5.894.447.961.224
Total	5.392.705	18.062.314.235.314

Untuk penyaluran Pembiayaan UMi dengan akad Syariah dilakukan melalui 36 Koperasi Syariah serta skema Syariah pada PT Pegadaian dan PT PNM.

Further, UMi disbursements under Islamic Sharia contracts was conducted through 36 Sharia Cooperatives and Sharia schemes at PT Pegadaian and PT PNM.

Skema Scheme	Debitur Debtors	%	Jumlah Penyaluran (Rp) Total Disbursement (IDR)	%
Syariah Sharia	2.548.527	47,26	8.650.134.512.869	47,89
Konvensional Conventional	2.844.178	52,74	9.412.179.722.445	52,11
Total	5.392.705	100,00	18.062.314.235.314	100,00

Pemerintah terus melakukan upaya pengembangan pembiayaan UMi. Pada tahun 2021, beberapa pengembangan yang dilakukan yaitu:

1. Pengembangan Rumah UMi di 10 Kanwil DJPb

Mengikuti keberhasilan pengembangan Rumah UMi di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, PIP memperluas implementasi pengembangan Rumah UMi untuk Kanwil DJPb lain yang memiliki potensi untuk pengembangan Rumah UMi. Sampai dengan saat ini telah terdaftar 10 Kanwil potensial untuk pengembangan Rumah UMi antara lain: Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Malang, Sulawesi Selatan dan berstatus sedang dalam pengusulan yaitu: Sumatera Barat, Yogyakarta, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur. BLU PIP dan Direktorat SMI akan melakukan rangkaian koordinasi terkait perluasan implementasi tersebut;

2. Kerja sama Bank Indonesia untuk Topik Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dan Program Pelatihan Aplikasi Pembukuan UMKM SiApik

Sebagai bagian dari Forum Harmonisasi antara Kemenkeu dan Bank Indonesia, Direktorat SMI untuk topik terkait Pembiayaan UMi terlibat dalam Program Pelatihan Aplikasi Pembukuan bagi UMKM (SiApik) kepada Pendamping (Account Officer) Penyalur Pembiayaan UMi dan Kerja Sama Pendanaan yang bersumber dari Perbankan yang tidak dapat memenuhi ketentuan Bank Indonesia terkait penyaluran kredit bagi UMKM dan Pembiayaan Inklusif melalui RPIM.

PIP akan menjadi *coordinated fund* bagi perbankan yang ingin melakukan kerja sama untuk memenuhi RPIM melalui program Pembiayaan UMi. PIP akan menindaklanjuti dengan melakukan

The government continues to make efforts to develop UMi financing. In 2021, several developments were carried out, as follows:

1. Development of the UMi House in 10 DG Treasury Regional Offices

Following the successful development of the UMi House at the DG Treasury Regional Office of North Maluku Province, PIP expanded the UMi House to other regional offices having the potential for such a scheme. At present, 10 potential regional offices for the development of UMi House have been registered, namely Aceh, Riau, South Sumatra, Central Java, Malang, South Sulawesi, with others being proposed include West Sumatra, Yogyakarta, West Kalimantan and East Nusa Tenggara. PIP and the SMI Directorate will carry out a series of coordination activities related to the expansion of the UMi House initiative;

2. Collaboration with Bank Indonesia on the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM) and the SiApik MSME Bookkeeping Application Training Program

As part of the Harmonization Forum between the Ministry of Finance and Bank Indonesia, the SMI Directorate is involved in topics related to UMi Financing and the Bookkeeping Application Training Program for MSMEs (SiApik) to the Account Officer for UMi Financing Disbursements and Funding Cooperation sourced from banks that cannot fulfill Bank Indonesia regulations regarding lending to MSMEs and Inclusive Financing through RPIM.

PIP will be the *coordinated fund* for banks that wish to cooperate to fulfill the RPIM through the UMi financing program. PIP will follow up by coordinating with several banks that have a vision for



koordinasi dengan beberapa Bank potensial yang memiliki visi untuk pengembangan UMKM khususnya usaha ultra mikro.

3. Kerja Sama Penyaluran Pembiayaan UMi melalui P2P Lending

PIP telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan salah satu penyedia jasa peer to peer (P2P) lending yaitu Mekaar.id. Tujuan pengembangan skema penyaluran Pembiayaan UMi melalui P2P Lending ini adalah untuk memanfaatkan platform yang dimiliki oleh P2P lending dalam perluasan jangkauan Pembiayaan UMi bagi pelaku usaha ultra mikro. Kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan piloting penyaluran Pembiayaan UMi melalui P2P lending.

4. Pengembangan Kerangka Kerja Uji Dampak Pembiayaan UMi melalui Revisi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018.

Berdasarkan hasil kerja sama dengan Melbourne Microfinance Initiatives pada tahun 2020 terkait pengembangan kerangka kerja Uji Dampak Pembiayaan UMi, didapatkan masukan antara lain terkait penambahan *control group* sebagai responden pembanding untuk benar-benar mengukur atribusi Pembiayaan UMi pada perubahan Nilai Perekonomian Debitur Pembiayaan UMi dan untuk menambahkan indikator terkait dengan Nilai Keuangan Inklusif untuk mengukur tingkat inklusifitas keuangan Debitur Pembiayaan UMi.

Pengembangan Kerangka Uji Dampak Pembiayaan UMi ini telah dilakukan sejak tahun 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun 2022 melalui revisi Perdirjen terkait Monev Pembiayaan UMi. Selain itu, Pengembangan Kerangka Kerja Uji Dampak ini juga akan diusulkan untuk menjadi *Quickwin* Direktorat SMI untuk tahun 2022.

developing MSMEs, especially ultra-micro businesses.

3. Collaboration on UMi financing disbursements through P2P Lending

PIP has signed a Cooperation Agreement with one of the providers of peer to peer (P2P) lending services, namely Mekaar.id. The purpose of developing the UMi financing scheme through P2P Lending is to use the platform of P2P lenders to enhancing the reach of UMi financing to ultra-micro business players. This collaboration will be followed up by the piloting of UMi financing through P2P lending.

4. Development of the UMi Financing Impact Test Framework through Revision of Director General of Treasury Regulation No. PER-25/PB/2018.

Based on collaboration outcomes with the Melbourne Microfinance Initiative in 2020 regarding the development of the UMi Financing Impact Test framework, various inputs have been obtained, which include the addition of a control group as a comparator respondent to actually measure the attribution of UMi Financing to changes in the Economic Value of UMi Financing Debtors and to add indicators related to Financial Inclusive Value to measure the level of financial inclusion of UMi Financing Debtors.

The development of this UMi Financing Impact Test Framework has been carried out since 2021 and will be continued in 2022 through the revision of the Director General Regulation concerning Monitoring and Evaluation of UMi Financing. In addition, the development of the Impact Test Framework will also be proposed to become a quick win for the SMI Directorate in 2022.

Pengembangan Tata Kelola Manajemen Investasi Development Of Investment Management Governance

Go Live Investasi Pemerintah Tahap I

Pada tahun 2021 Direktorat SMI mencanangkan Go Live Investasi Pemerintah Tahap I. Pada tahap ini, pengembangan Investasi Pemerintah diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang meliputi penetapan Komite Investasi Pemerintah (KIP) yang memegang kewenangan supervisi beserta tim pendukung seperti Task Force KIP dan Unit Kerja Pembantu (UKP) KIP. Selain pembentukan kelembagaan tersebut, beberapa hal yang diselesaikan meliputi penyusunan Kebijakan Umum dan Rencana Strategis (KURS), serta penunjukan awal Operator Investasi Pemerintah (OIP).

1. Pembentukan Komite Investasi Pemerintah, Task Force, Unit Kerja Pembantu

Komite Investasi Pemerintah (KIP) merupakan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam pengelolaan investasi pemerintah. Pembentukan KIP merupakan salah satu amanat PP 63 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 53/PMK.05/2020. Berdasarkan hal tersebut, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 451/KMK.05/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Komite Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Oktober 2021.

Untuk membantu KIP dalam menganalisis informasi dan pengambilan keputusan, Ketua KIP menerbitkan Keputusan Ketua KIP nomor KEP-1/KIP/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Task Force Komite Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, Dirjen Perbendaharaan menerbitkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-314/PB/2021 tentang

Phase I of Government Investment Go Live

In 2021, the SMI Directorate launched Phase I of Government Investment Go Live. At this stage, the development of Government Investment was directed at infrastructure development that includes establishment of the Government Investment Committee (KIP), which holds the supervisory authority and has supporting teams such as the KIP Task Force and the KIP Supporting Work Unit (UKP). Besides the establishment of these institutions, various aspects that have been completed include the preparation of the General Policy and Strategic Plan (KURS), and initial appointment of a Government Investment Operator (OIP).

1. Establishment of the Government Investment Committee, Task Force, Supporting Work Unit

The Government Investment Committee (KIP) is an institution that was established to supervise the management of government investment. The establishment of KIP is one of the mandates of Government Regulation No. 63 of 2019 and Minister of Finance Regulation No. 53/PMK.05/2020. Based on these regulations, the Minister of Finance Decree No. 451/KMK.05/2021 concerning Establishment and Membership of the Government Investment Committee for FY 2021 was stipulated on 26 October 2021.

To assist KIP in analyzing information and making decisions, the KIP Chairperson Decree No. KEP-1/KIP/2021 concerning Establishment and Membership of the Government Investment Committee Task Force for FY 2021 has been issued. Furthermore, the Director General of Treasury Decree No. KEP-314/PB/2021 concerning Establishment and Determination of Membership of Government Investment Committee Supporting



Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Unit Kerja Pembantu Komite Investasi Pemerintah Tahun 2021. Kepdirjen tersebut menjadi dasar UKP KIP bekerja dan menyiapkan data dan dokumen untuk mendukung pengambilan keputusan pada level KIP.

2. Penyusunan Kebijakan Umum dan Rencana Strategis Investasi Pemerintah

Kebijakan Umum dan Rencana Strategis Investasi Pemerintah (KURS IP) merupakan penjabaran arah kebijakan dan rencana strategis investasi pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen tersebut memuat: (a) pendahuluan; (b) landasan hukum investasi pemerintah; (c) perkembangan ekonomi, investasi, dan pasar keuangan; (d) proyeksi ekonomi, investasi, dan pasar keuangan; (e) manfaat, tujuan, dan sasaran investasi pemerintah; (f) arah dan kebijakan strategi investasi pemerintah; dan (g) kaidah pelaksanaan investasi pemerintah.

KURS IP memiliki fungsi yaitu: (a) pedoman bagi Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam menyusun Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP); (b) pedoman bagi Operator Investasi Pemerintah yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) dalam menyusun rencana jangka panjang dan menengah atas investasi pemerintah; dan (c) pedoman bagi KIP dalam menyusun kebutuhan dana investasi pemerintah yang akan dikelola oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang berbentuk BUMN dan/atau BHL.

3. Penyusunan PKIP untuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

PKIP merupakan dokumen yang memberikan tujuan dan sasaran investasi pemerintah dan menjelaskan strategi yang

Work Unit in 2021 has also been issued. The DG Treasury Decree is the basis for the KIP Supporting Work Unit to work and prepare data and documents to support decision making at the KIP level.

2. Preparation of Government Investment General Policy and Strategic Plan

The Government Investment General Policy and Strategic Plan (KURS IP) is an elaboration of the government's investment policy direction and strategic plan which refers to the National Medium Term Development Plan (RPJMN). The document contains: (a) introduction; (b) legal basis for government investment; (c) economic development, investment and financial markets; (d) economic, investment and financial market projections; (e) benefits, objectives and targets of government investment; (f) the direction and policy of the government's investment strategy; and (g) the rules for implementing government investment.

KURS IP has the following functions: (a) to provide guidelines for the Government Investment Committee (KIP) in preparing the Government Investment Policy Statement (PKIP); (b) to provide guidelines for Government Investment Operators as Public Service Agencies (BLU) in preparing long and medium term plans for government investments; and (c) to provide guidelines for KIP in formulating the need for government investment funds to be managed by a Government Investment Operator (OIP) in the form of BUMN (SoE) and/or BHL.

3. Preparation of PKIP for the People's Housing Savings Management Agency

The PKIP is a document that provides the government's investment objectives and targets and describes the strategy that must

harus diterapkan oleh BP Tapera untuk memenuhi tujuan investasi pemerintah yang memuat: (a) karakteristik dan tujuan investasi; (b) alokasi dana dan jangka waktu investasi; (c) skema dan pilihan investasi; (d) target imbal hasil dan jasa pengelolaan; (e) perencanaan; (f) divestasi; (g) manajemen risiko dan pengendalian internal; dan (h) monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

PKIP BP Tapera digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan investasi pemerintah berupa Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (Dana FLPP) yaitu dana yang digunakan pemerintah untuk menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau yang dikelola oleh BP Tapera selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP).

4. Pengalihan FLPP dan PPDPP kepada BP Tapera melalui Skema Investasi Pemerintah

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dikelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Alokasi APBN untuk program FLPP dari tahun 2010 sampai dengan 2021 mencapai Rp60,65 triliun kepada BLU PPDPP dan telah disalurkan melalui pembiayaan KPR Sejahtera kepada 943 ribu lebih Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembiayaan FLPP pada MBR melalui Bank Penyalur dengan tenor maks 20 tahun dan *fixed rate* sebesar 5% per tahun.

be implemented by BP Tapera to meet the government's investment objectives, which includes: (a) investment characteristics and objectives; (b) allocation of funds and investment period; (c) investment schemes and options; (d) target returns and management services; (e) planning; (f) divestment; (g) risk management and internal control; and (h) monitoring, evaluation, and reporting.

PKIP BP Tapera is used as a guideline in the implementation of government investment in the form of the Housing Financing Facility Fund (FLPP Fund), which is a fund used by the government to provide long-term low-cost funds in the context of housing finance for Low-Income Communities (MBR) to obtain decent and affordable housing, as managed by BP Tapera as the Government Investment Operator (OIP).

4. Transfer of FLPP and PPDPP to BP Tapera through the Government Investment Scheme

The Housing Financing Liquidity Facility Program (FLPP) is a housing financing liquidity facility support for low-income communities. This program is managed by the Public Service Agency for the Management of Housing Financing Funds (BLU PPDPP) of the Ministry of Public Works and Public Housing. The State Budget allocation for the FLPP program from 2010 to 2021 totaled IDR 60.65 trillion to BLU PPDPP and has been channeled through KPR Sejahtera financing to more than 943,000 Low-Income Communities (MBR). FLPP financing for MBR is provided through partner banks with a maximum tenor of 20 years and a fixed rate of 5% per annum.



Rancangan PP Tentang Pemberian Pinjaman

Salah satu aturan yang disusun pada tahun 2022 adalah Rancangan PP Pemberian Pinjaman. Aturan pemberian pinjaman sebenarnya merupakan amanat dari pasal 33 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa tata cara pemberian pinjaman diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara substansi, terdapat beberapa urgensi penyusunan rancangan PP ini yaitu:

1. Meningkatkan kerjasama ekonomi dan hubungan diplomatik, serta berperan aktif dalam pergaulan perdagangan internasional.
2. Mempercepat dan mendukung program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur strategis/ prioritas nasional.
3. Memberikan landasan payung hukum bagi tata kelola hubungan keuangan pusat dan daerah dalam hal pemberian pinjaman.
4. Meningkatkan ekspor melalui penyediaan fasilitas pembiayaan bagi negara tujuan ekspor.
5. Memberikan landasan hukum bagi pemberian pinjaman pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Sektoral. Contohnya UU Lembaga Penjaminan Simpanan, UU Pertanian, UU Peternakan, UU Perindustrian, UU Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
6. Melengkapi skema pemberian hibah kepada pemerintah/lembaga asing, khususnya hibah kepada negara asing dalam jumlah yang lebih besar.

Pada tahun 2021, Direktorat SMI telah menyelesaikan pembahasan RPP Pemberian Pinjaman di internal Kemenkeu. Selanjutnya pembahasan RPP tersebut akan dilanjutkan pada level Panitia Antar Kementerian (PAK) dan pembahasan bersama Kemenkumham di tahun 2022.

Draft Government Regulation on Loans Provision

One of the regulations drawn up in 2022 is the Draft Government Regulation on Loans Provision. The rules for granting loans are actually a mandate from Article 33 of Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury which states that the procedure for granting loans is regulated through a Government Regulation.

Substantially, there are several urgent requirements for the preparation of this draft regulation, as follows:

1. Improving economic cooperation and diplomatic relations, as well as playing an active role in international trade relations
2. Accelerating and supporting government programs in strategic infrastructure development/national priorities.
3. Providing a legal basis for the governance of central and regional financial relations in terms of lending.
4. Increasing exports through the provision of financing facilities for export destination countries.
5. Providing a legal basis for the provision of government loans regulated under sectoral laws. For example, the Law on Deposit Insurance Corporation, the Law on Agriculture, the Law on Animal Husbandry, the Law on Industry, the Law on the Indonesian Export Financing Agency.
6. Completing the grant scheme to foreign governments/institutions, especially grants to foreign countries in larger amounts.

In 2021, the SMI Directorate completed discussions on the draft regulation within the Ministry of Finance. For the next step, further discussions will take place in 2022 at the level of the Inter-Ministerial Committee (PAK) including a discussion with the Ministry of Law and Human Rights.

Pengembangan Riset Manajemen Investasi Developments In Investment Management Research

Digitalisasi Pembiayaan Ultra Mikro

Pembiayaan UMi telah diluncurkan sejak tahun 2017. Sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021 telah berhasil menjangkau sebanyak 5.092.355 debitur di seluruh Indonesia dengan total pembiayaan mencapai Rp16,94 triliun. Melalui survei baseline dan endline, dapat diukur tingkat keberhasilan penyaluran dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi para debiturnya. Tujuan mengimplementasikan piloting digitalisasi UMi adalah untuk memanfaatkan marketplace online dan transaksi secara *cashless* dalam rangka meningkatkan daya saing debitur sekaligus implementasi *physical distancing* saat pandemi Covid-19.

Meskipun memiliki prospek yang cukup bagus dan berkontribusi besar, proses digitalisasi UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah. Evolusi UMKM di Indonesia menuju pemasaran digital hingga hari ini masih menghadapi berbagai tantangan. Sebuah riset menyebutkan hanya 9% UMKM yang telah canggih dan 18% UMKM yang telah memanfaatkan web dan media sosial sebagai media pemasaran.

Terdapat beberapa program yang telah diimplementasikan sebagai bagian dari program digitalisasi sebagai berikut.

Digitalization of Ultra Micro Financing

The UMi financing scheme was launched in 2017. As of October 22, 2021, the scheme has managed to reach 5,092,355 debtors throughout Indonesia with a total financing of IDR 16.94 trillion. Through baseline and endline surveys, the level of success of disbursement in improving the economic welfare of beneficiaries can be measured. The purpose of piloting UMi digitalization is to utilize the online marketplace and cashless transactions to increase debtor competitiveness as well as implement physical distancing during the Covid-19 pandemic.

Despite having good prospects and providing a significant contribution, the process of digitizing MSMEs in Indonesia continues to be faced with various problems. The evolution of MSMEs in Indonesia towards digital marketing continues to be faced with various challenges. Based on a research study, only 9% of MSMEs have achieved the required sophistication while another 18% have used the web and social media as marketing media.

In this context, several programs have been implemented as part of the digitization program, as follows.

UMi Cashless

Penyaluran Pembiayaan UMi melalui Uang Elektronik

Marketplace Online

Onboarding Debitur Pembiayaan UMi ke Grabfood

Onboarding Debitur Pembiayaan UMi ke Digipay

Program Lelang Sukarela Produk UMi melalui platform lelang.go.id

Pelatihan program UMi Bangkit



Dari kajian yang dilakukan, diketahui masih ada 57% penerima pembiayaan UMi yang tidak pernah menggunakan uang elektronik dan 40% penerima pembiayaan UMi tidak pernah menggunakan *marketplace*. Dari kajian yang dilakukan diketahui kendala utama pemanfaatan uang elektronik adalah belum siapnya ekosistem pembayaran *cashless* sehingga debitur tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk memanfaatkan uang elektronik karena dirasa merepotkan. Adapun kendala utama pemanfaatan *marketpace* yaitu permasalahan penyediaan barang secara *ready stock* serta manajemen *online store* yang merepotkan.

Pengembangan Metode Penyusunan Analisis Peluang Investasi di Daerah

Dengan terbitnya PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, Direktorat SMI mengemban tugas baru dalam pengelolaan investasi pemerintah. Pemerintah dapat melaksanakan investasi dalam berbagai bentuk instrumen, yaitu saham, surat utang dan/atau sukuk, dan investasi langsung berupa Pemberian Pinjaman, Kerjasama Investasi, dan Investasi Langsung Lainnya.

Investasi Pemerintah dapat mencakup investasi yang dilakukan di daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Terdapat banyak peluang investasi di daerah, baik berupa infrastruktur maupun non infrastruktur. Terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk investasi membuat Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan investasi dan pihak swasta kurang tertarik untuk berinvestasi karena proyeksi pengembalian hasil (*return*) yang kurang menjanjikan. Tata kelola investasi pemerintah yang sangat fleksibel dapat melingkupi investasi yang dilakukan di daerah sehingga peluang investasi di daerah yang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta dapat didanai melalui investasi pemerintah.

From the study conducted, it is known that 57% of UMi financing recipients have never used electronic money and another 40% have never used the marketplace. The study also indicates that the main obstacle to the use of electronic money is that the cashless payment ecosystem is not yet ready so that debtors do not have high motivation to use it and consider it to be bothersome. The main obstacle to using marketplace is the problem of providing ready stock of goods and troublesome online store management.

Developments in Methods for Analysis Preparation of Regional Investment Opportunities

With the issuance of Government Regulation No. 63 of 2019 concerning Government Investment, the SMI Directorate has a new task in managing government investment. The government can invest in various forms of instruments, namely shares, debt securities and/or sukuk, and direct investment in the form of lending, investment cooperation, and other direct investments.

Government investment may include those in sub-national regions that can encourage regional and national economic growth. There are many investment opportunities in the regions, both in the form of infrastructure and non-infrastructure. The limited financing abilities of regional budgets (APBD) for investment makes regional governments unable to conduct investments and the private sector is less interested in investing because the projected return is considered unpromising. In this regard, a flexible regime of government investment governance can cover regional investments so that investment opportunities that cannot be realized by regional governments and the private sector can be funded through government investment.

Kanwil DJPb yang berlokasi di setiap provinsi lebih memahami kondisi perekonomian, sektor-sektor unggulan dan potensial di daerah, dan dinamika yang terjadi di daerah sehingga diharapkan dapat memotret peluang investasi yang lebih relevan dengan kebutuhan daerah. Dirjen Perbendaharaan mengarahkan agar Kanwil DJPb menjadi *Regional Chief Economist* (RCE) di mana salah satu bentuk pelaksanaan arahan tersebut adalah melakukan analisis kebutuhan investasi di wilayahnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Dirjen Perbendaharaan pada tahun 2020 merekomendasikan adanya Analisis Peluang Investasi di Daerah (APID) yang diintegrasikan dalam Kajian Fiskal Regional (KFR). Kajian terkait analisis peluang investasi pemerintah di daerah yang akan dilakukan oleh Kanwil DJPb meliputi latar belakang kebutuhan investasi, nilai investasi yang dibutuhkan, analisis pasar, analisis kelayakan investasi (secara keuangan), analisis biaya dan manfaat (kelayakan secara ekonomi), analisis dampak terhadap ekonomi dan/atau sosial, dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat investasi pemerintah di daerah. Penyusunan APID merupakan salah satu bagian dari pengembangan Kanwil DJPb sebagai RCE. Melalui kajian tersebut, pemerintah mendapatkan data potensi dan peluang investasi untuk meningkatkan perekonomian daerah.

The DG Treasury regional offices located in each province have a better understanding of the local economic conditions, the most promising and potential sectors, and regional dynamics so that they are expected to capture investment opportunities that are more relevant to regional needs. The Director General of Treasury directs its regional offices to become the Regional Chief Economist (RCE), where one form of implementation of the directive is to analyze investment needs in the region in order to enhance regional economic growth.

The Restricted Leadership Meeting (Rapimtas) of the Director General of Treasury in 2020 recommended an Analysis of Regional Investment Opportunities (APID) which is integrated into the Regional Fiscal Study (KFR). The study related to the analysis of government investment opportunities in the regions that will be carried out by DG Treasury regional offices include the background of investment needs, the required investment value, market analysis, investment feasibility analysis (financially), cost and benefit analysis (economic feasibility), impact analysis on the economy and/or social, and factors supporting or inhibiting government investment in the regions. The preparation of the APID is one part of the development of DG Treasury regional offices as RCE. Through this study, the government obtains data on potential and investment opportunities to improve the regional economy.



Fungsi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

The Financial Management of Public Service Agencies Function

Badan Layanan Umum (BLU) berstrategi pulihkan ekonomi dengan memberikan peran yang semakin strategis di tengah masyarakat. Melalui Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU, peran sebagai wajah pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelola dana, pengelola kawasan, dan penyedia barang/jasa lainnya semakin dirasakan kehadirannya.

Public service agencies (BLU) have a strategy of restoring the economy by providing an increasingly strategic role in the community. Through the Directorate of Financial Management of Public Service Agencies (PPK BLU), the role of the government's public face in providing basic community needs such as healthcare, education, fund management, area administration, and other goods/services is increasingly felt.

Perkembangan BLU

Growth in Public Service Agencies

PNBP BLU terus meningkat pesat seiring berjalannya waktu hingga rata-rata tumbuh 22%

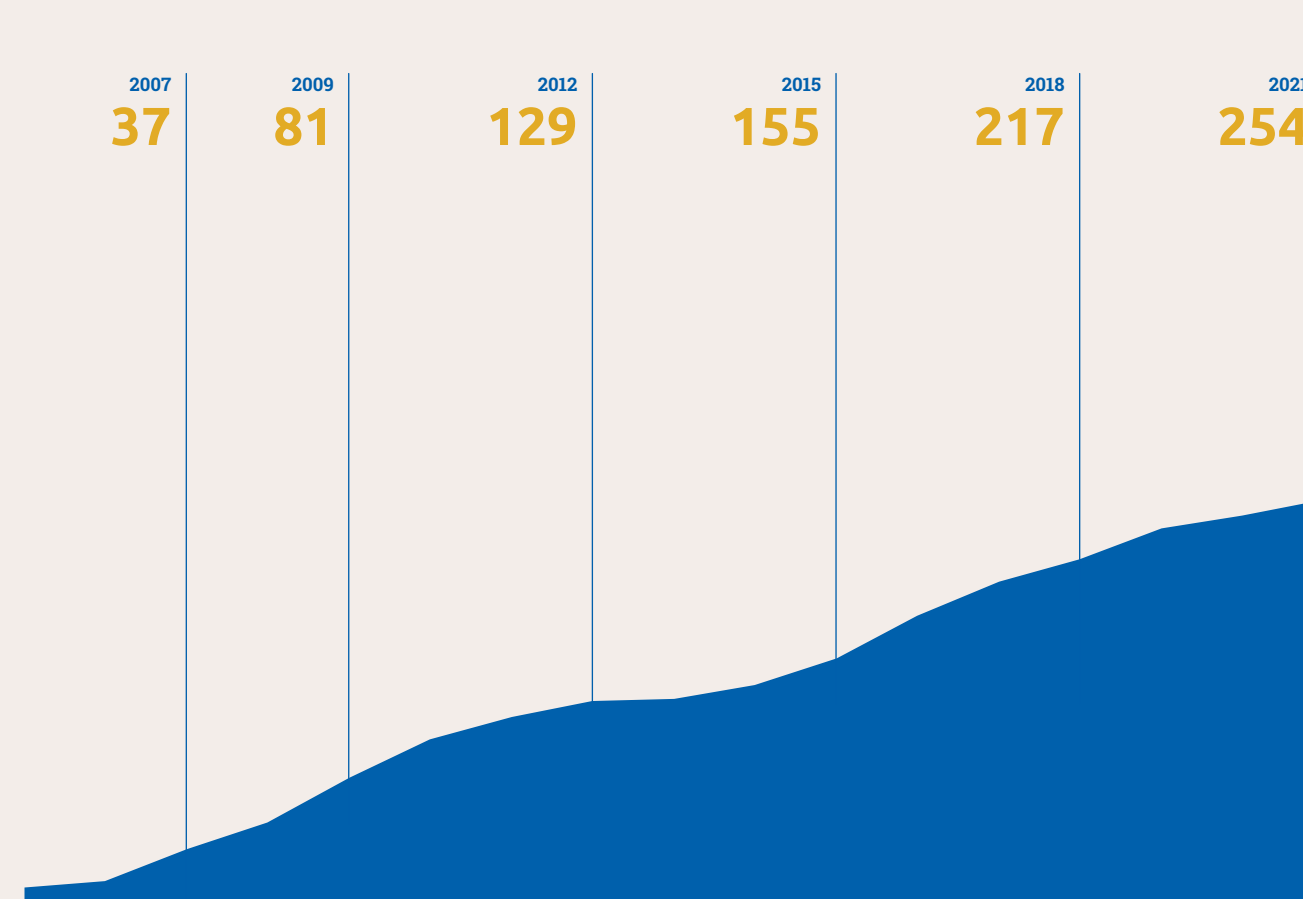
Non-Tax State Revenue (PNBP) generated by BLUs has rapidly risen with an average of 22% growth

Jumlah BLU terus bertambah setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2021, jumlah BLU telah mencapai 252 BLU yang terdiri dari 106 BLU Kesehatan, 107 BLU Pendidikan, 9 BLU Pengelola Dana, 6 BLU Pengelola Kawasan, dan 24 BLU Penyedia Barang/Jasa Lainnya.

Sejalan dengan semakin besarnya jumlah BLU, kontribusi BLU pada perekonomian Indonesia juga semakin besar setiap tahunnya. PNBP BLU terus meningkat pesat seiring berjalannya waktu hingga rata-rata tumbuh 22%, lebih besar dari rata-rata pertumbuhan PNBP Nasional 4% dan kontribusi PNBP atas Laba BUMN 9,1%. Dalam 11 tahun terakhir rasio kontribusi PNBP BLU rata-rata 10,5% dari PNBP Nasional.

The number of BLUs has been on an increasing trend from year to year. As of 2021, there were 252 BLU work units comprising 106 in healthcare services, 107 in education services, 9 in fund management services, 6 in area administration services, and 24 providing other goods and services.

Consistent with the increasing number of BLUs, their contribution to the Indonesian economy has also grown from year to year. Non-Tax State Revenue (PNBP) generated by BLUs has rapidly risen with an average of 22% growth, which is greater than the average national PNBP growth of 4% and the PNBP contribution from SOE profits at 9.1%. In the last 11 years, the PNBP contribution of BLUs has averaged 10.5% of the national PNBP.



BLU Bidang Layanan Kesehatan

Pada tahun 2021 telah ditetapkan 1 satker BLU bidang layanan kesehatan yaitu Balai Kesehatan Kerja Pelayaran pada tanggal 15 Februari 2021 dengan nomor ketetapan 57/KMK.05/2021.

Sampai dengan tahun 2021, jumlah BLU bidang layanan kesehatan secara keseluruhan mencapai 106 satker dengan rincian 33 BLU bidang layanan kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, 40 BLU bidang layanan kesehatan di lingkungan Kepolisian RI, 24 BLU bidang layanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan, 7 BLU balai kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan 3 BLU balai kesehatan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

BLU Bidang Layanan Pendidikan

Untuk BLU Bidang Layanan Pendidikan, pada tahun 2021 telah ditetapkan 9 satker BLU sebagai berikut.

Public Service Agencies providing Healthcare Services

In 2021, the Seafarers' Occupational Health Center was designated as a new BLU work unit providing healthcare services, i.e. on February 15, 2021 under MoF Decree No. 57/KMK.05/2021.

As of 2021, in total there were 106 BLU work units providing healthcare services, with 33 under the Ministry of Health, 40 within the Indonesian National Police, 24 within the Ministry of Defense, 7 treatment clinics (Balai Kesehatan) within the Ministry of Health, and 3 health centers within the Ministry of Transportation.

Public Service Agencies providing Education Services

In 2021, 9 education providers were designated as BLU work units, as follows:

As of 2021, in total there were 107 BLUs providing education services as per the following details:

Nomor Number	Nama K/L dan Satker BLU Name of Ministry and Public Service Agency Work Unit	Nomor dan Tanggal KMK Ministry of Finance Decree Number and Date
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Ministry of Education, Culture, Research and Technology		
1	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	209/KMK.05/2021 (31 Mei 2021)
2	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	209/KMK.05/2021 (31 Mei 2021)
3	Politeknik Negeri Bali	209/KMK.05/2021 (31 Mei 2021)
4	Politeknik Negeri Jakarta	209/KMK.05/2021 (31 Mei 2021)
5	Universitas Singaperbangsa Karawang	220/KMK.05/2021 (7 Juni 2021)
6	Politeknik Negeri Semarang	220/KMK.05/2021 (7 Juni 2021)
7	Universitas Islam Negeri KH Achmad Sid-diq Jember	319/KMK.05/2021 (2 Agustus 2021)
8	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal	526/KMK.05/2021 (29 Desember 2021)
9	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	526/KMK.05/2021 (29 Desember 2021)

Sampai dengan tahun 2021, jumlah BLU bidang layanan pendidikan secara keseluruhan mencapai 107 satker dengan rincian sebagai berikut.

- 39 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi;
- 19 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama;
- 23 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 18 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 4 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 1 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
- 1 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 2 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BLU Pengelola Dana

Sampai dengan tahun 2021, jumlah BLU bidang pengelola dana secara keseluruhan mencapai sebanyak 9 satker dengan rincian sebagai berikut.

- 5 BLU bidang pengelola dana di lingkungan Kementerian Keuangan;
- 1 BLU bidang pengelola dana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 1 BLU bidang pengelola dana di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informasi;
- 1 BLU bidang pengelola dana di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 1 BLU bidang pengelola dana di lingkungan Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah

BLU Pengelola Kawasan

Pada tahun 2021 telah ditetapkan 2 satker BLU bidang pengelola kawasan yaitu Museum Na-sional melalui KMK nomor 117/KMK.05/2021 tanggal 3 Maret 2021 dan Badan Pelaksana Otorita Borobudur melalui KMK nomor 259/

- 39 BLUs under the Ministry of Education, Culture, Research and Technology;
- 19 BLUs under the Ministry of Religious Affairs;
- 23 BLUs under the Ministry of Transportation;
- 18 BLUs under the Ministry of Health;
- 4 BLUs under the Ministry of Energy and Mineral Resources;
- 1 BLU under the Ministry of Industry;
- 1 BLU under the Ministry of Finance.
- 2 BLUs under the Ministry of Marine Affairs and Fisheries;

Public Service Agencies providing Fund Management Services

As of 2021, in total there were 9 BLUs providing fund management services as per the following details:

- 5 BLUs under the Ministry of Finance;
- 1 BLU under the Ministry of Public Works and Public Housing;
- 1 BLU under the Ministry of Communications and Information;
- 1 BLU under the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries;
- 1 BLU under the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises.

Public Service Agencies providing Area Administration Services

In 2021, 2 new BLU work units providing area administration services were established, namely the National Museum through MoF Decree No. 117/KMK.05/2021 dated March 3, 2021, and the Borobudur Authority Board through

KMK.05/2021 tanggal 28 Juni 2021.

Sampai dengan tahun 2021, jumlah BLU bidang pengelola kawasan secara keseluruhan men-capai sebanyak 6 satker dengan rincian sebagai berikut.

1. 2 BLU bidang pengelola kawasan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
2. 2 BLU bidang pengelola kawasan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. 1 BLU bidang pengelola kawasan di Wilayah Batam; dan
4. 1 BLU bidang pengelola kawasan di Wilayah Sabang

BLU Barang dan Jasa Lainnya

Di tahun 2021, jumlah BLU bidang barang dan/atau jasa lainnya mencapai sebanyak 24 satker dengan rincian sebagai berikut.

1. 6 BLU bidang barang dan/atau jasa lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan
2. 4 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. 3 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Kementerian Pertanian;
4. 2 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. 1 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan;
6. 1 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. 1 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Kementerian Agama;
8. 4 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. 1 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
10. 1 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah

MoF Decree No. 259/KMK.05/2021 dated June 28, 2021.

As of 2021, in total there were 6 BLUs providing area administration services as per the following:

1. 2 BLUs under the Ministry of State Secretariat;
2. 2 BLUs under the Ministry of Tourism and Creative Economy;
3. 1 BLU for the Batam Region;
4. 1 BLU for the Sabang Region

Public Service Agencies providing Other Goods and Services

As of 2021, in total there were 23 BLUs in the field of other goods and services as per the following:

1. 6 BLUs under the Ministry of Transportation;
2. 4 BLUs under the Ministry of Industry;
3. 3 BLUs under the Ministry of Agriculture;
4. 2 BLUs under the Ministry of Education and Culture;
5. 1 BLU under the Ministry of Finance;
6. 1 BLU under the Ministry of Youth and Sports Affairs.
7. 1 BLU under the Ministry of Religious Affairs;
8. 4 BLUs under the Ministry of Energy and Mineral Resources;
9. 1 BLU under the Agency for the Assessment and Application of Technology;
10. 1 BLU under the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises;

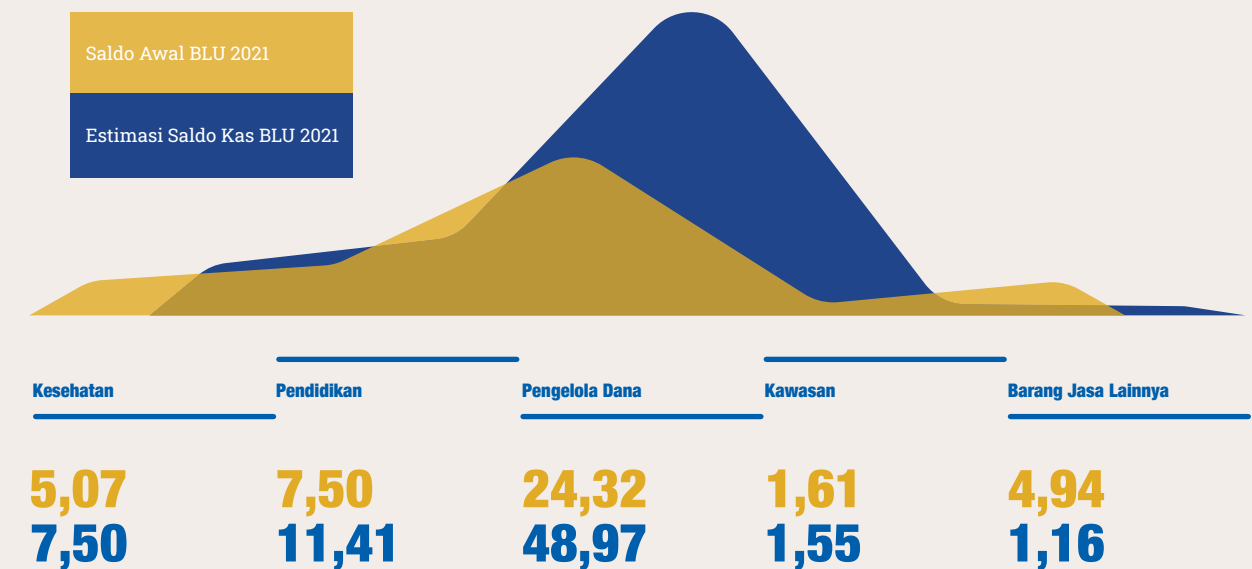
Kinerja Keuangan BLU
Financial Performance of Public Service Agencies

Total aset BLU pada tahun 2021 berjumlah sebesar Rp1.169,706 triliun. Sebagian besar aset BLU dikelola oleh Rumpun Pengelola Kawasan.

Estimasi saldo kas BLU pada akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp70,58 triliun. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp27,14 triliun dibandingkan dengan saldo awal kas BLU di tahun 2021. Sekitar 69,39% atau Rp48,97 triliun dari nilai estimasi saldo kas BLU dikelola oleh BLU Rumpun Pengelola Dana. Perbandingan estimasi saldo kas BLU pada berbagai rumpun layanan BLU disajikan pada grafik berikut.

In 2021, the total assets of public service agencies were valued at IDR 1,169.706 trillion. Most of these assets are managed under the Area Administration Cluster.

The estimated cash balance at BLUs as of end-2021 was IDR 70.58 trillion. This represents an increase of IDR 27.14 trillion compared to the initial cash balance in 2021. Approximately 69% or IDR 48.97 trillion of the estimated cash balance is managed under the fund management cluster. The comparison of cash balances under the various BLU service clusters is presented in the following graph.

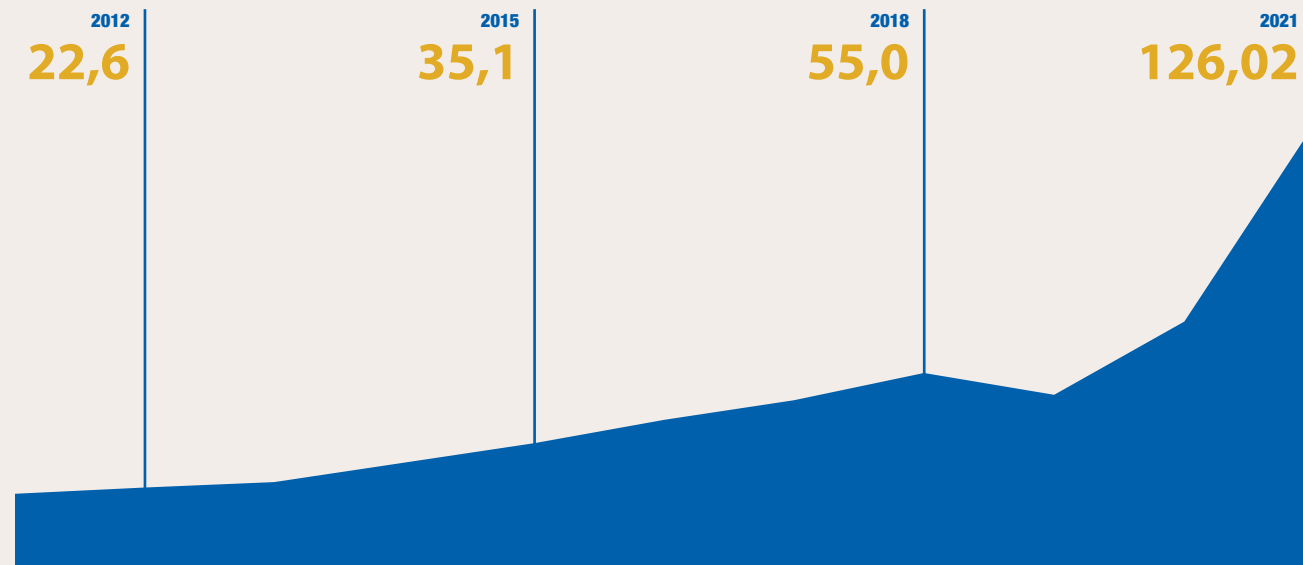


Pendapatan BLU

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU pada tahun 2021 mencapai Rp126,02 triliun atau 214,35 persen dari target PNBP BLU. Grafik di bawah menunjukkan perkembangan realisasi PNBP BLU dari tahun 2011 hingga 2021. Secara rata-rata, nominal PNBP BLU bertambah sebesar Rp5,5 triliun per tahun pada periode 2011 hingga 2021 atau sebesar 15,6 persen per tahun.

Income Generation by Public Service Agencies

In 2021, BLUs generated Non-Tax State Revenue (PNBP) worth IDR 126.02 trillion or 139% of the set target. The graph below shows the changes in BLU PNBP generation from 2011 to 2021. On average, revenue has increased by IDR 5.5 trillion per year during the period or 15.6% annually.



Berdasarkan grafik tersebut, terjadi penurunan realisasi PNPB BLU pada tahun 2019 sebesar Rp6,2 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembebasan tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) oleh BPDPK Sawit sesuai PMK 23/PMK.05/2019.

Terdapat dua rumpun yang memiliki persentase PNPB BLU yang cukup signifikan dibanding total PNPB BLU. PNPB rumpun layanan pendidikan pada periode 2011 hingga 2014 memiliki rata-rata persentase 48,1 persen dari total PNPB BLU pada periode tersebut. Sementara pada periode 2015 hingga 2021, rumpun pengelola dana merupakan rumpun dengan persentase PNPB terhadap total PNPB BLU tertinggi, yaitu rata-rata sebesar 42,25 persen.

Looking at the graph, in 2019 there was a decrease in BLU PNPB income of IDR 6.2 trillion. This was due to the exemption of the crude palm oil (CPO) export tariff by the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) in accordance with MoF Regulation No. 23/PMK.05/2019.

Based on the data, two BLU clusters own a significant percentage of the income compared to the total proceeds generated. For the period 2011 – 2014, the education service cluster had an average share of 48.1% of the total PNPB generated. Meanwhile, in the period 2015 – 2021, the fund management cluster had the highest share of BLU PNPB with an annual average of 42.25%.

Layanan / Services	PNBP 2020 (Triliun Rp)	PNBP 2021 (Triliun Rp)	Perubahan / Change (Triliun Rp)
Kesehatan Healthcare	19,17	22,93	3,76
Pendidikan Education	14,59	16,54	1,95
Pengelola Dana Fund Management	29,98	82,09	52,11
Kawasan Area Administration	1,62	1,73	0,11
Barang Jasa Lainnya Other Goods and Services	4,31	2,73	(1,58)

Dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat empat rumpun yang mengalami peningkatan nominal PNPB BLU yakni BLU rumpun kesehatan, pendidikan, pengelola dana dan kawasan. Rumpun penyedia barang/jasa lainnya mengalami penurunan sebesar Rp1,58 triliun.

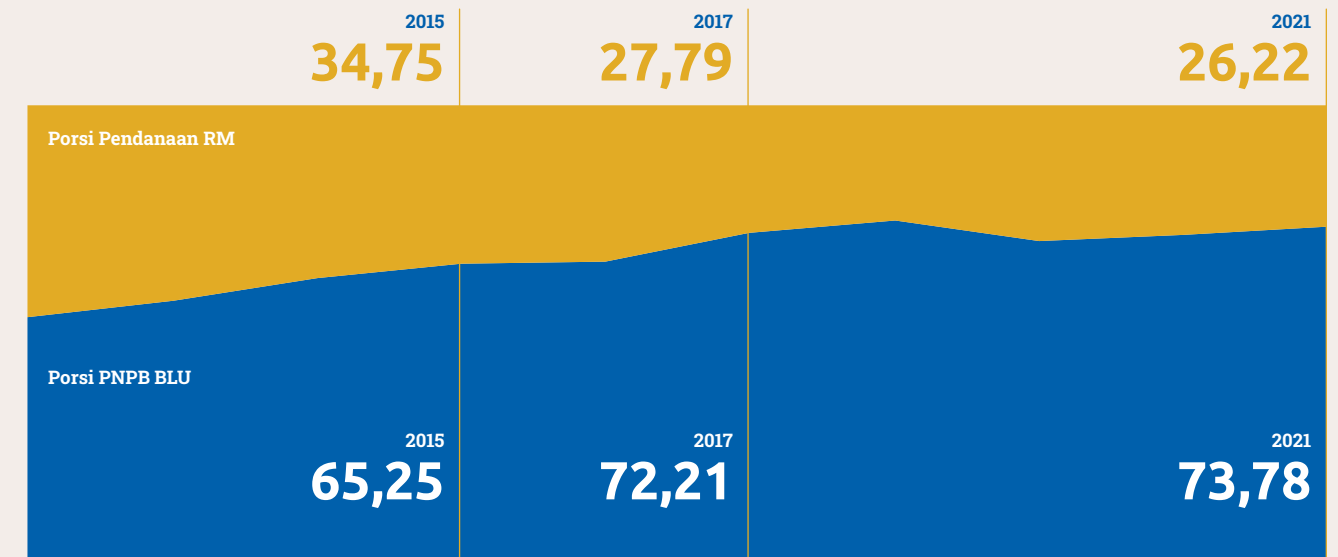
Belanja BLU

Realisasi belanja BLU pada tahun 2021 mencapai Rp132,77 triliun atau 94,42 persen dari pagu belanja. Terdapat dua sumber pendanaan belanja BLU yakni dari PNPB BLU dan Rupiah Murni. Grafik berikut menunjukkan bahwa terdapat tren penurunan porsi pendanaan yang berasal dari Rupiah Murni. Hal tersebut mengindikasikan peningkatan kemandirian BLU untuk membiayai sendiri kebutuhan operasionalnya.

Compared to 2020, four BLU clusters have shown an increase in their nominal income generation, i.e. healthcare services, education services, fund management and area administration clusters. On the other hand, the suppliers of other goods and services cluster experienced a decline of IDR 1.58 trillion.

Expenditure of Public Service Agencies

BLU spending in 2021 amounted to IDR 132.77 trillion or 94.42% of the spending ceiling. There are two sources of funding for BLU expenditures, namely the independently generated Non-Tax State Revenue and 'Rupiah Murni' or all GoI revenue. The following chart shows that there has been a downward trend in the portion of funding originating from 'Rupiah Murni'. This is indicative of the growing independence of BLUs to finance their operational needs by themselves.



Dibandingkan tahun 2020, terdapat empat rumpun yang mengalami peningkatan nominal realisasi belanja yakni BLU rumpun pendidikan, pengelola dana, pengelola kawasan, dan penyedia barang/jasa lainnya. Peningkatan nominal belanja tertinggi terdapat pada rumpun pengelola dana yakni sebesar Rp35,79 triliun atau tumbuh 91,98 persen dibandingkan tahun lalu.

Compared to 2020, four BLU clusters experienced an increase in nominal expenditures, namely education services, fund management, area administration services and suppliers of other goods and services. The highest increase in nominal spending was in the fund management cluster, totaling IDR 35.79 trillion or a growth of 91.98% from the preceding year.



Layanan / Services	PNBP 2020 (Triliun Rp)	PNBP 2021 (Triliun Rp)	Perubahan Change (Triliun Rp)
Kesehatan Healthcare	25,05	24,09	(0,96)
Pendidikan Education	26,16	29,72	3,56
Pengelola Dana Fund Management	38,91	74,69	35,78
Kawasan Area Administration	2,21	2,57	0,36
Barang Jasa Lainnya Other Goods and Services	1,77	1,97	0,2

Kinerja Layanan BLU Public Service Agencies' Performance on Service Delivery

Jumlah RS BLU hanya 3,06 persen dari total RS di Indonesia tetapi berkontribusi 15,4 persen layanan RS di Indonesia. Sekitar 80 persen dari pasien BLU rumah sakit merupakan peserta BPJS. Bahkan untuk BLU rumah sakit di bawah TNI dan Polri, 90 persen dari pasiennya merupakan peserta BPJS.

Jumlah PTN BLU hanya sebanyak 2,96% dari jumlah PTN di Indonesia namun telah mendidik 25,45% jumlah mahasiswa di Indonesia. BLU telah mendidik lebih dari 1,52 juta mahasiswa formal, 95 ribu vokasi, dan 246 ribu peserta diklat bersertifikasi. Melalui BLU vokasi telah menghasilkan berbagai tenaga ahli dan dilakukan link and match dengan dunia kerja. BLU telah menyediakan 152.805 program beasiswa kepada masyarakat tak mampu, 27.997 merupakan beasiswa LPDP. BLU Pendidikan juga telah melakukan lebih dari 30 ribu riset dan menghasilkan lebih dari 5,7 ribu HAKI.

BLU berkontribusi dalam program pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi salah satunya melalui penyaluran pembiayaan kepada UMi, UMKM, nelayan, petani hutan, MBR. Penyaluran dana telah dilakukan sebanyak Rp13,3 triliun kepada 1.152 koperasi, Rp742,7 miliar kepada 18,8 ribu nelayan, Rp1,5 triliun kepada 28 ribu petani hutan, Rp14,7 triliun kepada 4,48

The number of BLU hospitals is only 3.06% of the total hospitals in Indonesia, but contributes to 15.4% of hospital services in the country. Furthermore, about 80% of BLU hospital patients are BPJS enrollees. In fact, 90% of the patients in BLU hospitals under the Indonesian Military and Police are BPJS enrollees.

Likewise, the number of BLU public universities (PTN) is only 2.96% of the total PTN in Indonesia, but has educated 25.45% of Indonesian students. BLUs have educated more than 1.52 million formal students, 95,000 vocational students, and 246,000 students of certified training courses. Moreover, vocational BLUs have produced various experts that have been linked and matched with the employment industry. BLUs have provided 152,805 scholarship programs to underprivileged communities, 27,997 of which are LPDP scholarships. Furthermore, educational BLUs have conducted more than 30,000 researches and produced more than 5,700 intellectual property rights.

BLUs have contributed to poverty alleviation programs and economic recovery, including financing disbursements to the ultra-micro (UMi) segment, MSMEs, fishermen, forest farmers, and low-income communities. Funds totaling IDR 13.3 trillion have been disbursed to 1,152 cooperatives, IDR 742.7 billion to 18,800 fishermen, IDR 1.5 trillion to 28,000 forest farmers, IDR 14.7 trillion to 4.48 million ultra-

juta pengusaha ultra mikro, Rp65,1 juta pembiayaan perumahan kepada 852 ribu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

BLU mendukung upaya penguatan swasembada pangan melalui inseminasi semen ternak dan produksi vaksin. 4,35 juta dosis inseminasi buatan (80% kebutuhan nasional) diproduksi oleh BLU BBIB. 67-82% vaksin nasional (anthrax, brucellosis, rabies, flu burung, dll) diproduksi Pusvetma.

BLU mendukung penguatan optimalisasi sumber energi tambang/ alam dan hayati, serta upaya kelestarian lingkungan dan isu iklim. BLU menciptakan kestabilan harga sawit melalui BPDPKS. Melalui BLU Lemigas, Tekmira, PPGL, EBTKKE menciptakan 7 peta potensi energi nasional migas & batubara, 7 patent HKI, 7 teknologi rekayasa energi, dan produksi produk litbang. BLU BPDH juga telah menyalurkan dana terkait program lingkungan hidup kepada 27.509 debitur.

Dari sisi infrastruktur, BLU telah mengembangkan kawasan ekonomi dengan berbagai kemudahan dalam berusaha. BLU mengelola daerah pariwisata dan layanan khusus. BLU melakukan optimalisasi aset negara serta mendukung infrastruktur PSN. BLU juga telah menyiapkan jaringan komunikasi pada daerah 3T. Palapa Ring telah menghubungkan 57 kabupaten/kota sepanjang 12.148 km dan membangun 1.662 BTS.

BLU turut meningkatkan hubungan bilateral dengan pemberian hibah kepada negara lain. Penyaluran Hibah telah dilakukan kepada 8 Negara senilai Rp 42.4 miliar.

micro entrepreneurs, and IDR 65.1 million of housing financing to 852,000 low-income people (MBR).

BLUs have also supported efforts to strengthen food self-sufficiency through semen insemination of livestock and production of vaccines. 4.35 million doses of artificial insemination (80% of national requirement) were produced by BLU BBIB. Further, 67-82% of national vaccines (anthrax, brucellosis, rabies, bird flu, etc.) are produced by Pusvetma.

BLUs have also supported the optimization of mining and biological energy sources, as well as efforts towards environmental preservation and climate issues. BLUs create stability in palm oil prices through BPDPKS. Through BLU Lemigas, Tekmira, PPGL, The Energy Ministry's Directorate General of New and Renewable Energy (EBTKKE) has created 7 maps for potential national energy from oil and gas & coal, 7 IPR patents, 7 energy engineering technologies, and the production of R&D products. BLU BPDH has also distributed funds related to environmental programs to 27,509 debtors.

In terms of infrastructure, BLUs have developed economic zones that have special schemes towards ease of doing business. BLUs also manage tourism areas and special services. BLUs have optimized state assets and support national infrastructure. BLUs have also prepared communication network in the frontier, outermost and underprivileged (3T) areas. The Palapa Ring has connected 57 regencies/cities along 12,148 km and 1,662 BTS have been built.

BLUs have also improved bilateral relations by providing grants to other countries. Total grants provided to 8 countries amount to IDR 42.4 billion.



Dewan Pengawas BLU Public Service Agency Supervisory Board

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanan BLU, satker BLU memiliki dewan pengawas (dewas) masing-masing untuk mengawasi kinerja BLU. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, dewas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.

Dewas dalam BLU terdiri dari 3 atau 5 orang yang terdiri dari pejabat di Kementerian/Lembaga terkait, pejabat dari Kemenkeu, dan tenaga ahli. Dewas tersebut bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dewas kepada Menteri/Pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan dua kali dalam satu tahun.

Pada tahun 2021, satuan kerja BLU belum seluruhnya memiliki dewas. Berikut adalah tabel ketersediaan dewas pada masing-masing BLU berdasarkan rumpun bidangnya

Pentingnya peran BLU di masyarakat harus didukung dengan kinerja yang optimal dari para pengelola BLU beserta seluruh struktur organ BLU termasuk Dewan Pengawas BLU. Dewan Pengawas dituntut untuk mampu mempunyai pemahaman mengenai mandat dan bisnis BLU serta rasa tanggung jawab dan komitmen tinggi untuk dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan kinerja BLU.

Dewan Pengawas juga harus memiliki *sense of crisis* yang tajam serta mampu menjadi ethics role model dalam pengelolaan BLU. Untuk semakin meningkatkan pemahaman terhadap perannya serta adanya tata tertib kerja, Dewan Pengawas perlu menyusun *charter* berisi pedoman kerja tentang tugas pokok dan fungsi dewas dalam meningkatkan kualitas

In the performance of its duties and functions, every public service agency has a supervisory board to oversee the activities and performance in their respective institutions. Based on the Minister of Finance Regulation No. 129 of 2020 concerning Guidelines for the Management of Public Service Agencies, the supervisory board is a body in the respective BLU tasked with supervising and advising BLU managers in performing their management duties.

The BLU Supervisory Board is comprised of 3 or 5 individuals who are officials at the corresponding Ministry/ Agency, Ministry of Finance officials or external experts. The Board is responsible for preparing reports on the implementation of its duties to the Minister/ Head of institution and the Minister of Finance twice a year.

As of 2021, not all BLUs had established its Supervisory Board. The following table denotes the establishment of BLU supervisory boards based on cluster

The importance of the BLU's role in society must be supported by optimal performance from BLU managers and the entire organization structure including the BLU Supervisory Board. The Supervisory Board is required to have an understanding of the BLU's mandate and business as well as a high sense of responsibility and commitment to be able to contribute optimally in improving the organization's performance.

The Supervisory Board must also have a keen sense of crisis and be able to become an ethical role model on BLU management. To further improve understanding of its role and work procedures, the Supervisory Board needs to prepare a charter containing work guidelines on the main duties and functions of the Board of

Layanan Services	Jumlah Dewan Pengawas Number of Supervisory Board	
	Ada Yes	Tidak No
Kesehatan Healthcare	89	17
Pendidikan Education	88	21
Pengelola Dana Fund Management	5	2
Pengelola Kawasan Area Administrator	8	1
Barang Jasa Lainnya Other Goods and Services	14	9
Total	204	50



Penyusunan charter tidak hanya merupakan kelengkapan administrasi, tetapi juga harus diresapi sebagai komitmen tanggung jawab

Charter preparation is not only an administrative requirement, but must be thoroughly grasped as a commitment

dan efektivitas hubungan kerja guna menerapkan asas-asas tata kelola BLU yang baik. Penyusunan *charter* tidak hanya merupakan kelengkapan administrasi, tetapi juga harus diresapi sebagai komitmen tanggung jawab Dewan Pengawas dalam menjalankan perannya.

Pada tanggal 6 Agustus 2021 Dit PPK BLU telah menerbitkan pedoman Penyusunan *Charter* Dewan Pengawas BLU. *Charter* Dewan Pengawas menjadi pondasi awal dalam pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Pengawas terhadap BLU sebagai bentuk komitmen tinggi dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan peran sebagai organ pengawasan. *Charter* Dewan Pengawas menjadi pedoman tata kerja tentang tugas pokok dan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja guna menerapkan asas-asas Tata Kelola BLU yang baik.

BLU Maturity Rating BLU Maturity Rating

BLU Maturity Rating Model Assessment Tools and Evaluation merupakan suatu model yang digunakan untuk mengukur tingkat kedewasaan pengelolaan BLU, dari perspektif hasil (kinerja layanan dan kinerja keuangan) serta dari perspektif proses (kapabilitas internal, tata kelola dan kepemimpinan, inovasi, dan lingkungan). Harapan dari

Directors in improving the quality and effectiveness of working relationships to apply the principles of good BLU governance. Charter preparation is not only an administrative requirement, but must be thoroughly grasped as a commitment of the Supervisory Board in carrying out its role.

On August 6, 2021, the Directorate of PPK BLU issued guidelines for Charter Preparation of the BLU Supervisory Board. The Supervisory Board Charter is the initial foundation for the supervision conducted by the Supervisory Board towards the BLU as its commitment and full responsibility in performing its role as a supervisory body. The Charter serves as a working guideline regarding the main duties and supervisory functions of the Supervisory Board in improving the quality and effectiveness of working relationships to implement the principles of good BLU Governance.

The BLU Maturity Rating Model Assessment Tools and Evaluation is a model used to measure the maturity level of BLU management with respect to an outputs perspective (service performance and financial performance) and a process perspective (internal capabilities, innovation, governance and environment). The expected outcome



model BLU Maturity Rating adalah memberikan gambaran kondisi BLU secara lebih komprehensif untuk selanjutnya dijadikan basis dalam merencanakan *action plan* transformasi BLU.

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan piloting terhadap empat puluh tujuh BLU yang merepresentasikan perwakilan dari setiap rumpun. Pada tahun ini juga telah dikembangkan metode asesment berbasis digital melalui aplikasi BLU *Integrated Online System* (BIOS). Dari sisi regulasi telah ditetapkan Perdirjen nomor Per-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum pada tanggal 1 Desember 2021.

from the BLU Maturity Rating model is the creation of guidelines in applying the BLU rating at each cluster, to be then used as the basis for preparing the BLU transformation action plan.

In 2021, piloting was conducted against 47 BLUs as representatives of their cluster. During the year, a digital-based assessment method was also developed through the BLU *Integrated Online System* (BIOS) application. In terms of regulation, DG Treasury Regulation No. Per-11/PB/2021 has been stipulated concerning Guidelines for Assessment of Governance and Performance (Maturity Level) of Public Service Agencies on December 1, 2021.

BLU Expo 2021 *BLU Expo 2021*

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BLU sebagai wajah pemerintah dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat, mendorong DJPb, khususnya PPK BLU, untuk menyusun strategi komunikasi dalam meningkatkan awareness masyarakat terkait BLU. BLU Expo 2021 melibatkan seluruh BLU dari 22 Kementerian/ Lembaga Pembina BLU, BLUD, BUMN, Mitra Kerja BLU, serta masyarakat umum dengan menggunakan 2 platform, yaitu *virtual expo* (18 s.d. 18 November 2021) dan *web expo* (15 November s.d. 15 Desember 2021), yang diawali dengan kegiatan *pra expo* dari bulan September s.d. 15 November 2021.

Rangkaian kegiatan dalam BLU Expo BLU berupa 15 *talkshow* dan webinar yang dimulai dengan penandatanganan 4 Memorandum of Understanding (MoU) oleh 15 Menteri/ Pimpinan Lembaga untuk menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan sinergi kebijakan. MoU yang akan ditandatangani merupakan landasan untuk penyusunan Perjanjian Kerja

The lack of public knowledge on BLUs as the face of the government in providing basic services to the community has led to DG Treasury, especially the PPK BLU Directorate, to develop a communications strategy to enhance public awareness on BLUs. To that end, the BLU Expo 2021 involved all BLUs from 22 Ministries/ BLU Trustees, BLUDs, SOEs, BLU Partners, and the general public using 2 platforms, namely *virtual expo* (18 to 18 November 2021) and *web expo* (15 November to 15 December 2021). The series of events began with *pre-expo* activities from September to November 15, 2021.

The BLU Expo had various activities including 15 talk shows and webinars, and commenced with the signing of 4 Memorandums of Understanding (MoU) by 15 Ministers/Heads of Institutions to show their shared commitment in realizing policy synergies. The signed MoUs are the basis for the Cooperation Agreement (PKS) preparation which is a technical



Sama (PKS) yang merupakan komitmen teknis dari BLU-BLU di bawahnya yaitu:

- Akselerasi Sinergi Program RS Jejaring Nasional: Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan (3 Menteri);
- Digital Hub, *Talent Pool* Era Digital: Mendikbudristek, Menteri Perdagangan, Menkominfo, Menteri Tenaga Kerja, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (4 Menteri dan 1 Kepala Badan);
- Akselerasi Sinergi Program Pemberdayaan UMKM: Menteri Sosial, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara BUMN, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Menteri Keuangan (6 Menteri);
- Percepatan Integrasi Program Sertifikasi Halal bagi Usaha Kecil Menengah: Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Kabinet, dan Menteri Koperasi dan UKM (3 Menteri dan Sekretaris Kabinet).

Selain itu juga terdapat penandatanganan 1 MoU oleh Kepala BPPK dan Sekretaris Jenderal sebagai koordinator pembina teknis BLU terkait "Sinergi Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Satuan Pengawas Internal BLU"

commitment for the BLUs under it, namely as follows:

- Acceleration of Synergy of the National Network Hospital Program: Minister of Health, Minister of Home Affairs, and Minister of Finance (3 Ministers);
- Digital Hub, Digital Era Talent Pool: Minister of Education and Technology, Minister of Trade, Minister of Communication and Information, Minister of Manpower, and National Professional Certification Agency (4 Ministers and 1 Head of Agency);
- Acceleration of Synergy for MSME Empowerment Programs: Minister of Social Affairs, Minister of Cooperatives and SMEs, Minister of Maritime Affairs and Fisheries, Minister of State-Owned Enterprises, Minister of Tourism and Creative Economy, and Minister of Finance (6 Ministers);
- Acceleration of Integration of Halal Certification Programs for Small and Medium Enterprises: Minister of Religious Affairs, Minister of Communication and Information Technology, Cabinet Secretary, and Minister of Cooperatives and SMEs (3 Ministers and Cabinet Secretary).

In addition, there was also the signing of 1 MoU by the Head of BPPK and the Secretary General as the coordinator of BLU technical guidance related to "Synergy to Increase Capacity and Competence of BLU Internal Supervisory Units".



Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan The Accounting and Financial Reporting Function

Akuntabilitas keuangan negara tahun 2021 masih menjadi utama karena di dalamnya pemerintah turut mempertanggungjawabkan pelaksanaan program PC-PEN sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari pandemi Covid-19. Peningkatan atas akuntabilitas pelaporan keuangan negara yang disusun Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) dibuktikan melalui raihan Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari tahun ke tahun.

In 2021, the accounting of state finances was still top priority as the government was also responsible for implementing the PC-PEN program on its obligation of safeguarding the Indonesian nation from the detrimental effects of the Covid-19 pandemic. The enhanced accountability with respect to financial reporting as prepared by the Directorate of Accounting and Financial Reporting (APK) is evidenced by the achievement of the Unqualified Opinion on the Central Government Financial Report from year to year.

...setiap rupiah uang negara yang dikeluarkan dari kas negara dapat dipastikan seluruhnya terlaporkan dalam laporan keuangan

... every rupiah of state money spent from the state treasury can be guaranteed to have been reported in the financial report

Akuntabilitas Pengelolaan APBN Accountability for State Budget Management

Akuntansi berperan dalam memberikan gambaran kondisi keuangan negara dan kinerja pemerintahan yang tergambar pada Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut menjadi alat bantu pemerintah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah maupun sebagai evaluasi keputusan dan kebijakan pemerintah yang sudah dijalankan. Selain itu laporan keuangan juga memberikan informasi yang dibutuhkan oleh lembaga pemerintahan atau lembaga non-pemerintahan lainnya. Atas manfaat laporan keuangan yang diberikan tersebut maka akuntabilitas keuangan pemerintah khususnya dalam pertanggungjawaban program PEN yang merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar dapat terpenuhi.

Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan dana APBN, pemerintah telah membangun suatu sistem yang terintegrasi dimulai tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, maupun pertanggungjawaban anggaran. Sistem tersebut dibangun dengan tata kelola yang ketat dengan sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan setiap belanja yang dilakukan taat terhadap peraturan perundang-undangan, telah sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan demikian terhadap setiap rupiah uang negara yang dikeluarkan dari kas negara dapat dipastikan seluruhnya terlaporkan dalam laporan keuangan. Selain itu, guna memastikan bahwa tata kelola dilakukan dengan baik, koordinasi dan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) juga telah dilakukan.

Accounting provides an overview of the state finances condition and government performance as reflected in the Financial Report. The Financial Report is a decision-making tool for the government and determine policies for execution. Besides, it also represents a tool to evaluate past decisions and implemented policies. In addition, financial reports also provide information needed by government agencies or other non-governmental institutions. The vast benefits and uses of financial reports also provides for the fulfillment of the government's accountability over state finances, especially the administration of the National Economic Recovery (PEN) program that represents a non-negotiable obligation.

To maintain accountability in managing the State Budget, the government has built an integrated system beginning with budget planning, budget execution, and budget accountability. The system is built with strict governance and a robust internal control system to ensure that all expenditures comply with prevailing laws and regulations, are in accordance with procedures and can be accounted for through the Central Government Financial Report (LKPP) which is audited by the State Audit Board (BPK).

Consequently, every rupiah of state money spent from the state treasury can be guaranteed to have been reported in the financial report. Furthermore, to ensure that governance is carried out properly, coordination and supervision by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) and law enforcement agencies is also performed.

Pemerintah mempertanggungjawabkan seluruh transaksi APBN Tahun Anggaran 2021 dalam LKPP Tahun 2021 yang memenuhi 4 kriteria yaitu (i) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (ii) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (iii) melalui sistem pengendalian internal yang efektif, dan (iv) seluruh transaksi telah diungkapkan secara memadai.

The government has accounted for all its transactions on the State Budget FY 2021 in LKPP FY 2021 that fulfills 4 criteria, i.e. (i) conformity with Government Accounting Standards, (ii) compliance with laws and regulations, (iii) transactions have passed through an effective internal control system, and (iv) all transactions have been adequately disclosed.

Implementasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia Implementation of the Financial Information System of the Republic of Indonesia

Pemisahan dari kedua laporan keuangan tersebut menjadi tantangan untuk mengetahui informasi dan menilai kinerja keuangan pemerintah secara keseluruhan

The separation of the two financial reports represents a challenge in terms of ascertaining information and assessing the overall financial performance of the government

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah telah menyusun Laporan Keuangan atas pertanggungjawaban APBN yang dikenal dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan atas pertanggungjawaban APBD yang dikenal dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemisahan dari kedua laporan keuangan tersebut menjadi tantangan untuk mengetahui informasi dan menilai kinerja keuangan pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan adanya integrasi atas informasi keuangan.

Di sisi lain, peningkatan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah ditunjukkan dengan peningkatan perolehan WTP atas Laporan Keuangan dari tahun ke tahun. Untuk tahun anggaran 2020, pemerintah telah mendapatkan predikat WTP atas LKPP, LKBUN, 85 dari 87 LKKL, dan 486 dari 542 LKPD. Peningkatan atas akuntabilitas Laporan keuangan tersebut perlu dieksalasi dalam ranah pemanfaatannya melalui berbagai bentuk analisis dan olahan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

In realizing transparency and accountability on state finances management, the government has prepared a Financial Report to account for the State Budget, which is known as the Central Government Financial Report (LKPP). Furthermore, the accounting of regional budgets (APBD) is realized through the Regional Government Financial Report (LKPD). The separation of the two financial reports represents a challenge in terms of ascertaining information and assessing the overall financial performance of the government. Therefore, it is necessary to integrate financial information.

On the other hand, the government's enhanced accountability over state finances is indicated by the ever-increasing number of unqualified (WTP) opinions on financial reports from year to year. For FY 2020, the government received WTP opinions for LKPP, State General Treasurer Financial Report (LKBUN), 85 out of 87 Financial Report of Ministries/Agencies (LKKL), and 486 out of 542 Regional Government Financial Report (LKPD). This increase needs to be escalated in the realm of report usage through various forms of analysis and processing towards being the basis for policy making.



Sebagai bentuk integrasi informasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di level laporan serta eskalasi optimalisasi LKPP dan LKPD agar dapat digunakan sebagai supporting data guna perumusan kebijakan oleh pimpinan, pemerintah menyusun laporan manajerial berupa Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP). Penyusunan kedua laporan tersebut dilakukan secara berjenjang dari tingkat wilayah oleh Kanwil DJPb hingga tingkat nasional oleh Direktorat APK dan dilaksanakan secara manual menggunakan kertas kerja excel. Pengerjaan secara manual memberikan adanya risiko efisiensi dan potensi untuk adanya kesalahan menjadi lebih besar.

Demi meningkatkan kualitas serta memudahkan penyusunan laporan manajerial tersebut, DJPb melalui Direktorat APK secara daring melakukan Launching Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia Modul Pelaporan (SIKRI MP) yang merupakan pengembangan awal dari SIKRI yang mengintegrasikan informasi keuangan pemerintah pusat pada SPAN dan Informasi keuangan pemerintah daerah pada SIKD, baik di level laporan sampai dengan level transaksi.

As a form of financial information integration between the central and local governments at the reporting level as well as escalating LKPP and LKPD optimization so that they can be used as supporting data for policy formulation by leaders, the government prepares managerial reports in the form of Consolidated Government Financial Reports (LKPK) and Government Financial Statistics Reports (LSKP). The preparation of the two reports is carried out in stages from the regional level by DG Treasury regional offices to the national level by the APK Directorate. Furthermore, the report preparation was done manually using excel working papers. In this regard, manual processes pose an efficiency risk and the potential for magnifying errors.

With the objective to improve the quality and facilitate the preparation of these managerial reports, DG Treasury through the APK Directorate conducted an online launch of the Reporting Module of the Republic of Indonesia Financial Information System (SIKRI MP). SIKRI MP is SIKRI's initial development phase that integrates central government financial information in SPAN and local government financial information in SIKD, both at the reporting level to the transaction level.

Implementasi SIKRI MP diharapkan meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya dalam penyusunan LKPK dan LSKP, serta mengalihkan fokus dari penyusunan menjadi ke arah analisis

The implementation of SIKRI MP is expected to improve time and resource efficiency in the preparation of LKPK and LSKP, as well as shift the focus from preparation to analysis

Implementasi SIKRI MP diharapkan meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya dalam penyusunan LKPK dan LSKP, serta mengalihkan fokus dari penyusunan menjadi ke arah analisis. Ke depannya dengan pengembangan SIKRI yang mengakomodasi Data Analytics dan *Business Intelligence* serta disinergikan dengan pengembangan Treasury Big Data, dapat menjadi supporting tools bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan, khususnya kebijakan fiskal berbasis data yang inklusif, serta mampu meningkatkan sinergi pengelolaan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

The implementation of SIKRI MP is expected to improve time and resource efficiency in the preparation of LKPK and LSKP, as well as shift the focus from preparation to analysis. In the future, through continuous development to accommodate Data Analytics and Business Intelligence and synergized with Treasury Big Data, SIKRI can become a supporting tool for leaders in policy making, especially inclusive data-based fiscal policy, as well as being able to enhance synergies of state financial management between the central and regional governments.



Umum (LSKPU) telah disusun dalam periode triwulanan dan tahunan sejak tahun pelaporan 2008 sedangkan Laporan Statistik Keuangan Sektor Korporasi Publik disusun dalam periode tahunan sejak tahun pelaporan 2015.

Selama tahun 2021, Direktorat APK telah menyusun LSKPU Triwulan I s.d. IV 2021, LSKPU Preliminary 2020, LSKPU Unaudited 2020 dan LSKPU Audited 2020. Selain LSKPU, juga dilakukan diseminasi data LSKPU melalui laman resmi GFS dan melakukan harmonisasi dengan statistik lain seperti FABS (Bank Indonesia) dan FSA/SAB (Badan Pusat Statistik) untuk data pemerintah umum. Data GFS yang telah disusun dapat diakses pada www.gfs.djpb.kemenkeu.go.id.

quarterly and annual basis since FY 2008, while the Public Corporation Sector Financial Statistics Report has been compiled on an annual basis since FY 2015.

During 2021, the APK Directorate compiled the Q1 to Q4 LSKPU 2021, Preliminary LSKPU 2020, Unaudited LSKPU 2020 and Audited LSKPU 2020. Furthermore, LSKPU data was disseminated through the official GFS website and harmonized with other statistics such as FABS (Bank Indonesia) and FSA/SAB (Statistics Indonesia) for general government data. In this regard, GFS data can be accessed at www.gfs.djpb.kemenkeu.go.id.

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum sebagai Tools Manajerial

General Government Financial Statistics Report as Managerial Tools

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara butir I.5 (Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada Manual Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics Manual/GFSM*) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (*cross country studies*), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah.

Untuk melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pemerintah telah menyusun Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) yang menyajikan informasi terkait integrasi posisi fiskal nasional yang tercermin dalam sektor pemerintah umum (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dan integrasi posisi sektor publik (pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan badan lainnya). LSKP Sektor Pemerintah

The explanation of Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury item I.5 (Administration and accountability for budget execution) states that government financial reports can produce financial statistics that refer to the Government Finance Statistics Manual (GFSM) to meet the needs of fiscal policies and conditions analysis, management and analysis of cross-country studies, government activities, and presentation of government financial statistics.

To carry out the mandate of Law Number 1 of 2004, the government has prepared the Government Financial Statistics Report (LSKP) which provides information on the integrated national fiscal position as reflected in the general government sector (central and local government) and the integrated public sector (central government, local governments, SOEs, regional enterprises, and other bodies). The General Government Sector LSKP (LSKPU) has been compiled on a

Pencapaian Level atas Reviu Transparansi Fiskal Pilar I Achievement Level against Pillar I of Fiscal Transparency Review

Transparansi pengelolaan keuangan negara merupakan amanat konstitusi dan Undang-Undang sehingga pemerintah selaku pelaksana pengelolaan keuangan negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Presiden memberikan kuasa atas pengelolaan fiskal kepada Menteri Keuangan. Pelaksanaan Reviu Transparansi Fiskal yang dilakukan oleh BPK mengacu kepada *Fiscal Transparency Code (FTC)* yang dikeluarkan oleh IMF. FTC terbagi atas 4 pilar dan Direktorat APK bertanggungjawab atas pemenuhan pilar I yakni pelaporan fiskal. Pilar tersebut dibagi menjadi 12 kriteria yang masing-masing diberikan level berdasarkan hasil reviu oleh BPK. Level yang diberikan oleh BPK yakni *Not Met, Basic, Good, dan Advanced*.

Pada tahun 2021, dilakukan reviu transparansi fiskal oleh BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun

Transparency in the management of state finances is a constitutional and legal mandate, therefore the government as executor of state financial management is obligated to fulfill this requirement. The President grants power over fiscal management to the Minister of Finance. The Fiscal Transparency Review as conducted by the State Audit Board (BPK) refers to IMF's Fiscal Transparency Code (FTC). The FTC is divided into 4 pillars and the APK Directorate is responsible for the fulfillment of pillar I, i.e. fiscal reporting. This pillar is again divided into 12 criteria, each of which is assigned a level based on the BPK review outcomes. The achieved levels are determined by BPK as *Not Met, Basic, Good, and Advanced*.

In 2021, BPK conducted the fiscal transparency review against 2020 implementation, along with the



2020 bersamaan dengan pemeriksaan atas LKPP. Dalam reviu tersebut, Direktorat APK menyediakan data, menyusun jawaban atas kuesioner yang disampaikan oleh BPK, dan memberikan tanggapan berdasarkan peraturan perundang-undangan atas setiap permintaan konfirmasi dari BPK sesuai tugas dan wewenangnya. Hasil reviu tersebut diterbitkan bersamaan dengan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020.

Reviu Transparansi Fiskal tahun 2020 tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah memenuhi sebagian besar kriteria pelaporan fiskal dengan pencapaian level *good* pada 5 kriteria dan level *advanced* pada 7 kriteria, serta tidak terdapat kriteria yang mendapat level *not met* dan *basic*. Hasil ini dapat diartikan bahwa secara umum pemerintah pusat telah lebih baik dalam mentransparansikan pelaporan fiskal kepada publik sesuai dengan *Fiscal Transparency Code* yang berlaku secara internasional. Hasil reviu transparansi fiskal dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

LKPP audit. For the review, the APK Directorate provided data, compiled answers to the BPK questionnaire, and gave responses based on prevailing laws and regulations on any of the BPK's request for confirmation as per its duties and authorities. The review outcomes have been published together with the LKPP 2020 audit outcomes.

The Fiscal Transparency Review indicates that the central government has met most of the fiscal reporting criteria with 'good' level achievement against 5 criteria and 'advanced' level achievement against 7 criteria. In this context, no criteria were determined to be in the 'not met' or 'basic' levels. These results can be interpreted to mean that in general, the central government has done better on transparency in fiscal reporting to the public in accordance with the internationally applicable Fiscal Transparency Code. The fiscal transparency review outcomes have been stated in the Fiscal Transparency Implementation Review Report 2020.

Peluncuran Buku Mengawal Akuntabilitas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020

Book Launch on Safeguarding Accountability for Covid-19 Handling and National Economic Recovery in 2020



DJPb mempersembahkan buku bertajuk "Mengawal Akuntabilitas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020". Buku ini diluncurkan secara resmi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada kegiatan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021. Melalui buku ini, kita dapat melihat kilas balik dan kerja keras pemerintah, khususnya dari perspektif keuangan negara dalam menghadapi tahun 2020 yang penuh tantangan dengan kebijakan fiskal yang responsif, adaptif, namun tetap prudent.

Melalui buku ini, Direktorat APK sebagai salah satu unit eselon I DJPb menajamkan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangannya dalam mengawal akuntabilitas penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020. Selain dari sisi perencanaan yang baik, buku ini menyajikan bagaimana setiap program PC-PEN dipertanggungjawabkan dan dijaga akuntabilitasnya termasuk dinamika yang menyertainya.

Alokasi program PC-PEN tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp575,85 triliun atau 82,83% termasuk pemberian insentif perpajakan yang dimanfaatkan oleh para wajib pajak. Cerita faktual mengenai program PC-PEN tersebut juga diikuti dengan realisasi penanganan Covid-19 non PEN pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga yang ditujukan untuk menjaga kondisi kesehatan pegawainya sekaligus upaya preventif dalam penanggulangan pandemi Covid-19 lingkup internal Kementerian Negara/Lembaga.

The DG Treasury has presented a book entitled "Safeguarding Accountability for Covid-19 Handling and National Economic Recovery in 2020". This book was officially launched by Minister of Finance Sri Mulyani at the National Working Meeting on Accounting and Government Financial Reporting in 2021. This book provides flashbacks to the government's hard work and various endeavors, especially from the perspective of state finances in 2020, which was a year full of challenges with respect to a responsive, adaptive, and prudent fiscal policy.

Through this book, the APK Directorate as one of DG Treasury's echelon II units has described on how it honed its accounting and financial reporting functions in safeguarding accountability for COVID-19 handling and national economic recovery in 2020. Apart from good planning, this book describes how each PC-PEN program is accounted for and accountability maintained, which includes the underlying dynamics.

In respect to the PC-PEN program allocations, IDR 575.85 trillion or 82.83% has been realized that include tax incentives as availed by taxpayers. Besides the PC-PEN program, funds have been realized for non-PEN Covid-19 handling in line ministries/agencies that is intended to maintain the health of employees and as preventative efforts in dealing with the Covid-19 pandemic within the internal scope of government institutions.





Oleh karenanya, diharapkan buku ini mampu menjadi salah satu *knowledge management* dalam kaitannya bagaimana APBN Tahun 2020 bekerja sangat keras dan harus menopang sebagai *countercyclical* yang tetap *prudent*, namun di sisi lain harus tetap akuntabel dan transparan. Buku tersebut dapat diakses secara digital pada menu publikasi cetak pada website djpb.kemenkeu.go.id.

To that end, it is hoped that this book will be a reference for knowledge management in terms of how the State Budget 2020 was a hardressed instrument and provided countercyclical support while remaining prudent. On the other hand, the State Budget had to remain accountable and transparent. This book can be accessed digitally in the publications menu at the website djpb.kemenkeu.go.id.

Kajian Ilmiah dan Hasil Analisis Jurnal Ilmiah *Scientific Studies and Scientific Journal Analyses*

Tahun 2021, Direktorat APK berperan dalam melakukan analisis terhadap pemanfaatan informasi keuangan baik pusat maupun daerah. Manfaat dari kegiatan tersebut diantaranya untuk meningkatkan fungsi analisis dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah serta memastikan akuntabilitas, transparansi, keandalan, dan tepat waktu. Selain itu, juga sebagai penyediaan *early warning system* yang memudahkan pimpinan dalam mengambil kebijakan dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

In 2021, the APK Directorate had a role in conducting analyses on the use of financial information, both at the central and regional levels. The benefits of this endeavor include enhancing the analytical function in government financial accounting and reporting as well as ensuring accountability, transparency, reliability, and timeliness. Furthermore, the various analyses provides for an early warning system to facilitate leaders in making policies in the central government's accounting and financial reporting spheres.

Kesimpulan yang didapat bahwa tingkat opini audit yang baik akan mempengaruhi tingkat kepercayaan investor baik dalam negeri maupun asing dalam membeli SBN, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan Yield SBN

The conclusion is that a favorable audit opinion will affect the confidence levels of both domestic and foreign investors to purchase SBN, thereby lowering its yield

Beberapa analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Yield Surat Berharga Negara

Pemerintah menyusun LKPP sejak tahun 2004 dan pertama kali memperoleh opini WTP sejak tahun 2016. Selanjutnya, terdapat pertanyaan bagaimana pengaruh opini audit terhadap berbagai indikator perekonomian, termasuk Yield SBN.

Penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis pengaruh opini audit BPK terhadap Yield SBN melalui dua pendekatan yaitu pendekatan reaksi pasar keuangan (*Signaling Theory*) dan pendekatan regresi linear berganda. Kesimpulan yang didapat bahwa tingkat opini audit yang baik akan mempengaruhi tingkat kepercayaan investor baik dalam negeri maupun asing dalam membeli SBN, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan Yield SBN. Informasi tersebut dapat menjadi *knowledge* dalam pengambilan keputusan bagi pemangku kebijakan.

2. Analisis Pengaruh Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah

Pemerintah daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai laporan pertanggungjawaban yang merupakan cerminan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran sampai pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, sebagai perwujudan akuntabilitas, LKPD tersebut diaudit dan diberikan opini audit oleh BPK.

Dalam perjalanannya, perolehan opini audit LKPD telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan semakin banyak pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dan bahkan memperoleh opini

Some of the conducted analyses are described as follows:

1. Analysis of the Effect of BPK's Audit Opinion on Government Securities Yield

The government has compiled the LKPP since 2004 and obtained the unqualified (WTP) opinion for the first time in 2016. In this regard, there is the question of how the audit opinion influences various economic indicators, including Government Securities (SBN) yields.

The research was conducted by analyzing the effect of BPK's audit opinion on SBN yields through two approaches, namely the financial market reaction approach (*Signaling Theory*) and the multiple linear regression approach. The conclusion is that a favorable audit opinion will affect the confidence levels of both domestic and foreign investors to purchase SBN, thereby lowering its yield. This information can be used as reference in decision making by policy makers.

2. Analysis of the Effect of Regional Government Financial Statement Audit Opinions on the Welfare of Regional Communities

Regional governments prepare the Regional Government Financial Report (LKPD) to account for regional financial management processes beginning with planning, budgeting to budget execution. Furthermore, in terms of accountability the LKPD is audited and given an audit opinion by BPK.

In its development, LKPD audit opinions are improving from year to year and more and more local governments are obtaining WTP opinions, or even getting WTP opinions in successive years. Of the 542 local governments, 309 local

Perolehan opini WTP yang semakin meningkat tersebut mencerminkan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah

The increasing number of WTP opinions reflects a qualitative improvement in regional financial management



WTP secara berturut-turut. Dari 542 pemerintah daerah, sebanyak 309 pemerintah daerah telah meraih opini WTP sebanyak 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2016 dan 34 pemerintah daerah telah meraih opini WTP sebanyak 10 tahun berturut-turut sejak tahun 2011.

Perolehan opini WTP yang semakin meningkat tersebut mencerminkan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian dan memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerah, terutama terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kajian ini akan melakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan model ekonometri untuk menguji korelasi antara status opini WTP, termasuk perolehan opini WTP 5 tahun dan 10 tahun berturut-turut dari BPK, dibandingkan dengan kemajuan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

governments have achieved the WTP opinion for 5 consecutive years since 2016, while 34 others have achieved it for 10 consecutive years since 2011.

The increasing number of WTP opinions reflects a qualitative improvement in regional financial management. This is expected to be a driving force that contributes towards regional economic development, especially in improving the people's welfare. In line with this, this study will use a quantitative analysis through econometric models to examine the correlation between the status of achieving WTP opinion, including acquiring it for 5 and 10 years in a row, compared to the progress of bringing welfare to local communities.

Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Development of Central Government Accounting and Financial Reporting System

Penyusunan Peraturan di Bidang Akuntansi Pemerintahan

Sepanjang 2021, telah diterbitkan 1 Peraturan Menteri Keuangan, 2 Peraturan Menteri Keuangan, dan 2 Keputusan Dirjen Perbendaharaan terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.05/2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 22 Juli 2021.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 Tentang Sistem Akuntansi Hibah. Saat ini dalam proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan ditargetkan akan ditetapkan pada Desember 2021.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2021 Tentang Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain. Saat ini memasuki tahap akhir di mana proses pembahasan dan harmonisasi telah selesai dilakukan. Saat ini posisi draft RPKM telah di Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan penetapan dengan target penetapan pada Desember 2021.
4. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-101/PB/2021 tentang Perubahan Unit Badan Lainnya Yang Tercantum Dalam Daftar Unit Badan Lainnya Pada Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya. Perdirjen dimaksud ditetapkan pada 16 April 2021.

Drafting of Regulations on Government Accounting

The year 2021 saw the stipulation of 1 Minister of Finance Regulation, 2 Minister of Finance Regulation, and Director General of Treasury Decrees related to accounting and financial reporting, as follows:

1. Minister of Finance Regulation No. 95/PMK.05/2021 concerning Amendment to the Minister of Finance Regulation No. 107/PMK.05/2020 concerning Mechanisms for Implementation and Accountability for Government-borne Taxes in the Context of COVID-19 Pandemic Handling, dated July 22, 2021.
2. Minister of Finance Regulation No. 201/PMK.05/2021 concerning Grant Accounting System. This is currently under process of harmonization with the Ministry of Law and Human Rights and is targeted for stipulation in December 2021.
3. Minister of Finance Regulation No. 179/PMK.05/2021 concerning Accounting System for Subsidy and Other Expenditures. The draft is currently in the final stage after having passed the discussion and harmonization phases. The draft regulation (RPMK) is at the Ministry of Law and Human Rights for finalization by the target date of December 2021.
4. Director General of Treasury Decree No. KEP-101/PB/2021 concerning Changes in Other Agency Units that are included in the List of Other Agency Units in the Accounting and Financial Reporting System of Other Agencies. The said Decree was enacted on April 16, 2021.



- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-205/PB/2021 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Perdirjen dimaksud ditetapkan pada 30 Juli 2021.
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Perdirjen ini akan mengganti Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Pada Bagan Akun Standar.

Pelaksanaan Sosialisasi dan FGD

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan 2 kali sosialisasi dan 2 kali Forum Group Discussion dalam rangka melakukan edukasi dan komunikasi terhadap para satuan kerja terkait peraturan-peraturan terbaru akuntansi dan pelaporan keuangan, dengan daftar sebagai berikut:

- Pelaksanaan sosialisasi kepada Satuan Kerja lingkup KPPN dan Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Juni 2021 dengan tema "Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Untuk Pertanggungjawaban APBN 2021 di Masa Pandemi COVID- 19". Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara daring melalui media zoom mengingat masih terjadi pandemi Covid-19. Salah satu tujuan pelaksanaan sosialisasi adalah penyampaian pemutakhiran informasi khususnya terkait peraturan/ketentuan di bidang akuntansi pemerintahan sekaligus berdiskusi dengan satuan kerja terkait untuk mendapatkan gambaran umum pelaksanaan akuntansi dan pelaporan termasuk menginventarisasi permasalahan dan mendapatkan tanggapan untuk perbaikan.
- Pelaksanaan sosialisasi kepada satuan kerja lingkup KPPN dan Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat pada 29 Juni 2021 dengan tema "Peningkatan Kualitas

- Director General of Treasury Decree No. KEP-205/PB/2021 concerning Update on Codefication of Account Segments in the Standard Accounts Chart. The said Decree was issued on July 30, 2021.
- Director General of Treasury Decree No. KEP-331/PB/2021 concerning Codefication of Account Segments on the Standard Accounts Chart. This Decree replaces the Director General of Treasury Decree No. KEP-211/PB/2018 concerning Codefication of Segments in the Standard Accounts Chart.

Information Dissemination and FGD

In 2021, 2 dissemination activities and 2 Focus Group Discussions (FGD) were held to inform and communicate to work units on the latest accounting and financial reporting regulations, as per the following list:

- Dissemination to work units at KPPN and the DG Treasury regional office of South Sulawesi Province on June 30, 2021 under the theme "Improving the Quality of Financial Reports for State Budget 2021 Accountability in the COVID-19 Pandemic Period". This activity was conducted online through Zoom with due consideration of the ongoing Covid-19 pandemic. One of the activity objectives was to convey up to date information, especially regulations/ stipulations on government accounting. The other objective was to have a discussion with relevant work units to obtain an overview of accounting and reporting as practiced, including taking an inventory of problems and getting feedback for improvement.
- Dissemination to work units at KPPN and the DG Treasury regional office of West Java Province on June 29, 2021 with the theme "Improving the Quality of Financial Reports for

Laporan Keuangan Untuk Pertanggungjawaban APBN 2021 di Masa Pandemi Covid-19". Sosialisasi dilaksanakan secara daring melalui media aplikasi zoom. Terdapat tiga materi yang dipaparkan dalam kegiatan sosialisasi yaitu current issues akuntansi dan pelaporan keuangan tahun 2021, pengungkapan PC PEN, dan update aplikasi.

- Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) dalam penyusunan Kajian Dampak Implementasi PSAK 71 pada Badan Usaha Terhadap Kebijakan Dana/Kewajiban Kompensasi. Pelaksanaan FGD ditujukan untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai substansi penerapan PSAK 71 pada sisi badan usaha dalam penyusunan kajian yang menjadi rekomendasi BPK atas pemeriksaan LK BUN 2020.

Secara khusus, fokus diskusi adalah terkait penyajian piutang atas dana kompensasi di sisi badan usaha dan kewajiban kompensasi di sisi pemerintah di mana dengan implementasi PSAK 71. Beberapa isu dalam diskusi adalah penerapan konsep time value of money dalam menyajikan piutang kompensasi pada pembukuan badan usaha sehingga menimbulkan impairment loss, isu potensi risiko terkait arus kas, upaya mitigasi risiko dan penyempurnaan dari sisi proses bisnis oleh pemerintah.

- Pelaksanaan FGD dalam penyusunan Kajian Kebijakan Akuntansi Kegiatan Hulu Migas. FGD ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Kajian Kebijakan Akuntansi Kegiatan Hulu Migas. FGD dilaksanakan pada tanggal 3 November 2021 secara daring melalui media zoom dengan narasumber adalah Wakil Ketua Komite Kerja KSAP dan Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan SKK Migas yang merupakan akademisi dan praktisi di bidang akuntansi khusus kegiatan Hulu Migas. Pelaksanaan FGD ditujukan untuk mendapatkan

State Budget Accountability 2021 in the Covid-19 Pandemic Period". This activity was conducted online via Zoom. Three main topics were presented in the session, i.e. current issues of accounting and financial reporting in 2021, disclosure of PC PEN, and application updates.

- Focus Group Discussion on Preparation of a Study on the Impact of Financial Accounting Standard (PSAK) 71 Implementation on Business Entities in regards to Compensation Fund/ Liability Policies. The FGD was aimed at gaining a deeper understanding and knowledge on the substance of PSAK 71 implementation on business entities, prior to preparing the study as recommended by BPK on its 2020 BUN LK audit.

In particular, the discussion's focus was on the presentation of receivables from compensation funds on the business entity side and compensation obligations on the government side following PSAK 71 implementation. The issues raised included application of the time value of money concept in presenting compensation receivables on the books of business entities resulting in impairment loss, risk potential issues related to cash flow, risk mitigation efforts and improvements in terms of business processes by the government etc.

- FGD on the preparation of Accounting Policy Study for Upstream Oil and Gas Activities. This FGD was held online on November 3, 2021 via Zoom. The featured speakers were the Deputy Chair of the KSAP Working Committee and the Head of the Accounting and Finance Division of SKK Migas who are academics and accounting practitioners, specifically for Upstream Oil and Gas activities. The FGD was aimed at obtaining a deeper understanding and knowledge on the presentation of Upstream Oil and Gas activities in

pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai substansi penyajian kegiatan Hulu Migas dalam LKPP yang merupakan rekomendasi BPK atas temuan LHP LK BUN tahun 2015.

Secara khusus, fokus diskusi adalah terkait penyajian transaksi kegiatan Hulu Migas pada siklus operasional yang belum disajikan dalam LKPP. Beberapa isu dalam diskusi adalah bagaimana kebijakan akuntansi pelaporan kegiatan Hulu Migas yang merupakan bagian dari keuangan negara, entitas yang tepat untuk mempertanggungjawabkan dan melakukan pelaporan atas kegiatan Hulu Migas, dan strategi penyajian kajian Hulu Migas menurut pemerintah untuk menanggapi kajian alternatif yang disusun oleh BPK.

the LKPP, as recommended by BPK in 2015 LHP LK BUN findings.

In particular, the discussion was focused on the presentation of transactions for Upstream Oil and Gas activities in the operational cycle that were yet presented in the LKPP. One of the issues discussed was on the accounting policy for reporting upstream oil and gas activities as part of state finances, the right entity to account for and report on upstream oil and gas activities, and the government's strategy for presenting upstream oil and gas studies in response to alternative studies prepared by BPK.



Pengembangan Sistem Aplikasi

Selanjutnya, terkait pengembangan sistem aplikasi pada Desember 2021 dirilis Update Aplikasi BAS Mobile Android. Untuk Aplikasi BAS Mobile berbasis IOS, pengembangan aplikasi telah dimulai sejak tahun 2020 dan saat ini pengembangan tetap berproses. Selain itu juga dilakukan perbaikan secara terus menerus terhadap aplikasi-aplikasi pendukung pelaporan keuangan antara lain aplikasi SAIBA (Versi 21.0.0), aplikasi SIMAK-BMN (Versi 21.0.0, dan Persediaan (Versi 21.0.0).

Application Systems Development

In December 2021, the BAS Mobile Android Application Update was released in relation to application system development. Development of the IOS-based BAS Mobile Application was started in 2020 and currently is still a work in progress. In addition, continuous enhancements are being made to financial reporting applications, including SAIBA (Version 21.0.0), SIMAK-BMN (Version 21.0.0, and Inventory (Version 21.0.0).

**Penyuluhan SAI Berbasis One-On-One Meeting
 One-on-One SAI Counseling**

Dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan Tahun 2021. Direktorat APK menyelenggarakan kegiatan penyuluhan SAI berbasis one-on-one meeting dengan Kementerian Negara/Lembaga. Dalam kegiatan ini dilakukan pendampingan dan bimbingan secara intensif pada K/L untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi K/L dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan selama TA 2021 lebih dini agar didapatkan solusi dan penyelesaian sehingga Laporan Keuangan K/L Tahun 2021 dapat terjaga kualitasnya.

Kegiatan yang mengangkat tema "Peningkatan Kualitas Penyusunan LKKL Tahun 2021 Menyongsong Migrasi ke Aplikasi SAKTI" ini bertujuan untuk mendorong komitmen K/L peserta penyuluhan untuk melakukan monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LKKL Tahun 2020, menyajikan dan mengungkapkan secara memadai atas realisasi dan kegiatan PC PEN pada CaLK di LKKL tahun 2021, serta meningkatkan kualitas data Laporan Keuangan menjelang migrasi ke Aplikasi SAKTI full module di tahun 2022. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat menyelesaikan seluruh tindak lanjut temuan atas rekomendasi BPK, meningkatkan kualitas penyajian dan pengungkapan realisasi PC PEN tahun 2021, dan menyusun Laporan Keuangan yang akurat, tepat waktu, dan andal.

One-on-one meeting diikuti oleh 12 K/L yang terdiri dari 2 K/L yang memperoleh opini non-WTP atas LKKL tahun 2020 (Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan 10 K/L dengan pagu PC PEN terbesar di tahun 2021 (Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, POLRI, Kementerian Agama, Kementerian

In the endeavor to enhance the quality of financial reports in 2021, the APK Directorate organized a counseling session on the line institutions accounting system (SAI) based on one-on-one meetings with ministries/agencies. During this session, intensive assistance and guidance was provided to ministries and to ascertain their problems and obstacles in preparing financial reports for FY 2021. Furthermore, this session was held well in advance to seek for solutions and settlements so that 2021 financial statements of line ministries/agencies would be of a high quality.

With the theme "Enhancing the Quality of Ministry/Agency Financial Report Preparation in 2021 and Welcoming Migration to the SAKTI Application", the session sought to encourage the commitment of participants to monitor the accomplishment of follow-ups to BPK findings on the 2020 financial reports, to adequately present and disclose PC-PEN realization and activities on CaLK in 2021 financial reports (LKKL), and to improve the quality of Financial Report data ahead of migration to the full module SAKTI Application in 2022. Through this session, it is hoped that all participants would be able to complete pending follow-ups to BPK recommendations, enhance the quality of presentation and disclosure of PC-PEN realization in 2021, and prepare financial reports that are accurate, timely, and reliable.

The one-on-one meetings session was attended by 12 line ministries/agencies, comprising 2 institutions that received non-WTP opinions on their 2020 financial report (Ministry of Social Affairs and Ministry of Maritime Affairs and Fisheries) and 10 institutions having the highest PC-PEN ceiling in 2021 (Ministry of Health, Ministry of Defense, Ministry of Public Works and Public Housing, Indonesian National Police, Ministry of Religious



Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Perhubungan).

Affairs, Ministry of Agriculture, Ministry of Manpower, Ministry of Education, Culture, Research and Technology, Ministry of Environment and Forestry, and Ministry of Transportation).

Penyuluhan SAI Tingkat K/L *SAI Counseling at the Ministry/Agency Level*

Transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 memerlukan penanganan yang cepat dan masif sehingga berpotensi timbulnya risiko dalam akuntabilitas pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi tetap harus dijaga dengan baik pada setiap transaksi keuangan negara guna menjamin kualitas laporan keuangan.

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang tetap terjaga, diselenggarakan kegiatan *Workshop* Penyuluhan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) tingkat K/L Tahun 2021. Peserta Penyuluhan SAI tersebut adalah pejabat/staf SAI dan BMN yang menangani penyusunan LKKL tingkat UAPA pada 87 K/L. Kegiatan Penyuluhan SAI untuk Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021 dibagi dalam 4 kelas sebagai wujud penyelenggaraan protokol kesehatan.

Melalui kegiatan ini diharapkan ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pejabat/petugas SAI di lingkungan K/L tingkat UAPA, menyamakan persepsi atas peraturan/update aplikasi dalam penyusunan laporan keuangan K/L dan pengenalan persiapan implementasi SAKTI *Full Module*.

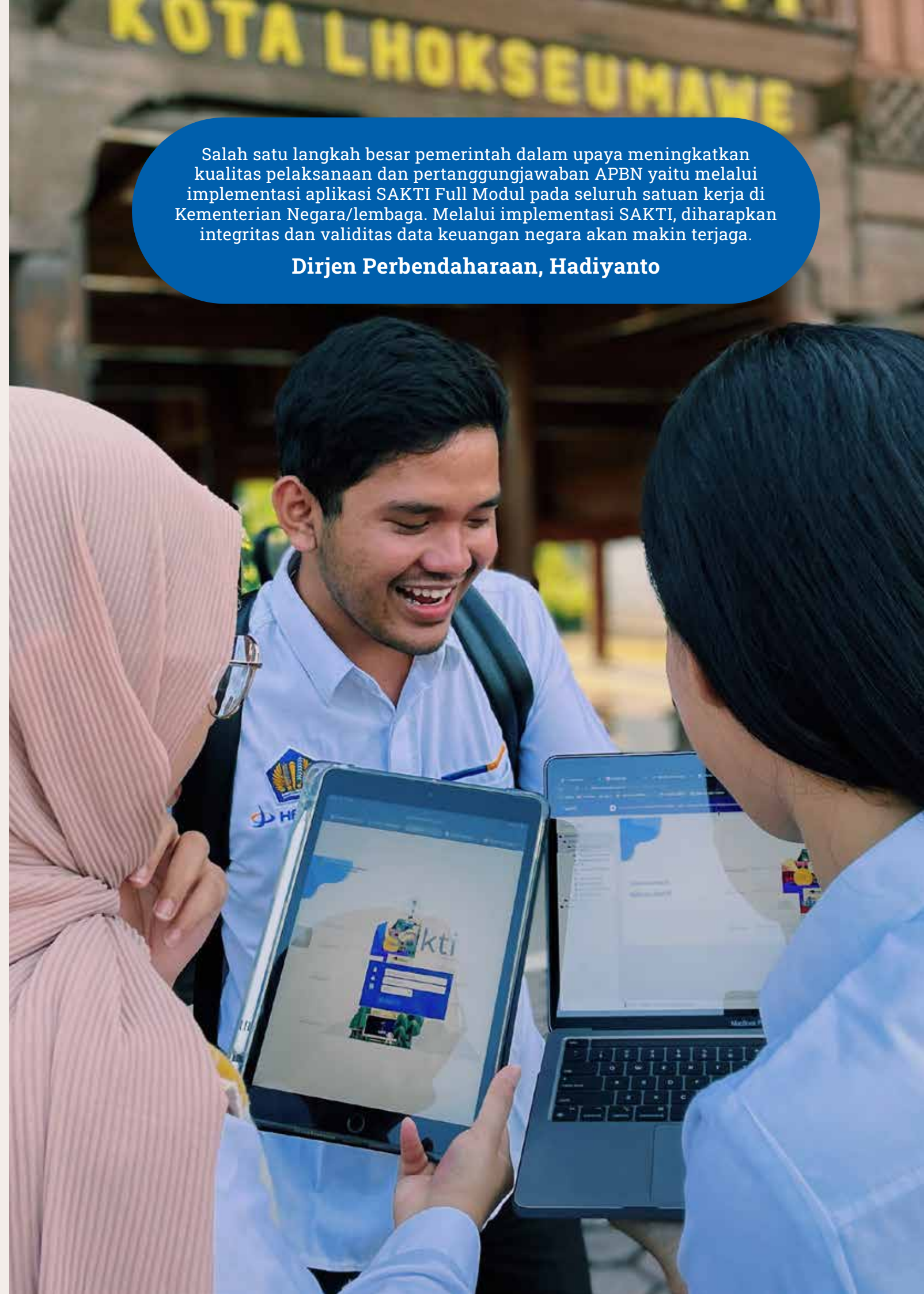
Transactions carried out by the government on Covid-19 pandemic mitigation require rapid and massive handling, with the consequent potential of posing accountability risks. Therefore, the principles of prudence, accountability, and transparency must be maintained in all state financial transactions to ensure high quality of financial reports.

To realize high accountability on financial management, the SAI Counseling Workshop was organized in 2021 at the ministry/agency level. The workshop participants included SAI and state property (BMN) managers who handle the preparation of UAPA level LKKL at 87 ministries/agencies. The 2021 workshop was divided into 4 classes with due regard to implementing health protocols.

This workshop is expected to have enhanced the knowledge and skills of SAI officials/managers at the UAPA level, and harmonize perceptions of regulations and application updates in the preparation of financial reports. Furthermore, this workshop introduced the preparations being done for the implementation of the SAKTI *Full Module*.

Salah satu langkah besar pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN yaitu melalui implementasi aplikasi SAKTI Full Modul pada seluruh satuan kerja di Kementerian Negara/lembaga. Melalui implementasi SAKTI, diharapkan integritas dan validitas data keuangan negara akan makin terjaga.

Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto





Fungsi Sistem Perbendaharaan The Treasury System Function

Pengelolaan perbendaharaan negara terus mengalami dinamisasi sistem dan kebijakan. Dalam mengelola kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi perbendaharaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan (SP) merumuskan beragam mekanisme sebagai upaya untuk menjaga peran dan fungsi organisasi dalam mengawal APBN sekaligus menjalankan amanah selaku *Regional Chief Economist* (RCE).

The management of the state treasury continues to experience system and policy dynamics. In managing the continuous implementation of the duties and functions of the treasury, the Directorate of Treasury System (SP) formulates various mechanisms as an effort to maintain the roles and tasks of the organization in guarding the State Budget while carrying out the mandate of the *Regional Chief Economist* (RCE).

Transaksi perdana piloting pembayaran common expense melalui platform dilaksanakan pada bulan Agustus 2021

The initial piloting transaction for common expense payment through the platform was carried out in August 2021

Transformasi Kelembagaan Institutional Transformation

Platform Pembayaran Pemerintah

Telah dilakukan 15 siklus transaksi gaji melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) pada tahun 2021 dengan rincian 13 siklus transaksi gaji induk, satu transaksi THR, dan satu transaksi Gaji Ketiga Belas. Pada tahun 2021 juga terus dilakukan pengembangan sistem dan pengujian atas interkoneksi antara aplikasi SAKTI dengan Sistem Telkom dan Sistem PLN. Pada bulan Juni 2021, telah dilaksanakan UAT atas interkoneksi ini.

Sesuai amanat PMK 204/2020, atas interkoneksi antara core system dengan sistem mitra yaitu sistem PLN dan Telkom, perlu disusun sebuah perjanjian kerja sama (PKS). PKS antara DJPb dengan PT PLN dilakukan pada PRJ-293/PB/2021 dan 0371.PJ/HKM.02.01/C01000000/2021 tanggal 16 Juli 2021 kemudian PKS antara DJPb dengan PT Telkom dilakukan pada PRJ-294/PB/2021 dan K.Tel.23/HK.810/TEL-00000000/2021 tanggal 23 Juli 2021.

Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) piloting pembayaran melalui Platform pun dilakukan. SOP piloting telah disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan pada bulan Juli 2021, sebagai salah satu syarat dilaksanakannya transaksi perdana.

Berikutnya, pengembangan dan pengujian dashboard gaji dan common expense digunakan sebagai tool dalam melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan layanan pembayaran melalui platform. Fitur dashboard platform terdiri atas dashboard gaji, dashboard PLN, dan dashboard Telkom. Pengembangan fitur

Government Payment Platform

In 2021, 15 cycles of salary transactions were conducted through the Government Payment Platform (PPP), comprising 13 salary transaction cycles, 1 religious festival allowance (THR) transaction, and 1 13th salary transaction. During the year, there was a continuation of systems development along with testing of the interconnection between the SAKTI application and Telkom and PLN systems. In June 2021, the User Acceptance Testing (UAT) was implemented for this interconnection

In accordance with the mandate of MoF Regulation No. 204/2020, the interconnection between the core system and partner systems, i.e. PLN and Telkom systems, requires a cooperation agreement (PKS) to be drawn up. In this regard, the PKS between DG Treasury and PT PLN was conducted under PRJ-293/PB/2021 and 0371.PJ/HKM.02.01/C01000000/2021 on 16 July 2021. Furthermore, the PKS between DG Treasury and PT Telkom was conducted under PRJ-294/PB/2021 and K.Tel.23/HK.810/TEL-00000000/2021 on July 23, 2021.

Moreover, the Standard Operating Procedures (SOP) were formulated for piloting payments through the platform, and the piloting SOP was approved by the Director General of Treasury in July 2021 as one of the conditions for executing the initial transaction.

Next, the development and testing of salary and common expense dashboards is intended as a tool in monitoring and evaluating payment compliance through the platform. The platform's features consist of the salary dashboard, the PLN dashboard, and the Telkom dashboard. The development of the platform's dashboard feature was completed at the user acceptance testing stage on June 14-15, 2021.

dashboard platform telah selesai pada tahap pengujian user acceptance test pada tanggal 14-15 Juni 2021.

Transaksi perdana piloting pembayaran common expense melalui platform dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Transaksi perdana tersebut melibatkan satker piloting yaitu kantor pusat Setjen Kemenkeu dan satker lingkup DJPb dengan total jumlah peserta 218 satker. Hingga Desember 2021, lima siklus pembayaran telah dilalui. Soft Launching PPP dilaksanakan pada tanggal 5 November 2021 oleh Dirjen Perbendaharaan bersama perwakilan PT PLN dan PT Telkom.

Sebagai pengujian terhadap *quality assurance piloting* PPP tahap I, tim Inspektorat Jenderal melakukan reviu melalui serangkaian metode pengujian terhadap berbagai data dukung serta uji petik pada KPPN dan satuan kerja yang ditetapkan sebagai sampel. Berdasarkan hasil pengujian, rata-rata capaian pemenuhan kriteria pada 6 area adalah sebesar 89%, yaitu pada sistem platform, interkoneksi sistem, administrasi keuangan secara elektronik, penyelesaian tagihan, monitoring dan evaluasi, serta bussiness contuinity plan sesuai PMK Nomor 204/PMK.05/2020.

Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/KMK.01/2021 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan, DJPb memiliki 4 Inisiatif Startegis dengan progres capaian sampai dengan bulan Desember 2021, adalah sebagai berikut.

The initial piloting transaction for common expense payment through the platform was carried out in August 2021. The initial transaction involved a pilot work unit, namely the Ministry of Finance's Secretariat General Head Office and DG Treasury work units under it, in all numbering 218 work units. As of December 2021, five payment cycles were successfully conducted. The PPP Soft Launch was inaugurated on November 5, 2021 by the Director General of Treasury together with representatives of PT PLN and PT Telkom.

As a test of the quality assurance of PPP phase I piloting, a team from the Inspectorate General conducted a review through a series of testing methods on various supporting data as well as sampling tests on KPPN and work units that were designated as tester units. Based on the test results, the average achievement of criteria fulfillment was 89% in 6 areas, i.e. platform system, system interconnection, electronic financial administration, bill settlement, monitoring and evaluation, and business continuity plan as per MoF Regulation No. 204/PMK.05 /2020.

Bureaucratic Reform and Institutional Transformation

In accordance with Minister of Finance Decree No. 91/KMK.01/2021 concerning Implementation of the Strategic Initiatives for the Bureaucratic Reform and Institutional Transformation Program (RBTK) of the Ministry of Finance, DG Treasury has 4 Strategic Initiatives. The progress of these initiatives as of December 2021 can be seen in the following table.

**INISIATIF STRATEGIS DJPB TAHUN 2021
DG of Treasury Services 2021**

Inisiatif Strategis Services	Target TW IV Q4 Target	Target s.d. Des Target until December	Capaian s.d. Des Achievement as of December
IS #17 Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (Shared Service dan Government Platform) IS #17 Simplification of Budget Execution through use of Digital Technologies (Shared Service and Government Platform)	90%	90%	94%
IS #19 Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara IS #19 Integrating Central and Local Government Financial Information towards Enhancing the Quality of State Financial Management	90%	90%	100%
DA #25 Big Data Analytics BLU 2021	85%	85%	100%
DA #26 Data analytics pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sosial dan pembiayaan pemerintah kepada UMKM DA #26 Data analytics on community empowerment through social assistance and government financing to MSMEs	85%	85%	100%

Change Management and Communication

Pengelolaan CMC dalam rangka membangun awareness dan meningkatkan ownership serta menjamin keberhasilan implementasi Transformasi Kelembagaan dilakukan dengan penyelenggaraan Trustsury Festival 2021

To build awareness and increase ownership and ensure the successful implementation of Institutional Transformation, the Trustsury Festival 2021

Change Management and Communication (CMC) terdiri dari kegiatan di bidang manajemen perubahan dan komunikasi. Pada periode tahun 2021, dalam rangka menyukseskan pelaksanaan kegiatan manajemen perubahan dan komunikasi telah dilaksanakan berbagai kegiatan.

Telah dilakukan penandatanganan Treasury Charter 2021 pada tanggal 29 Januari 2021. Treasury Charter merupakan bentuk komitmen para pimpinan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kemudian dilakukan penetapan Duta Transformasi Kementerian Keuangan dengan Penetapan Duta Kantor Vertikal 2021 dan Change Agent Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonsia Nomor 145/KMK.01/2021 tentang Penetapan Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tahun 2021 untuk Duta Transformasi Kelembagaan

Change Management and Communication

This scheme involves the execution of various activities in the field of change management and communication. During 2021, various activities have been carried out in the context of the successful implementation of change management and communication.

The Treasury Charter 2021 was signed on January 29, 2021. This charter represents a form of commitment of Directorate General of Treasury leaders. In this context, the Ministry of Finance Transformation Ambassadors were appointed in line with the Vertical Office Ambassadors 2021 and Ministry of Finance Change Agents, as effected through Minister of Finance Decree No. 145/KMK.01/2021 concerning Ministry of Finance Transformation Ambassadors for Institutional Transformation within the Ministry of Finance, while the DG Treasury Light House were appointed under Director General of Treasury Decree No. Kep-



Kementerian Keuangan, sedangkan Light House DJPb dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor Kep-154/PB/2021 tentang Penetapan Duta Transformasi Kelembagaan tingkat KPPN.

Dalam rangka memberikan reward atas kinerja Duta Transformasi Kelembagaan maka dilakukan Penetapan Duta Transformasi terbaik berdasarkan laporan kinerja Duta Transformasi Kelembagaan dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP65/PB/2021 tentang Penganugerahan Penghargaan Implementasi Program Kerja Duta Transformasi Dirjen Perbendaharaan Terbaik Tahun 2020.

Pengelolaan CMC dalam rangka membangun awareness dan meningkatkan ownership serta menjamin keberhasilan implementasi Transformasi Kelembagaan dilakukan dengan penyelenggaraan Trustsury Festival 2021 pada tanggal 1-5 November 2021 dengan melibatkan seluruh jajaran dari Kantor Pusat sampai dengan Kantor Vertikal DJPb.

Quickwins DJPb

Pelaksanaan *One on One Meeting Progress Quickwins* 2021 secara bulanan bersama Initiative Owner yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember dan diikuti oleh Direktorat terkait pencapaian dan *progress Quickwins* 2020 dan 2021.

Untuk tahun 2021, DJPb memiliki 10 *Quickwins* yang secara keseluruhan telah tercapai 100% telah memenuhi *Acceptance Criteria*. Berikut tabel pencapaian 10 *Quickwins* 2021:

154/PB/2021 concerning Appointment of Institutional Transformation Ambassadors at the KPPN level.

With the objective of recognizing and rewarding performance, the best Transformation Ambassador was determined based on performance reports of the Institutional Transformation Ambassadors as per Director General of Treasury Decree No. KEP65/PB/2021 concerning Awarding of the Best Work Plan Implementation of Transformation Ambassadors under the Directorate General of the Treasury for 2020.

Further, to build awareness and increase ownership and ensure the successful implementation of Institutional Transformation, the Trustsury Festival 2021 was organized on November 1-5 2021, which involved all parts of the organization from the Head Office to DG Treasury vertical offices.

DG Treasury Quick Wins

In 2021, One on One meetings on Quick Wins Progress was held with the Initiative Owner on a monthly basis from January through December. These meetings were attended by the relevant Directorate having a role on the achievement and progress of Quick Wins in 2020 and 2021.

For 2021, DG Treasury recorded 10 Quick Wins, 100% of which and have met the Acceptance Criteria. The following table shows the achievements of the 10 Quick Wins in 2021:

CAPAIAN QUICKWINS DJPB TAHUN 2021
DG of Treasury Quickwins Achievement 2021

Nomor Number	Quickwins	Capaian Achievement	UIC
1	Implementasi <i>FRESH Office</i> DJPb Implementation of DG Treasury <i>FRESH Office</i>	100%	Setditjen
2	Digitalisasi Modul MP PNBPN tidak Terpusat Digitalization of the Decentralized MP PNBPN Module	10%	Dit. PA & SITP
3	Digitalisasi Sistem Pembayaran Pemerintah Digitalization of Government Payment System	100%	Dit. PKN & SITP
4	Digitalisasi Pembiayaan UMi Digitalization of UMi Financing	100%	Dit. SMI
5	<i>Go Live</i> Investasi Pemerintah (Tahap I) Government Investment <i>Go Live</i> (Phase I)	100%	Dit. SMI
6	BLU <i>Maturity Rating Assessment</i> BLU <i>Maturity Rating Assessment</i>	100%	Dit. PPK BLU
7	BIOS <i>NextGen: Maturity Rating</i> BLU BIOS <i>NextGen: Maturity Rating</i> BLU	100%	Dit. PPK BLU & SITP
8	Otomatisasi Telaah Laporan Keuangan Automation of Financial Report Review	100%	Dit. APK & SITP
9	<i>Electronic Bank Guarantee</i> (e-BG) <i>Electronic Bank Guarantee</i> (e-BG)	100%	Dit. SP & SITP
10	Rancangan <i>Treasury Big Data</i> Rancangan <i>Treasury Big Data</i>	100%	Dit. SITP

Penelitian dan Pengembangan dan Kerja Sama Kelembagaan
Research and Development and Institutional Cooperation

Penerbitan Jurnal Ilmiah Perbendaharaan

DJPb mengelola dua Jurnal Ilmiah Perbendaharaan yaitu Jurnal *Indonesian Treasury Review* (ITRev) dan Jurnal Manajemen Perbendaharaan (JMP). Jurnal ITRev diterbitkan sebagai media jurnal ilmiah yang dapat memberikan inspirasi bagi terwujudnya transformasi tata kelola Sistem Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik yang berkelanjutan. Hal yang disasar dalam penerbitan ITRev adalah pengembangan budaya ilmiah dalam keorganisasian yang mengedepankan nilai riset atau *evidence-based policy*.

Selama 2021, jurnal ITRev telah diterbitkan sebanyak 4 kali penerbitan yaitu ITRev Volume 6 Nomor 1 Tahun 2021, ITRev Volume 6 Nomor 2 Tahun 2021, ITRev Volume 6 Nomor 3 Tahun 2021, dan ITRev Volume 6 Nomor 4 Tahun 2021.

Publication of Scientific Journals on Treasury Affairs

DG Treasury manages two scientific journals on Treasury Affairs, namely the *Indonesian Treasury Review Journal* (ITRev) and the *Treasury Management Journal* (JMP). ITRev is published as a scientific work with the objective of inspiring the realization of a sustainable transformation in the Treasury System, State Finance, and Public Policy governance. ITRev publication is meant to foster the development of a scientific culture within the organization that puts forward the value of research or evidence-based policy.

ITRev was published on 4 occasions in 2021, namely ITRev Volume 6 Number 1 of 2021, ITRev Volume 6 Number 2 of 2021, ITRev Volume 6 Number 3 of 2021, and ITRev Volume 6 Number 4 of 2021.



Jurnal Manajemen Perbendaharaan (JMP) merupakan wadah gagasan dan intelektualitas yang dijadikan sebagai ruang publik dalam bentuk jurnal ilmiah yang digunakan sebagai sarana dialog, komunikasi, sosialisasi, dan edukasi. JMP bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan bidang keilmuan dan praktik perbendaharaan dengan mempublikasikan makalah teoritis/analitis, empiris, dan review yang berkualitas di bidangnya. JMP diterbitkan pertama kali pada tahun 2020.

Selama 2021, JMP telah diterbitkan sebanyak 2 kali penerbitan yaitu JMP Volume 2 Nomor 1 tahun 2021 dan JMP Volume 2 Nomor 2 tahun 2021.

Brown Bag Seminar

Sebagai sarana pertukaran gagasan, pengalaman, dan hasil penelitian, serta meningkatkan eksposur Jurnal Ilmiah Perbendaharaan, pada tahun 2021 telah dilaksanakan Brown Bag Seminar (BBS) yang merupakan sebuah seminar yang berisi presentasi dan diseminasi hasil penelitian yang telah dipublikasikan pada Jurnal ITRev dan JMP. BBS 2021 dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan disiarkan secara langsung di kanal Youtube DJPb mulai dari tanggal 11 November 2021 hingga 9 Desember 2021.

Kerja Sama Kelembagaan

Pada tahun 2021, DJPb telah menjalin kerja sama dengan beberapa mitra luar negeri terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta untuk meningkatkan sinergi dan hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak yang terkait. Kerja sama yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

World Bank

Pelaksanaan Webinar Peluncuran

The Treasury Management Journal (JMP) represents a forum for ideas and intellect and is used as a public space and a scientific journal towards dialogue, communication, dissemination, and education. JMP aims to improve and advance the field of science and treasury practice by publishing high-quality theoretical/analytical, empirical, and review papers in their fields. JMP was first published in 2020.

During 2021, JMP was issued on 2 occasions, namely JMP Volume 2 Number 1 of 2021 and JMP Volume 2 Number 2 of 2021.

Brown Bag Seminar

As a means of exchanging ideas, experiences, research results and to promote the scientific journals on Treasury Affairs, the Brown Bag Seminar (BBS) was organized that contained relevant presentations and discussion on research outcomes published in ITRev and JMP. The BBS 2021 event was held online via Zoom and broadcast live on the DG Treasury Youtube channel from 11 November 2021 - 9 December 2021.

Institutional Cooperation

In 2021, DG Treasury collaborated with several foreign partners regarding the execution of its duties and functions, and to foster synergies and better relations with the counterparties. The various activities conducted in this regard are as follows.

World Bank

This collaboration involved a

Hasil Studi: *Institutional Diagnostic of Low and Slow Capital Budget Execution in Indonesia* pada tanggal 03 Juni 2021 sebagai bentuk sosialisasi atas kajian *Subject Institutional Diagnostic of Low and Slow Central Government Capital Budget Execution* yang disusun bersama World Bank pada 2019.

DJPb juga terlibat dalam program kerja sama dengan World Bank melalui Public Financial Management Multi Donor Trust Fund (PFM MDTF) Tahap III dengan Skema RETF khususnya terkait dengan topik *Expenditure Policy and Management*.

Prospera

Kerja sama dilakukan terkait review kinerja BLU Kesehatan untuk meningkatkan kinerja BLU melalui rekomendasi teknis dan strategis, serta technical advisory dalam pelaksanaan metodologi *Spending Review*, pengembangan modul Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dalam aplikasi SAKTI, pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI), dan pemanfaatan data aktual untuk perencanaan anggaran.

Korea Development Institute

Korea Development Institute (KDI) melalui *Knowledge Sharing Program (KSP)* telah melakukan *preliminary meeting* dan pembicaraan awal terkait usulan kerja sama *Initial Research Towards Enhancing Indonesia's IFMIS - Next Generation SPAN*. Selanjutnya, kerja sama akan diresmikan melalui *launching seminar* dan *high-level meeting* dan dilanjutkan dengan KSP Policy Seminar dan *In-depth Study* pada tahun 2022.

Korea Public Finance Information System

Kerja sama dilakukan dalam penyusunan kajian awal pengembangan SPAN sebagaimana proposal *Initial Research Towards*

webinar on the 'Launch of Study Results: Institutional Diagnostic of Low and Slow Capital Budget Execution in Indonesia', on June 3, 2021 to disseminate the Institutional Diagnostic of Low and Slow Central Government Capital Budget Execution study that was compiled with the World Bank in 2019.

DG Treasury was also involved in a collaboration with the World Bank through the Phase III Public Financial Management Multi Donor Trust Fund (PFM MDTF) under the RETF Scheme, particularly related to the topic of *Expenditure Policy and Management*.

Prospera

This collaboration was related to reviewing the performance of public service agencies in the healthcare sector with the objective of enhancing their performance through technical and strategic recommendations. Other aspects of the collaboration involved technical advisory in *Spending Review methodology implementation*, development of the *Medium-Term Expenditure Framework (KPJM) module* in the SAKTI application, development of the *Republic of Indonesia Financial Information System (SIKRI)*, and utilization of accrual data for budget planning.

Korea Development Institute

Collaboration with the Korea Development Institute (KDI) through the *Knowledge Sharing Program (KSP)* involved a *preliminary meeting* and initial discussions regarding the proposed cooperation for *Initial Research Towards Enhancing Indonesia's IFMIS - Next Generation SPAN*. Furthermore, the collaboration will be inaugurated through the *launching of seminars and high-level meetings* and continued with the KSP Policy Seminar and *In-depth Study* in 2022.

Korea Public Finance Information System

This collaboration involved the preparation of a SPAN development preliminary study as proposed by the *Initial Research Towards Enhancing Indonesia's IFMIS (Next Generation*



Enhancing Indonesia's IFMIS (Next Generation SPAN). Selain itu DJPb dan Korea Public Finance Information System (KPFIS) juga telah melakukan penandatanganan MoU untuk mempererat kerja sama di bidang sistem informasi dan teknologi.

Ministry of Finance of Singapore

Kerja sama dengan Kementerian Keuangan Singapura merupakan upaya benchmarking fungsi perbendaharaan pada negara maju, sekaligus termasuk dalam tema *treasury collaboration* antara Kemenkeu Indonesia dan Singapura yang tergabung dalam Indonesia-Singapore Finance Dialogue (ISFED) 2021

Kegiatan kerja sama dilaksanakan dalam bentuk *Sharing Session on Shared Service Provider and Government Credit Card in Singapore* pada tanggal 25 Februari 2021 dan *Sharing Session on Government Payment Platform, Data Analytics, and Public Sector Finance Transformation in Singapore* pada 27 April 2021.

U.S Treasury

Terdapat empat proyek kerja sama dengan US Treasury yang dilaksanakan pada tahun 2021, yaitu *improving cash flow forecasting, improving liquidity management, improve disbursement practices, serta develop strategies to optimize payment processes.*

Selain kerja sama dengan mitra luar negeri, DJPb juga secara aktif melakukan berbagai kegiatan kerja sama dengan mitra dalam negeri terkait dengan tugas dan fungsi perbendaharaan. Kerja sama yang dilaksanakan dapat dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), atau Dokumen Kerjasama Lainnya (DKL). Sebagian besar kerja sama dalam negeri dilakukan pada Kantor Vertikal DJPb, yang mana paling banyak dilakukan pada Kanwil DJPb disusul dengan KPPN dan unit kerja Kantor Pusat DJPb.

SPAN). In addition, DG Treasury and the Korea Public Finance Information System (KPFIS) have also signed a MoU to strengthen cooperation in the field of information systems and technology.

Ministry of Finance of Singapore

The collaboration with the Singapore Ministry of Finance is on benchmarking the treasury function in developed countries, as well as inclusion in the treasury collaboration theme between the Indonesian Ministry of Finance and Singapore who are members of the Indonesia-Singapore Finance Dialogue (ISFED) 2021.

The collaboration involved a *Sharing Session on Shared Service Providers and Government Credit Cards in Singapore* on 25 February 2021 and *Sharing Session on Government Payment Platform, Data Analytics, and Public Sector Finance Transformation in Singapore* on 27 April 2021.

U.S Treasury

In 2021, four collaborative projects were organized with the US Treasury, i.e. *improving cash flow forecasting, improving liquidity management, improving disbursement practices, and developing strategies to optimize payment processes.*

Besides collaborating with foreign partners, DG Treasury actively pursues various collaborative activities with domestic partners in regards to treasury duties and functions. Cooperation agreements may take the form of a Memorandum of Understanding (MoU), Cooperation Agreement (PKS), or other cooperation documents (DKL). Most of the domestic cooperation is performed by DG Treasury vertical offices, of which the majority is conducted at regional offices, followed by KPPN and Head Office work units.

Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan *Harmonization of Treasury Regulations*

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sistem Perbendaharaan, telah diselesaikan perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan yaitu penyelesaian 2 PMK dan 2 Perdirjen Perbendaharaan yang meliputi:

Peraturan Menteri Keuangan

1. PMK nomor PMK-114/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
2. PMK nomor PMK-184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022

Peraturan Dirjen Perbendaharaan

1. Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-7/PB/2021 tentang Tata Cara Pemoangan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga yang Lain
2. Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-12/PB/2021 tentang Mekanisme Konfirmasi Keaslian dan Keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Melalui Interkoneksi Sistem.

Pelaksanaan Quickwin Electronic Bank Guarantee Fase I *Quickwin on Electronic Bank Guarantee Phase I*

Pada tahun 2021, DJPb memiliki 10 Quickwins untuk mendukung pelaksanaan program Transformasi Kelembagaan, salah satu diantaranya adalah *Quickwin Electronic Bank*

With the aim of fulfilling the duties and functions of the Treasury System, treasury sector polices have been formulated, through the promulgation of 2 MoF Regulation (PMK) and 2 DG Treasury Regulation (Perdirjen) as follows:

Ministry of Finance Regulation

1. MoF Regulation No. PMK-114/PMK.05/2021 concerning Amendment to Minister of Finance Regulation No. 43/PMK.05/2020 concerning Mechanisms for Budget Execution from the State Revenue and Expenditure Budget in Handling the 2019 Coronavirus Pandemic
2. MoF Regulation No. PMK-184/PMK.05/2021 concerning Budget Execution in the context of Completing Work during the 2019 Coronavirus Pandemic Period that was not completed by the end of FY 2021 and to be continued in FY 2022

DG Treasury Regulation

1. DG Treasury Regulation number PER-7/PB/2021 concerning Procedures for Deducting Health Insurance Contributions for Other Family Members
2. DG Treasury Regulation No. PER-12/PB/2021 concerning Mechanism for Confirming the Authenticity and Validity of Payment Guarantee at the end of Fiscal Year through System Interconnection.

In 2021, DG Treasury recorded 10 Quick Wins in support of the Institutional Transformation program, one of which was the Phase I Electronic Bank Guarantee (e-BG). This represents



Guarantee (e-BG) Fase I, yang merupakan mekanisme konfirmasi validitas Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran melalui sistem yang terhubung antara Sistem Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan Perbankan. Adapun tujuan yang diharapkan dengan adanya e-BG Fase I ini adalah untuk menghindari adanya Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang tidak sah/tidak diakui perbankan melalui konfirmasi validitas secara sistem sehingga dapat menciptakan rasa aman bagi Satker atas pembayaran sebelum barang/jasa diterima.

Adapun pihak yang berperan sebagai *unit in charge* atas Quickwin e-BG Fase I dimaksud adalah Direktorat SP dan Direktorat SITP. Dalam rangka pelaksanaan capaian Quickwin dimaksud, saat ini telah dikembangkan interkoneksi Sistem Aplikasi OM SPAN dan Sistem Penerbitan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran pada perbankan terkait mekanisme konfirmasi keaslian dan keabsahan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran.

Sebagai dasar hukum pengaturan, saat ini telah ditetapkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2021 tentang Mekanisme Konfirmasi Keaslian dan Keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Melalui Interkoneksi Sistem. Selain itu, telah ditandatangani pula Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJPb dan Perbankan yang terlibat dalam kerjasama interkoneksi sistem.

a mechanism for confirming the validity of the Fiscal Year End Payment Guarantee through an interconnected system between the State Treasury and Budget Online Monitoring Application System (OM SPAN) and banking institutions. The expected goal of e-BG Phase I is to avoid the presence of invalid/unrecognized Fiscal Year End Payment Guarantee by the banking system through confirmation of system validity so as to create a sense of security for the work units for conducting payments before goods/ services are received.

The units in charge of the e-BG Phase I Quick Win are the SP and SITP Directorates. In the context of achieving this Quick Win, the OM SPAN Application System is being interconnected with the Fiscal Year End Payment Guarantee Issuance System at banks in relation to the mechanism for confirming the authenticity and validity of the fiscal year end payment guarantees.

As the legal basis for implementing the interconnection, the Director General of Treasury Regulation No. PER-12/PB/2021 stipulates the Mechanism for Confirming Authenticity and Validity of Guaranteed End-of-Fiscal Year Payments Through System Interconnection. In addition, a Cooperation Agreement (PKS) has also been signed between DG Treasury and banks involved in the system interconnection collaboration.

Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum Mentoring on Business and Legal Processes

Selama kurun waktu tahun 2021, telah diterima lebih kurang 35 permintaan berupa pendampingan hukum dan lebih kurang sebanyak 28 permintaan berupa penugasan rekomendasi ahli keuangan negara

During 2021, approximately 35 requests for legal assistance were received and approximately 28 of them were requests for the assignment of state finance experts

Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum (Probiskum) menjadi salah satu pilar dalam penanganan perkara hukum di bidang keuangan negara. Dalam rangka mencapai hal tersebut, telah dilakukan penyiapan bahan pembinaan proses bisnis dan sistem perbendaharaan, penyusunan standar, pedoman, petunjuk teknis, harmonisasi dan penyelesaian permasalahan, pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan, penanganan masalah hukum di bidang keuangan negara yang dihadapi internal dan eksternal DJPb.

Adapun hal-hal lain yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian penanganan perkara di bidang keuangan negara adalah dengan melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan hukum dengan aparat penegak hukum, melaksanakan kegiatan *coaching* persiapan pendampingan hukum berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK 158/PMK.01/2012 dan SE-46/PB/2016 yang muaranya guna memberikan pemahaman yang sama terhadap pemenuhan panggilan sebagai saksi/ahli, melaksanakan kegiatan pendampingan hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, serta secara aktif turut memantau, memonitoring dan melakukan tindakan yang diperlukan serta melaporkan perkembangan penanganan perkara hukum.

Selama kurun waktu tahun 2021, telah diterima lebih kurang 35 permintaan berupa pendampingan hukum dan lebih kurang sebanyak 28 permintaan berupa penugasan rekomendasi ahli keuangan negara.

Masih dalam rangka penanganan perkara hukum di bidang keuangan negara, telah diselenggarakan kegiatan berupa penguatan kapasitas pegawai pada unit vertikal dan kantor pusat tentang Hukum Keuangan Negara melalui FGD/Seminar/Pelatihan Hukum

Business and Legal Process Development (Probiskum) is one of the pillars in handling legal cases in the field of state finance. In order to achieve this, materials for business process and treasury system development have been prepared. Other aspects include the preparation of standards, guidelines, technical instructions, harmonization and problem solving, implementation of treasury business processes, and handling of legal problems on state finances faced internally and externally by DG Treasury.

Other aspects carried out in the context of resolving cases on state finances include coordinating with law enforcement officers, and coaching and mentoring for preparing legal assistance as based on Minister of Finance Regulation No. PMK 158/PMK.01/ 2012 and SE-46/PB/2016. This regulation provides a common understanding for fulfilling legal summons as witnesses/experts; providing legal assistance with respect to the investigation and examination, to actively participating in monitoring, and taking the necessary actions and reporting developments on the handling of legal cases.

During 2021, approximately 35 requests for legal assistance were received and approximately 28 of them were requests for the assignment of state finance experts.

Furthermore, in the context of handling legal cases on state finances, various activities were organized such as capacity building on State Finance Law for employees in vertical units and the head office through FGDs/Seminars/ Training, including FGD on State



Keuangan Negara diantaranya adalah kegiatan FGD Hukum Keuangan Negara dengan mengangkat tema “Penggunaan Teknologi dalam Transaksi Keuangan”, Seminar Sertifikasi Sistem pada Layanan Pembayaran melalui Platform Pembayaran Pemerintah, serta FGD Hukum Keuangan Negara di Surabaya pada tanggal 15-17 Desember 2021 yang pelaksanaannya berkolaborasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dengan tema “Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara dan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membekali kompetensi pegawai Kementerian Keuangan untuk memitigasi resiko terjadinya permasalahan hukum di kantor vertikal dan siap mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam beracara di pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. FGD tersebut juga diharapkan dapat melahirkan berbagai alternatif solusi terhadap kondisi permasalahan terkait bidang keuangan negara dan perbendaharaan.

Selain itu, kegiatan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat, stakeholders, maupun akademisi untuk turut serta dalam pengembangan keilmuan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan sekaligus menyediakan sarana pembelajaran, aspirasi, kritik dan masukan yang konstruktif terkait kebijakan-kebijakan keuangan dan perbendaharaan di daerah.

Standardisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan

Standardization and Capacity Development of Treasury Managers

Selama kurun waktu 2021, telah dilakukan implementasi Jabatan Fungsional (JF) di Bidang Perbendaharaan pada Kementerian dan Lembaga. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut.

Finance Law with the theme “Use of Technology in Financial Transactions”, Seminar on System Certification on Payment Services through the Government Payment Platform, and the State Finance Law FGD in Surabaya on 15-17 December 2021. This FGD was organized in collaboration with the DG Treasury Regional Office of East Java Province with the theme “Financial Management in the Perspective of State Finance Law and Handling of Corruption Cases”.

These activities are expected to impart Ministry employees with the competence on risk mitigation for legal problems in vertical offices, and to be ready to apply the knowledge, skills, and attitudes needed in court proceedings in accordance with applicable regulations. The FGD was also expected to generate various alternative solutions to problems related to state finances and the treasury.

In addition, these activities can provide opportunities for the public, stakeholders, and academics to participate in scientific development on state finance and treasury issues as well as provide a means of learning, aspirations, criticism and constructive input related to financial and treasury policies in the regions.

During 2021, functional positions (JF) on Treasury Affairs were opened at Ministries and Agencies, with the following results:

1. Telah ditetapkan regulasi (1) PermenPANRB Nomor 37 Tahun 2021 tentang JF APN; (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan AK JF PK APBN dan JF APK APBN; dan (3) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2021 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah JF PTN dan JF APN.
2. Aplikasi e-Jafung modul pengangkatan, pengajuan dan penilaian angka kredit telah selesai dikembangkan, dengan tahapan telah disampaikan User Requirement (UR), dilakukan User Acceptance Test (UAT) dan dilakukan perbaikan berdasarkan hasil UAT, serta telah dilakukan deployment pada server production sehingga telah siap digunakan untuk memfasilitasi pengajuan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional bidang perbendaharaan.
3. Untuk tahun 2021 Direktorat SP telah menerbitkan dua surat rekomendasi formasi sesuai surat no S-30/PB/2021 tanggal 02 Februari 2021 dan surat no S-127/PB/2021 tanggal 05 April 2021, dan telah ditetapkan satu formasi sesuai SK Menpan RB no 58 Tahun 2021.
4. Telah dilaksanakan uji kompetensi bagi calon pejabat fungsional melalui mekanisme *inpassing* yang diikuti oleh 9.658 peserta.
5. Jumlah peserta uji kompetensi yang lulus sebanyak 8.800 peserta. Namun setelah dilakukan seleksi persyaratan administratif, jumlah yang direkomendasikan untuk diangkat sebanyak 5.153 peserta.
6. Pejabat fungsional yang diangkat dalam JF Perbendaharaan sejumlah 5.581 PNS baik melalui mekanisme *inpassing* maupun *delayering*.
7. Jumlah K/L yang telah mengimplementasikan JF sampai tahun 2021 sebanyak 68 K/L (*inpassing* dan *delayering*), dari total K/L sebanyak 86.

Selain itu, juga dilaksanakan sertifikasi bagi PPK dan PPSPM dengan capaian sebagai berikut.

1. Stipulated regulations include (1) PANRB Regulation No. 37 of 2021 concerning JF APN; (2) DG Treasury Regulation No. PER-14/PB/2021 concerning Guidelines for the Proposal, Assessment, and Determination of AK JF PK APBN and JF APK APBN; and (3) DG Treasury Regulation No. PER-/PB/2021 concerning Guidelines for Writing Scientific Papers for JF PTN and JF APN.
2. Modules for the e-Jafung application for appointment, submission and credit score assessment have been developed, and is current at the User Requirement (UR) stage. The User Acceptance Test (UAT) has been conducted and improvements have been made based on the UAT outcomes. Further, the production server has been deployed such that the application is now ready to be used to facilitate the submission and assessment of credit scores for functional positions in the treasury sector.
3. In 2021, the SP Directorate issued two letters of recommendation on organization structure as per Note No. S-30/PB/2021 dated February 2, 2021 and Note No. S-127/PB/2021 dated April 5, 2021. In this regard, one structure has been determined according to the Menpan RB Decree No. 58 of 2021.
4. A competency test was held for functional position candidates through the *inpassing* mechanism, which was attended by 9,658 participants.
5. Overall, 8,800 participants passed the competency test. However, based on the administrative selection process, the recommended number for appointment was 5,153 participants.
6. Functional officers appointed in the JF Treasury numbered 5,581 civil servants either through *inpassing* or *delayering* mechanisms.
7. As of 2021, 68 ministries/agencies had implemented JF (*inpassing* and *delayering*), out of a total of 86 ministries/agencies.

In addition, certification for commitment-making officers (PPK) and payment order authorized signatory officers (PPSPM) was also conducted with the following achievements:



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PPK/PPSPM dan calon PPK/PPSPM yang tersertifikasi selama tahun 2021 sebanyak 9.158 orang. 2. Pelaksanaan Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSM pada Satker Pengelola APBN melalui PENG-1/PB.7/2021 tanggal 05 Januari 2021. 3. Pelaksanaan Penyegaran (Refreshment) untuk PPSPM sesuai BA-5/PB.7/2021 tanggal 02 Februari 2021. 4. Pelaksanaan Penyegaran (Refreshment) untuk PPSPM sesuai BA-7/PB.7/2021 tanggal 03 Februari 2021. 5. Pelaksanaan Penyegaran (Refreshment) untuk PPSPM sesuai BA-8/PB.7/2021 tanggal 04 Februari 2021. 6. Pelaksanaan Penyegaran (Refreshment) untuk PPSPM sesuai BA-12/PB.7/2021 tanggal 08 Februari 2021. 7. Pelaksanaan Penyegaran (Refreshment) untuk PPSPM Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dan Banten sesuai ND-453/PB.7/2021 tanggal 19 Maret 2021. 8. Pelaksanaan Penyegaran (Refreshment) untuk PPSPM Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta sesuai ND-510/PB.7/2021 tanggal 01 April 2021. 9. Pelaksanaan Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSM pada Satker Pengelola APBN Periode II Tahun 2021 melalui PENG-3/PB.7/2021 tanggal 05 April 2021. 10. Pelaksanaan Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSM pada Satker Pengelola APBN Periode III Tahun 2021 melalui PENG-10/PB.7/2021 tanggal 04 Oktober 2021. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Overall, the number of certified PPK/PPSPM and prospective PPK/PPSPM during 2021 was 9,158 persons. 2. Implementation of Competency Assessment for PPK and PPSM at the Budget Management Working Unit was executed under PENG-1/PB.7/2021 dated January 5, 2021. 3. Implementation of Refreshment for PPSPM was conducted according to BA-5/PB.7/2021 dated 02 February 2021. 4. Implementation of Refreshment for PPSPM was conducted according to BA-7/PB.7/2021 dated 03 February 2021. 5. Implementation of Refreshment for PPSPM was conducted according to BA-8/PB.7/2021 dated 04 February 2021. 6. Implementation of Refreshment for PPSPM was conducted according to BA-12/PB.7/2021 dated February 8, 2021. 7. Implementation of Refreshment for PPSPM at the Regional Office of West Java Province and Banten Province was conducted in accordance with ND-453/PB.7/2021 dated March 19, 2021. 8. Implementation of Refreshment for PPSPM at the Regional Office of Central Java, East Java and Yogyakarta Province was conducted in accordance with ND-510/PB.7/2021 dated April 1, 2021. 9. Implementation of Competency Assessment for PPK and PPSM at the State Budget Management Working Unit Period II 2021 was conducted through PEM-3/PB.7/2021 on 05 April 2021. 10. Implementation of Competency Assessment for PPK and PPSM at the State Budget Management Working Unit Period III 2021 was conducted through PENG-10/PB.7/2021 on 04 October 2021. |
|--|---|

Formulasikan Sinergi Kebijakan Fiskal Melalui FKPKN *Formulation of Fiscal Policy Synergy through FKPKN*

DJPb yang memiliki kantor vertikal di daerah harus mengoptimalkan perannya bukan hanya sebagai treasurer, tetapi juga menjadi leader untuk pengembangan ekonomi di daerah selaku *Regional Chief Economist* (RCE). Hal ini dilakukan agar pelaksanaan APBN di daerah benar-benar memberikan hasil dan manfaat optimal untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut. Untuk menuju ke arah tersebut, diperlukan keselarasan yang baik serta berbagai penguatan peran DJPb, salah satunya dengan pembangunan sinergi melalui Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) di daerah. FKPKN dapat menjadi forum koordinasi untuk bersama-sama menyusun formulasi sinergi dari kebijakan fiskal di pusat dengan kebijakan fiskal di daerah. Direktorat SP sebagai pembina teknis pembentukan FKPKN telah melakukan beberapa kegiatan antara lain menyusun petunjuk teknis pembentukan FKPKN, melaksanakan rapat koordinasi tingkat pusat dengan Eselon I Kementerian Keuangan lainnya, serta melaksanakan rapat koordinasi dengan Kanwil DJPb peserta piloting.

FKPKN merupakan wadah koordinasi, komunikasi dan konsultasi terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang melibatkan berbagai stakeholders untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Forum ini terdiri dari dua layer, yaitu pusat dan daerah. Layer pusat terdiri dari Eselon I di Kementerian Keuangan ditambah Kementerian Lembaga serta badan atau lembaga lain terkait seperti OJK atau BI. Sedangkan layer daerah, FKPKN diikuti oleh semua kantor vertikal di daerah baik dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Lembaga, dari Pemerintah Daerah serta Badan atau Lembaga lain di luar Kementerian, termasuk juga akademisi dan universitas di daerah.

Tema FKPKN yang dibahas secara periodik di antaranya tema rutin berupa tuisi Kementerian Keuangan yang saling bersinergi dan juga isu tematik sesuai kondisi yang memerlukan kebijakan cepat ataupun kebijakan khusus. Isu tersebut bisa digali dari permasalahan di daerah maupun bisa juga langsung dari pusat. Melalui FKPKN diharapkan berbagai program dan kegiatan pengelolaan keuangan negara di daerah dapat bersinergi sehingga bisa dilaksanakan lebih efisien, efektif dan komprehensif.

Having vertical offices in the regions, DG Treasury is required to optimize its role not only as treasurer, but also to become a leader for regional economic development as the *Regional Chief Economist* (RCE). This has the objective of ensuring that regional State Budget execution actually delivers optimum outcomes and benefits for the welfare and progress of the respective region. To move in this direction, good alignment is needed along with the further strengthening the DG Treasury's role, among which is the fostering of synergies through the State Financial Management Coordination Forum (FKPKN) in the regions. FKPKN can be a coordination forum to jointly formulate synergies between fiscal policy at the center and in the regions. As the technical advisor for FKPKN establishment, the SP Directorate has carried out various activities, including compiling technical guidelines for FKPKN formation, conducting coordination meetings at the centre with the Ministry of Finance's other echelon I units, and organizing coordination meetings with DG Treasury regional offices participating in the piloting stage.

FKPKN is a forum for coordination, communication and consultation related to the management of state finances involving various stakeholders to realize a more orderly, efficient, effective, transparent and accountable state financial management. This forum consists of two layers, namely the center and the regions. The central layer consists of the Ministry's echelon I units plus ministries and agencies and other related bodies such as OJK or BI. Meanwhile, the regional layer FKPKN is attended by regional vertical offices of the Ministry of Finance and other ministries and agencies, regional governments, and other agencies or institutions along with academics and regional universities.

Periodic discussions at FKPKN include routine themes such as the Ministry of Finance's role and function to foster synergies, along with thematic issues based on existing conditions that require quick or special policies. These issues can be explored both in terms of local perspectives or the view from the center. Through FKPKN, it is hoped that various programs and activities for managing state finances in regional governments can be synergized so that they can be implemented in a more efficient, effective and comprehensive manner.



Program Strategis Roll Out Sakti Roll Out Of The Strategic Sakti Program

Penerapan SAKTI meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L)

The use of SAKTI improves the effectiveness, efficiency, transparency, and accountability of financial management as performed by line ministries/agencies

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan sebuah sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai fungsi pengelolaan keuangan negara di sisi pengguna anggaran di mana sebelumnya dilakukan melalui berbagai sistem aplikasi. Dengan SAKTI, seluruh proses dalam siklus APBN mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban pada semua tingkatan pengguna Satker hingga Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dilaksanakan melalui SAKTI. Penerapan SAKTI merupakan perwujudan modernisasi sistem informasi pengelolaan keuangan negara oleh DJPb untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Penerapan SAKTI meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Pertama, perekaman transaksi yang sama cukup pada SAKTI dilakukan satu kali pada satu modul untuk kemudian digunakan oleh modul lain yang terkait. Dengan demikian, potensi kesalahan yang muncul dari perekaman transaksi yang sama secara berulang (redundansi) tidak terjadi. Kedua, SAKTI diakses melalui situs pencari sehingga tidak membutuhkan proses instalasi/pemutakhiran aplikasi pada sisi pengguna. Selain itu, konsolidasi data secara berjenjang juga dilakukan lebih cepat karena seluruh pengguna pada seluruh tingkatan pengguna mengakses satu basis data yang terintegrasi.

Selanjutnya, SAKTI menerapkan pengaturan kewenangan pengguna berdasarkan peran (operator, validator, dan approver), pendokumentasian perubahan data pada setiap tahapan transaksi (audit trail), dan kemampuan untuk melakukan penelusuran jurnal akuntansi ke transaksi sumbernya (monitoring jurnal). SAKTI

The Institutional Level Financial Application System (SAKTI) is an information system that integrates various functions of state financial management from the perspective of the budget user, which was previously performed through separate application systems. With SAKTI, all processes in the State Budget (APBN) cycle from budgeting to accountability at all working unit levels to line ministries/agencies (K/L) can be executed through the system. SAKTI implementation by DG Treasury is the embodiment of state financial management information system modernization to enhance the quality of state financial management.

The use of SAKTI improves the effectiveness, efficiency, transparency, and accountability of financial management as performed by line ministries/agencies. First, it is sufficient to record in SAKTI a transaction once in one module and then use the same transaction in other related modules. Thus, the potential for errors that arise from recording the same transaction repeatedly (redundancy) is reduced. Second, SAKTI can be accessed through a web browser, therefore it does not require application installation/update on the user side. In addition, data consolidation in stages can be performed faster because all levels of users access one integrated database.

Furthermore, SAKTI applies user authority settings based on roles (operator, validator, and approver), documents data changes at each transaction stage (audit trail), and is capable of tracing accounting journals to source transactions (journal monitoring). SAKTI also uses full accrual accounting with automatic validation and journaling processes so as to minimize errors and improve the



Fungsi Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan The Treasury Information Systems and Technology Function

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dituntut untuk terus berinovasi agar kualitas layanan yang disediakan tetap terjaga atau bahkan meningkat. Melalui pemanfaatan kemajuan teknologi terkini, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) terus berupaya menciptakan berbagai terobosan di tengah perkembangan lingkungan organisasi yang dinamis.

The Directorate General of Treasury is required to continuously innovate so that the quality of services delivered is maintained or even improved. By utilizing the latest technological advances, the Directorate of Treasury Information Systems and Technology (SITP) continuously endeavors to create various breakthroughs in the midst of developments in a dynamic organization.



juga menggunakan akuntansi *full accrual* dengan proses validasi dan penjurnalan secara otomatis sehingga meminimalkan kesalahan (*error*) dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Setelah melalui lima fase *piloting* sejak tahun 2015, penerapan SAKTI *full module* diperluas ke seluruh K/L (*roll out*) pada akhir tahun 2021 untuk transaksi APBN 2022. Berbagai agenda persiapan mulai dari pemutakhiran sistem, peningkatan kapasitas infrastruktur, manajemen perubahan dan pelatihan, hingga penyusunan regulasi dilaksanakan sejak awal tahun 2021. Agenda persiapan pelaksanaan tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh DJPb pada Kantor Pusat, Kanwil DJPb, dan KPPN tetapi juga melibatkan unit eselon I Kemenkeu lainnya dan eksternal Kemenkeu. Beberapa persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

quality of financial reports.

After undergoing five piloting phases since 2015, implementation of the full SAKTI module was expanded to all ministries/agencies (*roll out*) at the end of 2021 for handling State Budget 2022 transactions. In this regard, various preparations ranging from system updates, infrastructure capacity building, change management and training, to preparation of regulations has been carried out since early 2021. Preparations towards full implementation was not only carried out by DG Treasury at the Head Office, regional offices and KPPN but also involved other of the Ministry's echelon I units as well as external parties. Some of the preparations made are listed as follows.

Manajemen Perubahan Change Management	Pelatihan Training	Sistem & Infrastruktur System & Infrastructure	Tata Kelola dan Regulasi Governance and Regulations
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan FGD top/operational level Kantor Pusat K/L FGD of top/operational level at ministry/agency head office Sosialisasi/workshop/FGD top/operational level Satker K/L oleh unit vertikal DJPb Dissemination/workshop/FGD of top/operational level ministry/agency work units by DG Treasury vertical units Pemetaan tingkat Kesiapan pengguna Mapping of preparedness levels of users Rebranding SAKTI Publikasi melalui berbagai kanal komunikasi Rebranding of SAKTI publications through various communication channel 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pelatihan: <i>Trainings organized:</i> <ul style="list-style-type: none"> Training of Master Trainer Training of Trainer Managerial Training End User Training Bimtek dan e-learning SAKTI (BPPK). Penyediaan media pembelajaran secara mandiri (juknis, video tutorial) pada kanal youtube SAKTI dan Mobile Apps Pandu SAKTI Provision of independent learning media (guidebooks, video tutorials) on the SAKTI youtube channel and the Pandu SAKTI Mobile App Pendampingan Satker oleh unit vertikal DJPb <i>Assistance to work units by DG Treasury vertical units</i> Dukungan layanan kepada pengguna oleh HAI DJPb <i>Service support to users through HAI DJPb</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pemutakhiran core (SAKTI) dan monitoring (MonsAKTI) system Updates on core (SAKTI) and monitoring (MonsAKTI) system Scale up server Penyiapan environment Training Pandu-SAKTI <i>Environment Training on Pandu-SAKTI</i> Pemetaan akses internet Satker K/L <i>Mapping of internet access of ministry/agency work</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Tata Kelola Governance Weekly Meeting SAKTI lintas Es-1 Kemenkeu <i>SAKTI Weekly Meeting of MoF cross-echelon I units</i> Stress test & vulnerability test (Pusintek dan Itjen Kemenkeu) <i>Stress test & vulnerability test (MoF Information Center and IG)</i> IS Audit SAKTI (EY) <i>SAKTI IS Audit (EY)</i> Monev Exit Criteria <i>Exit Criteria Monev</i> Monitoring kesiapan roll out (via MonsAKTI) <i>Monitoring of roll out preparations (via MonsAKTI)</i> Kerjasama penyediaan email kedinasan SAKTI dan dukungan operasional (Kemenkominfo) <i>Cooperation in providing SAKTI official emails and operational support (Kemenkominfo)</i> Penetapan PMK 171/PMK.05/2021 ttg Pelaksanaan Sistem SAKTI <i>Issuance of PMK 171/PMK.05/2021 on SAKTI System Implementation</i>

Setelah berbagai persiapan yang dilakukan, *roll out* SAKTI yang ditandai dengan penyampaian SPM gaji induk/penghasilan pegawai bulan Januari tahun 2022 dari SAKTI telah dilaksanakan pada akhir tahun 2021 lalu. Sebanyak 24.733 SPM gaji induk/penghasilan pegawai dari SAKTI untuk 1.763.420 penerima telah diterbitkan SP2D oleh KPPN.

After going through the various preparations, the roll out was marked by the submission of the employee salary Payment Order (SPM) for January 2022 through SAKTI at the end of 2021. A total of 24,733 SPM for employee salaries were processed through SAKTI for 1,763,420 recipients as per issuance of SP2D by KPPN.

Performa Sistem Informasi Perbendaharaan & Layanan Pengguna *Performance of Treasury Information Systems & User Services*

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai core application DJPb saat ini memiliki 2.398 user yang tersebar di seluruh unit vertikal DJPb maupun satker Bendahara Umum Negara (BUN). Pada tahun 2021, SP2D (termasuk pembayaran dana transfer dan pembiayaan, serta pengesahan BLU/penerimaan pembiayaan) yang telah diterbitkan melalui SPAN berjumlah 5.162.588 SP2D dengan nilai total transaksi sebesar Rp3.347,69 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 68 juta penerima.

Custom Web

Aplikasi Custom Web sebagai tools dalam pengesahan revisi DIPA Satker oleh BUN saat ini digunakan oleh 616 user. Sepanjang tahun 2021, tercatat 123.031 usulan Revisi DIPA termasuk pemutakhiran petunjuk operasional kegiatan yang telah disahkan melalui Custom Web.

Online Monitoring SPAN

Online Monitoring SPAN (OM-SPAN) memiliki jumlah pengguna aktif 74.698 pada tahun 2021. Selain menyajikan seluruh data transaksi belanja dari SPAN, aplikasi ini juga menyajikan data transaksi setoran penerimaan pajak dan non pajak dari MPN-G3 yang berjumlah sekitar 89,46 juta transaksi.

State Treasury and Budget System

As the core application of DG Treasury, the State Treasury and Budget System (SPAN) currently has 2,398 users spread across all vertical units and the State General Treasurer (BUN) work unit. In 2021, a total of 5,162,588 SP2D or fund disbursement orders (including payment of transfers and financing, BLU approval/ financing) have been issued through SPAN with a total transaction value of IDR 3,347.69 trillion and channeled to more than 68 million recipients.

Custom Web

The Custom Web application is a tool to approve budget execution list (DIPA) revisions of work units by BUN, and currently has 616 users. During 2021, 123,031 proposed DIPA revisions including updates to operational instructions for activities were approved through Custom Web.

Online Monitoring SPAN

The Online Monitoring SPAN (OM-SPAN) application had 74,698 active users in 2021. Besides displaying all expenditure data from SPAN, this application also presents transaction data for tax and non-tax receipts from MPN-G3, totaling around 89.46 million transactions



e-REKON & LK

Aplikasi e-REKON & LK pada tahun 2021 telah digunakan oleh 70.713 user. Pada tahun tersebut, tercatat 1.246.780 transaksi rekonsiliasi dan perubahan user/kewenangan diproses melalui aplikasi e-REKON & LK.

SAKTI

Mulai akhir tahun 2021, SAKTI full module diimplementasikan secara penuh kepada seluruh KL. Secara keseluruhan SAKTI telah digunakan oleh lebih dari 213 ribu user (19.652 Satker dari 82 K/L dan BUN). Pada tahun 2021, sebanyak 655.901 SPM (termasuk pengesahan) dihasilkan dari SAKTI dengan total transaksi sebesar Rp280,92 triliun.

Modul Penerimaan Negara Generasi-3

Pada tahun 2021, terdapat 89,46 juta transaksi penerimaan yang diproses oleh Modul Penerimaan Negara Generasi-3 (MPN G-3) pada tahun 2021 dengan total nilai transaksi sebesar Rp2.105,27 triliun.

Aplikasi Gaji Satker dan KPPN (Web dan Desktop)

Tahun 2021 merupakan tahap awal piloting aplikasi gaji web dalam rangka implementasi layanan pembayaran gaji melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP). Terdapat dua Satker yang mengikuti pelaksanaan piloting tersebut yakni Setditjen Perbendaharaan dan Setjen Kemenkeu. Dari pelaksanaan pembayaran gaji melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) pada tahun 2021 tersebut, aplikasi gaji memproses 128 gaji pada Setjen Kemenkeu dan sebanyak 362 gaji pada Setditjen Perbendaharaan. Adapun seluruh ADK gaji yang dihasilkan dari aplikasi gaji, baik web maupun desktop pada tahun 2021 berjumlah 568.967.

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

Pada tahun 2021, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) digunakan untuk memproses 400 juta transaksi KUR dan

e-REKON & LK

The e-REKON & LK application was used by 70,713 users in 2021. During the year, 1,246,780 reconciliation transactions and changes in user/ authority were processed through the application.

SAKTI

Beginning in end-2021, the SAKTI full module will be implemented in all ministries/agencies. Overall, SAKTI has been used by more than 213,000 users (19,652 work units at 82 ministries/agencies and BUN). In 2021, a total of 655,901 SPM (including endorsements) were generated from SAKTI with a total transaction value of IDR 280.92 trillion.

3rd Generation State Revenue Module

In 2021, 89.46 million revenue transactions were processed by the 3rd Generation State Revenue Module (MPN G-3) with a total transaction value of IDR 2,105.27 trillion.

Salary Application for Work Units and KPPN (Web and Desktop)

The year 2021 was the preliminary stage for piloting the web salary application in the context of implementing salary payment services through the Government Payment Platform (PPP). Two work units participated in the pilot, namely the Secretariat General of Treasury and the Secretariat General of the Ministry of Finance. Of the salary payments processed through PPP in 2021, the salary application processed 128 salaries at the Secretariat General of the Ministry of Finance and 362 salaries at the Secretariat General of Treasury. In all, 568,967 salary data archives were generated in 2021 through the salary application, for both the web and desktop versions.

Credit Program Information System (SIKP)

In 2021, the Credit Program Information System (SIKP) was used to process 400 million people's business credit (KUR)

UMI dengan total nilai sebesar Rp285,00 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 7 juta debitur melalui 47 Bank/ Penyalur.

Layanan Pengguna (HAI DJPb)

Fungsi service support pada DJPb saat ini dilaksanakan melalui HAI DJPb sehingga layanan pertanyaan, permasalahan, maupun gangguan di bidang perbendaharaan dapat ditangani melalui satu pintu (single point of contact). Sedangkan pemberian jawaban/penyelesaian juga dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen pemilik proses bisnis. Saat ini, HAI DJPb memiliki saluran layanan yang terdiri dari:

- Telepon ke call center HAI DJPb dengan nomor 14090;
- Surat elektronik (e-mail) ke alamat hai.djpb@kemenkeu.go.id;
- Portal HAI DJPb ke <https://hai.kemenkeu.go.id>;
- Web-chat ke <https://djpb.kemenkeu.go.id> atau <https://hai.kemenkeu.go.id>.

HAI DJPb telah menjadi backbone dalam integrasi contact center Kemenkeu yang mencakup DJPb, DJA, DJPK, DJKN, dan unit-unit di Kemenkeu lainnya. Pengguna layanan HAI DJPb antara lain KPPN, Kanwil DJPb, Satker, Pemda, Perbankan, dan Masyarakat. Jumlah pengguna layanan HAI DJPb sampai akhir tahun 2021 berjumlah lebih dari 216 ribu pengguna. Sepanjang tahun 2021, terdapat 130.416 permintaan layanan konsultasi/penyelesaian permasalahan terkait aplikasi, peraturan, kebijakan, dan proses bisnis yang disediakan oleh HAI DJPb dari berbagai saluran layanan yang tersedia.

and ultra-micro (UMI) transactions with a total value of IDR 285.00 trillion. These transactions involved disbursements to more than 7 million debtors through 47 banks/ disbursers.

User Support Service (HAI DJPb)

The service support function at DG Treasury is currently provided through HAI DJPb so that all inquiries, issues, and concerns on treasury matters can be handled through a single point of contact. Meanwhile, the provision of answers/settlement is conducted by involving all elements of the business process owner. At present, HAI DJPb has the following service channels:

- HAI DJPb call center number 14090;
- Electronic mail (e-mail) address at hai.djpb@kemenkeu.go.id;
- HAI DJPb website at <https://hai.kemenkeu.go.id>;
- Web-chat at <https://djpb.kemenkeu.go.id> or <https://hai.kemenkeu.go.id>

As of now, HAI DJPb has become the backbone of the integrated contact center for the Ministry of Finance which includes the Directorate General of Treasury, Directorate General of Budget, Directorate General of Fiscal Balance, Directorate General of State Assets Management, and other units in the Ministry of Finance. Users of this service include KPPN, DG Treasury regional offices, regional governments, banks and the public. As of end-2021, the HAI DJPb service had more than 216,000 users. During 2021, HAI DJPb served more than 130,416 requests for consulting services/ problem solving related to applications, regulations, policies, and business processes through its various service channels.

Kepuasan Pengguna Layanan Service User Satisfaction

Sistem Informasi dan Teknologi DJPb

Kepuasan para pengguna Sistem Informasi dan Teknologi (SIT) DJPb merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui persepsi pengguna aplikasi terhadap kinerja berbagai sistem informasi yang disediakan oleh DJPb. Pengukuran kepuasan pengguna tersebut dilakukan melalui metode survei yang dilaksanakan pihak eksternal yang independent. Pada tahun 2021, survei dilaksanakan oleh tim peneliti dari Universitas Indonesia (UI).

Terdapat lima sistem informasi yang menjadi objek survei tingkat kepuasan pengguna tahun 2021 yakni SPAN, Custom Web, E-Rekon & LK, OM-SPAN, dan SAKTI. Survei dilaksanakan secara online di 34 provinsi di Indonesia dengan 15.348 responden yang mengikuti survei pada tahun 2021. Dari pelaksanaan survei tersebut, indeks kepuasan pengguna terhadap kinerja sistem informasi DJPb pada tahun 2021 sebesar 4,67 pada skala lima.

The satisfaction levels of DG Treasury

Information System and Technology users is one of the measuring tools used to determine the application users' perception on the performance of the various information systems provided. The measurement of user satisfaction is carried out through surveys conducted by an independent external party. In 2021, a survey was conducted by a University of Indonesia (UI) research team.

In this regard, five information systems were the object of the 2021 survey, i.e. SPAN, Custom Web, E-Rekon & LK, OM-SPAN, and SAKTI. The survey was conducted online in 34 Indonesian provinces with 15,348 respondents taking part. Based on the survey results, the user satisfaction index on the performance of DG Treasury information systems in 2021 was 4.67 on a scale of 5.

Kepuasan Pengguna Layanan HAI DJPb

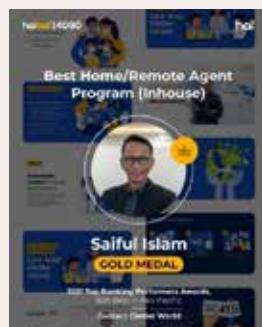
Kinerja HAI DJPb dalam penyediaan layanan dianggap sangat baik oleh penggunanya. Berdasarkan survei kepuasan penggunaan terhadap layanan yang disediakan HAI DJPb, dari total 2.404 responden, indeks kepuasan pengguna pada Survei Kepuasan Pengguna HAI DJPb Tahun 2021 adalah 4,64.

HAI DJPb Service User Satisfaction

The performance of HAI DJPb in providing services is considered very good by its users. Based on the user satisfaction survey against 2,404 respondents, the User Satisfaction Index on HAI- DJPb in 2021 was 4.64.



Raihan Penghargaan Awards & Achievements



Penghargaan HAI DJPb

Pada Tahun 2021 HAI DJPb berpartisipasi dalam berbagai event, baik tingkat nasional maupun internasional. Beberapa penghargaan yang diperoleh oleh HAI DJPb pada berbagai ajang yang diikuti pada tahun 2021 antara lain:

1. Top Ranking Performance Awards

Dua medali emas pada ajang *Top Ranking Performance Awards* (TRPA) tahun 2021 tingkat Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Contact Center World, untuk kategori:

- Kategori *Best Home/Remote Agent Program (Inhouse)* dengan presenter Direktur SITP (Saiful Islam); dan
- Kategori *Best Contact Center Operational Manager (Inhouse)* dengan presenter ex Kasi Layanan Pengguna (Nugroho Juli Purnama).

Atas keberhasilan tersebut, HAI DJPb berkesempatan untuk melanjutkan capaiannya di tingkat dunia pada ajang *Top Ranking Performers Awards* tahun 2021 - World Finals. Dalam ajang internasional tersebut, HAI DJPb akan bersaing dengan pemenang dari wilayah Amerika, Eropa, TimurTengah, serta Afrika.

2. The 2021 Global Top Rangking Performers

HAI DJPb berhasil memperoleh penghargaan *Best in the world Gold Winner* dalam ajang *16th Annual Global Contact Center World Award the Best in the World* untuk kategori *Best Home/Remote Agent Program* dengan presenter Direktur SITP (Saiful Islam).

3. The Best Contact Center Indonesia

Tiga medali platinum, tiga medali emas, tiga medali perak, dan satu

Awards for HAI DJPb

In 2021, HAI DJPb was included in various events, both at the national and international levels. Some of the awards received by HAI DJPb at the various events in 2021 are described as follows:

1. Top Ranking Performance Awards

Two gold medals were won at the *Top Ranking Performance Awards* (TRPA) 2021 Asia Pacific level organized by Contact Center World, for the following categories:

- Best Home/Remote Agent Program (Inhouse)* category, which was received by SITP Director Saiful Islam;
- Best Contact Center Operational Manager (Inhouse)* category, which was received by ex-User Services Section Head Nugroho Juli Purnama.

For this success, HAI DJPb had the opportunity to progress to the world level at the *Top Ranking Performers Awards* in 2021 - World Finals. In this international event, HAI DJPb competed against winners from the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2. The 2021 Global Top Rangking Performers

HAI DJPb managed to win the Gold Winner award at the *16th Annual Global Contact Center World Award*, the *Best in the World* for the *Best Home/Remote Agent Program* category, which was received by SITP Director Saiful Islam.

3. The Best Contact Center Indonesia

Three platinum medals, three gold medals, three silver medals, and one

medali perunggu pada ajang *The Best Contact Center Indonesia* (TBCCI) tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association untuk 10 kategori individual yang diikuti berhasil diraih HAI DJPb. Atas berbagai medali yang diterima, HAI DJPb menjadi *8th Runner Up* untuk top 10 organisasi/korporasi yang mengikuti ajang tersebut.

4. SNI AWARD Tahun 2021 / The National Quality Award of Indonesia ke 16 Tahun 2021

SNI Award merupakan penghargaan tertinggi dari Pemerintah Republik Indonesia bagi industri/perusahaan/ organisasi yang menerapkan SNI berkinerja baik dan berkelanjutan. Pada ajang penganugerahan SNI Award atau *The National Quality Award of Indonesia ke-16* tahun 2021 yang diselenggarakan Badan Standardisasi Nasional, DJPb yang diwakili oleh HAI DJPb meraih penghargaan kategori perak untuk organisasi kecil jasa.

5. Resertifikasi ISO 9001:2015

Untuk menjaga kualitas mutu layanan, HAI DJPb kembali melakukan re-certification audit eksternal sebagai salah satu syarat untuk perpanjangan sertifikat layanan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang diperoleh tahun 2018. Dari proses audit yang dilalui, HAI DJPb kembali memperoleh sertifikasi layanan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dari TUV Rheinland selaku badan sertifikasi ISO.

TOP 10 Kompetisi Inovasi Kemenkeu Tahun 2021

Mengusung integrasi sistem pengelolaan keuangan pemerintah melalui SAKTI, DJPb melalui inovasi SAKTI berhasil masuk top 10 kompetisi inovasi Kemenkeu tahun 2021. Selanjutnya, SAKTI akan mengikuti kompetisi tingkat nasional pada tahun 2022.

bronze medal were won at *The Best Contact Center Indonesia* (TBCCI) in 2021 organized by the Indonesia Contact Center Association. At this event, HAI DJPb participated in 10 individual categories. For the various medals received, HAI DJPb became the *8th Runner Up* for the top 10 organizations/corporations that participated in the event.

4. SNI AWARD 2021 / The 16th National Quality Award of Indonesia 2021

The SNI Award is the highest award from the Government of the Republic of Indonesia for industries/companies/organizations applying the SNI standard with good and sustainable performance. The 16th SNI Award or *The National Quality Award of Indonesia 2021* was held by the National Standardization Body. Here, DG Treasury was represented by HAI DJPb that won the silver category award for small service organizations.

5. ISO9001:2015 Recertification

To maintain the quality of service, HAI DJPb was again re-certified through an external audit as one of the requirements for the extension of the ISO 9001:2015 Quality Management System service certification that was obtained in 2018. Following the audit process, HAI DJPb again received the stated ISO certification from TUV Rheinland as an ISO certification body.

Ministry of Finance Top 10 Innovation Competition 2021

By employing the theme of government financial management system integration, DG Treasury successfully entered the Ministry of Finance's 'Top 10 Innovation Competition 2021' through its SAKTI application. Furthermore, SAKTI will participate in a national level competition in 2022.



Fungsi Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan The Senior Treasury Analyst Function

TPBP bertugas melaksanakan penyusunan telaahan, kajian, dan rekomendasi di bidang pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, dan pembinaan pengelolaan keuangan BLU.

The Senior Treasury Analyst is tasked with conducting analyses and reviews, and provide recommendations in the field of cash management, investment management systems, and fostering of financial management in public service agencies

Pembentukan Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan (TPBP) oleh Menteri Keuangan pada tahun 2011 didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.01/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan di lingkungan DJPb serta menggunakan landasan tata kerja Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Perbendaharaan Nomor KEP-118/PB/2011 tentang Uraian dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

TPBP bertugas melaksanakan penyusunan telaahan, kajian, dan rekomendasi di bidang pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, dan pembinaan pengelolaan keuangan BLU. Sedangkan pembentukan TPBP bertujuan untuk meningkatkan kualitas telaahan, kajian, dan rekomendasi di bidang perbendaharaan serta membantu Dirjen Perbendaharaan dan para direktur dalam melakukan kajian dan memberikan penalaran konseptual berdasarkan keahlian serta tinjauan akademis yang relevan. Selain itu, TPBP dituntut untuk dapat menyelenggarakan kajian pelaksanaan pelayanan publik dengan sistem administrasi yang efektif, efisien, dan profesional.

TPBP adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DJPb yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dirjen Perbendaharaan. TPBP secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat Ditjen Perbendaharaan.

Pada tahun 2021, TPBP dijabat Catur Ariyanto Widodo S.E., M.Int.Dev.Ec., sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 332/KMK.01/UP.11/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sepanjang tahun 2021, berbagai kegiatan dan kajian telah dilaksanakan

The establishment of the Senior Treasury Analyst position by the Minister of Finance in 2011 was based on Minister of Finance Regulation (PMK) No. 51/PMK.01/2011 dated March 22, 2011 concerning Senior Treasury Analyst within the Directorate General of Treasury, and the work procedures were specified under Director General of Treasury Decree No. KEP-118/PB/2011 concerning Description and Procedures of the Duties of Senior Treasury Analyst in the Directorate General of Treasury, Ministry of Finance.

The Senior Treasury Analyst is tasked with conducting analyses and reviews, and provide recommendations in the field of cash management, investment management systems, and fostering of financial management in public service agencies. Furthermore, the position was established with a view to enhance the quality of analyses, review, and recommendations on treasury affairs, and to assist the Director General of Treasury and line directors in conducting reviews and conceptual reasoning based on relevant academic expertise. In addition, the Senior Treasury Analyst is required to be able to conduct studies on the delivery of public services through an effective, efficient, and professional administration system.

The Senior Treasury Analyst is a civil servant within DG Treasury, who in the performance of duties is under and directly responsible to the Director General of Treasury. Administratively, the position sits within the DG Treasury Secretariat.

In 2021, Catur Ariyanto Widodo S.E., M.Int.Dev.Ec., held the position of Senior Treasury Analyst, which was based on Minister of Finance Decree No. 332/KMK.01/UP.11/2020 dated 13 July 2020 concerning Changes in Echelon II Positions within the Ministry of Finance.

During 2021, the Senior Treasury Analyst conducted various activities



oleh TPBP dalam rangka mendukung pencapaian tujuan program yang menjadi tanggung jawab DJPb. Pelaksanaan kegiatan dan capaian selama tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Kajian Sinergi Pembinaan BLU dan BLUD

Sebagai instansi dengan tujuan yang sama, Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu untuk memiliki standardisasi pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan BLUD bahkan dapat berbeda-beda karena disesuaikan dengan ketentuan peraturan kepala daerah. Untuk itu diperlukan kajian untuk memberikan sinergi pembinaan antara BLU dan BLUD. Hal ini terlebih mengingat Kanwil DJPb juga memiliki tugas melakukan pembinaan pengelolaan keuangan BLU namun belum optimal dalam melaksanakan pembinaan BLUD di daerahnya masing-masing.

2. Kajian Efisiensi BLU

Efisiensi merupakan aspek penting baik bagi sektor publik maupun sektor privat, baik dalam konteks kompetensi maupun produktivitas. Terlebih bagi, BLU sejak awal pembentukannya diharuskan mengedepankan unsur efisiensi. Saat ini, pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap BLU sering berdasarkan pada aspek keuangan dan aspek layanan saja. Sementara itu aspek efisiensi yang tidak kalah penting dalam pengukuran kinerja belum memiliki pengukuran secara khusus. Efisiensi semakin krusial di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.

3. Kajian Pemanfaatan QRIS dalam Pelaksanaan APBN

Penggunaan internet, ponsel pintar, dan perkembangan teknologi semakin pesat di Indonesia, termasuk dalam hal digitalisasi keuangan. Bank Indonesia telah melakukan standardisasi Quick-

in support of the programs of the Directorate General of Treasury. The various activities and achievements for the year are as follows:

1. Study on Synergies in the Fostering of BLU and BLUD

As agencies with the same objective, public service agencies (BLU) and regional public service agencies (BLUD) need to have standardized financial management processes. In this regard, financial management at BLUD can vary due to adjustments with the provisions of regional head regulations. For this reason, a study was needed to deliver synergies in the fostering of BLU and BLUD. This is especially true considering that DG Treasury regional offices also have the task of providing guidance on financial management of BLUs, however this is currently not ideal with regards to fostering BLUDs within their respective regions.

2. Study on Generating Efficiencies at BLU

Efficiency is an important aspect for the public and private sectors, both in the context of competition and productivity. This is especially true for BLUs whose establishment is premised on the prioritization of efficiency. As of now, BLU performance is mainly measured on the financial and service aspects. Meanwhile, no specific criteria exists on efficiency that is no less important in measuring performance. Efficiency has become increasingly crucial amid the global Covid-19 pandemic, which has affected Indonesia in a considerable way.

3. Study on the Use of QRIS in State Budget execution

Indonesia has seen a significant rise in the use of the internet and smart phones, along with rapid technological developments that includes digitalization of financial services. In this regard, Bank

Response (QR) Code bernama QRIS. Untuk itu diperlukan kajian mengenai kemungkinan instansi pemerintah/satker sebagai pihak yang melaksanakan transaksi pembayaran dana APBN agar dapat menggunakan QRIS, serta melakukan penyesuaian apa saja terkait sistem aplikasi dan sistem non-aplikasi (regulasi/prosedur) yang dibutuhkan. Kajian dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dan Direktorat Sistem Perbendaharaan.

4. Kajian Kebijakan Umum dan Rencana Strategis Investasi Pemerintah

Kajian ini merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 (PP 63/2019) tentang Investasi Pemerintah yang akan menjadi pedoman penyiapan dokumen Kebijakan Umum dan Rencana Strategis Investasi Pemerintah (KURS-IP) pasca terbentuknya Komite Investasi Pemerintah (KIP). Kajian KURS-IP diharapkan akan menjadi salah satu dasar dalam menyusun KURS-IP Tahun 2020 sampai dengan 2024 yang merupakan prasyarat penting bagi operasionalisasi KIP. Kajian KURS-IP awal telah disusun pada tahun 2020. Namun mengingat adanya perubahan yang cukup mendasar akibat pandemi Covid-19, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Kajian KURS-IP merupakan kajian bersama dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan melibatkan ekonom dari Bank Mandiri.

5. Penyusunan Kajian Pengaturan Kelembagaan BPDPKS

Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan tentang pengaturan kelembagaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), TPBP untuk menyusun Kajian Pengaturan Kelembagaan

Indonesia has standardized the Quick-Response (QR) Code called QRIS. For this reason, it was deemed necessary to study the feasibility of government agencies/work units, as responsible parties conducting transactions from the State Budget, in using QRIS and the consequent adjustments required in relation to the application system and non-application system (regulations/procedures). This study was carried out in collaboration with the Directorate of Budget Execution, the Directorate of State Treasury Management, and the Directorate of the Treasury System.

4. Study on Government Investment General Policy and Strategic Plan

This study is a follow-up to Government Regulation No. 63 of 2019 concerning Government Investment which serves as a guide for the preparation of the Government Investment General Policy and Strategic Plan (KURS-IP) document following the establishment of the Government Investment Committee (KIP). The KURS-IP study is expected to be one of the bases in compiling the KURS-IP 2020 – 2024, which is an important prerequisite for KIP operations. The initial KURS-IP study was compiled in 2020. However, given the fundamental changes caused by the Covid-19 pandemic, various adjustments were needed. The KURS-IP study is a joint endeavor with the Directorate of Investment Management Systems and involves economists from Bank Mandiri.

5. Preparation of Study on Institutional Arrangements for the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS)

As a follow up to the Minister of Finance directive regarding the institutional arrangements of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS),



BPDPKS. Kajian dilatarbelakangi oleh arahan agar meninjau pengaturan kelembagaan BPDPKS agar anggarannya tidak membebani postur anggaran Kementerian Keuangan. Sementara itu, pengaturan kelembagaan tidak dapat dipisahkan dari penilaian atas efektivitas program-program perkebunan kelapa sawit melalui BPDPKS. Kajian dilaksanakan melalui analisis yang mendalam terhadap sumber data dari berbagai aspek.

6. Dukungan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan DJPb

Dalam rangka tertib pengaturan keuangan negara, TPBP aktif membantu perumusan beberapa rancangan peraturan yang terkait dengan tugas dan fungsi DJPb. TPBP aktif dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Badan Cadangan Logistik Strategis (BCLS) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Keduanya merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. TPBP juga aktif dalam mengawal isu-isu strategis nasional seperti Pencegahan Korupsi (PK) di Kawasan Pelabuhan, stranas e-payment, dan tatalaksana Hibah Millenium Challenge Corporation.

7. Penyiapan Bahan Rapat Dirjen Perbendaharaan

Guna mendukung kelancaran rapat-rapat penting Direktur Jenderal Perbendaharaan maupun Menteri Keuangan, TPBP aktif dan produktif dalam menyediakan bahan rapat strategis pimpinan. Dengan

the Senior Treasury Analyst compiled a study on this aspect. The study was meant to review the BDPPKS's current institutional arrangements so that its allocations would not burden the Ministry's budget posture. In the meantime, institutional arrangements are indubitably linked to assessing the effectiveness of BPDPKS's palm oil plantation programs. The study was accomplished through in-depth analysis of data sources from various aspects.

6. Support towards Formulation of DG Treasury Related Legislation

In the context of proper regulation of state finances, the Senior Treasury Analyst provided active support in the formulation of several draft regulations related to the duties and functions of DG Treasury. The Senior Treasury Analyst was closely involved in drawing up the Draft Presidential Regulation (RPerpres) concerning Strategic Logistics Reserve Agency (BCLS) and Draft Government Regulation (RPP) concerning Free Trade and Free Port Zones (KPBPB). Both of these represent derivative regulations of Law Np. 11 of 2020 concerning Job Creation. The Senior Treasury Analyst was also involved in overseeing national strategic issues such as Prevention of Corruption (PK) in Port Areas, national e-payment strategy, and the management of the Millennium Challenge Corporation Grant.

7. Preparation of Briefing Materials for Director General of Treasury Meetings

In support of the smooth running of important meetings of the Director General of Treasury and the Minister of Finance, the Senior Treasury Analyst actively produced and provided briefing materials for leaders. As a result, it was expected

demikian, diharapkan keputusan strategis dapat diambil dengan tepat.

8. Monitoring dan Dukungan Pelaksanaan Rekomendasi Kajian

Kajian-kajian yang dilaksanakan mengandung rekomendasi-rekomendasi sebagai saran tindak lanjut atas sejumlah topik strategis DJPb. Atas rekomendasi-rekomendasi tindak lanjut tersebut, TPBP juga melakukan monitoring dan terutama dukungan pelaksanaan rekomendasi kepada direktorat-direktorat yang terkait.

that appropriate decisions would be taken in these strategic leadership meetings.

8. Monitoring and Support for Implementation of Study Recommendations

The various studies contain recommendations as follow-up suggestions on several DG Treasury strategic topics. In this regard, the Senior Treasury Analyst monitored the follow-up recommendations and specifically supported its implementation at the relevant directorates.





 Singali, Padang Sidempuan Hutaimbaru
Fotografer: Mhd. Arif Maulana Harahap, KPPN Padang Sidempuan

Loyal bermakna memiliki tekad dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi, serta sanggup mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Program strategis tersebut ialah memiliki komitmen yang tinggi dalam mencapai tujuan visi dan misi organisasi, serta memberikan dedikasi dan kesetiaan yang berkesinambungan pada organisasi.

The Treasurer has a high commitment to achieving the goals of the organization's vision and mission. High determination and dedication to the organization which is implemented in the implementation of daily tasks produces a spirit of loyalty and continuous loyalty to the organization to give the best contribution to the country.

05

Tata Kelola Organisasi



Organizational
Governance

Posisi Ditjen Perbendaharaan diperkuat lagi melalui peran Regional Chief Economist. Organisasi kemudian menyusun tata kelola agar peran tersebut dapat menghasilkan output yang dapat menyentuh fungsi APBN sebagai stabilisasi, distribusi, maupun alokasi dan memberikan dampak bagi perekonomian regional.

The position of the Directorate General of Treasury has been further strengthened through its role as the Regional Chief Economist. Consequently, the organization has structured governance so that this role can produce outputs with respect to the State Budget functions of stabilization, disbursement, and allocation that delivers positive impacts to regional or sub-national economies.





Strategi Treasury Sebagai Regional Chief Economist *The Treasury Strategy on the Regional Chief Economist*

RCE diharapkan mampu memanfaatkan dan mewujudkan data driven organization sebagai alat untuk melakukan analisis dan kajian

The RCE is expected to be able to utilize and realize a data driven organization as a tool to conduct analyses and studies

Branding fungsi perbendaharaan yang ditambah dengan kemampuan analisis makroekonomi dan fiskal daerah dalam wadah *Regional Chief Economist (RCE)* merupakan respons atas arahan dari Menteri Keuangan kepada Dirjen Perbendaharaan dalam rangka peningkatan kapasitas dan peran Kanwil DJPb di daerah. RCE merupakan inisiatif baru dari DJPb dalam merespons kebutuhan analisis data informasi terkait pelaksanaan APBN, makroekonomi, dan fiskal di daerah.

Mengikuti era perkembangan digital, organisasi pemerintah dituntut mampu bekerja, mengambil kesimpulan/keputusan, dan menetapkan suatu kebijakan dengan menggunakan analisis data secara tepat dan memadai (*data driven organization*). RCE diharapkan mampu memanfaatkan dan mewujudkan data driven organization sebagai alat untuk melakukan analisis dan kajian yang kemudian dapat dipergunakan dalam penyusunan kebijakan dan memberikan rekomendasi terbaik di daerah maupun pusat.

Peran Kanwil DJPb sebagai RCE tentu tidak lepas dari pelaksanaan tugas yang selama ini telah dijalankan. Pelaksanaan peran strategis Kanwil DJPb dalam pengembangan RCE dapat dipisahkan dalam beberapa kategori sebagai berikut.

The branding of the treasury function coupled with capabilities for conducting regional macroeconomic and fiscal analyses under the Regional Chief Economist (RCE) role represents a response to the Minister of Finance's directives to the Director General of Treasury to enhance the capacity and role of DG Treasury regional offices. The RCE is DG Treasury's new initiative in responding to the need for data analysis related to State Budget execution, macroeconomics, and fiscal issues in the sub-national regions.

In the wake of developments in the digital age, government institutions are required to be able to work, draw conclusions/make decisions, and establish a policy using appropriate and adequate data analysis techniques (*data driven organization*). The RCE is expected to be able to utilize and realize a data driven organization as a tool to conduct analyses and studies which can then be used in policy formulation and provide the best recommendations at the regional and national levels.

In this context, the role of DG Treasury regional offices as RCE certainly are inseparable from the tasks performed up to this point. The strategic role of DG Treasury regional offices in developing the RCE initiative can be divided into the following categories.

Penajaman Hasil Proses Bisnis Perbendaharaan sebagai Bagian dari RCE

Refinement of Treasury Business Process Outputs as Part of RCE

Dalam rangka melihat peran strategis Kanwil DJPb sebagai RCE, telah disusun proses bisnis dan output RCE yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Piloting RCE. Pada petunjuk teknis tersebut digambarkan desain proses bisnis untuk ALCo, CPIN, dan New Kajian Fiskal Regional (KFR) yang mencakup sumber data, sistem/aplikasi terkait, sub-unit yang melakukan pengolahan data, analisis data, dan penyajian laporan.

Proses bisnis tersebut mengasumsikan bahwa data makro ekonomi, moneter, dan transaksi keuangan dari pemda dapat tersaji secara tepat waktu. KFR merupakan output kajian Kanwil DJPb yang diarahkan pada analisis fiskal dan makroekonomi yang dapat digunakan dalam pencapaian tujuan kebijakan fiskal.

In view of the strategic role of DG Treasury regional offices as RCE, the RCE business processes and outputs have been prepared as contained in the RCE Pilot Technical Guidelines. These guidelines describe the business process design for ALCo, CPIN, and conducting Regional Fiscal Assessment (KFR) which includes data sources, related systems/applications, sub-units that perform data processing, data analysis, and report presentation.

The business process assumes that macroeconomic, monetary, and financial transaction data from local governments are presented in a timely manner. The KFR is the output of the DG Treasury Regional Office study which contains fiscal and macroeconomic analysis for use as the basis in achieving fiscal and macroeconomic policy objectives.

Penguatan Kelembagaan/Struktur Organisasi RCE *Strengthening the RCE Institutional/Organizational Structure*

Penguatan kelembagaan yang bersifat terbuka perlu dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan adanya kerja sama dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan penguatan hasil kajian ekonomis. Kelembagaan dibuat terbuka dan tidak kaku sehingga mampu menampung kehadiran unit lain di internal Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga (K/L), BI, OJK, ekonomis daerah, akademisi dan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, penyusunan KFR dapat dilaksanakan dari pegawai yang mungkin pada saat ini berada pada sub-unit yang berbeda. Hal ini mempertimbangkan kuantitas

An open-oriented institutional strengthening is a contemporary requirement towards collaborating with various parties for enhancing the outcomes of the economist studies. In this regard, the institution should have an open structure and not be too rigid, thereby able to accommodate the presence of various units from the Ministry of Finance, other ministries/agencies, Bank Indonesia, OJK, local governments and regional economists and academics. For example, the open structure would allow for the KFR preparation to be conducted by employees who may currently be in different sub-units. This endeavor also takes into account the limited



dan kualitas SDM yang terbatas dan bervariasi pada Kanwil DJPb. Bentuk kelembagaan ini juga memungkinkan perluasan anggota untuk memasukkan pejabat/pegawai unit eselon I lain di daerah (DJP, DJBC) dan di pusat (BKF, DJA, DJPK).

Selain itu perlu dipertimbangkan untuk juga memasukkan anggota dari Pemda, BPS, BI, dan akademisi untuk melengkapi keahlian yang tidak dimiliki oleh Kanwil DJPb serta mempercepat knowledge transfer serta sense of belonging atas RCE tersebut. Kelembagaan yang terbuka diusulkan dengan mempertimbangkan pembentukan RCE yang mengedepankan output RCE yang mendukung ALCo pusat dan Daerah serta pelaksanaan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah (FKPKD).

Pengembangan Standardisasi Kompetensi SDM Standardization of HR Competencies

Untuk menghasilkan kualitas kajian yang baik diperlukan SDM yang mendukung dengan kemampuan yang mumpuni. Pengembangan SDM sebagai peneliti secara berkelanjutan dapat dilakukan bekerja sama dengan universitas, lembaga riset atau secondment di institusi yang sudah memiliki fungsi riset ekonomi seperti BI, BPS, dan perbankan. Penyebaran tenaga fungsional utama perlu segera dilakukan dan dipenuhi. Program pelatihan yang tersertifikasi dalam pengembangan karier segera perlu dilakukan. Pegawai yang didedikasikan dapat dilakukan seleksi dari pegawai yang ada seperti pada seleksi *Treasury Dealing Room* (TDR) dan kemudian dikembangkan melalui pelatihan analisis, meningkatkan kemampuan data analytics pegawai untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis evidence dan data.

and varied quantity and quality of available human resources at DG Treasury regional offices. Moreover, this institutional form also allows expansion of members to include other echelon I unit officials/ employees in the regions (DG Taxes, DG Customs & Excise) and at the center (BKF, DJA, DJPK).

Furthermore, it is necessary to consider including members from regional governments, BPS, BI, and academics to complement the expertise that may be unavailable at DG Treasury regional offices, and to accelerate the transfer of knowledge and sense of belonging on the RCE. An open institution is proposed by considering RCE establishment that prioritizes outputs to support central and regional ALCos, as well as the implementation of the Regional Financial Management Coordination Forum (FKPKD).

To produce good quality studies, it is necessary to have the support of qualified and capable human resources. In this context, developing human resource capabilities as researchers in a sustainable manner can be achieved by collaborating with universities, research institutions or secondment in institutions that already have economic research roles such as BI, BPS, and banking establishments. The primary functional staff need to be assigned immediately to fulfill the requirements of regional units. Furthermore, a certified training program should be urgently developed with respect to career development. Dedicated employees can be selected from existing positions such as *Treasury Dealing Room* (TDR) roles, and then further developed through analyst and data analytics training to support evidence and data-based decision making.

Transformasi Data Driven Organization Transformation to a Data Driven Organization

Menjadi data-driven organization juga berarti menciptakan pola pikir di mana analitik berdasarkan data dianut oleh semua tingkatan organisasi sebagai dasar dari semua keputusan bisnis

Being a data-driven organization also means creating a mindset where data-driven analytics is embraced by all levels of the organization as the basis for all business decisions

Penerapan data driven organization sejatinya telah diamanatkan dalam penjelasan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan, dan analisis perbandingan antar negara (*cross countries studies*).

Dalam rangka mewujudkan data-driven decision-making di dalam organisasi, diperlukan integrasi pertukaran data sehingga data yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh organisasi secara maksimal melalui data analytics. Sebagian besar organisasi, termasuk pemerintahan, mengerti bahwa jika semua data yang ada di dalam proses bisnisnya dapat diintegrasikan, maka dapat menerapkan data analytics dan mendapatkan nilai insight yang signifikan dari data tersebut untuk meningkatkan value added proses bisnis. Karena itu, penting bagi suatu organisasi untuk bertransformasi menjadi *data-driven organization*. Menjadi *data-driven organization* juga berarti menciptakan pola pikir di mana analitik berdasarkan data dianut oleh semua tingkatan organisasi sebagai dasar dari semua keputusan bisnis.

The elucidation of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury mandates the building of a data driven organization. The elucidation states that government financial reports should produce financial statistics with reference to the Government Finance Statistics (GFS) Manual in meeting the needs for analysis of fiscal policies and condition, management, and cross-country studies.

In order to realize data-driven decision-making within the organization, it is necessary to integrate data exchange so that the available data can be utilized optimally through data analytics. Most organizations, including governments, understand that if all the available data from their business processes can be integrated, they can apply data analytics methods and gain significant insights to enhance value addition in their business processes. Consequently, it is important for an organization to transform into a data-driven organization. Being a data-driven organization also means creating a mindset where data-driven analytics is embraced by all levels of the organization as the basis for all business decisions.



Branding Output melalui Komunikasi Publik dan Publikasi

Output Branding through Public Communications and Publications

Branding atau penguatan identitas memiliki fungsi untuk membangun citra (*image building*) atau menciptakan pencitraan (*imagery*)

Branding or identity strengthening has the function of image building or creating a certain image (*imagery*)

Produk atau hasil kajian yang disusun oleh Kanwil DJPb sebagai RCE tentunya berisi rekomendasi dan solusi atas suatu permasalahan yang dibahas sehingga menjadi solusi bagi pengambil keputusan. Agar implementasi hasil RCE berjalan dengan baik, maka Komunikasi Publik dan Publikasi menjadi satu tahapan yang sangat penting. Mempertimbangkan fungsi komunikasi yang sangat penting maka training komunikasi publik yang efektif harus disiapkan untuk mendukung strategi komunikasi dan seluruh kegiatan implementasi RCE pada Kanwil DJPb.

The products or outcomes of studies compiled by DG Treasury regional offices as RCE obviously contain recommendations and solutions to problems under discussion, and therefore can provide solutions for decision makers. In order to ensure that RCE outcomes are well received, public communications and publications represent a very important aspect. Considering the high importance of the communication function, effective public communication training must be prepared to support the communication strategy against all RCE related activities at DG Treasury regional offices.

Branding atau penguatan identitas memiliki fungsi untuk membangun citra (*image building*) atau menciptakan pencitraan (*imagery*) tertentu di masyarakat umum, publik atau konsumen yang dituju akan keberadaan sebuah organisasi. Branding merupakan hal yang penting, karena hal tersebut terkait dengan bagaimana kita membangun karakteristik organisasi yang melekat pada *stakeholders*.

Branding merupakan hal yang penting untuk mengembangkan organisasi. Untuk itu perlu ada strategi komunikasi publik yang bisa kita gunakan juga untuk membangun *brand image*. Untuk dapat menjalankan strategi komunikasi publik berjalan dengan baik, maka kita harus mampu memetakan berada dalam jenis branding mana kegiatan yang kita lakukan.

Branding or identity strengthening has the function of image building or creating a certain image (*imagery*) in the minds of the general public, public or consumers for highlighting the existence of an organization.

Branding is important as it is related to building organizational characteristics that stick in the minds of stakeholders. Branding is also important for the development of an organization. In this regard, a public communications strategy is required for developing a brand image. To ensure that this strategy works well, the organization needs to be able to map out the type of branding that it would be doing.





Layanan KPPN Filial dan KPPN Mobile

KPPN Filial Service and KPPN Mobile



Selain layanan pada kantor yang dedicated, DJPb juga memiliki layanan *front office* KPPN yang ditempatkan di luar KPPN, yang disebut Layanan Filial KPPN atau KPPN Filial. Layanan Filial diberikan dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan dan dilaksanakan oleh Satuan Tugas berdasarkan penugasan khusus dari Kepala KPPN.

Layanan Filial KPPN bertujuan memberikan pelayanan terbaik

kepada pemangku kepentingan pada daerah-daerah yang memiliki kendala geografis signifikan. Layanan ini menghadirkan layanan *front office* KPPN pada lokasi dan wilayah kerja yang telah ditetapkan. Sejak dicanangkan pada tahun 2011 melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-09/PB/2010 dan bertahap sampai dengan saat ini, DJPb telah mengelola 17 Layanan Filial yang dioperasikan oleh 15 KPPN.

Besides service delivery through dedicated offices, DG Treasury also offers the KPPN front office service that are located away from the KPPN office, which is called the KPPN Filial Service. This facility is provided to improve and bring services closer to stakeholders and are provided by a Task Force based on a special assignment from the Head of KPPN.

The KPPN Filial Service aims to provide the best service to stakeholders in areas that have significant geographical constraints. Further, this facility provides KPPN front office services at predetermined locations and work areas. Since its inception in 2011 through the Director General of Treasury Regulation No. PER-09/PB/2010 and a phased growth until the present, DG Treasury manages 17 filial services as operated by 15 KPPN.



Nomor Number	Filial	KPPN Induk Parent KPPN	Nomor Number	Filial	KPPN Induk Parent KPPN
1	Sabang	Banda Aceh	10	Teluk Bintuni	Manokwari
2	Sigli	Banda Aceh	11	Teluk Wondama	Manokwari
3	Sinabang	Meulaboh	12	Morowali	Poso
4	Ranai	Tanjung Pinang	13	Maybrat	Sorong
5	Muara Teweh	Buntok	14	Kaimana	Fakfak
6	Wakatobi	Bau-bau	15	Malinau	Tanjung Selor
7	Alor	Kupang	16	Sendawar	Samarinda
8	Namlea	Ambon	17	Tiakur	Saumlaki
9	Soffi	Ternate			

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, layanan Filial KPPN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelayanan penerimaan SPM beserta dokumen pendukung dan ADK;
2. Pengujian SPM secara substantif dan formal;
3. Pemindaian SPM beserta dokumen pendukung;
4. Konfirmasi surat setoran penerimaan;
5. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan;
6. Pelayanan *Customer Service Office*.

Sedangkan layanan KPPN Mobile pada dasarnya sama dengan layanan *front office* KPPN pada umumnya. Perbedaannya adalah dilakukan dengan cara “jemput bola” SPM ke tempat yang lebih dekat dengan satker, sehingga satker akan menghemat waktu perjalanan menuju KPPN. Terdapat 7 layanan *mobile* yang sudah dibentuk pada Kanwil DJPb, yaitu Kanwil DJPb:

1. Provinsi Sumatera Utara;
2. Provinsi Banten;
3. Provinsi DKI Jakarta;
4. Provinsi Jawa Barat;
5. Provinsi Jawa Tengah;
6. Provinsi Jawa Timur;
7. Provinsi Bali

In the provision of services, the KPPN Filial Service performs the following functions:

1. Pay Order (SPM) acceptance services along with supporting documents and computer data (ADK)
2. Substantive and formal examination of SPM
3. Scanning of SPM along with supporting documents
4. Confirmation of revenue payment slip
5. Reconciliation of financial statements
6. Customer Service Office.

Meanwhile, the KPPN Mobile Service is basically the same as KPPN front office service. The difference is that here KPPN are proactive in picking up the SPM at a location closer to work units, and so saving them time from having to travel to the KPPN office. Presently, 7 mobile service units have been established at the DG Treasury regional offices as follows DG Treasury Regional Office of :

1. North Sumatra Province;
2. Banten Province;
3. Jakarta Province;
4. West Java Province;
5. Central Java Province;
6. East Java Province;
7. Bali Province.



Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

Pengelolaan Manajemen Risiko Risk Management

Sampai dengan triwulan IV 2021, 14 risiko dari total 16 risiko yang perlu mitigasi telah berhasil diturunkan menjadi risiko yang berada di luar area penanganan.

As of Q4 2021, 14 out of 16 risks requiring mitigation were successfully downgraded to become those that did not require special handling

Dalam pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Kemenkeu, pada tahun 2021 ditetapkan 4 risiko tingkat Kemenkeu yang diturunkan ke DJPb yaitu: (i) tidak optimalnya remunerasi dan peningkatan belanja bunga utang; (ii) Temuan material atas LKPP dan LK BUN; (iii) Implementasi Sistem Digital Payment-Marketplace (DigiPay) tidak sesuai dengan target dan *timeline* yang telah ditetapkan; dan (iv) Tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BUN belum sesuai dengan rekomendasinya. Seluruh risiko yang diturunkan dari Kemenkeu-Wide ke Kemenkeu-One DJPb telah dimitigasi sehingga 2 risiko telah turun ke level rendah dan 1 risiko telah turun besaran risikonya.

Secara umum, risiko yang dikelola pada tingkat Kemenkeu-One DJPb di tahun 2021 mencapai 26 risiko mampu dikelola dengan baik. Sampai dengan triwulan IV 2021, 14 risiko dari total 16 risiko yang perlu mitigasi telah berhasil diturunkan menjadi risiko yang berada di luar area penanganan. Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergi dari masing-masing unit di DJPb untuk secara bersama-sama menekan level kemungkinan dan level dampak dari risiko.

Pengembangan simplifikasi proses bisnis manajemen risiko melalui aplikasi Internal Control and Risk Management (*Incrima*) telah dilaksanakan secara berkesinambungan melalui sinergi antara Bagian Kepatuhan Internal (KI) bersama Direktorat SITP. Aplikasi ini telah diterapkan oleh seluruh unit di lingkup DJPb dalam penyusunan profil dan pemantauan atas risiko secara daring.

With respect to risk management within the Ministry of Finance, in 2021 4 identified risks at the Ministry level were assigned to DG Treasury, namely: (i) less than optimum remuneration and an increase in debt interest spending; (ii) material findings on LKPP and LK BUN; (iii) Non-alignment of the Digital Payment-Marketplace (DigiPay) System with the established targets and timelines; and (iv) discrepancies in the follow-up material for BPK's recommendations on LK BUN with its recommendations. All risks passed down from the Ministry of Finance-Wide to DG Treasury were properly mitigated so that 2 risks have been lessened to the low level while 1 other risk has decreased in order of magnitude.

In general, the 26 risks managed at the Ministry of Finance-One DG Treasury level in 2021 were appropriately supervised. As of Q4 2021, 14 out of 16 risks requiring mitigation were successfully downgraded to become those that did not require special handling. This achievement was the result of collaboration and synergy between DG Treasury units to jointly reduce the potential and level of impact of these risks.

Furthermore, the continuing simplification of risk management business processes through the Internal Control and Risk Management (*Incrima*) application has been going on via the fostering of synergies between the Internal Compliance Division and the SITP Directorate. This application has now been implemented by all DG Treasury units in preparing risk profiles and conducting online risk monitoring.



Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Establishment of an Integrity Zone towards WBK/WBBM

DJPb menjadi unit Eselon I dengan jumlah unit kerja berpredikat WBK dan WBBM terbanyak

DG Treasury as an Echelon I unit within the Ministry of Finance with the highest number of work units predicated as WBK and WBBM

Peran aktif DJPb dalam menegakan Reformasi Birokrasi salah satunya melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Program ini merupakan upaya penciptaan island of integrity melalui pengembangan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Komitmen DJPb terhadap program Pembangunan ZI diwujudkan melalui penyertaan program ZI dalam milestones DJPb tahun 2019-2024 dan upaya akselerasi serta asistensi secara intensif kepada seluruh unit kerja.

Hasil dari upaya aktif tersebut, mengantarkan DJPb menjadi unit Eselon I dengan jumlah unit kerja berpredikat WBK dan WBBM terbanyak dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut yaitu 2020 dan 2021 di lingkup Kemenkeu. Adapun sampai dengan tahun 2021, jumlah unit yang meraih predikat WBK/WBBM sebanyak 220 unit kerja yang terdiri dari 191 unit berpredikat WBK dan 29 unit berpredikat WBBM.

Progress Implementasi Integrity Framework Progress on Integrity Framework Implementation

Integrity Framework (IF) merupakan suatu pedoman yang berisi 10 (sepuluh) instrumen yang merupakan intisari dalam pengelolaan integritas yang digunakan bagi *first-line* (manajemen), *second-line* (Unit Kepatuhan Internal) dan seluruh pegawai dalam menjalankan langkah-langkah pencegahan korupsi atau penyalahgunaan wewenang, monitoring dan pengendalian serta penindakan penyalahgunaan secara berkelanjutan. Mengacu pada road map

Among the active endeavors of DG Treasury for upholding the Bureaucratic Reform initiative is by establishing an Integrity Zone (ZI) towards a Corruption-Free Area (WBK) and Clean Bureaucracy Service Area (WBBM). This program is an effort to create an island of integrity through the development of a bureaucratic work culture that is anti-corruption, has high performance, and provides high-quality public services. DG Treasury's commitment to the ZI Development program is realized through the inclusion of the ZI program in the DG Treasury milestones 2019-2024 and intensive acceleration and assistance to all work units.

The results of these active efforts have made DG Treasury as an Echelon I unit within the Ministry of Finance with the highest number of work units predicated as WBK and WBBM in 2 consecutive years, namely 2020 and 2021. As of 2021, a total of 220 work units had achieved the WBK/WBBM predicate, consisting of 191 units with the WBK predicate and 29 units with the WBBM predicate.

The Integrity Framework (IF) is a guideline of 10 instruments as the essence of integrity management, which is used for the first-line (management), second-line (Internal Compliance Unit) and all employees in carrying out measures to prevent corruption or abuse of authority, monitoring and control and prosecution of abuse on an ongoing basis. With reference to the Human Resources (HR) 2019-2030 road map, IF implementation in 2021 entered the further development



Sumber Daya Manusia (SDM) 2019-2030, pada tahun 2021 implementasi IF memasuki tahapan pengembangan (*development*) lanjutan melalui upaya internalisasi dan implementasi awal nilai yang terkandung dalam *Integrity Framework* (IF) yang telah dituangkan dalam Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-253/PB/2020.

Adapun capaian terkait IF sampai dengan tahun 2021 adalah keberhasilan dalam penyelenggaraan Training of Trainee (ToT) IF kepada + 266 pejabat di lingkup DJPb yang terbagi dalam 8 (delapan) *batch*. Tindak lanjut pascapelatihan, setiap peserta diwajibkan menjadi influencer dalam menyebarkan nilai-nilai IF di unit kerjanya. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat internalisasi dan uji kompetensi pada seluruh pejabat dan pegawai di lingkup DJPb telah mencapai > 97%.

Progress Piloting Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016

Progress of Piloting the ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management System

ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 37001:2016 merupakan standar yang merefleksikan tata kelola internasional dan dapat digunakan dalam berbagai yurisdiksi baik oleh sektor profit maupun pemerintahan. Standar ini membantu organisasi untuk menerapkan rancangan yang wajar dan proporsional dalam mencegah, mendeteksi serta menindaklanjuti risiko penyuapan. Komitmen penerapan ISO SMAP telah dituangkan dalam milestone DJPb tahun 2019 s.d. 2024 dan telah dimuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sekretariat DJPb tahun 2021.

stage through internalization and initial implementation of the values contained in the Integrity Framework (IF), as stated in the Director General of Treasury Decree No. KEP- 253/PB/2020.

In terms of progress until 2021, the IF Training of Trainees (ToT) activity was organized and attended by approximately 266 officials within DG Treasury, divided into 8 batches. Following the training, each participant is required to become an influencer in disseminating IF values in their work units. Based on the evaluation outcomes, the level of internalization and competency testing for all officials and employees within DG Treasury has reached above 97%.

The ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) is a standard for international governance that can be used in various jurisdictions, be it the for-profit sector as well as governments. This standard helps organizations to implement a reasonable and proportionate plan to prevent, detect and act on bribery risks. The commitment to implementing ISO SMAP is contained in the DG Treasury milestones 2019-2024 and has been included in the Key Performance Indicators (KPI) for 2021 at the DG Treasury Secretariat.



DJPb menjadi unit pioner yang telah berhasil menyelenggarakan sertifikasi ISO SMAP di lingkup Kementerian Keuangan

DG Treasury as a pioneer in successfully conducting ISO SMAP certification within the Ministry of Finance

Implementasi ISO SMAP di DJPb diinisiasi melalui berbagai kegiatan salah satunya piloting ISO SMAP kepada unit sampel yaitu KPPN Madiun dan penyusunan rancangan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Pedoman ISO SMAP lingkup DJPb. Adapun pada tahun 2021, DJPb telah berhasil memiliki unit yang telah tersertifikasi ISO SMAP yaitu KPPN Madiun yang sekaligus atas capaian tersebut mengantarkan DJPb menjadi unit pionir yang telah berhasil menyelenggarakan sertifikasi ISO SMAP di lingkup Kementerian Keuangan.

ISO SMAP implementation at DG Treasury was initiated through various activities, among them through ISO SMAP piloting at a sample unit, namely KPPN Madiun. In parallel, the draft Director General of Treasury Decree concerning ISO SMAP Guidelines within the scope of DG Treasury has been prepared. Meanwhile, in 2021 KPPN Madiun was successfully certified as ISO SMAP, which at the same time made DG Treasury as a pioneer in successfully conducting ISO SMAP certification within the Ministry of Finance.

Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Internal Monitoring of Internal Controls

...di mana pada tahun 2021 kesimpulan efektivitas pengendalian internal DJPb adalah efektif

...where in 2021 it was determined that internal control within DG Treasury has been 'effective'

Pada tahun 2021 dilaksanakan Evaluasi Pengendalian Internal Tingkat Entitas (EPITE) yang dilakukan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan EPITE dilakukan menggunakan beberapa teknik yaitu Reviu Dokumen, Wawancara, Survei, dan Observasi pada Kantor Pusat dan kantor vertikal DJPb. Selain digunakan untuk mengetahui pengendalian intern secara umum, hasil EPITE juga digunakan untuk memantau pengendalian organisasi dalam tingkat yang lebih detail atau yang lebih dikenal dengan PPITA (Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas).

Pada Kantor Pusat DJPb, pemantauan PPITA dilakukan terhadap proses bisnis utama pada Sekretariat dan Direktorat. Sedangkan pada kantor vertikal pemantauan PPITA lebih diarahkan untuk memantau kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Muara dari EPITE dan PPITA adalah kesimpulan efektivitas pengendalian internal, di mana pada tahun 2021 kesimpulan efektivitas pengendalian internal DJPb adalah efektif.

In 2021, an Entity Level Internal Control Evaluation (EPITE) was conducted to assess the effectiveness of entity level internal controls in creating an environment that supports the achievement of organizational goals. The EPITE was conducted using several techniques, namely document review, interviews, surveys, and observations at Head Office and Treasury vertical offices. Besides ascertaining internal control in general, EPITE outcomes were also used to monitor organizational control at a more detailed level or better known as PPITA (Activity Level Internal Control).

At the DG Treasury Head Office, PPITA monitoring was carried out on the main business processes of the Secretariat and Directorates, while at vertical offices PPITA monitoring was more against the procurement of goods and services.

The end objective of EPITE and PPITA is to determine the effectiveness of internal control, where in 2021 it was determined that internal control within DG Treasury has been 'effective'.

Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan Monitoring of Internal Controls Over Financial Reporting

Pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada 2021 telah efektif dan memadai

Internal control within DG Treasury has been 'effective'

Pemantauan pengendalian internal tidak hanya dilakukan terhadap proses bisnis yang dianggap penting saja, akan tetapi juga dilakukan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pemantauan pengendalian internal atas pelaporan keuangan (PIPK) diperlukan sebagai dasar klausul pimpinan yang menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan telah memperhatikan pengendalian internal yang memadai.

Penilaian Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan pada tahun 2021 dilaksanakan pada laporan keuangan BA 015 (Kemenkeu sebagai satker), BA BUN (Bendahara Umum Negara), DAK Fisik dan Dana Desa. Beberapa hal yang masuk dalam tahapan PIPK adalah penilaian terhadap risk control matriks, penilaian pengendalian intern tingkat entitas, penilaian pengendalian utama teknologi informasi, dan penilaian pengendalian atas atribut yang ada. Berdasarkan penilaian tersebut, disimpulkan bahwa pengendalian internal atas pelaporan keuangan pada 2021 telah efektif dan memadai.

In 2021, an Entity Level Internal Control Evaluation (EPITE) was conducted to assess the effectiveness of entity level internal controls in creating an environment that supports the achievement of organizational goals. The EPITE was conducted using several techniques, namely document review, interviews, surveys, and observations at Head Office and Treasury vertical offices. Besides ascertaining internal control in general, EPITE outcomes were also used to monitor organizational control at a more detailed level or better known as PPITA (Activity Level Internal Control).

At the DG Treasury Head Office, PPITA monitoring was carried out on the main business processes of the Secretariat and Directorates, while at vertical offices PPITA monitoring was more against the procurement of goods and services. The end objective of EPITE and PPITA is to determine the effectiveness of internal control, where in 2021 it was determined that internal control within DG Treasury has been 'effective'.

Pelaksanaan Survei Persepsi Integritas Implementation of the Integrity Perception Survey

Dalam rangka mengetahui tingkat persepsi integritas pada Kemenkeu, Inspektur Jenderal Kemenkeu telah mengadakan Survei Penilaian Integritas terhadap semua unit eselon I lingkup Kemenkeu pada periode bulan September sampai dengan bulan Desember 2021.

Berdasarkan hasil survei tersebut, DJPb merupakan unit eselon I dengan indeks persepsi integritas

In order to determine the integrity perception at the Ministry of Finance, the Ministry's Inspector General conducted an Integrity Assessment Survey of all echelon I units during the period of September to December 2021.

Based on this survey, DG Treasury was the echelon I unit having the highest integrity perception index with a score

DJPb merupakan unit eselon I dengan indeks persepsi integritas tertinggi dengan indeks 95,82

DG Treasury was the echelon I unit having the highest integrity perception index with a score of 95.82

tertinggi dengan indeks 95,82. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum segenap jajaran DJPb telah menunjukkan integritas yang sangat baik dalam hal kinerja layanan, baik layanan internal maupun layanan eksternal/mitra kerja.

Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal Internal Compliance Unit Effectiveness Index

Hasil akhir sebesar 90,82% dari target tahun 2021 sebesar 75%

The result was a score of 90.82% from the 2021 target of 75%

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan penilaian indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal di DJPb oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk menilai kinerja Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada DJPb. Ada dua komponen utama penilaian indeks efektivitas UKI yaitu komponen pengungkit (dukungan SDM, Informasi, dan Komunikasi, EPITE, PPITA, penerapan kode etik, penyusunan dan pemanfaatan FRS, dan penyusunan profil pegawai) dan komponen hasil (jumlah pengaduan masyarakat, jumlah OTT, kepuasan stakeholder, dan hasil survei penilaian integritas).

Penilaian tersebut dilakukan pada lima unit sampel yaitu UKI-E1 DJPb, UKI-W Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, UKI-W Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, UKI-P KPPN Surabaya II, dan UKI-P KPPN Ternate. Dari hasil penilaian Itjen, didapatkan hasil akhir sebesar 90,82% dari target tahun 2021 sebesar 75%.

of 95.82. This achievement shows that in general, all DG Treasury staff have demonstrated their integrity in terms of service performance, both on internal services and external services with work partners.

In 2021, the Internal Compliance Unit's effectiveness index was assessed by the Ministry's Inspectorate General, which was meant to assess the performance of DG Treasury's Internal Compliance Unit (UKI). There are two main components to the effectiveness index assessment, namely the lever component (HR support, information, communications, EPITE, PPITA, code of conduct application, preparation and use of FRS, and preparation of employee profiles) and the outcome component (number of public complaints, number of red-handed operations (OTT), stakeholder satisfaction, and integrity assessment survey results).

The assessment was performed against five sample units, namely DG Treasury UKI-E1, UKI-W of Treasury Regional Office of West Sumatra Province, UKI-W of Treasury Regional Office of West Sulawesi Province, UKI-P of KPPN Surabaya II, and UKI-P of KPPN Ternate. Based on the IG's assessment, the result was a score of 90.82% from the 2021 target of 75%.

Evaluasi Tindak Lanjut Audit Evaluation of Audit Follow-Ups

Rekomendasi yang telah berstatus Tuntas/Closed sejumlah 2.353 rekomendasi (98,53%)

Overall, 2,353 (98.53%) recommendations have been put in the 'closed' category

Sampai dengan akhir Tahun 2021 telah dilakukan tindak lanjut hasil audit/pemeriksaan aparat pengawasan fungsional kepada unit kerja DJPb pada kantor pusat maupun vertikal terhadap temuan Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Tindak lanjut tersebut dilaksanakan melalui aplikasi Team Central dengan seluruh rekomendasi dari Inspektorat Jenderal yang berjumlah 2.388 rekomendasi.

Rekomendasi yang telah berstatus Tuntas/Closed sejumlah 2.353 rekomendasi (98,53%), berstatus Dalam Proses sejumlah 34 rekomendasi (1,43%), dan berstatus Sudah Ditindaklanjuti namun belum dinyatakan selesai oleh Inspektorat Jenderal sejumlah 1 rekomendasi (0,04%). Pada tahun 2021 juga telah dilakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan lama (Temuan berusia di atas 5 tahun) sesuai dengan milestone Setditjen tahun 2021-2022. Adapun 5 rekomendasi temuan lama yang telah diselesaikan di tahun 2021 yaitu:

- Laporan Hasil Audit Belanja Modal pada Kantor Pusat DJPBN TA 2011
- Laporan Hasil Audit Belanja Modal pada Kantor Pusat DJPB Tahun Anggaran 2012
- Laporan Hasil Audit Compliance Penyelesaian Retur SP2D-Utang Kepada Pihak Ketiga yang Berasal dari Retur SP2D pada KPPN Jakarta III Tahun 2015
- Laporan Hasil Audit Compliance Penyelesaian Retur SP2D/Utang Kepada Pihak Ketiga yang Berasal dari Retur SP2D pada KPPN Jakarta VII Tahun 2015
- Laporan Monitoring Penyerapan Anggaran TW 3 dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di Lingkungan Kemenkeu Tahun 2016.

As of end-2021, various follow-ups had been conducted by functional supervisory officials against work units at the Treasury head office and vertical institutions. These follow-ups were based on the audit findings of the Ministry's Inspectorate General. In this context, the follow-ups were executed through the Team Central application against the Inspectorate General's recommendations, numbering 2,388 in all.

Overall, 2,353 (98.53%) recommendations have been put in the 'closed' category, 34 recommendations (1.43%) are 'under process', while 1 other recommendation (0.04%) is in the 'followed up but not declared complete by the Inspectorate General' category. During 2021, follow-ups were also conducted against older recommendations (findings from more than 5 years prior) in accordance with the DG Treasury Secretariat milestones for 2021-2022. The 5 recommendations against previous findings that were resolved in 2021 are as follows:

- Capital Expenditure Audit Report at the Treasury Head Office for FY 2011
- Capital Expenditure Audit Report at The Treasury Head Office for FY 2012
- Report on Compliance Audit Outcomes for Settlement of SP2D-Debt Returns to Third Parties Derived from SP2D Returns at KPPN Jakarta III in 2015
- Report on Compliance Audit Outcomes for Settlement of SP2D Returns/Debts to Third Parties Derived from SP2D Returns at KPPN Jakarta VII in 2015
- Monitoring Report on Q3 Budget Execution and Resolution of Compensation Claims (TGR) within the Ministry of Finance in 2016



Pengelolaan Pengaduan Complaints Management

Dari 115 pengaduan yang diterima tersebut, 110 pengaduan telah selesai ditindaklanjuti

Of the 115 complaints, 110 have been successfully resolved

DJPb telah menggunakan aplikasi berbasis web dalam mengelola pengaduan yaitu melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan (SIPANDU) yang juga telah dikembangkan versi mobile-nya melalui platform Android OS. Laporan pengaduan yang telah diterima selama tahun 2021 adalah sebanyak 115 pengaduan yang terdiri dari 40 aduan terkait pelayanan, 28 terkait SDM/kode etik, dan 47 pengaduan lain-lain.

Dari 115 pengaduan yang diterima tersebut, 110 pengaduan telah selesai ditindaklanjuti. Di antara pengaduan yang diterima oleh Ditjen Perbendaharaan, 38 pengaduan disampaikan oleh pelapor melalui saluran SIPANDU, 2 pengaduan disampaikan pelapor melalui surat, 33 pengaduan merupakan pelimpahan dari WiSe (Whistleblowing System) Kemenkeu, 7 pengaduan merupakan pelimpahan dari SP4N-Lapor! Kementerian PAN-RB, dan 35 pengaduan diterima melalui Hai-DJPb/surel.

DG Treasury uses a web-based application for managing complaints, namely the Complaint Management Information System (SIPANDU) application. Furthermore, a mobile version through the Android OS platform has also been developed. During 2021, a total of 115 complaints were received, comprising 40 complaints related to services, 28 related to HR/code of conduct issues, and 47 others of varying nature.

Of the 115 complaints, 110 have been successfully resolved. Among the complaints received by the Directorate General of Treasury, 38 were submitted by complainants through the SIPANDU channel, another 2 were sent via letter, 33 were recorded by the MoF WiSe (Whistleblowing System), 7 were delegated from PAN-RB Ministry's SP4N-Lapor! and 35 others were received via Hai-DJPb/email.

Keterbukaan Informasi Publik/Kehumasan Public Information Openness/ Public Relations

Penerbitan Siaran Pers / Keterangan Pers Issuance of Press Release/ Press Statement

Dalam rangka publikasi atas informasi penting terkait kegiatan dan berita tingkat nasional maupun kantor vertikal DJPb, pada tahun 2021 telah diterbitkan siaran pers/keterangan pers yang berkaitan dengan tugas fungsi DJPb sebanyak 10 buah dan dirilis pada situs resmi Kementerian Keuangan dan DJPb.

In the context of publishing important information on activities and news at the national level and DG Treasury vertical offices, during 2021 10 press releases were issued in relation to the organization's duties and functions on the official websites of the Ministry of Finance and DG Treasury.

Nomor Number	Judul Siaran Pers Press Release Headline	KPPN Induk Parent KPPN
1	Strategi Pelayanan BLU di Tengah Pandemi untuk Pulihkan Ekonomi BLU Service Strategy amid the Pandemic to Restore the Economy	19 Maret 2021
2	Raih WTP Lima Kali Berturut-Turut: Komitmen Pemerintah Mengelola APBN secara Transparan dan Akuntabel Tetap Konsisten di Masa Pandemi Covid-19 WTP Achieving WTP Five Times in a row: The Government's Commitment to Manage the State Budget in a Transparent and Accountable Way Remains Consistent During the Covid-19 Pandemic	22 Juni 2021
3	Penyerahan LKPP Tahun 2020 (Unaudited) dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2020 Submission of LKPP 2020 (Unaudited) and Entry Meeting on LKPP 2020	31 Maret 2021
4	Menkeu Tetapkan Penyesuaian Tarif Pungutan Ekspor Produk Kelapa Sawit Minister of Finance Sets Tariffs for Export Levy on Palm Oil Products	29 Juni 2021
5	Pemerintah Telah Laporkan Anggaran PC PEN Secara Transparan dan Akuntabel Melalui LKPP TA 2020 (Audited) Transparent and Accountable Reporting on PC PEN Budget by the Government through LKPP FY 2020 (Audited)	9 September 2021
6	Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2021 Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi National Working Meeting on Accounting and Government Financial Reporting 2021 for Reviving the Economy, Restoring the Country, and Together Facing the Pandemic	14 September 2021
7	Kemenkeu Ciptakan Platform Pembayaran Pemerintah yang Terpercaya, Andal dan Aman Bagi Masyarakat Ministry of Finance Creates a Trusted, Reliable and Safe Government Payment Platform for the Community	5 November 2021
8	BLU EXPO 2021: Sinergi BLU Pulihkan Ekonomi BLU EXPO 2021: Fostering BLU Synergies for Restoring the Economy	16 November 2021
9	Menkeu Pantau Proses Kelancaran Pencairan Anggaran Belanja APBN 2021 Minister of Finance Monitors the Smooth Disbursement of Funds from the State Budget 2021	27 Desember 2021
10	Menkeu Pastikan Akhir Tahun Anggaran 2021 Berjalan Baik Minister of Finance Ensures that End of FY 2021 Will Run Well	31 Desember 2021

Publikasi Situs Resmi dan Media Sosial DJPb

Publications on DG Treasury Official Website and Social Media Sites

Situs resmi www.djpb.kemenkeu.go.id merupakan salah satu kanal komunikasi publik yang penting dalam fungsi kehumasan DJPb yang diresmikan pada 01 September 2015. Situs resmi ini telah memenuhi ketentuan standar tampilan situs yang ditetapkan melalui KMK No.50/KMK.01/2014 serta memiliki fitur publikasi unggulan yaitu:

1. Himpunan peraturan, keputusan, surat, dan pengumuman
2. Data realisasi APBN periodik
3. Himpunan installer aplikasi pengelola keuangan
4. Berita terbaru baik tingkat nasional maupun regional
5. Tautan berbagai informasi atau opini seputar unit organisasi
6. Overview layanan unggulan DJPb, dan
7. Helpdesk Terpadu HAI-DJPBN

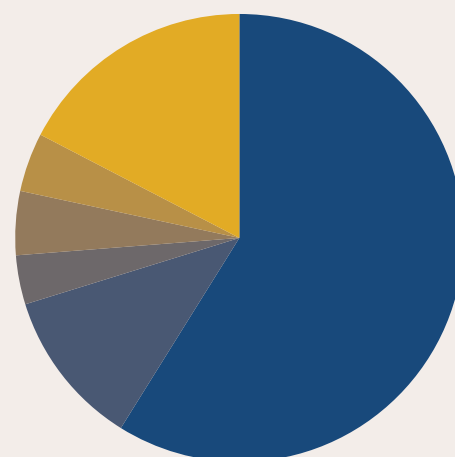
Dalam rangka penyeragaman tampilan situs seluruh unit kerja sesuai amanat KMK No. 50/KMK.01/2014 tentang Standar Tampilan Situs di Lingkungan Kementerian Keuangan, sejak tahun 2016 DJPb telah membangun *microweb* untuk Kanwil DJPb dan landing page KPPN yang terintegrasi penuh dalam domain situs resmi www.djpb.kemenkeu.go.id.

The official website at www.djpb.kemenkeu.go.id is one of the important public communication channels for executing the DG Treasury's public relations function, which was launched on September 1, 2015. The official site has fulfilled all web design standards as stipulated in Minister of Finance Decree No. 50/KMK.01/2014 and has exceptional publication features, namely:

1. Compilation of regulations, decrees, notices, and announcements
2. Periodic State Budget realization data
3. Set of financial manager application installers
4. Latest news at national and regional levels
5. Links to various information and profiles of organizational units
6. Overview of DG Treasury's superior services, and
7. Integrated HAI-DJPBN Helpdesk

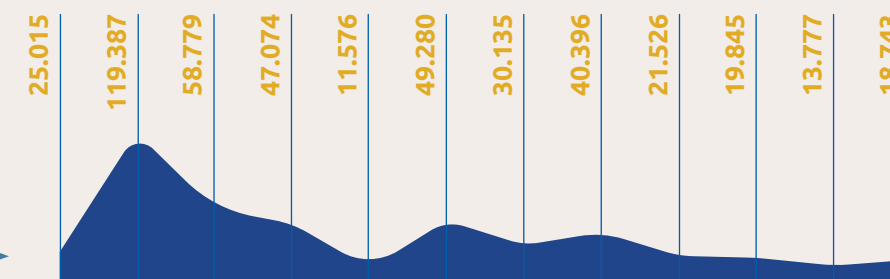
As mandated by Minister of Finance Decree No. 50/KMK.01/2014 concerning Website Design Standards in the Ministry of Finance, all work units have adopted a uniform website appearance. In this context, since 2016 DG Treasury had developed a *microweb* for its regional offices and a fully integrated KPPN landing page in its official website domain of www.djpb.kemenkeu.go.id.

Jenis Post pada Portal DJPb Types of Posts on the DJPb Portal



Pergerakan Jumlah Pengunjung Portal DJPb selama Jan - Des 2021

Movement of the Number of Visitors to the DJPb Portal during Jan - Dec 2021



Jumlah Post pada Portal DJPb Number of Posts on the DJPb Portal

Bulan Month	Berita News	Aplikasi Application	Siaran Broadcast	Opini Opinion	Realisasi Realization	Peraturan Regulation
1	13	4	0	0	0	2
2	12	7	0	1	1	6
3	18	3	2	1	1	5
4	11	2	0	1	1	3
5	11	1	0	0	1	1
6	17	3	2	0	2	0
7	8	4	0	2	1	11
8	6	2	0	0	1	3
9	11	2	2	0	1	3
10	12	1	0	1	1	9
11	20	2	2	3	1	1
12	27	1	2	4	1	5

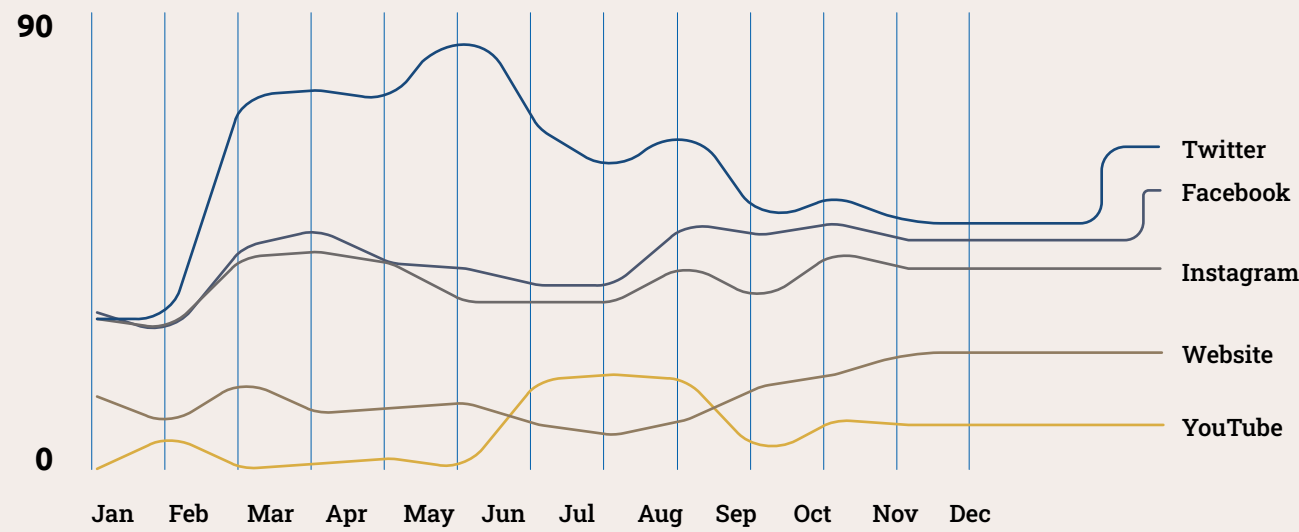
Perubahan paradigma dalam hubungan kemasyarakatan (*public relation*) yang lebih mengarah pada pembangunan trust dengan masyarakat yang lebih proaktif serta perkembangan teknologi internet, menjadikan perlunya peran kehumasan DJPb untuk turut serta aktif dalam berbagai media sosial. Menjawab tantangan tersebut, mulai tahun 2015 diluncurkan akun resmi DJPb pada beberapa media sosial seperti:

1. Twitter : @DJPBNKemenkeuRI
2. Facebook: DJPb Kemenkeu RI
3. Youtube: DJPb Kemenkeu RI
4. Instagram: @ditjenperbendaharaan

The shift in the public relations paradigm that is becoming more and more oriented towards building trust with a more proactive society amid developments in internet technology has required the public relations role within DG Treasury to be an active participant in various social media platforms. Responding to these challenges, starting in 2015 the official DG Treasury account was launched on several social media platforms as per the following:

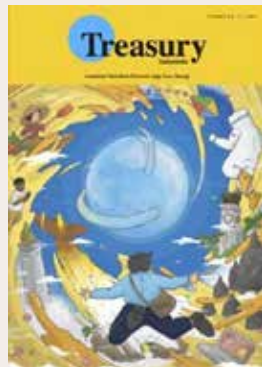
1. Twitter: @DJPBNKemenkeuRI
2. Facebook: DJPb Kemenkeu RI
3. Youtube: DJPb Kemenkeu RI
4. Instagram: @ditjenperbendaharaan

Kunjungan per Jenis Media Sosial Visits by Type of Social Media



Penerbitan Media Cetak Resmi DJPb DG Treasury Official Print Media

Majalah Treasury Indonesia



Majalah Treasury Indonesia (MTI) Terbitan I /2021

Pada penerbitan pertama tahun 2020, MTI mengangkat tema “Akselerasi Pemulihan Ekonomi, Jaga Terus Sinergi”. Tema ini terkait dengan kebijakan fiskal ekspansif yang diambil pemerintah, melalui stimulus ekonomi yang komprehensif dengan program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pun dijalankan.

Treasury Magazine Indonesia

Treasury Indonesia Magazine (MTI) Issue I/ 2021

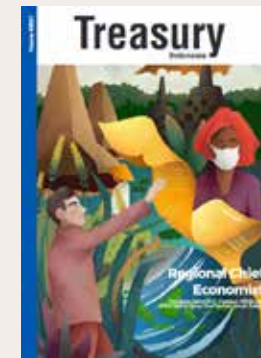
In its first publication for 2021, MTI took up the theme of “Accelerating Economic Recovery, Maintaining Synergies”. This theme is related to the expansionary fiscal policy taken by the government, which involves a comprehensive economic stimulus for handling the Covid-19 pandemic and initiating the National Economic Recovery (PEN) program.

Majalah Treasury Indonesia (MTI) Terbitan II / 2021



Pada terbitan kedua ini, MTI mengangkat tema “Pandemi Picu Efek Digitalisasi”. Proses bisnis berbasis digital diharapkan membantu memastikan pelaksanaan tugas dalam mengawal APBN dilaksanakan dengan pruden dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menjadi lebih akuntabel.

Majalah Treasury Indonesia (MTI) Terbitan III/2021



Tahun ini posisi Kanwil DJPb diperkuat lagi melalui peran *Regional Chief Economist (RCE)*. Aktivitas dan implementasi RCE telah dilakukan oleh Kanwil, baik melalui penajaman Kajian Fiskal Regional (KFR), Implementasi Assets & Liabilities Committee (ALCo) di tingkat regional, serta Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN) di daerah.

Majalah Treasury Indonesia (MTI) Terbitan IV/2021



Terbitan terakhir MTI tahun 2021 mengusung tema BLU Bersinergi Pulihkan Ekonomi. Sajian ini akan mengulas berbagai inovasi dan sinergi yang telah dilakukan oleh BLU, sekaligus peranan DJPb yang mendapatkan mandat untuk menjalankan fungsi perumus kebijakan dan pembina dalam pengelolaan keuangan BLU.

Treasury Indonesia Magazine (MTI) Issue II/ 2021

For the year’s second edition, MTI highlighted the theme of “Pandemic Triggers the Digitization Effect”. Digital-based business processes are expected to ensure that the various tasks related to safeguarding State Budget execution are carried out prudently and responsibly in accordance with applicable regulations, thereby making the process more accountable.

Treasury Indonesia Magazine (MTI) Issue III/ 2021

For the year, the position of DG Treasury regional offices has been further strengthened by the role of Regional Chief Economist (RCE). In this regard, RCE activities and functions have been performed by the regional Offices in terms of honing the regional fiscal studies (KFR), running the Assets & Liabilities Committee (ALCo) at the regional level, and the State Finance Management Coordination Forum (FKPKN) in the regions.

Treasury Indonesia Magazine (MTI) Issue IV/ 2021

The final MTI edition for 2021 focused on the theme of “Fostering BLU Synergies to Restore the Economy”. This edition presented a deep dive on the various innovations and synergies conducted by public service agencies (BLU), and on the role of DG Treasury that is mandated to formulate policies and supervise BLU financial management.



Laporan Tahunan DJPb 2020 DG Treasury Annual Report 2020



Laporan Tahunan (Annual Report) DJPb Tahun 2020 terbit dengan mengusung tema "Pulihkan Asa Kuatkan Bangsa". Penyusunan Laporan Tahunan 2020 bertujuan untuk memenuhi asas transparansi dan keterbukaan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai media penyampaian informasi dan dokumentasi bagi pemangku kepentingan DJPb.

The DG Treasury Annual Report 2020 was published under the theme of "Restoring Hope to Strengthen the Nation". The Annual Report 2020 was prepared in fulfillment of the principles of transparency and openness as accountability over activities undertaken and is a means of providing information and documentation to DG Treasury stakeholders.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Information Management and Documentation



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJPb dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK No. 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaannya, Sekretaris DJPb selaku PPID DJPb mendapat permintaan data/informasi baik secara langsung melalui surat, surat elektronik, telepon, maupun penerusan permintaan data dari PPID Kementerian Keuangan.

The Information and Documentation Management Officer (PPID) of the Directorate General of Treasury was established based on the mandate of Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness and Minister of Finance Regulation No. 132/PMK.01/2012 concerning Guidelines for Public Information Services in the Ministry of Finance. With respect to implementation, the Secretary of DG Treasury acts as the DG Treasury PPID and receives requests for data/information directly through letters, e-mails, telephone, as well as forwarded requests from the Ministry of Finance PPID.

Pada tahun 2021, PPID DJPb kembali memperoleh penghargaan sebagai empat PPID Tingkat I di Kementerian Keuangan dengan Kategori Informatif. Prestasi ini diberikan karena memiliki tidak hanya kreasi positif tetapi juga inovasi yang terus dikembangkan. DJPb mengembangkan inovasi aplikasi e-PPID DJPb yang bertujuan mempercepat waktu penyelesaian permohonan informasi sehingga meraih penghargaan tersebut.

In 2021, the DG Treasury PPID was again awarded for four top PPID Level I at the Ministry of Finance in the Informative Category. This achievement was given not only for positive creations but also for developing continuous innovations. In this regard, DG Treasury has developed an innovative e-PPID application to speed up the resolution time of information requests, which has ultimately resulted in winning the award.

REKAPITULASI PERMINTAAN PPID DJPb 2021 Recap of DG Treasury PPID Requests in 2021

Bulan	PPID Kemenkeu	PPID Tk I	PPID Tk II	PPID Tk III	Total
Jan	1	2	0	4	7
Feb	1	0	0	8	9
Mar	0	3	4	0	7
Apr	2	3	0	12	17
Mei	1	3	0	0	4
Jun	0	1	3	0	4
Jul	1	3	0	1	5
Agt	0	2	0	0	2
Sep	0	4	0	0	4
Okt	2	5	0	3	10
Nov	0	3	0	1	4
Des	0	1	0	0	1
Total	8	30	7	29	74

Layanan Perpustakaan Library Services

Perpustakaan DJPb mempunyai 3.601 judul koleksi

The DG Treasury Library had 3,601 titles

Perpustakaan DJPb mempunyai visi yaitu menjadi perpustakaan unggulan dalam perbendaharaan negara dengan fasilitas yang lengkap dan modern berbasis teknologi informasi. Dalam mewujudkan visi tersebut, Perpustakaan DJPb mengemban tiga misi yaitu pertama, melestarikan karya cetak dan karya rekam hasil terbitan DJPb, misi yang kedua yakni menjadi pusat informasi bahan pustaka dan dokumentasi kepada seluruh pegawai DJPb yang membutuhkan, sedangkan yang ketiga adalah menyelenggarakan layanan perpustakaan.

Perpustakaan DJPb dikelola oleh Subbagian KLIP. Adapun jam layanan

The DG Treasury Library has a vision to become the leading library on state treasury issues with information technology-based modern facilities. In realizing this vision, the DG Treasury Library upholds three mission statements, firstly, to preserve printed and recorded works published by DG Treasury; secondly, to become a center for information and library of materials and documentation for all personnel requiring such data; thirdly, to provide library services.

The Library is managed by the KLIP Subdivision. Library service hours start Monday – Friday from 8:00 to



perpustakaan dimulai hari Senin – Jum’at pukul 08.00 – 17.00 WIB. Jenis layanan yang diberikan yaitu peminjaman buku dan bahan pustaka dengan jangka waktu peminjaman selama empat belas hari dan maksimal peminjaman dua buah buku. Hingga akhir tahun 2021, Perpustakaan DJPb mempunyai 3.601 judul koleksi yang terdiri dari buku-buku referensi (skripsi, tesis, peraturan), buku teks, buku fiksi, majalah, hingga modul.

17:00 hours. Services provided include the borrowing of books and library materials for a maximum of two books up to fourteen days. During 2019, the Library had 788 visitors who also borrowed books. As of end-2020, the DG Treasury Library had 3,601 titles in its collection, comprising reference books (theses, regulations), textbooks, fiction, magazines, and modules.

Klasifikasi Classification	Jumlah Judul Number of Title	Jumlah Eksemplar Number of Copies
Referensi (Ensiklopedia, Skripsi, Peraturan, dll) Reference Material (Encyclopedia, Thesis, Regulations, etc.)	1.225	1.467
Textbook	2.136	2.819
Fiksi (Novel) Fiction (Novels)	237	299
Majalah Magazines	84	120
Modul Modules	26	46

Optimalisasi Barang Milik Negara Optimization of State-Owned Assets

Pengelolaan BMN pada masa pandemi Covid-19 yang extraordinary dilakukan dengan budaya kerja baru yang responsif dan adaptif

BMN management during the extraordinary Covid-19 pandemic period has been conducted under a new, responsive and adaptive work culture

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi. Siklus logistik aset sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan terdiri dari 13 rantai tahapan, yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan BMN pada masa pandemi Covid-19 yang extraordinary dilakukan dengan budaya kerja baru yang responsif dan adaptif sehingga diperlukan business continuity plan (BCP) sebagai sistem pencegahan dan pengendalian untuk menghadapi potensi kendala gangguan atas keberlangsungan organisasi, pelayanan, kesehatan baik pegawai ataupun para stakeholder. Selain itu juga dilakukan upaya penguatan dalam pengelolaan BMN seperti sosialisasi, pembinaan, asistensi, supervisi dan koordinasi secara intensif melalui kegiatan loka karya/webinar, diskusi/konsultasi daring, gugus kendali mutu sampai dengan penyusunan laporan/penginputan data bersama.

Juara Umum BMN Award tahun 2021

DJPb menginisiasi berbagai inovasi dan kreatifitas agar dalam pelaksanaan pengelolaan BMN dapat lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 456/KM.1/2021 upaya pada tahun 2021 tersebut berhasil mengantarkan DJPb sebagai juara umum BMN Award di lingkungan Kemenkeu. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Keuangan kepada Dirjen Perbendaharaan pada puncak Hari Oeang RI ke 75 tahun 2021.

State-Owned Assets (BMN) are all goods purchased or obtained at the expense of the State Budget or derived from other legitimate acquisitions with the objective of supporting the implementation of tasks and functions. As stipulated in legislation, the asset logistics cycle consists of a chain of 13 stages, i.e., needs planning and budgeting, procurement, deployment, utilization, security and maintenance, assessment, transfer, destruction, disposal, administration, guidance, supervision and control.

BMN management during the extraordinary Covid-19 pandemic period has been conducted under a new, responsive and adaptive work culture, thereby requiring a business continuity plan (BCP) as a prevention and control system to deal with potential disruptions to the continuity of operations, services, and safe health of employees and stakeholders. In addition, efforts were also made on BMN management strengthening through dissemination, coaching, assistance, supervision and intensive coordination via workshops/ webinars, online discussions/consultation, quality control groups to the preparation of reports/joint data input.

Overall Winner of the BMN Award 2021

DG Treasury has initiated various innovations to ensure that BMN management can be more effective and efficient. In line with Minister of Finance Decree No. 456/KM.1/2021, the efforts conducted in 2021 have succeeded in making DG Treasury as the overall winner of the BMN Award within the Ministry of Finance. In this regard, the award was presented directly by the Minister of Finance to the Director General of Treasury at the 75th Indonesian Oeang Day celebrations in 2021.



Satuan Kerja di lingkungan DJPb yang memperoleh penghargaan dimaksud antara lain:

1. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat kategori Kualitas Pengamanan BMN klasifikasi satker Menengah
2. KPPN Singkawang kategori Kualitas Penghapusan BMN klasifikasi satker menengah
3. KPPN Pekanbaru kategori Kualitas Penghapusan BMN klasifikasi satker kecil
4. KPPN Surakarta kategori Kualitas Data Master Aset klasifikasi satker menengah
5. KPPN Singaraja kategori Kualitas Data Master Aset klasifikasi satker kecil
6. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat kategori Kualitas Laporan BMN klasifikasi satker besar
7. KPPN Larantuka kategori Kualitas Laporan BMN klasifikasi satker menengah
8. KPPN Medan II kategori Kualitas Laporan BMN klasifikasi satker kecil

DJPb berkomitmen mempertahankan sekaligus meningkatkan pengelolaan BMN, mengingat dinamika perkembangan organisasi menuntut respons kreatif dan inovatif agar terwujud pengelolaan BMN yang efektif dan efisien sebagai implementasi dari *good asset management* menuju *good governance*.

The DG Treasury work units that have received the award include the following:

1. DG Treasury Regional Office of West Sulawesi Province for the BMN Security Quality category in the mid-scale work unit classification
2. KPPN Singkawang for the BMN Disposal Quality category in the mid-scale work unit classification
3. KPPN Pekanbaru for BMN Disposal Quality category in the small-scale work unit classification
4. KPPN Surakarta for the Master Assets Data Quality category in the mid-scale work unit classification
5. KPPN Singaraja for the Master Assets Data Quality category in the small-scale work unit classification
6. DG Treasury Regional Office of West Sumatra Province for the BMN Report Quality category in the large-scale work unit classification
7. KPPN Larantuka for the BMN Report Quality category in the mid-scale work unit classification
8. KPPN Medan II for the BMN Report Quality category in the small-scale work unit classification

DG Treasury is committed to maintaining and improving BMN management, considering that organizational dynamics demand creative and innovative responses to realize effective and efficient BMN management as the implementation of *good asset management* towards *good governance*.

Perkembangan Optimalisasi BMN

Dengan pertimbangan dan latar belakang ketersediaan BMN yang cukup bervariasi serta sebagai implikasi dari tuntutan perkembangan organisasi seperti peringkasan, perubahan/penataan layout ruang kerja (*ABW, fresh office, green office, workspace office* dll), permasalahan aset yang non free and clear secara fisik, administrasi dan hukum yang kerap menjadi temuan BPK, DJPb kembali meneruskan program optimalisasi BMN baik reutilisasi, hibah, sewa, alih status, alih guna dan pembentukan *satellite office*.

Dalam pelaksanaan optimalisasi BMN sampai dengan tahun 2021 DJPb telah berhasil melakukan reutilisasi lebih dari 500 unit barang bekas pakai untuk digunakan, lebih dari 60 pegawai yang menempati rumah negara dan hibah sebanyak lebih dari 1.500 unit BMN kepada lebih dari 40 lembaga sosial masyarakat di wilayah Jabodetabek dan Jawa Tengah yang membutuhkan.

Selain itu, dalam mendukung upaya penanganan Covid-19, secara khusus telah dilakukan juga hibah BMN berupa 3 unit laptop, 4 unit PC dan 4 unit mesin cetak kepada para relawan tenaga kesehatan yang berada di bawah naungan lembaga sosial masyarakat, serta 1 unit ambulans kepada yayasan yang salah satu kegiatannya membantu masyarakat tidak mampu baik dalam kondisi darurat ataupun pengangkutan jenazah.


Developments in BMN Optimization

Keeping in mind that the available BMN are of such varied nature and the organizational requirements in terms of simplification, changing/rearranging workspace layout (activity based working, fresh office, green office, etc.), along with issues where assets are not free and physically clear, administration and regulation issues that often become BPK's findings, DG Treasury has continued the BMN optimization program in terms of reutilization, grants, leases, transfer of status, transfer of use and the establishment of a satellite offices.

With regards to BMN optimization in 2021, DG Treasury succeeded in reutilizing more than 500 used goods for reuse and over 60 employees are now occupying state houses. Likewise, more than 1,500 BMN assets have been granted to over 40 social institutions in the Jabodetabek and Central Java areas that need such assets.

Furthermore, to support Covid-19 mitigation efforts 3 laptops, 4 PCs and 4 printers as BMN were granted to volunteer health workers under the auspices of community social institutions. Similarly, an ambulance was handed over to a foundation that aids underprivileged sections of society in cases of emergency or in the transportation of dead bodies.



 **Benteng Huraba, Tapanuli**
Fotografer: Tiomada Sirait, KPPN Padangsidempuan

Optimisme dan semangat dalam mewujudkan New DJPb in Town yang andal senantiasa terbawa oleh Insan Perbendaharaan untuk terus meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam bekerja sehingga mampu memberikan nilai tambah kepada organisasi maupun lingkungan sekitar.

Optimism and spirit to creates a reliable New DJPb in Town is always carried by the Treasurer to continue to improve creativity and innovation in their work so as to provide added value to the organization and the surrounding environment.



Daftar Alamat Unit Kerja

List of Work Unit Addresses

Bulan Month	Unit Kerja Work Unit	Alamat Address
1	Direktur Pelaksanaan Anggaran	Gd. Prijadi Praptosuhardjo I Lt. 4 Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
2	Direktur Pengelolaan Kas Negara	Gd. Prijadi Praptosuhardjo II Lt. 3 Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta
3	Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan	Gd. Prijadi Praptosuhardjo IIIB Lt. 3 Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta
4	Direktur Sistem Manajemen Investasi	Gd. Prijadi Praptosuhardjo I Lt. 3 Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
5	Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Gd. Prijadi Praptosuhardjo I Lt. 5 Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
6	Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Gd. Prijadi Praptosuhardjo IIIA Lt. 2 Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta
7	Direktur Sistem Perbendaharaan	Gd. Prijadi Praptosuhardjo IIIA Lt. 4 Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta
8	Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Gd. Prijadi Praptosuhardjo I Lt. 2 Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
9	Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan	Gedung Prijadi Praptosuhardjo II lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 Jakarta
10	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh	Gedung Keuangan Negara Gd. A Lantai II, Jl. Tgk. Chik Di Tiro Banda Aceh, 23241
11	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara	Jl. Diponegoro No.30A Medan, 20152
12	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat	Jl. Khatib Sulaiman, No.3 Padang, 25138
13	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Riau	Jl. Jend. Sudirman, No. 249 Pekanbaru, 28116
14	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Kep. Riau	Jl. Raja Haji Fisabilillah Blok B Km. 8 No. 1-5 Tanjung Pinang, 29124
15	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jambi	Jl. Mayjen Yusuf Singadikane No.45 Jambi, 36122
16	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Selatan	Jl. Kapten A. Rivai No. 2 Palembang, 30129
17	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Lampung	Jl. Cut Mutiah No. 23A Bandar Lampung, 35124
18	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Bengkulu	Jl. Adam Malik (D. H. P. Natadireja) No. 271 Km.8 Bengkulu, 38225
19	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Bangka Belitung	Jl. Sungai Selan No. 91 Pangkal Pinang, 33135
20	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten	Jl. K.H. Abdul Fatah Hasan No. 33 Serang, 42118
21	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta	Jl. Otto Iskandardinata No. 53-55 Jakarta, 13330
22	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat	Jl. Diponegoro No. 59 Bandung, 40123
23	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Tengah	Jl. Pemuda No. 2 Semarang, 50138

Bulan Month	Unit Kerja Work Unit	Alamat Address
24	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta	Jl. Kusumanegara No. 9 Yogyakarta, 55166
25	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur	Jl. Indrapura No. 5 Surabaya, 60175
26	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Barat	Jl. Achmad Sood No. 3 Pontianak, 78121
27	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Tengah	Jl. Cilik Riwut Km. 1 No. 10 Palangkaraya, 73111
28	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Selatan	Jl. Mayjen D.I. Pandjaitan No. 24 Banjarmasin, 70114
29	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Timur	Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Samarinda, 75124
30	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Utara	Jl. Sutoyo, Kabupaten Bulungan Tanjung Selor, 77211
31	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Bali	Jl. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala Denpasar, 80235
32	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Nusa Tenggara Barat	Jl. Majapahit No. 10 Mataram, 83127
33	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Nusa Tenggara Timur	Jl. El Tari II Walikota Baru Kupang, 85000
34	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan	Jl. Jend. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar, 90232
35	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Barat	Gedung Keuangan Negara, Jl. Soekarno-Hatta Mamuju
36	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tengah	Jl. Tanjung Dako No. 15 Palu, 94112
37	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tenggara	Jl. Mayjen Sutoyo No. 34 Kendari, 93122
38	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Gorontalo	Jl. Raden Saleh Kota Gorontalo, 96128
39	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara	Jl. 17 Agustus Manado, 95113
40	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku Utara	Jl. Jati Lurus No. 254 Ternate, 97713
41	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku	Jl. Pitu Ina No. 7 Karang Panjang Ambon, 97122
42	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua Barat	GKN Manokwari Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O Atururi, Arfai, Anday Manokwari, 98312
43	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua	Jl. Jend. A. Yani No. 8 Jayapura, 99111
44	Kepala KPPN Meulaboh	Jl. Sisingamangaraja No. 3 Meulaboh 23617
45	Kepala KPPN Tapaktuan	Jl. T. Cut Ali No. 69 Tapak Tuan 23715
46	Kepala KPPN Langsa	Jl. Jend A. Yani No. 2 Langsa 24416
47	Kepala KPPN Kutacane	Jl. Blangkejeren Km. 3 Kutacane 24601

Bulan Month	Unit Kerja Work Unit	Alamat Address	Alamat Address
48	Kepala KPPN Takengon	Jl. Rumah Sakit Umum No. 96	Takengon 24551
49	Kepala KPPN Medan I	Jl. Diponegoro No. 30A	Medan 20152
50	Kepala KPPN Medan II	Jl. Diponegoro No. 30A	Medan 20152
51	Kepala KPPN Tebing Tinggi	Jl. Sutomo No. 2	Tebing Tinggi 20600
52	Kepala KPPN Pematang Siantar	Jl. Brigjen Rajamin Purba, SH.	Pematang Siantar 21111
53	Kepala KPPN Padang Sidempuan	Jl. Kenanga No. 50	Padang Sidempuan 22725
54	Kepala KPPN Gunung Sitoli	Jl. Pancasila No. 13	Gunung Sitoli 22814
55	Kepala KPPN Rantau Prapat	Jl. Sisingamangaraja No. 62	Rantau Prapat 21415
56	Kepala KPPN Tanjung Balai	Jl. Sudirman Km. 1	Tanjung Balai 21312
57	Kepala KPPN Sibolga	Jl. Dr. Sutomo No. 7	Sibolga 21520
58	Kepala KPPN Sidikalang	Jl. Sisingamangaraja No. 69A	Sidikalang 22313
59	Kepala KPPN Balige	Jl. Raya Balige-Laguboti No. 2	Balige
60	Kepala KPPN Padang	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79	Padang 25129
61	Kepala KPPN Painan	Jl. Ilyas Yacub No. 3	Painan
62	Kepala KPPN Bukit Tinggi	Jl. Prof. Hazairin No. 1	Bukit Tinggi 26116
63	Kepala KPPN Solok	Jl. Raya Kotobaru	Solok 27362
64	Kepala KPPN Sijunjung	Jl. Prof. M. Yamin, Sh No. 77	Sijunjung
65	Kepala KPPN Lubuk Sikaping	Jl. Jend. Sudirman No. 93	Lubuk Sikaping
66	Kepala KPPN Rengat	Jl. Diponegoro No. 2	Rengat 29112
67	Kepala KPPN Dumai	Jl. Jend. Sudirman No. 25	Dumai 28812
68	Kepala KPPN Batam	Jl. Raja Haji - Sekupang	Batam 29422
69	Kepala KPPN Kuala Tungkal	Jl. Thomas Cup No. 1	Kuala Tungkal 36513
70	Kepala KPPN Sungai Penuh	Jl. H. Bakri No. 16	Sungai Penuh 37112
71	Kepala KPPN Muara Bungo	Jl. Sulthan Thaha	Muara Bungo 37211
72	Kepala KPPN Bangko	Jl. Diponegoro	Bangko 37314
73	Kepala KPPN Sekayu	Jl. Kol. Wahid Udin	Sekayu 30711
74	Kepala KPPN Baturaja	Jl. Jend. D. I. Panjaitan No. 471	Baturaja 32112
75	Kepala KPPN Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso Komp. Pemda Tk. II Musi Rawas	Lubuk Linggau 31611
76	Kepala KPPN Lahat	Jl. R. E. Martadinata	Lahat 31414
77	Kepala KPPN Metro	Jl. Seminung No. 5	Metro 34111
78	Kepala KPPN Kotabumi	Jl. Jend. Sudirman Km. 3	Kotabumi 31513
79	Kepala KPPN Liwa	Jl. Raden Intan, Way Mengaku	Liwa
80	Kepala KPPN Curup	Jl. Sukowati No. 63	Curup 39114
81	Kepala KPPN Muko-Muko	Jl. Bandar Baru Raya Komplek Perkantoran Kabupaten	Muko-Muko
82	Kepala KPPN Manna	Jl. Affan Baksin No. 103	Manna 38512
83	Kepala KPPN Tanjung Pandan	Jl. Sriwijaya Pall No. 1	Tanjung Pandan 33416

Bulan Month	Unit Kerja Work Unit	Alamat Address	Alamat Address
84	Kepala KPPN Serang	Jl. KH. Abdul Fatah Hasan 34	Serang 42118
85	Kepala KPPN Rangkas Bitung	Jl. Siliwangi No. 48	Rangkas Bitung
86	Kepala KPPN Tangerang	Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No. 12	Tangerang
87	Kepala KPPN Jakarta I	Jl. Ir. H. Juanda No. 19	Jakarta 10120
88	Kepala KPPN Jakarta II	Jl. Wahidin II No. 3	Jakarta 10710
89	Kepala KPPN Jakarta III	Jl. Otto Iskandar Dinata 53-55	Jakarta 13330
90	Kepala KPPN Jakarta IV	Jl. Ir. H. Juanda No. 19	Jakarta 10120
91	Kepala KPPN Jakarta V	Jl. T. B. Simatupang Jakarta Selatan	Jakarta
92	Kepala KPPN Jakarta VI	Jl. Ir. H. Juanda No. 19	Jakarta
93	Kepala KPPN Jakarta VII	Jl. Otto Iskandar Dinata 53-55	Jakarta
94	Kepala KPPN Khusus Pinjaman Dan Hibah	Jl. Ir. H. Juanda No. 19	Jakarta 10120
95	Kepala KPPN Khusus Investasi	Jl. Wahidin II No. 3	Jakarta 10710
96	Kepala KPPN Khusus Penerimaan	Jl. Wahidin II No. 3	Jakarta 10710
97	Kepala KPPN Bandung I	Jl. Asia - Afrika No. 114	Bandung 40261
98	Kepala KPPN Bandung II	Jl. PHH. Mustofa No. 37	Bandung
99	Kepala KPPN Karawang	Jl. Kertabumi	Karawang 41311
100	Kepala KPPN Bogor	Jl. Ir. H. Juanda No. 62	Bogor 46122
101	Kepala KPPN Purwakarta	Jl. Ibrahim Singadilaga No. 65	Purwakarta 41115
102	Kepala KPPN Sukabumi	Jl. Suryakencana No. 20	Sukabumi 43111
103	Kepala KPPN Garut	Jl. Jend. A. Yani No. 249	Garut 44117
104	Kepala KPPN Cirebon	Jl. Tuparev No. 14	Cirebon 45153
105	Kepala KPPN Kuningan	Jl. Moch. Toha No. 14	Kuningan
106	Kepala KPPN Tasikmalaya	Jl. Manonjaya No. 50 Cibeureum	Tasikmalaya 48101
107	Kepala KPPN Sumedang	Jl. Mayor Abdurrachman No. 221	Sumedang
108	Kepala KPPN Bekasi	Jl. Pramuka No. 63	Bekasi
109	Kepala KPPN Semarang I	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34	Semarang 50241
110	Kepala KPPN Semarang II	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34	Semarang 50241
111	Kepala KPPN Surakarta	Jl. Slamet Riyadi No. 467	Surakarta 57146
112	Kepala KPPN Sragen	Jl. Sukowati (Komp. Gedung Kartini) No. 15C	Sragen
113	Kepala KPPN Klaten	Jl. Sersan Sadikin No. 30	Klaten
114	Kepala KPPN Pati	Jl. P. Diponegoro No. 102	Pati 59111
115	Kepala KPPN Purwodadi	Jl. M. H. Thamrin	Purwodadi
116	Kepala KPPN Kudus	Jl. Mejubo Kudus	Kudus 59319
117	Kepala KPPN Pekalongan	Jl. Bahagia No. 44	Pekalongan 51117
118	Kepala KPPN Tegal	Jl. Dr. Sutomo No. 64	Tegal 52113
119	Kepala KPPN Purworejo	Jl. Urip Sumoharjo No. 83	Purworejo 54111

Bulan Month	Unit Kerja Work Unit	Alamat Address	Alamat Address
120	Kepala KPPN Purwokerto	Jl. D. I. Panjaitan No. 62	Purwokerto
121	Kepala KPPN Banjarnegara	Jl. Letjen S. Parman No. 545	Banjarnegara 53412
122	Kepala KPPN Cilacap	Jl. Perintis Kemerdekaan	Cilacap
123	Kepala KPPN Magelang	Jl. Veteran No. 3	Magelang 56117
124	Kepala KPPN Yogyakarta	Jl. Kusumanegara No. 11	Yogyakarta 55166
125	Kepala KPPN Wates	Jl. Adhiyaksa No. 2	Wates
126	Kepala KPPN Wonosari	Jl. Taman Bakti/ Piyaman Wonosari	Wonosari 55815
127	Kepala KPPN Surabaya I	Jl. Indrapura No. 5	Surabaya 60175
128	Kepala KPPN Surabaya II	Jl. Dinoyo No. 111	Surabaya 60175
129	Kepala KPPN Sidoarjo	Jl. Wolter Mongonsidi No. 89A	Sidoarjo
130	Kepala KPPN Malang	Jl. Merdeka Selatan No. 2	Malang 65119
131	Kepala KPPN Pamekasan	Jl. Jokotole No. 141	Pamekasan 69321
132	Kepala KPPN Mojokerto	Jl. Gajah Mada No. 147	Mojokerto 61314
133	Kepala KPPN Banyuwangi	Jl. Jend. A. Yani No. 120	Banyuwangi 68416
134	Kepala KPPN Jember	Jl. Kalimantan No. 35	Jember 68121
135	Kepala KPPN Bondowoso	Jl. A. Yani No. 86	Bondowoso
136	Kepala KPPN Madiun	Jl. Salak No. 52	Madiun 63131
137	Kepala KPPN Kediri	Jl. Jenderal Basuki Rachmat	Kediri 64124
138	Kepala KPPN Blitar	Jl. Raya Garum Km. 4	Blitar 66128
139	Kepala KPPN Bojonegoro	Jl. Untung Suropati No. 63	Bojonegoro
140	Kepala KPPN Tuban	Jl. H. O. S Cokrominoto	Tuban
141	Kepala KPPN Pacitan	Jl. Letjen. S. Parman No. 47	Pacitan
142	Kepala KPPN Sanggau	Jl. Jend. Sudirman	Sanggau 78511
143	Kepala KPPN Singkawang	Jl. Firdaus H. Rais No. 66	Singkawang 79123
144	Kepala KPPN Ketapang	Jl. Jend. Sudirman No. 55	Ketapang 78812
145	Kepala KPPN Sintang	Jl. Adi Sucipto No. 1	Sintang 78611
146	Kepala KPPN Putussibau	Jl. W. R. Soepratman No. 50	Putussibau 78711
147	Kepala KPPN Buntok	Jl. Pelita Raya No. 369	Buntok 73711
148	Kepala KPPN Sampit	Jl. Jend. Sudirman Km. 1,5 Sampit Kotawaringin Timur	Sampit
149	Kepala KPPN Pangkalan Bun	Jl. Sutan Syahrir No. 9	Pangkalan Bun 74101
150	Kepala KPPN Banjarmasin	Jl. Mayjend. D. I. Panjaitan No. 10	Banjarmasin 70114
151	Kepala KPPN Pelaihari	Jl. Datu Insad No. 79	Pelaihari 70813
152	Kepala KPPN Barabai	Jl. Ir. PHM. Noor No. 28	Barabai 71311
153	Kepala KPPN Tanjung	Jl. A. Yani Km. 10 No. 20	Tanjung 71571
154	Kepala KPPN Kotabaru	Jl. Yakut No. 19	Kotabaru 72116
155	Kepala KPPN Samarinda	Jl. Moh. Yamin No. 25	Samarinda 75123

Bulan Month	Unit Kerja Work Unit	Alamat Address	Alamat Address
156	Kepala KPPN Tanjungredeb	Jl. Milono No. 2	Tanjungredeb 77311
157	Kepala KPPN Tarakan	Jl. Diponegoro No. 46	Tarakan
158	Kepala KPPN Nunukan	Jl. Ujang Dewa-Sedadap	Nunukan 77482
159	Kepala KPPN Denpasar	Jl. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala	Denpasar 80235
160	Kepala KPPN Singaraja	Jl. Udayana No. 10	Singaraja 81116
161	Kepala KPPN Amlapura	Jl. Cempaka	Amlapura 80812
162	Kepala KPPN Selong	Jl. Moh. Yamin No. 43	Selong 83611
163	Kepala KPPN Bima	Jl. Pendidikan No. 16	Bima 84116
164	Kepala KPPN Sumbawa Besar	Jl. Garuda No. 107	Sumbawa Besar 84312
165	Kepala KPPN Atambua	Jl. Diponegoro	Atambua
166	Kepala KPPN Larantuka	Jl. Jend. Sudirman No. 48	Larantuka
167	Kepala KPPN Ende	Jl. Kelimutu No. 53	Ende 86316
168	Kepala KPPN Ruteng	Jl. Adi Sucipto	Ruteng 86518
169	Kepala KPPN Waingapu	Jl. Ampera	Waingapu 87111
170	Kepala KPPN Makassar I	Jl. Slamet Riyadi No. 5	Makassar
171	Kepala KPPN Makassar II	Jl. Jend. Urip Sumoharjo Km. 4 (GKN Lt. II)	Makassar 90232
172	Kepala KPPN Pare Pare	Jl. Karaeng Burane No. 20	Pare Pare 91111
173	Kepala KPPN Benteng	Jl. D. I. Panjaitan Benteng-Selayar	Benteng 92812
174	Kepala KPPN Bantaeng	Jl. Raya Lanto No. 112	Bantaeng 92411
175	Kepala KPPN Palopo	Jl. Opu Tossapaile	Palopo 91927
176	Kepala KPPN Watampone	Jl. K. H. Agus Salim No. 7	Watampone 92732
177	Kepala KPPN Sinjai	Jl. H. Abdul Latif No. 4	Sinjai 92611
178	Kepala KPPN Makale	Jl. Pontiku No. 35	Makale
179	Kepala KPPN Mamuju	Jl. A. Yani No. 14	Mamuju
180	Kepala KPPN Majene	Jl. Jend. Sudirman No. 96	Majene 91412
181	Kepala KPPN Palu	Jl. Tanjung Dako No. 11	Palu 94112
182	Kepala KPPN Poso	Jl. Kalimantan No. 16	Poso 94619
183	Kepala KPPN Luwuk	Jl. Jend. A. Yani No. 134	Luwuk 94711
184	Kepala KPPN Toli Toli	Jl. Magamu 6-8	Toli Toli 94515
185	Kepala KPPN Bau Bau	Jl. Anoa No. 1	Bau Bau 93717
186	Kepala KPPN Raha	Jl. Kasuari No. 1	Raha
187	Kepala KPPN Kolaka	Jl. Bendungan / Gelora (Stadion) Balandete	Kolaka 93518
188	Kepala KPPN Marissa	Jl. Pelabuhan Kec. Marissa	Marissa
189	Kepala KPPN Tahuna	Jl. Malahasa No. 29	Tahuna 95813
190	Kepala KPPN Bitung	Jl. Stadion Dua Saudara Manembo-Nembo Atas No. 59	Bitung

Bulan Month	Unit Kerja Work Unit	Alamat Address	
191	Kepala KPPN Kotamobagu	Jl. Paloko No. 7	Kotamobagu 95713
192	Kepala KPPN Tobelo	Jl. Kemakmuran	Tobelo
193	Kepala KPPN Ambon	Jl. Kapitan Ulupaha (GKN Lt. I Dan II) No. 1	Ambon 97124
194	Kepala KPPN Tual	Jl. Pahlawan Revolusi	Tual
195	Kepala KPPN Saumlaki	Jl. Sifnama	Saumlaki 97664
196	Kepala KPPN Masohi	Jl. Pattimura	Masohi
197	Kepala KPPN Manokwari	Jl. Yos Sudarso No. 1003	Manokwari 98312
198	Kepala KPPN Sorong	Jl. Basuki Rahmat Km. 7	Sorong 98416
199	Kepala KPPN Fak-Fak	Jl. Jend. A. Yani	Fak-Fak 98611
200	Kepala KPPN Merauke	Jl. Prajurit No. 1	Merauke 99616
201	Kepala KPPN Biak	Jl. Majapahit	Biak 98117
202	Kepala KPPN Serui	Jl. Maluku	Serui 98312
203	Kepala KPPN Nabire	Jl. Merdeka No. 46	Nabire 98815
204	Kepala KPPN Wamena	Jl. Yos Sudarso	Wamena 99502
205	Kepala KPPN Timika	Jl. Cenderawasih (SPII)	Timika 98616
206	Kepala KPPN Jayapura	Jl. Jend. A. Yani No. 8	Jayapura 99111
207	Kepala KPPN Ternate	Jl. Jos Sudarso No. 6	Ternate 97711
208	Kepala KPPN Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No. 58	Gorontalo 96128
209	Kepala KPPN Manado	Jl. Bethesda (GKN Lt. 3) No. 8	Manado 95114
210	Kepala KPPN Kendari	Jl. Mayjend Sutoyo No. 5	Kendari 93122
211	Kepala KPPN Kupang	Jl. El Tari II Walikota (GKN Lt. 3)	Kupang 85000
212	Kepala KPPN Mataram	Jl. Langko No. 40	Mataram 83125
213	Kepala KPPN Balikpapan	Jl. Jend. A. Yani No. 28	Balikpapan 76113
214	Kepala KPPN Palangkaraya	Jl. P. Tendean No. 4	Palangkaraya 73112
215	Kepala KPPN Pontianak	Jl. K. S. Tubun No. 36	Pontianak 78121
216	Kepala KPPN Pangkal Pinang	Jl. Kejaksaan No. 16	Pangkal Pinang 33125
217	Kepala KPPN Bengkulu	Jl. Sukarno Hatta	Bengkulu 38222
218	Kepala KPPN Bandar Lampung	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 91	Bandar Lampung 35128
219	Kepala KPPN Palembang	Jl. Kapten A. Rivai No. 2	Palembang 30129
220	Kepala KPPN Tanjung Pinang	Jl. Diponegoro No. 5	Tanjung Pinang 29111
221	Kepala KPPN Jambi	Jl. Jend. A. Yani No. 7	Jambi 36122
222	Kepala KPPN Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No. 249	Pekanbaru
223	Kepala KPPN Banda Aceh	Jl. Tgk. Chik Ditiro (GKN) No. 39A	Banda Aceh 23241
224	Kepala KPPN Lhokseumawe	Jl. Pasar Inpres No. 1	Lhok Seumawe 24241
225	Kepala KPPN Tanjung Selor	Jl. Sutoyo, Kabupaten Bulungan	Tanjung Selor, 77211



Daftar Singkatan List of Abbreviations

A

ALM	Asset Liability Management
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
ATB	Aset Tak Berwujud

B

BAKTI	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
BAS	Bagan Akun Standar
BAT	Bank Account Transfer
BIG-eb	Bank Indonesia Government-electronic Banking
Bintalnas	Pembinaan Mental Nasional
BIOS	BLU Integrated Online System
BKN	Badan Kepegawaian Negara
BLU	Badan Layanan Umum
BLU	Badan Layanan Umum
BLUPROMiSe	Badan Layanan Umum Profesional Melayani Sinergi
BMN	Barang Milik Negara
BMN	Barang Milik Negara
BNT	Bendahara Negara Tersertifikasi
BO	Bank Operasional
BPD LH	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
BPD LH	BLU Pengelola Dana Lingkungan Hidup
BPNT	Bantuan Pangan Non Tunai
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUN	Bendahara Umum Negara
BUN	Bendahara Umum Negara

C

CBS	Core Banking System
CKC	Centraal Kantoor voor de Comptabiliteit
CMS	Cash Management System
CPIN	Cash Planning Information Network
CTO	Central Transformation Office

D

DBR	Daftar Barang Ruangan
DFDD	DAK Fisik dan Dana Desa
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

DJPb	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DPPN	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

E

EITI	Extractive Industries Transparency Initiative
EPITE	Evaluasi Pengendalian Internal Tingkat Entitas

F

FASB	Financial Account and Balance Sheet
FEKK	Forum Ekonom Kementerian Keuangan
FSA	Full Sequence of Accounts

G

GFS	Government Financial Statistics
-----	---------------------------------

I

IKK	Indeks Kualitas Kebijakan
IKPA	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IKU	Indikator Kinerja Utama
IMF	International Monetary Fund
IPB	Institut Pertanian Bogor
IPS	Internasional Public Service
IPSASB CAG	The International Public Sector Accounting Standards Consultative Advisory Group
IS	Inisiatif Strategis
ITRev	Indonesian Treasury Review

K

K/L	Kementerian Negara/Lembaga
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kesra	Kesejahteraan Rakyat
KIB	Kartu Inventaris Barang
KIP	Komisi Informasi Pusat
KIP	Komisi Informasi Pusat
KIP	Komite Investasi Pemerintah
KKP	Kartu Kredit Pemerintah
KKPE	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
KLIP	Kehumasan Layanan Informasi dan Protokoler
KOICA	Korea Indonesia Cooperating Agency
KPEN-RP	Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan
KPM	Keluarga Penerima Manfaat

KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KUPS	Kredit Usaha Pembibitan Sapi
KUR	Kredit Usaha Rakyat

L

LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKBB	Lembaga Keuangan Bukan Bank
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LOM	Leaders Offsite Meeting
LPDP	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
LPDP	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
LSKP	Laporan Statistik Keuangan Pemerintah

M

MP	Maksimum Pencairan
MPN	Modul Penerimaan Negara
MTI	Majalah Treasury Indonesia

N

NZAS	New Zealand Award Scholarship
------	-------------------------------

P

PA	Pengelolaan Anggaran
PBJ	Pengadaan Barang/Jasa
Petaraja	Pemetaan Integritas dan Rekam Jejak
PIP	Pusat Investasi Pemerintah
PJSP	Payment System Service Providers
PKH	Program Keluarga Harapan
PKLK	Profil Kualitas Laporan Keuangan
PKN	Pengelolaan Kas Negara
PMO	Project Management Office
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNBP	Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNM	Penanaman Modal Madani
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPDH	Perkiraan Pencairan Dana Harian
PPID	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

R

Rapimnas	Rapat Pimpinan Nasional
RBTK	Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
Reksus	Rekening Khusus

RKD	Rekening Kas Desa
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
RoE	Recognition of Excellence
RPA	Review Pelaksanaan Anggaran
RPK	Reviu Pengelolaan Kinerja
RPKBUNP	Rekening Pembantu Kuasa BUN Pusat
RWI	Risk Workshop International

S

SAB	Sectoral Accounts and Balance Sheets
SAKTI	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAP	Standar Akuntansi Pemerintah
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDG	Sustainable Development Goals
SFO	Strategy Focused Organization
SIKRI	Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia
Simserba	Sistem Sertifikasi Bendahara
SIPANDU	Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan
SISPEN	Sistem Penerimaan Negara
SMI	Sistem Manajemen Investasi
SMI	Sistem Manajemen Investasi
SP	Sistem Perbendaharaan
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPM	Surat Perintah Membayar
SPN	Surat Perbendaharaan Negara
SPP	Surat Perintah Pembayaran
SP-SPD	Surat Pengantar-Surat Penarikan Dana
SPT	Surat Perintah Transfer
SSRG	Skema Subsidi Resi Gudang

T

T-CoP	Treasury CoP
TDK	Transaksi dalam Konfirmasi
TDR	Treasury Dealing Room
TDR	Treasury Dealing Room
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TMP	Tidak Memberikan Pendapat
TMR	Treasury Management Representative
TNP	Treasury Notional Pooling
TPBP	Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan
TW	Tidak Wajar

U

UD	Ujian Dinas
ULP	Unit Layanan Pengadaan
UMi	Ultra Mikro
UNPSA	United Nations Public Service Award
UNPSA	United Nations Public Service Awards
UNPSF	United Nations Public Service Forum
UNPSF	United Nations Public Service Forum
UPKP	Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
USAID	United States Agency for International Development

W

WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBK	Wilayah Bebas dari Korupsi
WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WiSe	Whistleblowing System
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

Y

Yoy	Year on Year
-----	--------------



Daftar Pagu dan Realisasi DIPA Tahun 2021

Budget and Realization DIPA Year 2021

No Num.	KPPN Treasury Office	Kode Kanwil Regional Office Code	Jumlah Satker Number of Work Unit	DIPA Belanja DIPA Expenditure	Jumlah SP2d Number of SP2D	Pendapatan Revenue	Belanja Expenditure	%
001	BANDA ACEH	01	338	12.019.249.483.000	61700	2.677.332.213.054	11.694.495.123.769	97,30%
002	L A N G S A	01	78	1.759.631.912.000	17625	520.926.416.241	1.756.859.985.763	99,84%
003	MEULABOH	01	96	2.243.448.375.000	19005	659.465.056.250	2.210.136.543.632	98,52%
004	M E D A N I	02	145	13.323.079.593.000	45422	1.155.563.990.673	12.675.990.805.530	95,14%
005	PEMATANG SIANTAR	02	53	1.699.935.564.000	11438	1.528.605.293.086	1.672.337.150.122	98,38%
006	PADANG SIDEMPUAN	02	118	2.252.181.807.000	20291	1.258.737.167.639	2.216.740.019.595	98,43%
007	GUNUNG SITOLI	02	69	1.683.005.206.000	13553	15.135.984.561	1.642.145.007.283	97,57%
008	PEKANBARU	04	298	9.476.714.683.000	71655	11.297.186.921.299	9.076.224.838.354	95,77%
009	TANJUNG PINANG	31	206	4.402.695.456.000	41698	1.731.194.456.084	4.258.408.490.551	96,72%
010	P A D A N G	03	263	10.556.967.558.000	68744	7.429.838.186.891	10.006.198.688.543	94,78%
011	BUKITTINGGI	03	176	2.257.678.765.000	35071	1.150.217.296.644	2.139.310.522.940	94,76%
012	J A M B I	05	244	7.151.402.180.000	40789	4.425.654.324.745	6.799.549.155.581	95,08%
013	SUNGAI PENUH	05	42	816.531.990.000	8625	13.192.704.624	811.535.722.496	99,39%
014	PALEMBANG	06	289	15.617.402.502.000	86688	11.312.269.766.453	14.903.521.387.400	95,43%
015	PANGKAL PINANG	09	238	3.713.809.608.000	43003	2.243.958.700.205	3.599.056.366.226	96,91%
016	B E N G K U L U	08	210	4.851.039.517.000	47503	2.023.336.772.338	4.584.967.781.365	94,52%
017	BANDAR LAMPUNG	07	284	12.333.080.328.000	56639	6.444.531.253.642	11.800.667.201.721	95,68%
018	JAKARTA I	11	304	79.722.384.372.000	91681	27.504.841.261.454	77.995.359.868.577	97,83%
019	JAKARTA II	11	261	1.202.329.671.281.000	166641	1.136.075.989.916.860	1.165.792.150.792.730	96,96%
020	S E R A N G	10	202	8.660.068.887.000	50048	9.748.493.795.789	8.354.299.108.602	96,47%
021	PURWAKARTA	12	58	1.959.113.874.000	12600	31.577.077.578.987	1.934.290.763.370	98,73%
022	BANDUNG I	12	186	18.873.182.473.000	62670	21.049.827.668.962	18.080.503.131.895	95,80%
023	B O G O R	12	152	6.570.667.492.000	66103	9.919.820.993.727	6.407.942.581.801	97,52%
024	C I R E B O N	12	111	4.060.717.033.000	32266	3.169.432.246.456	3.901.065.262.667	96,07%
025	TASIKMALAYA	12	144	4.827.211.265.000	29146	1.468.084.497.964	4.632.493.125.147	95,97%
026	SEMARANG I	13	131	20.295.322.398.000	68754	25.754.305.339.578	19.778.260.080.863	97,45%
027	PURWOREJO	13	54	1.603.602.628.000	9220	549.142.247.845	1.593.495.076.133	99,37%
028	SURAKARTA	13	109	6.918.435.138.000	36911	4.155.113.709.021	6.703.465.178.300	96,89%
029	PURWOKERTO	13	73	3.278.822.899.000	17636	2.226.021.567.261	3.208.870.902.511	97,87%
030	YOGYAKARTA	14	292	12.823.282.742.000	74333	7.047.132.853.087	12.279.288.858.287	95,76%
031	SURABAYA I	15	114	15.056.313.503.000	75308	48.233.019.658.962	14.563.492.580.175	96,73%
032	M A L A N G	15	166	8.986.708.335.000	60796	101.200.426.352.189	8.498.057.825.492	94,56%
033	M A D I U N	15	158	3.838.833.972.000	39120	2.149.334.402.136	3.766.836.985.918	98,12%

No Num.	KPPN Treasury Office	Kode Kanwil Regional Office Code	Jumlah Satker Number of Work Unit	DIPA Belanja DIPA Expenditure	Jumlah SP2d Number of SP2D	Pendapatan Revenue	Belanja Expenditure	%
034	K E D I R I	15	118	2.904.635.616.000	21786	35.101.210.961.159	2.814.998.654.463	96,91%
035	BONDOWOSO	15	92	2.167.990.255.000	12625	2.035.602.354.611	2.071.212.990.083	95,54%
036	PAMEKASAN	15	100	2.996.067.953.000	21133	1.360.259.431.350	2.943.770.238.430	98,25%
037	D E N P A S A R	20	273	11.979.890.934.000	74742	9.516.076.299.809	10.979.282.739.632	91,65%
038	M A T A R A M	21	241	10.222.834.970.000	53349	2.486.000.866.546	9.887.058.052.422	96,72%
039	K U P A N G	22	292	14.199.191.882.000	79740	2.048.591.364.324	13.443.406.897.036	94,68%
040	E N D E	22	69	1.564.541.035.000	13806	510.841.927.615	1.468.564.917.905	93,87%
041	WAINGAPU	22	67	1.385.902.547.000	12303	279.920.874.839	1.366.935.970.765	98,63%
042	PONTIANAK	16	255	10.512.263.891.000	70911	5.772.456.885.753	10.060.348.543.887	95,70%
043	PALANGKARAYA	17	239	8.581.340.041.000	66129	2.051.093.731.085	8.322.900.652.122	96,99%
044	S A M P I T	17	70	1.233.504.616.000	12938	1.714.305.674.046	1.201.759.445.484	97,43%
045	BANJARMASIN	18	286	9.286.381.551.000	69023	6.077.776.813.949	9.002.982.381.027	96,95%
046	SAMARINDA	19	261	7.947.172.798.000	64281	10.285.133.138.238	7.506.889.281.052	94,46%
047	BALIKPAPAN	19	138	4.188.190.739.000	39722	10.423.904.198.565	4.006.940.311.711	95,67%
048	T A R A K A N	34	54	946.169.337.000	13673	2.312.208.343.239	893.580.948.205	94,44%
049	M A N A D O	27	268	10.011.694.193.000	73819	3.145.300.620.442	9.470.115.146.702	94,59%
050	GORONTALO	26	223	5.241.628.224.000	54916	1.063.090.904.000	5.056.014.417.167	96,46%
051	P A L U	24	251	8.145.473.931.000	63836	2.500.024.016.990	7.656.516.458.300	94,00%
052	P O S O	24	85	1.572.176.493.000	19268	2.951.099.983.667	1.534.524.942.160	97,61%
053	L U W U K	24	62	1.093.002.520.000	13865	492.581.502.134	1.047.364.590.544	95,82%
054	MAKASSAR I	23	147	10.700.170.359.000	74120	946.992.277.498	10.369.163.349.353	96,91%
055	WATAMPONE	23	81	2.339.683.769.000	22059	412.059.822.600	2.314.689.496.586	98,93%
056	BANTAENG	23	67	1.273.814.565.000	18247	771.947.150.156	1.252.665.950.895	98,34%
057	PARE - PARE	23	111	1.802.708.815.000	21178	553.066.995.988	1.783.389.300.290	98,93%
058	P A L O P O	23	98	1.837.292.947.000	21714	977.872.443.999	1.812.059.841.474	98,63%
059	M A J E N E	32	64	1.401.510.020.000	15023	270.932.560.951	1.397.937.328.927	99,75%
060	K E N D A R I	25	266	8.690.335.012.000	58861	2.805.971.096.676	8.471.046.776.588	97,48%
061	A M B O N	29	239	7.601.649.073.000	37657	1.963.500.776.520	7.334.559.745.387	96,49%
062	T E R N A T E	28	272	6.248.358.576.000	72128	1.785.173.458.434	6.081.714.180.330	97,33%
063	JAYAPURA	30	272	10.672.544.167.000	53947	2.951.443.546.191	10.024.358.403.329	93,93%
064	B I A K	30	50	1.469.281.382.000	12125	489.025.106.715	1.427.895.604.921	97,18%
065	MANOKWARI	33	216	6.940.226.137.000	47438	1.521.392.174.844	6.700.798.481.058	96,55%
066	S O R O N G	33	120	3.879.357.861.000	33261	1.357.316.256.295	3.798.433.952.898	97,91%

No Num.	KPPN Treasury Office	Kode Kanwil Regional Office Code	Jumlah Satker Number of Work Unit	DIPA Belanja DIPA Expenditure	Jumlah SP2d Number of SP2D	Pendapatan Revenue	Belanja Expenditure	%
067	FAK - FAK	33	52	1.548.540.559.000	10543	12.700.752.697	1.471.307.368.869	95,01%
068	MERAUKE	30	93	3.804.171.035.000	18696	708.126.740.650	3.609.435.299.863	94,88%
070	LUBUK LINGGAU	06	48	1.122.578.368.000	9776	557.492.106.684	1.094.825.080.989	97,53%
071	B I M A	21	68	1.476.418.197.000	15595	386.202.373.926	1.472.191.770.772	99,71%
072	PEKALONGAN	13	64	1.615.446.043.000	10754	1.536.377.456.273	1.575.182.277.953	97,51%
073	BOJONEGORO	15	53	1.684.200.042.000	10706	2.603.083.787.249	1.641.223.843.418	97,45%
074	TAPAKTUAN	01	86	1.447.650.863.000	15392	529.418.652.099	1.406.406.452.620	97,15%
075	RANTAU PRAPAT	02	55	853.683.926.000	9752	1.285.131.762.612	799.310.727.046	93,63%
076	TANJUNG BALAI ASAHAN	02	65	968.015.649.000	11150	2.522.892.308.013	939.695.400.513	97,07%
077	SIJUNJUNG	03	63	824.463.420.000	11480	8.319.927.858	800.359.556.457	97,08%
078	MUARA BUNGO	05	54	754.659.697.000	11714	738.951.123.365	733.206.268.013	97,16%
079	S I N T A N G	16	47	1.663.203.510.000	13219	997.343.523.017	1.611.933.683.693	96,92%
080	B U N T O K	17	82	1.173.827.717.000	15631	777.786.323.571	1.149.467.510.874	97,92%
081	KOTABARU	18	51	1.022.562.970.000	8484	3.634.644.525.803	998.389.820.490	97,64%
082	TOLI - TOLI	24	59	930.154.324.000	11908	368.029.626.193	898.072.355.594	96,55%
083	T A H U N A	27	46	779.096.839.000	9914	195.933.975.908	758.921.371.344	97,41%
084	T U A L	29	59	1.581.213.774.000	13222	16.304.129.410	1.489.901.968.975	94,23%
085	N A B I R E	30	66	2.628.586.107.000	10132	16.663.950.177	2.573.881.265.583	97,92%
086	KARAWANG	12	36	1.883.118.577.000	10638	1.988.173.178.940	1.788.528.714.934	94,98%
087	SUMEDANG	12	30	1.765.511.575.000	7059	42.702.248.009	1.746.391.812.639	98,92%
088	JAKARTA III	11	258	117.735.757.434.000	113758	7.282.344.077.377	113.230.034.339.351	96,17%
089	LHOKSEUMAWA	01	103	3.530.925.223.000	19953	1.194.051.368.494	3.527.128.192.309	99,89%
090	S O L O K	03	66	774.265.972.000	11739	643.831.448.227	747.871.859.342	96,59%
091	LUBUK SIKAPING	03	54	585.318.428.000	11171	7.004.909.767	557.311.125.252	95,22%
092	R E N G A T	04	78	1.387.299.695.000	13471	1.525.275.137.189	1.344.629.109.216	96,92%
093	SINGKAWANG	16	83	1.649.999.367.000	18736	1.004.912.683.784	1.579.703.174.410	95,74%
094	KETAPANG	16	48	1.125.559.014.000	11568	1.634.987.237.555	1.026.373.294.497	91,19%
095	BANDUNG II	12	183	17.409.579.934.000	68694	843.784.386.050	16.992.888.729.583	97,61%
096	G A R U T	12	33	1.692.163.732.000	5917	659.258.367.314	1.680.631.570.865	99,32%
097	P A T I	13	56	1.512.331.529.000	10102	689.332.566.887	1.479.405.659.905	97,82%
098	MOJOKERTO	15	92	2.401.496.205.000	23988	1.742.011.971.147	2.336.647.811.471	97,30%
099	PACITAN	15	22	468.413.080.000	4454	11.592.359.211	447.785.803.674	95,60%
100	BANYUWANGI	15	48	1.007.684.317.000	10021	553.597.641.194	968.245.171.877	96,09%
101	SUMBAWA BESAR	21	55	949.034.773.000	9702	1.668.475.067.374	926.104.764.514	97,58%

No Num.	KPPN Treasury Office	Kode Kanwil Regional Office Code	Jumlah Satker Number of Work Unit	DIPA Belanja DIPA Expenditure	Jumlah SP2d Number of SP2D	Pendapatan Revenue	Belanja Expenditure	%
102	PANGKALAN BUN	17	71	932.039.946.000	14167	2.103.878.241.140	912.315.279.155	97,88%
103	B A U - B A U	25	108	1.682.883.381.000	21577	440.432.713.674	1.649.139.012.154	97,99%
104	SAUMLAKI	29	37	902.455.406.000	6443	5.074.828.967	874.547.141.404	96,91%
105	KUTACANE	01	43	870.237.099.000	8035	4.488.786.095	862.228.248.644	99,08%
106	SIBOLGA	02	53	1.025.553.711.000	10892	524.894.111.279	1.002.856.043.138	97,79%
107	TANJUNG PANDAN	09	40	567.453.636.000	8109	652.508.631.596	529.030.273.978	93,23%
109	BATURAJA	06	68	1.397.423.025.000	11375	530.894.071.054	1.379.929.183.353	98,75%
110	BARABAI	18	93	1.169.203.648.000	17178	816.643.976.864	1.170.873.480.415	100,14%
111	R U T E N G	22	82	1.882.304.692.000	15682	289.626.926.106	1.852.693.089.636	98,43%
112	TOBELO	28	62	1.481.594.552.000	14724	481.007.087.471	1.392.642.716.875	94,00%
113	W A M E N A	30	80	4.977.093.315.000	10081	26.556.195.114	4.658.180.533.229	93,59%
115	MAGELANG	13	85	2.747.181.104.000	27133	2.242.537.098.477	2.691.331.550.533	97,97%
116	KOTABUMI	07	95	1.881.816.499.000	13804	1.083.852.450.755	1.846.903.837.328	98,14%
117	PUTUSSIBAU	16	29	710.271.488.000	5210	7.910.393.662	681.015.522.863	95,88%
118	T E G A L	13	98	3.068.990.657.000	17637	1.895.412.472.838	3.001.645.706.173	97,81%
119	SIDIKALANG	02	54	1.074.104.665.000	9338	264.928.892.439	1.037.887.718.260	96,63%
120	D U M A I	04	111	1.806.209.978.000	21377	14.570.280.615.836	1.749.315.433.022	96,85%
121	M A N N A	08	62	1.010.427.157.000	12266	8.302.205.373	997.763.997.579	98,75%
122	TAKENGON	01	52	1.043.536.976.000	12574	12.578.406.908	1.049.492.412.285	100,57%
123	M E D A N II	02	175	5.811.083.599.000	48930	15.838.261.404.347	5.643.124.791.559	97,11%
124	TEBING TINGGI	02	75	1.832.897.119.000	13591	500.098.704.161	1.802.145.097.102	98,32%
125	BALIGE	02	70	1.445.068.378.000	12873	376.885.170.322	1.398.982.838.153	96,81%
126	METRO LAMPUNG	07	73	1.678.677.137.000	14287	2.121.601.746.564	1.645.332.747.260	98,01%
127	TANGERANG	10	116	4.486.476.824.000	38047	37.640.971.412.754	4.287.927.094.787	95,57%
128	SUKABUMI	12	86	2.640.747.297.000	18423	1.767.475.379.043	2.582.929.696.123	97,81%
129	K U D U S	13	80	2.229.553.898.000	18682	37.777.899.731.404	2.182.000.032.211	97,87%
130	CILACAP	13	51	1.194.708.011.000	11574	1.465.846.170.285	1.141.920.699.864	95,58%
131	J E M B E R	15	67	2.529.647.186.000	14511	2.624.182.038.768	2.339.113.689.845	92,47%
132	SINGARAJA	20	67	1.656.112.496.000	11023	495.719.798.380	1.596.951.220.586	96,43%
133	JAKARTA IV	11	263	36.237.889.815.000	78981	4.983.029.934.538	35.486.558.066.181	97,93%
134	SEMARANG II	13	161	9.709.588.943.000	62014	2.312.845.237.117	9.436.494.653.633	97,19%
135	SURABAYA II	15	164	14.266.951.023.000	55156	1.257.858.882.730	13.534.018.559.644	94,86%
136	MAKASSAR II	23	220	8.332.474.394.000	59289	8.652.605.838.934	7.514.426.067.840	90,18%
137	B A T A M	31	123	5.049.935.967.000	29174	8.298.722.031.905	4.542.242.271.528	89,95%

No Num.	KPPN Treasury Office	Kode Kanwil Regional Office Code	Jumlah Satker Number of Work Unit	DIPA Belanja DIPA Expenditure	Jumlah SP2d Number of SP2D	Pendapatan Revenue	Belanja Expenditure	%
138	SERUI	30	33	557.513.439.000	4548	5.192.093.412	543.418.724.133	97,47%
139	JAKARTA V	11	250	69.633.844.732.000	177288	6.039.745.247.563	67.271.511.244.711	96,61%
140	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	11	218	380.801.346.188.000	8111	19.977.790.080.958	370.865.349.315.185	97,39%
141	TIMIKA	30	43	1.913.409.542.000	8463	6.690.250.465.673	1.862.696.650.727	97,35%
142	PAINAN	03	34	543.049.050.000	6015	3.840.944.251	534.176.298.151	98,37%
143	KUALA TUNGKAL	05	51	669.074.394.000	8455	759.282.430.800	657.359.925.330	98,25%
144	LAHAT	06	89	1.903.952.460.000	17388	565.541.518.631	1.875.465.596.808	98,50%
145	LIWA	07	28	597.568.610.000	5472	4.041.871.519	588.156.180.066	98,42%
146	CURUP	08	67	952.942.117.000	15445	222.924.508.187	943.222.480.762	98,98%
147	KUNINGAN	12	70	1.775.005.430.000	13226	635.967.654.808	1.753.511.354.361	98,79%
148	KLATEN	13	75	2.026.599.744.000	14389	2.833.338.348.449	1.988.041.123.068	98,10%
149	WONOSARI	14	34	600.741.820.000	5789	173.191.431.944	589.536.829.107	98,13%
150	BLITAR	15	88	1.795.402.419.000	18228	1.722.667.038.417	1.698.628.348.860	94,61%
151	TANJUNG	18	91	1.156.504.416.000	15145	578.033.774.353	1.133.867.965.893	98,04%
152	NUNUKAN	34	33	638.667.211.000	5620	43.111.109.300	610.188.203.540	95,54%
153	TANJUNG REDEP	19	27	464.125.109.000	4587	91.024.968.178	445.847.122.919	96,06%
154	AMLAPURA	20	61	1.016.735.609.000	10411	25.769.762.940	949.963.189.860	93,43%
155	BENTENG	23	26	377.189.619.000	5934	3.071.626.280	368.439.527.359	97,68%
156	KOLAKA	25	57	1.101.206.418.000	10566	42.945.985.242	1.069.300.027.591	97,10%
157	RAHA	25	35	706.234.817.000	6074	6.312.183.106	703.914.678.660	99,67%
158	KOTAMOBAGU	27	87	1.594.614.382.000	19291	611.435.440.224	1.555.990.262.794	97,58%
159	BANGKO	05	50	840.495.324.000	11240	639.218.486.492	826.082.121.296	98,29%
160	SEKAYU	06	47	1.326.586.918.000	6888	1.443.633.768.516	1.305.619.727.122	98,42%
161	RANGKASBITUNG	10	55	1.738.303.732.000	12621	13.067.705.999	1.644.991.067.546	94,63%
162	SIRAGEN	13	60	1.184.211.004.000	9855	1.999.682.528.378	1.161.362.985.012	98,07%
163	PURWODADI	13	46	1.733.111.424.000	10702	873.507.366.423	1.705.570.969.318	98,41%
164	BANJARNEGARA	13	49	1.249.803.518.000	6276	43.493.324.563	1.227.347.592.054	98,20%
165	SIDOARJO	15	77	5.629.586.961.000	29696	14.345.485.236.477	5.574.680.280.732	99,02%
166	TUBAN	15	26	614.363.500.000	4612	480.361.038.292	603.628.949.192	98,25%
167	SANGGAU	16	64	1.162.325.294.000	13760	1.178.115.793.215	1.137.516.617.268	97,87%
168	PELAIHARI	18	31	539.540.963.000	6288	35.622.327.975	531.186.823.122	98,45%
169	SELONG	21	27	960.184.087.000	6152	22.084.482.185	955.050.589.449	99,47%
170	MAKALE	23	38	923.447.497.000	7705	20.721.409.800	881.729.720.423	95,48%
171	BEKASI	12	79	2.257.305.067.000	25167	23.477.318.500.533	2.217.032.782.365	98,22%
172	ATAMBUA	22	53	1.105.718.546.000	9986	31.519.524.802	1.046.811.328.943	94,67%

No Num.	KPPN Treasury Office	Kode Kanwil Regional Office Code	Jumlah Satker Number of Work Unit	DIPA Belanja DIPA Expenditure	Jumlah SP2d Number of SP2D	Pendapatan Revenue	Belanja Expenditure	%
173	MASOHI	29	97	2.252.030.323.000	17683	13.982.107.517	2.110.739.464.126	93,73%
174	LARANTUKA	22	52	804.880.123.000	8914	5.745.671.184	793.460.931.930	98,58%
175	JAKARTA VI	11	183	37.357.592.768.000	155571	6.096.055.402.726	36.781.002.021.923	98,46%
176	WATES	14	32	553.190.173.000	6104	240.477.291.851	544.653.858.308	98,46%
177	SINJAI	23	25	503.730.549.000	5508	4.047.265.737	504.599.826.368	100,17%
178	MAMUJU	32	178	4.242.375.822.000	34732	668.108.708.409	4.089.112.452.305	96,39%
179	BITUNG	27	67	1.275.930.635.000	14610	1.026.125.435.094	1.174.423.368.170	92,04%
180	MARISA	26	43	678.056.850.000	7828	8.199.689.613	643.476.588.877	94,90%
181	MUKOMUKO	08	25	307.647.645.000	4370	3.074.236.388	301.432.628.192	97,98%
182	JAKARTA VII	11	188	333.385.457.412.000	107946	15.451.016.636.012	324.352.969.890.756	97,29%
185	TANJUNG SELOR	34	140	3.807.657.964.000	25342	41.784.293.227	3.570.276.378.160	93,77%



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lt. 1-2
Jalan Lapangan Banteng Timur, No. 2-4
Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta 13730

Telp.: 021-3865130, Faks.: 021-3846402
www.djpb.kemenkeu.go.id